



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten
Harmonis • Loyal • Dapatif • Kolaboratif



LPPD



H. Sutarmidji, S.H., M.Hum.
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H.
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2022



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karna berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka penyusunan LPPD, LKPJ, RLPPD dan pelaksanaan EPPD telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut mencakup format sekaligus substansi LPPD dan EPPD memuat data dan informasi secara elektronik yang akan digunakan Pemerintah untuk memantau keberhasilan implementasi kebijakan Otonomi Daerah secara keseluruhan. Hasil dari laporan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah melalui LPPD dan EPPD tersebut akan menjadi umpan balik yang akan digunakan sebagai dasar peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, alat deteksi dini permasalahan penerapan kebijakan nasional dan daerah serta dasar utama pengambilan kebijakan otonomi daerah.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kalimantan Barat yang telah berkontribusi besar dalam penyusunan laporan ini dan semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak untuk selanjutnya dapat diketahui masyarakat seluas-luasnya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhai kita semua.

Pontianak, 30 Maret 2023
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



H. SUTARMIDJI, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1
1.1.1.1 Data Umum Daerah	4
A. Kondisi Geografis Daerah.....	4
1. Batas Administrasi Wilayah	4
2. Luas Wilayah.....	5
3. Topografi	6
B. Gambaran Umum Demografis.....	7
1. Jumlah Penduduk	7
C. Produk Domestik Regional Bruto.....	7
1. PDRB Menurut Lapangan Usaha	7
2. PDRB Menurut Pengeluaran	8
D. Indeks Pembangunan Manusia	9
E. Angka Kemiskinan	10
F. Pertumbuhan Ekonomi	11
G. Jumlah Pegawai.....	13
1.1.1.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	15
A. Pajak Daerah.....	15
1. Pajak Kendaraan Bermotor.....	16
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan	
Bermotor.....	23
4. Pajak Air Permukaan	24
5. Pajak Rokok.....	26
6. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	
Yang Sah.....	27
B. Retribusi	27
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	
Yang Dipisahkan	31
D. Pendapatan Transfer	31
1. Dana Perimbangan	32
2. Dana Insentif Daerah (DID)	37
E. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.	40
F. Target dan Realisasi Pendapatan	43
1.1.1.3 Pengelolaan Belanja Daerah	43
A. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	43
B. Target dan Realisasi Belanja.....	46
1.1.1.4 Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan	
dan Belanja Daerah	55
A. APBD Murni Provinsi Kalimantan Barat	
Tahun Anggaran 2022	55
1. Penjabaran Pergeseran ke-1 (Satu)	
APBD Provinsi Kalimantan Barat	
Tahun Anggaran 2022	57
2. Penjabaran Pergeseran ke-2 (Dua)	

APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022	59
3. Penjabaran Pergeseran ke-3 (Tiga) APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022	61
4. Penjabaran Pergeseran ke-4 (Empat) APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022	63
B. Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022	66
1. Penjabaran Pergeseran ke-1 (Satu) APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022	68
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	70
1.1.2.1 Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah	71
A. Permasalahan Bidang Politik, Ketentraman dan Ketertiban	73
1. Kesatuan Bangsa dan Politik	73
2. Urusan Ketentraman dan Ketertiban ..	73
B. Permasalahan Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM	74
1. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	74
2. Urusan Kearsipan	74
3. Urusan Perpustakaan	75
4. Fungsi Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan	75
C. Permasalahan Pembangunan Bidang Ekonomi	76
1. Urusan Penanaman Modal	77
2. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (KUMKM)	78
3. Urusan Pangan	79
4. Urusan Kelautan dan Perikanan	80
5. Urusan Kehutanan	81
6. Urusan Perdagangan	82
7. Urusan Industri	83
8. Urusan Pariwisata	83
D. Permasalahan Bidang Sosial dan Budaya	84
1. Urusan Pendidikan	84
2. Urusan Kesehatan	86
3. Urusan Kepemudaan dan Olahraga ...	88
4. Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	88
E. Permasalahan Pembangunan Bidang Infrastruktur	89
1. Urusan Penataan Ruang	89
2. Urusan Lingkungan Hidup	90
3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	93
4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93
5. Urusan Sumber Daya Air	94
6. Urusan Keciptakarya, yang mencakup Komunikasi dan Informatika	94

7. Urusan Perhubungan.....	95
8. Urusan Perumahan Pemukiman.....	96
9. Urusan Komunikasi dan Informatika...	96
F. Permasalahan Utama Pembangunan Kalimantan Barat.....	97
G. Permasalahan Dimensi Kewilayahan	98
1.1.2.2 Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.....	100
A. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.....	100
B. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.....	101
1.1.2.3 Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah ...	103
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	110

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DAERAH	113
2.1 Capaian Kinerja Makro	113
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	113
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	114
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	182
2.2.3 Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	199
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	203
2.3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022	203
2.3.1.1 Sasaran Strategis 1.....	204
A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	204
B. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	206
C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	207
D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2018–2022 dan Target RPJMD.....	213
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	213
2.3.1.2 Sasaran Strategis 2.....	215
A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	215
B. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	237
C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	239
D. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2018–2022 dan target RPJMD.....	239
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	

	atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	243
2.3.1.3	Sasaran Strategis 3.....	248
	A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	248
	B. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	253
	C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	255
	D. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 - 2022 Dan Target RPJMD...	260
	E. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dan Realisasi Nasional	261
	F. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	262
2.3.1.4	Sasaran Strategis 4.....	266
	A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	266
	B. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	296
	C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	299
	D. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019-2022 Dan Target Akhir Jangka Menengah 2022	306
	F. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	307
2.3.1.5	Sasaran Strategis 5.....	310
	A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	310
	B. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	315
	C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	316
	D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2018-2021 dan Target Akhir Jangka Menengah 2023	318
	E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	318
2.3.1.6	Sasaran Strategis 6.....	319
	A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	319
	B. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	320

C.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	321
D.	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2018-2022 dan Target Akhir Jangka Menengah 2018-2023.....	331
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	332
2.3.1.7	Kinerja Lainnya	333
2.3.1.8	Realisasi Anggaran.....	337
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN	339
3.1	Dasar Hukum	339
3.2	Gambaran Umum Tugas Pembantuan di Provinsi Kalimantan Barat.....	340
3.3	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	342
3.3.1	Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Daerah Provinsi.....	342
3.3.2	Realisasi.....	369
3.4	Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	377
3.5	Permasalahan dan Kendala	377
3.6	Saran dan Tindak Lanjut.....	381
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	385
4.1	Urusan Pendidikan.....	385
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	385
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	385
4.1.3	Realisasi.....	385
4.1.4	Alokasi Anggaran	389
4.1.5	Dukungan Personil.....	389
4.1.6	Permasalahan dan Solusi	390
4.2	Urusan Kesehatan	392
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	392
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	393
4.2.3	Realisasi.....	393
4.2.4	Alokasi Anggaran	396
4.2.5	Dukungan Personil.....	397
4.2.6	Permasalahan dan Solusi	397
4.3	Urusan Pekerjaan Umum.....	399
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	399
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	399
4.3.3	Realisasi.....	399
4.3.4	Alokasi Anggaran	402
4.3.5	Dukungan Personil.....	402
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	402
4.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	404
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	404

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	405
4.4.3 Realisasi.....	405
4.4.4 Alokasi Anggaran.....	408
4.4.5 Dukungan Personil.....	40
4.4.6 Permasalahan dan Solusi.....	410
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	411
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar	411
4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	411
4.5.3 Realisasi.....	411
4.5.4 Alokasi Anggaran.....	413
4.5.5 Dukungan Personil.....	413
4.5.6 Permasalahan dan Solusi.....	413
4.6 Urusan Sosial.....	414
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar	414
4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	415
4.6.3 Realisasi.....	416
4.6.4 Alokasi Anggaran.....	423
4.6.5 Dukungan Personil.....	423
4.6.6 Permasalahan dan Solusi.....	423
4.7 Program dan Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.....	425
4.7.1 Bidang Urusan Pendidikan	425
4.7.2 Bidang Urusan Kesehatan	426
4.7.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum	426
4.7.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	427
4.7.5 Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	427
4.7.6 Bidang Urusan Sosial	428
BAB V PENUTUP	429

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Agregat Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Semester I Tahun 2022	7
Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)	8
Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (Persentase)	9
Tabel 1.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat Tahun 2020 s.d 2022	10
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.....	13
Tabel 1.6 Realisasi Penerimaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Ta.2022	43
Tabel 1.7 Realisasi Pendapatan APBD	49
Tabel 1.8 Belanja Operasi Tahun 2022	49
Tabel 1.9 Belanja Modal Tahun 2022	50
Tabel 1.10 Belanja Tidak Terduga Tahun 2022	50
Tabel 1.11 Belanja Transfer Tahun 2022	50
Tabel 1.12 Pembiayaan Tahun 2022.....	50
Tabel 1.13 Perkembangan Struktur APBD menurut jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022	51
Tabel 1.14 Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022	54
Tabel 1.15 Penjabaran APBD Murni Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022.....	56
Tabel 1.16 Perubahan ke-1 Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat	57
Tabel 1.17 Perubahan ke-2 Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat	60
Tabel 1.18 Perubahan ke-3 Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat	62
Tabel 1.19 Perubahan ke-4 Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat	64
Tabel 1.20 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Provinsi Kalimantan Barat	66
Tabel 1.21 Perubahan ke-1 Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat.....	68
Tabel 1.22 Program Yang Direncanakan Sesuai Dengan Misi yang Diemban	103
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro Tahun 2022	113
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	114
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	182
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	199
Tabel 2.5 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022	203
Tabel 2.6 Perkembangan Irigasi Provinsi	206
Tabel 2.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	206
Tabel 2.8 Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2022 dan target RPJMD Sasaran Strategis 1.....	213
Tabel 2.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran Strategis 2	215
Tabel 2.10 Aspek Potensi Dalam Pemetaan Tahun 2021	225
Tabel 2.11 9 Aspek Kompetensi	225
Tabel 2.12 Data Peserta Yang Belum Mencapai Level Minimal Aspek Potensi (Level 3)	225
Tabel 2.13 Data Peserta Yang Belum Mencapai Level Minimal Tiap Jenjang Jabatan.....	226
Tabel 2.14 Pengaduan Masyarakat.....	228

Tabel 2.15	Pengelolaan Pengaduan Berdasarkan Jenis Pengaduan Tahun 2022	229
Tabel 2.16	Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022.....	234
Tabel 2.17	Prestasi Yang Telah Diraih Provinsi Kalimantan Barat Pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 s.d. 2022	235
Tabel 2.18	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	237
Tabel 2.19	Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2022 dan Target RPJMD Sasaran Strategis 2	239
Tabel 2.20	Realisasi Predikat dan Nilai Indeks RB dan Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Kalbar	243
Tabel 2.21	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran Strategis 3	248
Tabel 2.22	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat Menurut Komponen, 2012-2022.....	249
Tabel 2.23	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022	253
Tabel 2.24	Perbandingan Realisasi Kinerja 2019-2022 dan target RPJMD Sasaran Strategis 3.....	260
Tabel 2.25	Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan target Nasional Sasaran Strategis 3.....	261
Tabel 2.26	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran Strategis 4	266
Tabel 2.27	Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Belaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2021, Triwulan IV-2022 dan Tahun 2022 (Miliar Rupiah)	273
Tabel 2.28	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat Triwulan IV-2022 Menurut Lapangan Usaha (persen)	274
Tabel 2.29	Struktur PDRB Provinsi Kalimantan Barat Menurut Lapangan Usaha (persen)	275
Tabel 2.30	Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Barat Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2021, Triwulan IV-2022 dan Tahun 2022 (miliar rupiah)	276
Tabel 2.31	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat Triwulan IV-2022 Menurut Pengeluaran (persen)	277
Tabel 2.32	Struktur PDRB Provinsi Kalimantan Barat Menurut Pengeluaran (persen)	277
Tabel 2.33	Distribusi Pengeluaran Penduduk di Kalimantan Barat Maret 2021, September 2021 dan Maret 2022 (persentase)	280
Tabel 2.34	Status Pembangunan Desa	280
Tabel 2.35	Status Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.....	283
Tabel 2.36	Status Desa Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022	284
Tabel 2.37	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2020- Agustus 2022	285
Tabel 2.38	Karakteristik Pengangguran (persen), Agustus 2020- Agustus 2022 (BPS Kalbar 2022).....	286
Tabel 2.39	Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kalimantan Barat.....	287
Tabel 2.40	Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2020-	

	Agustus 2022	288
Tabel 2.41	Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2020 - 2021	289
Tabel 2.42	Pandemi Covid-19 dan Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat	291
Tabel 2.43	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2021 - September 2022	293
Tabel 2.44	Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah, Maret 2021 – Maret 2022	294
Tabel 2.45	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	296
Tabel 2.46	Perbandingan Realisasi Kinerja 2019-2022 dan Target 2022 Sasaran Strategis 4	306
Tabel 2.47	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran Strategis 5	310
Tabel 2.48	Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022	312
Tabel 2.49	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	315
Tabel 2.50	Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2022 dan Target 2023 Sasaran Strategis 5	318
Tabel 2.51	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran Strategis 6	319
Tabel 2.52	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	320
Tabel 2.53	Titik Pantau Kualitas Air Prov. Kalimantan Barat Tahun 2022	321
Tabel 2.54	Data Kualitas Udara Metode Passive Sampler Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022	323
Tabel 2.55	Data Indeks Kualitas Lahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022	324
Tabel 2.56	Titik Pantau Kualitas Air Laut Prov. Kalimantan Barat Tahun 2022	325
Tabel 2.57	Tabel Data Dukung Limbah B3 Yang Terkelola Sesuai Aturan Oleh Pengumpul Limbah B3 Skala Provinsi Di Tahun 2022 PT. Primanru Jaya Cabang Pontianak	326
Tabel 2.58	Tabel Data Dukung Limbah B3 Yang Terkelola Sesuai Aturan Oleh Pengumpul Limbah B3 Skala Provinsi Di Tahun 2022 PT. Putra Limbah Khatulistiwa	327
Tabel 2.59	Rekapitulasi Data Pengaduan Masyarakat Tentang Lingkungan Hidup Tahun 2022	329
Tabel 2.60	Bank Sampah di Setiap Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat	329
Tabel 2.61	Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2022 dan Target RPJMD Sasaran Strategis 6	331
Tabel 2.62	Perubahan IKLH Kalimantan Barat Tahun 2018-2022	331
Tabel 2.63	IKLH Kalimantan Barat dari 2014 – 2022	332
Tabel 2.64	Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	337
Tabel 3.1	Program dan Kegiatan dengan Sumber Dana Tugas Pembantuan Tahun 2022	346
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Satker 139127 Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan	347
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan Satker 139128 Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	348
Tabel 3.4	Program dan Kegiatan Satker 139132 Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	350

Tabel 3.5	Program, Kegiatan dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2022.....	351
Tabel 3.6	Rekap Pemeliharaan Sekat Kanal Tahun 2022	352
Tabel 3.7	Rekap Pelaporan Pemeliharaan Sumur Bor Tahun 2022.....	355
Tabel 3.8	Kegiatan Revegetasi pada Tahun 2022	357
Tabel 3.9	Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat Tahun 2022 Yang Melibatkan Kelompok Masyarakat.....	362
Tabel 3.10	Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Provinsi.....	369
Tabel 3.11	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBN Sumber Dana Tugas Pembantuan Tahun 2022	372
Tabel 3.12	Program, Kegiatan dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2022.....	373
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Tahun 2021 dengan tahun 2022.....	373
Tabel 3.14	Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	374
Tabel 3.15	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan	375
Tabel 3.16	Capaian Realsasi Anggaran TP Ini Sebesar 97,77% Dengan Rincian.....	376
Tabel 3.17	Permasalahan dan Kendala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.....	380
Tabel 4.1	Target Capaian SPM Urusan Pendidikan	385
Tabel 4.2	Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan	385
Tabel 4.3	Pendidikan Menengah Atas.....	387
Tabel 4.4	Mutu Layanan Dasar Pendidikan Khusus	388
Tabel 4.5	Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan	389
Tabel 4.6	Target Capaian SPM Urusan Kesehatan	393
Tabel 4.7	Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan Kesehatan.....	393
Tabel 4.8	Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan.....	395
Tabel 4.9	Mutu Layanan Dasar pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi.....	396
Tabel 4.10	Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan.....	396
Tabel 4.11	Target Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	399
Tabel 4.12	Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	399
Tabel 4.13	Mutu Layanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota.....	401
Tabel 4.14	Mutu Layanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota.....	401
Tabel 4.15	Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	405
Tabel 4.16	Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	405
Tabel 4.17	Mutu Layanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	407
Tabel 4.18	Mutu Layanan Dasar Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.....	408
Tabel 4.19	Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	409
Tabel 4.20	Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	411
Tabel 4.21	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	411
Tabel 4.22	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu Dan Pelayanan Ganti Rugi	412

Tabel 4.23	Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu	413
Tabel 4.24	Target Capaian SPM Urusan Sosial.....	415
Tabel 4.25	Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial	416
Tabel 4.26	Mutu Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti.....	418
Tabel 4.27	Mutu Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti.....	419
Tabel 4.28	Mutu Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti.....	420
Tabel 4.29	Mutu Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti	421
Tabel 4.30	Mutu Layanan Dasar Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	422
Tabel 4.31	Alokasi Anggaran Urusan Sosial	423
Tabel 4.32	Dukungan Personil Dinas Sosial	423
Tabel 4.33	Permasalahan Dan Kendala Penerapan SPM Urusan Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022	424
Tabel 4.34	Program Kegiatan Urusan Pendidikan	425
Tabel 4.35	Program Kegiatan Urusan Kesehatan.....	426
Tabel 4.36	Program Kegiatan Urusan pekerjaan Umum	426
Tabel 4.37	Program Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat.....	427
Tabel 4.38	Program Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	427
Tabel 4.39	Program Kegiatan Urusan Sosial	428

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Barat.....	5
Gambar 1.2	Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	5
Gambar 1.3	Persentase Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	5
Gambar 1.4	Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020 s.d. 2022	11
Gambar 1.5	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 s.d. 2022..	12
Gambar 1.6	Diagram Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022	70
Gambar 2.1	Kondisi Panjang Jalan Pelayanan (Km, %) Tahun 2021	205
Gambar 2.2	Kondisi Panjang Jalan Pelayanan (Km, %) Tahun 2021	205
Gambar 2.3	Kondisi Panjang Jalan Pelayanan (Km, %) Tahun 2022	206
Gambar 2.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat, 2010-2022	249
Gambar 2.5	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Kalimantan Barat (tahun), 2010-2022.....	250
Gambar 2.6	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah Kalimantan Barat, 2010-2022.....	251
Gambar 2.7	Pengeluaran Per Kapita per Tahun Kalimantan Barat, 2010-2022 (Rp 000).....	251
Gambar 2.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2022	252
Gambar 2.9	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (Y-On-Y) (Persen).....	267
Gambar 2.10	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)	268
Gambar 2.11	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)	269
Gambar 2.12	Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen)	270
Gambar 2.13	Pertumbuhan Ekonomi Komponen Pengeluaran (y-to-y) (persen)	271
Gambar 2.14	Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) (persen)	272
Gambar 2.15	Perkembangan Gini Ratio, Maret 2016-Maret 2022	278
Gambar 2.16	Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin (persen) Agustus 2020-Agustus 2022	285
Gambar 2.17	Persentase Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal Provinsi Kalimantan Barat, Agustus 2020-Agustus 2022.....	288
Gambar 2.18	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kalimantan Barat (persen), Agustus 2020-Agustus 2022.....	290
Gambar 2.19	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, Agustus 2022	290
Gambar 3.1	Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Provinsi Kalimantan Barat.....	365
Gambar 4.1	Pendidikan Khusus	388
Gambar 4.2	Mutu Layanan Dasar Kesehatan	395
Gambar 4.3	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni	

	Bagi Korban Bencana	407
Gambar 4.4	Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.....	408

BAB I



PENDAHULUAN

Kalbar Maju Lingkungan Hidup Lestari
dalam Keberagaman



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Akuntabilitas dan transparansi, dua hal yang menjadi gambaran dasar sebagai visualisasi dari keinginan pemerintah untuk merubah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sebagai implikasi dari ketentuan perundangan yang mengamanatkan adanya keterbukaan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat. “Power tends to corrupt, absolut power corrupts absolutely” merupakan adagium terkenal dari Lord Acton yang menggambarkan betapa penyimpangan sejatinya cenderung akan dilakukan oleh penguasa dominan. Berangkat dari hal tersebut Indonesia telah menetapkan bahwa unsur-unsur pemerintahan yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif memiliki sifat egaliter untuk mengantisipasi kekuasaan absolut.

Setiap unsur memiliki tatanan tersendiri untuk menjaga dan menjamin pelaksanaan peran dan fungsi sudah memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi publik. Rangkaian proses penyelenggaraan pemerintahan yang saling bertaut memerlukan fungsi pengawasan oleh masyarakat yang telah diatur dalam ketentuan tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi salah satu kewajiban kepala daerah.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), serta pasal 71 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Agar Undang-Undang tersebut efektif, maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Nomor Des. 52/10/50 tanggal 12 Desember 1956 yang antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang



Nomor 25 Tahun 1956 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1957. Sejak saat itu Kalimantan Barat secara yuridis telah menjadi Provinsi Otonom.

Sejalan dengan perubahan status Kalimantan Barat yang sejak tanggal 1 Januari 1957 telah menjadi suatu Daerah Provinsi Otonom, maka DPRD Peralihan dalam sidangnya tanggal 28 Januari 1957 telah berhasil membentuk Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Peralihan Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat. Momen tersebut menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat, sehingga tanggal 28 Januari 1957 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan diperingati setiap tahun pada tanggal 28 Januari sebagai puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, transparan, akuntabel, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

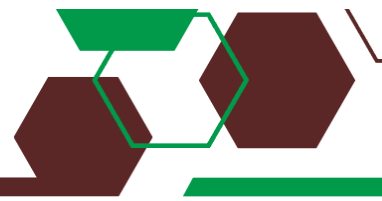
Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ dan Ringkasan LPPD. Bagi Pemerintah laporan tersebut dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Berkenaan dengan itu, kewajiban penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 tersebut diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana tata cara evaluasi, dengan menyesuaikan pada Rencana Pembangunan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019



tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Selanjutnya, LPPD Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2021 dibuat berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023. Pengukuran kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PERJANKIN) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021. Berkenaan dengan kewajiban dimaksud maka disusunlah LPPD dengan berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);



7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Gubernur Nomor 77 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 78).

1.1.1.1 Data Umum Daerah

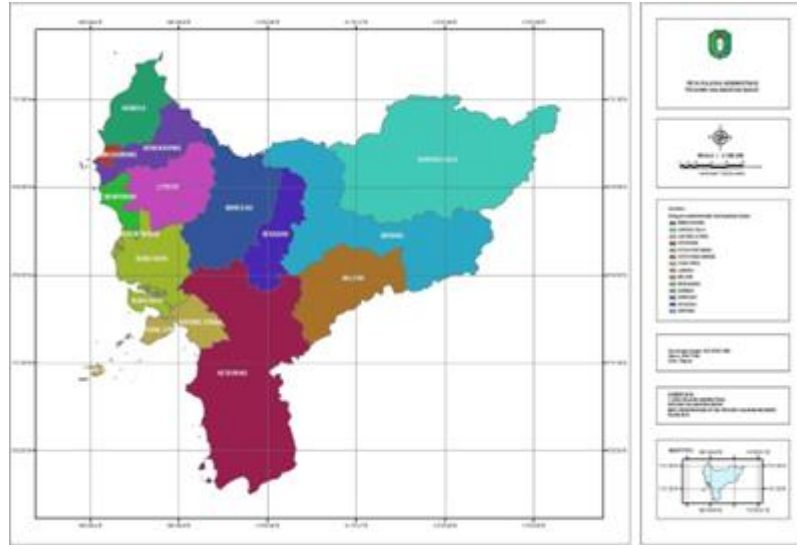
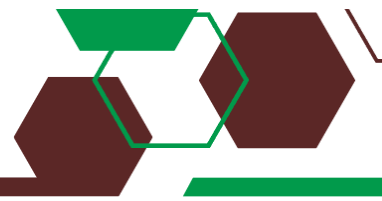
A. Kondisi Geografis Daerah

1. Batas Administrasi Wilayah

Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan letak geografis berada diantara $108^{\circ}30'$ BT - $114^{\circ}10'$ BT dan $2^{\circ}08'$ LU - $3^{\circ}02'$ LS, oleh karena itu Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang dilintasi Garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di Kota Pontianak. Berdasarkan letak geografisnya Provinsi Kalimantan Barat berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kalimantan Tengah;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata.

Letak geografis wilayah Kalimantan Barat menjadikannya sebagai salah satu provinsi strategis karena dilalui oleh Laut Natuna dan Laut Jawa serta Selat Karimata yang diantara wilayah perairan tersebut tergabung dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI I), menjadikan Kalimantan barat sebagai jalur transit. Selain itu, Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang berbatasan darat secara langsung dengan Sarawak-Malaysia dengan panjang wilayah perbatasan sebesar 966 Km.

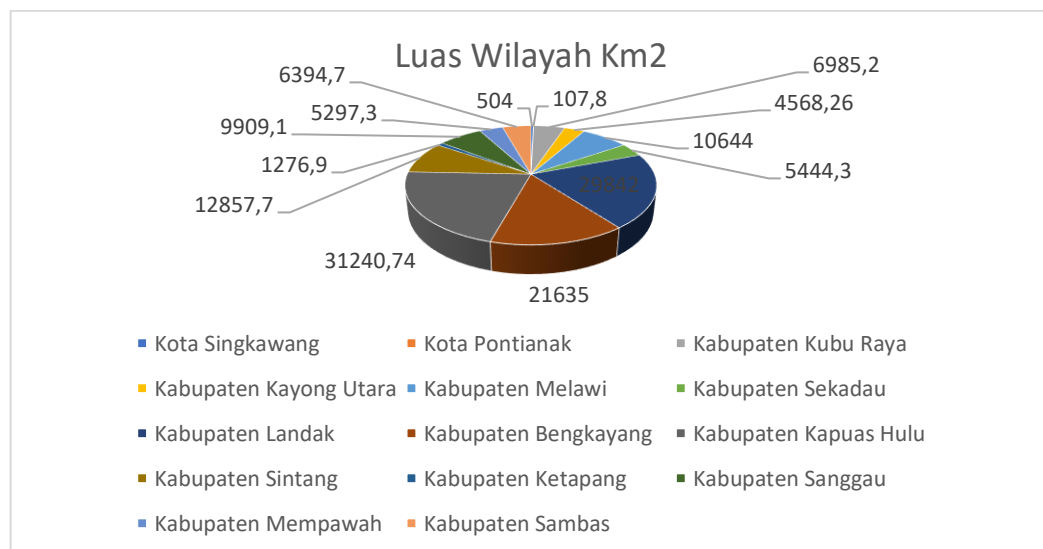


Gambar 1.1

Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Barat

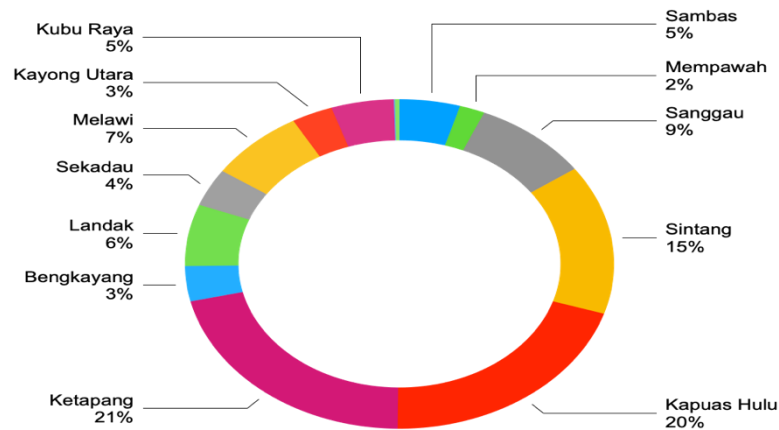
2. Luas Wilayah

Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan hamparan dataran rendah dengan luas wilayah 146.807,00 Km² dan garis pantai sepanjang 1.163 Km. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat membentang dari Utara dan Selatan sekitar 600 Km dan 850 Km dari Barat ke Timur. Selanjutnya luasan wilayah itu berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan, terbagi menjadi 14 kabupaten/kota, meliputi 12 kabupaten dan 2 kota sebagaimana terangkum dalam data RPJMD Tahun 2018-2023, sebagai berikut:



Gambar 1.2

Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat



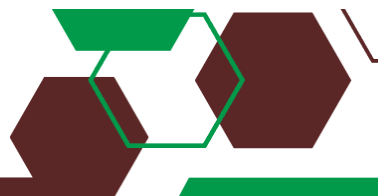
Gambar 1.3
Persentase Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

3. Topografi

Secara topografis Kalimantan Barat berupa wilayah daratan yang membentang dari Barat ke Timur di sepanjang Lembah Kapuas serta Laut Natuna, Selat Karimata dan Laut Jawa. Ketinggian daratan Provinsi Kalimantan Barat bervariasi antara 50-100 Meter di wilayah pesisir meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Ketapang. Ketinggian 100-500 Meter Provinsi Kalimantan Barat berada di wilayah timur meliputi Kabupaten Landak, Sanggau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu. Berdasarkan ketinggian daratannya, Provinsi Kalimantan Barat merupakan wilayah perbukitan yang berada di sekitar wilayah bagian timur dan utara yang berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak, serta dataran rendah yang cukup luas terutama di daerah pesisir pantai.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki gunung-gunung yang ketinggiannya relatif rendah dan tidak aktif. Gunung yang paling tinggi adalah Gunung Baturya di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang dengan ketinggian berkisar 2.278 meter dari permukaan laut. Gunung yang terendah adalah Gunung Cabang dengan ketinggian 103 meter di Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara.

Selain terdapat gunung, Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki ratusan sungai sehingga diberi julukan sebagai Provinsi Seribu Sungai. Sungai Kapuas merupakan sungai besar dan terpanjang di Indonesia yang melalui Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Sekadau dan Pontianak dengan



panjang 1.086 km. Sungai Kubu merupakan sungai yang terpendek 38 Km terdapat di Kabupaten Kubu Raya.

B. Gambaran Umum Demografis

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, jumlah penduduk pada **Semester I Tahun 2022** di Kalimantan Barat berjumlah sebanyak **5.482.046 jiwa**, terdiri dari penduduk berjenis kelamin **laki-laki berjumlah 2.817.151 jiwa** dan penduduk berjenis kelamin **perempuan berjumlah 2.664.895 jiwa** sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Agregat Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat
Semester I Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	SAMBAS	328.407	312.171	640.578
2.	MEMPAWAH	157.879	150.761	308.640
3.	SANGGAU	254.476	236.131	490.607
4.	KETAPANG	297.860	277.719	575.579
5.	SINTANG	221.907	207.450	429.357
6.	KAPUAS HULU	134.860	128.230	263.090
7.	BENGKAYANG	150.817	139.647	290.464
8.	LANDAK	212.832	192.324	405.156
9.	SEKADAU	111.998	104.262	216.260
10.	MELAWI	108.363	101.310	209.673
11.	KAYONG UTARA	66.001	62.414	128.415
12.	KUBU RAYA	312.221	299.002	611.223
13.	KOTA PONTIANAK	336.801	336.328	673.129
14.	KOTA SINGKAWANG	122.729	117.146	239.875
JUMLAH		2.817.151	2.664.895	5.482.046

Sumber: Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat

C. Produk Domestik Regional Bruto

1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Kalimantan Barat triwulan III-2022 dibanding triwulan III-2021 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 6,48 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan diatas 10 persen adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 40,30 persen; Jasa Lainnya sebesar 28,81 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 16,57 persen; Jasa Perusahaan sebesar 15,73 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda



Motor sebesar 15,23 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,58 persen. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen.

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022*
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,19	1,19	5,31
B.	Pertambangan dan Penggalian	21,23	21,23	0,33
C.	Industri Pengolahan	-2,41	-2,41	7,17
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,12	3,76
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	5,67
F.	Konstruksi	12,18	12,18	-6,07
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,23	13,23	15,23
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,89	3,89	40,30
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-19,26	-19,26	16,57
J.	Informasi dan Komunikasi	8,37	8,37	-0,16
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,36	-0,36	3,35
L.	Real Estat	1,15	1,15	-5,91
M,N.	Jasa Perusahaan	-4,45	-4,45	15,73
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,42	1,42	6,28
P.	Jasa Pendidikan	-8,46	-8,46	7,74
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	26,81	26,81	11,58
R,S,T, U.	Jasa Lainnya	8,26	8,26	28,81
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)				6,48

*y on y TW III 2022, sumber data Berita Resmi BPS, data diolah

2. PDRB Menurut Pengeluaran

Ekonomi Kalimantan Barat pada Triwulan III-2022 terhadap Triwulan III-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 6,48 persen. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yaitu sebesar 12,95 persen; diikuti oleh Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai komponen pengurang sebesar 4,89 persen; Komponen PK-RT tumbuh sebesar 4,35 persen; Komponen PMTB tumbuh sebesar 2,55 persen; Komponen PK-LNPRT



tumbuh sebesar 0,46 persen. Sedangkan komponen yang mengalami kontraksi yaitu PK-P yang terkontraksi sedalam 4,60 persen.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (Persentase)

Komponen		2020	2021	2022*
A.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0.19	4,96	3,28
B.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-1.88	8,86	0,07
C.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0.76	5,02	0,65
D.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1.14	1,39	1,93
E.	Perubahan Inventori	-	-	-
F.	Ekspor Barang dan Jasa	7.76	10,12	1,09
G.	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-21.14	5,85	0,37
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)				6,48

*y on y TW III 2022, sumber data Berita Resmi BPS, data diolah

D. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM Kalimantan Barat pada tahun 2022 mencapai 68,63, meningkat 0,73 poin (1,08 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (67,90). Selama periode tahun 2010-2022, IPM Kalimantan Barat rata-rata meningkat sebesar 0,86 persen per tahun

Peningkatan IPM 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak, Pertumbuhan IPM 2022 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama umur panjang dan hidup sehat serta standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,02 tahun, lebih lama 0,26 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah penduduk umur 7 tahun keatas meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 12,65 menjadi 12,66 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,14 tahun, dari 7,45 tahun menjadi 7,59 tahun pada tahun 2022.



Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan), meningkat 381 ribu rupiah (4,25 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1.4
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat
Tahun 2020 s.d 2022

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sambas	67,03	67,10	67,95
2	Bengkayang	67,87	68,04	68,74
3	Landak	65,98	66,21	67,17
4	Mempawah	65,74	66,03	66,94
5	Sanggau	65,77	66,20	66,91
6	Ketapang	67,17	67,43	67,92
7	Sintang	66,88	66,93	67,86
8	Kapuas Hulu	65,69	65,75	66,70
9	Sekadau	64,76	64,93	65,58
10	Melawi	65,55	65,87	66,81
11	Kayong Utara	62,68	62,90	63,81
12	Kubu Raya	67,95	68,16	68,91
13	Kota Pontianak	79,44	79,93	80,48
14	Kota Singkawang	71,94	72,11	72,89
Kalimantan Barat		67,66	67,90	68,63

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, data diolah

E. Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan dihitung melalui pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. **Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat pada Maret 2022 sebesar 350,25 ribu orang, menurun 3,8 ribu orang terhadap September 2021 dan menurun 17,64 ribu orang terhadap Maret 2021.** Jika dipersentasekan penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 6,73 persen, menurun 0,11 persen



poin terhadap September 2021 dan menurun 0,42 persen poin terhadap Maret 2021.

Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, periode Maret 2021–Maret 2022, jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang sebesar 1,86 ribu orang dari 86,90 ribu orang Maret 2021 menjadi 85,04 ribu orang Maret 2022. Sejalan dengan kondisi di perkotaan, penduduk miskin di perdesaan juga mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang 15,78 ribu orang dari 280,99 ribu orang Maret 2021 menjadi 265,21 ribu orang Maret 2022. Periode September 2021–Maret 2022, jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang sebesar 4,00 ribu orang dari 89,04 ribu orang September 2021 menjadi 85,04 ribu orang Maret 2022. Situasi berbeda dengan peningkatan penduduk miskin di perkotaan, penduduk miskin di perdesaan mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan meningkat 0,3 ribu orang dari 264,96 ribu orang September 2021 menjadi 265,21 ribu orang Maret 2022.



Gambar 1.4

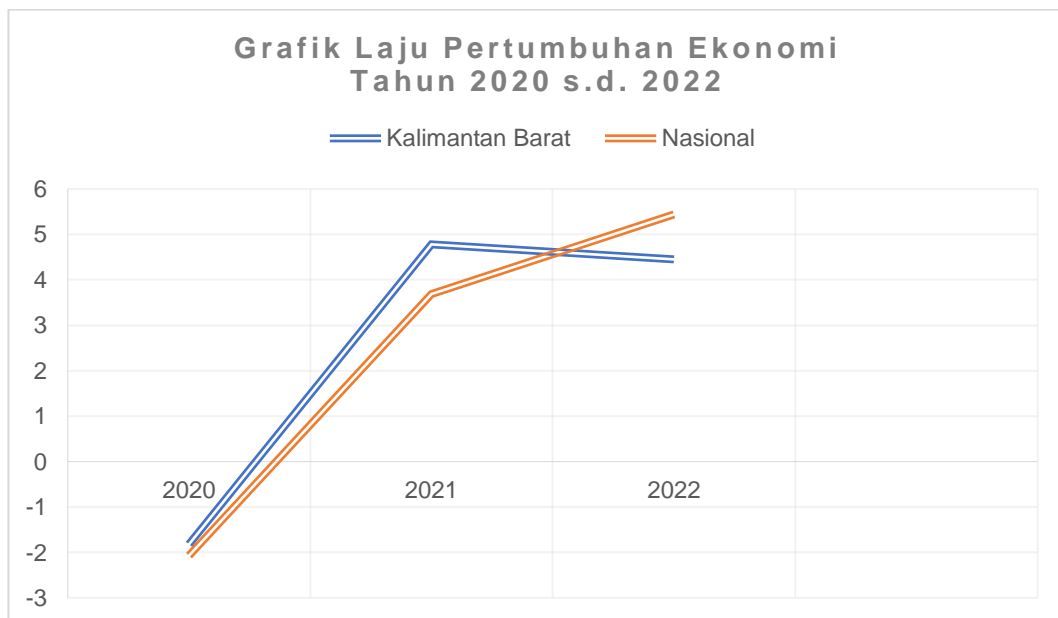
Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020 s.d. 2022

F. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan setiap tahunnya dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 5,26 persen dan terendah pada



tahun 2020 sebesar -1,82 persen. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan II 2022 mengalami peningkatan pertumbuhan. Perekonomian Kalimantan Barat tumbuh sebesar 4,45 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,05 persen (yoy)¹. Pertumbuhan yang meningkat ini searah dengan pertumbuhan yang terjadi pada regional Kalimantan dan nasional. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi regional kawasan Kalimantan yang tumbuh sebesar 4,25 persen (yoy), besaran pertumbuhan Kalimantan Barat pada triwulan II 2022 tercatat lebih tinggi. Namun, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,44% (yoy), pertumbuhan Kalimantan Barat pada triwulan II 2022 tersebut tercatat lebih rendah.



Gambar 1.5

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 s.d. 2022

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan II 2022 didukung oleh upaya percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, pelonggaran pembatasan sosial dan syarat penerbangan, serta perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri yang lebih masif sehingga mendorong mobilitas dan konsumsi masyarakat. Meskipun pada triwulan II 2022 Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang terdampak kebijakan moratorium ekspor minyak kelapa sawit, namun penurunan kasus konfirmasi Covid-19, pelonggaran pembatasan sosial dan syarat penerbangan, perayaan HBKN Idul Fitri, pembukaan perbatasan Kalimantan Barat-Serawak, serta libur



sekolah mendorong peningkatan keyakinan, mobilitas, dan konsumsi rumah tangga dan sektor swasta. Kondisi tersebut juga mendorong peningkatan kinerja pada berbagai lapangan usaha (LU) yang berkaitan dengan peningkatan mobilitas dan konsumsi rumah tangga dan sektor swasta, antara lain LU transportasi dan pergudangan, perdagangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Selain ketiga lapangan usaha tersebut, peningkatan kinerja PDRB Kalimantan Barat juga ditopang oleh LU pertambangan yang tumbuh positif meskipun melambat.

G. Jumlah Pegawai

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, penduduk Semester II Tahun 2022 keadaannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

No	Perangkat Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Total Pegawai	Struktural	Fungsional Tertentu	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKRETARIAT DAERAH	222	174	396	40	136	220
2	SEKRETARIAT DPRD	39	29	68	5	8	55
3	INSPEKTORAT	56	59	115	9	76	30
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2655	3079	5734	10	4772	952
5	DINAS KESEHATAN	118	244	362	29	170	163
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	73	36	109	15	22	72
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42	19	61	7	10	44
8	DINAS SOSIAL	55	46	101	16	11	74
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	76	47	123	17	62	44
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15	38	53	11	12	30
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	25	24	49	8	17	24
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21	14	35	7	11	17



No	Perangkat Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Total Pegawai	Struktural	Fungsional Tertentu	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
13	DINAS PERHUBUNGAN	63	12	75	17	5	53
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	31	16	47	9	20	18
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	25	31	56	8	17	31
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	26	23	49	3	24	22
17	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	41	36	77	8	17	52
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	34	47	81	8	46	27
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	90	39	129	16	26	87
20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	227	78	305	76	46	183
21	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	172	96	268	15	131	122
22	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	72	56	128	15	51	62
23	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	75	37	112	13	30	69
24	DINAS KETAHANAN PANGAN	16	22	38	6	10	22
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	45	30	75	8	47	20
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	138	59	197	40	2	155
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	37	42	79	7	37	35
28	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	48	33	81	7	30	44



No	Perangkat Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Total Pegawai	Struktural	Fungsional Tertentu	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
29	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	26	16	42	6	21	15
30	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	16	12	28	5	0	23
31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	28	8	36	6	9	21
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24	11	35	7	8	20
33	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	51	43	94	18	13	63
34	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	18	11	29	10	0	19
35	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDARSO	336	654	990	8	704	278
36	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI	145	174	319	14	253	52
37	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	94	12	106	17	35	54
TOTAL		5275	5407	10682	521	6889	3272

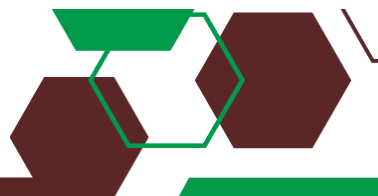
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Semester II tahun 2022.

1.1.1.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

A. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun demikian untuk menjamin kelangsungan pungutan pajak, pemerintah daerah harus memberikan manfaat kepada pembayar pajak seperti pelayanan dan pembangunan serta lain sebagainya yang pada akhirnya masyarakat merasakan manfaat dari membayar pajak.

Pemberian kewenangan pelaksanaan urusan Pemerintahan tersebut juga diikuti dengan pemberian sumber-sumber pembiayaan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian akan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang efektif pemberlakuannya dimulai pada Tahun 2024. Adapun jenis pajak daerah



yang dapat dikelola oleh Pemerintah Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

Penjelasan lebih lanjut terkait capaian realisasi Pajak Daerah (berdasarkan LRA per tanggal 7 Februari 2023) adalah sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Target Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 adalah sebesar Rp.696.228.643.094,00 dengan realisasi sebesar Rp.690.822.428.925,00 (99,22%).

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 1a Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada saat tertentu. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, menyebutkan bahwa Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembekuan dan pembebasan pajak, meliputi, pokok pajak dan/atau denda administrasi baik bunga pajak maupun denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dengan adanya pertimbangan dan analisa perkembangan pendapatan, maka perlu adanya terobosan berupa pemberian Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Di Provinsi Kalimantan Barat.

Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemberian Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat, tertuang dan diatur pada:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 yang dilaksanakan mulai dari 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022;



- b. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2022 yang dilaksanakan mulai dari 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022;
- c. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 yang dilaksanakan mulai dari 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022;
- d. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2022 yang dilaksanakan mulai dari 1 November 2022 sampai dengan 20 Desember 2022.

Melalui kebijakan Pajak Daerah tersebut, diharapkan akan meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kepastian status kepemilikan kendaraan bermotor dan tertib administrasi sebagai wajib pajak. Diharapkan pula melalui kebijakan tersebut, juga akan dapat pendukung peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari jenis pajak PKB (tunggakan pajak) dan BBNKB Kedua.

Hasil pelaksanaan Pemberian Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Barat terdapat menunjukkan bahwa adanya pergerakan atas penerimaan PKB dan pembayaran Tunggakan PKB sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat diantaranya adalah Peningkatan Penerimaan PKB dengan total sebanyak 13.113 Segi (18,04%) dengan nominal sebesar Rp.9.834.326.070,71 (21,97%) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Roda 2 sebanyak 10.041 Segi (16,80%) dengan nominal sebesar Rp.1.913.358.047,14 (16,04%);
- b. Roda 4 sebanyak 3.072 Segi (23,76%) dengan nominal sebesar Rp.7.920.968.023,57 (24,12%).

Adapun Peningkatan pada Pembayaran Tunggakan PKB dengan total sebanyak 5.875 Segi (119,68%) dengan nominal Rp.8.473.265.165,71 (218,75%) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Roda 2 sebanyak 4.548 Segi (106,65%) dengan nominal sebesar Rp.1.846.271.831,43 (137,89%);
- b. Roda 4 sebanyak 1.326 Segi (205,93%) dengan nominal sebesar Rp.6.626.993.334,29 (261,46%).

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelayanan Samsat, Mitra Samsat yaitu Dirlantas Polda Kalbar dan Jasa Raharja juga menyambut baik



program Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya Serta Pemberian Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor yang berdampak pada peningkatan PNPB dan Pembayaran Jasa Raharja. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, bahwa bulan sadar pajak sangat berperan penting dalam meningkatkan PKB secara maksimal. Hal yang penting juga adalah dukungan dari pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan administrasi kesamsatan.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Tahun 2022 sebesar Rp.672.901.666.906,00 dengan realisasi sebesar Rp.732.440.221.800,00 (108,85%). Tercapainya target BBNKB bahkan melebihi dari target yang sudah ditetapkan menunjukkan indikasi semakin membaiknya roda perekonomian masyarakat di Kalimantan Barat yang dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang melakukan pembelian kendaraan bermotor (kendaraan baru dan lama) pada Tahun 2022.

Sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat, secara nyata warga masyarakat yang menjadi Wajib Pajak sangatlah terbantu dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang melaksanakan perubahan status kepemilikan kendaraan bermotor dan/atau Mutasi Unit/Segi Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Gubernur tersebut sebagaimana Tabel 3 di atas, yaitu Roda 2 sebanyak 1.085 Segi (158,50%) dengan nominal berkurang sebesar Rp.81.566.057,14 (-99,97%) dan Roda 4 sebanyak 920 Segi (183,67%) dengan nominal berkurang sebesar Rp.810.803.700,00 (-99,66%).

Penerimaan daerah dari perubahan status kepemilikan kendaraan bermotor (BBNKB II dan seterusnya) seharusnya menjadi Rp.0,- pada saat berlakunya kebijakan ini, namun faktanya di lapangan ada sejumlah penerimaan nominal yang disebabkan oleh adanya pembayaran di bulan Pemberian Pembebasan atas Penetapan BBNKB II yang telah dilakukan Penetapannya pada bulan sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur



seperti Perubahan Status Kepemilikan Kendaraan Bermotor serta adanya Proses Rubah Bentuk Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:

- a. R2: seharusnya Rp. 0,00 tetapi terdapat penerimaan Rp.24.400,00.
- b. R4: seharusnya Rp.0,00 tetapi terdapat penerimaan Rp.2.749.800,00.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB yang dilakukan antara lain yaitu:

- a. Intensifikasi pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB yang dilakukan antara lain yaitu:

- 1) Updating data subjek dan objek pajak:

- a) Melaksanakan inventarisasi dan menyampaikan data tunggakan pajak kendaraan perusahaan setiap Kabupaten/Kota melalui UPT PPD masing-masing wilayah kerja.

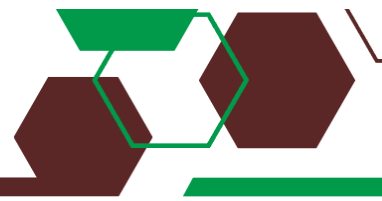
- b) Optimalisasi penagihan pajak kendaraan bermotor melalui Surat Tim Pembina Samsat Provinsi Kalimantan Barat kepada Perusahaan Perkebunan dan Pertambangan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, door to door oleh Petugas UPT PPD, pengiriman surat konfirmasi tunggakan melalui jasa pengiriman dan melaksanakan Sistem Notifikasi Tagihan Pajak Daerah (Pemberitahuan Masa Jatuh Tempo Pajak Kendaraan Bermotor melalui media WA).

- c) Melakukan validasi dan verifikasi terhadap basis data wajib pajak secara langsung ke lapangan sebagai bahan perbaikan data yang telah dimiliki.

- d) Berkaitan dengan pemutakhiran/updated jumlah data kendaraan bermotor, Badan Pendapatan Daerah telah melakukan pemutakhiran data kendaraan bermotor melalui upaya-upaya sebagai berikut:

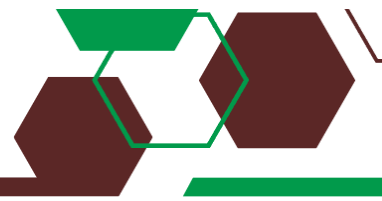
- (1) Mengeliminasi data ganda kendaraan bermotor yang identik nomor rangka dan nomor mesin namun kepemilikan kendaraan bermotor telah berpindah tangan atau berubahnya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);

- (2) Mengeliminasi data kendaraan bermotor yang telah berpindah keluar wilayah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan dokumen fiskal keluar yang diterbitkan.



Mengingat data kendaraan bermotor bukan hanya memiliki status sebagai subjek dan objek Pajak Kendaraan Bermotor tetapi juga merupakan data yang digunakan untuk forensik kendaraan bermotor Pihak Kepolisian dan data jumlah masyarakat yang memberikan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Jalan (SWDKLLJ) PT. Jasa Raharja, dalam hal verifikasi dan validasi hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait melalui Tim Pembina Samsat. Berdasarkan hasil rapat Tim Pembina Samsat yang dihadiri oleh Korps Lalu Lintas Polri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, PT. Jasa Raharja, Kementerian Perhubungan dan BPJS Kesehatan berkomitmen untuk mewujudkan *single* data kendaraan bermotor di Indonesia.

- 2) Penambahan waktu pelayanan:
 - a) Pelayanan pembayaran PKB melalui kegiatan Samsat Keliling, yaitu dengan menambah jam pelayanan Samsat Keliling di luar jam Pelayanan rutin (dilaksanakan dari Sore hingga Malam hari).
 - b) Pelayanan Samsat Malam Se-Kalbar yang dilakukan oleh seluruh UPT PPD Bapenda Provinsi Kalimantan Barat serta Samsat Keliling Pedesaan yang dilakukan oleh UPT PPD untuk menjangkau titik pelayanan masyarakat yang jauh dari perkotaan.
 - c) Pelayanan pembayaran PKB melalui kegiatan layanan Terpadu KIR dan Intensifikasi Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
Jenis Layanan Terpadu terdiri dari layanan KIR, layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor/Pengesahan STNK dan SWDKLLJ. Tempat pelaksanaan di 3 (tiga) lokasi yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang.
- 3) Menerapkan *reward and punishment* kepada Wajib Pajak:
 - a) Secara rutin menyampaikan Surat Teguran dan Surat Peringatan kepada Wajib Pajak yang menunggak pajak baik dilakukan secara langsung oleh Petugas maupun melalui jasa pengiriman. Melalui kegiatan ini, data yang didapat akan digunakan untuk perbaikan data yang ada dalam sistem aplikasi. Saat ini sedang dirancang penyampaian Surat Teguran dan Surat peringatan dengan menggunakan Teknologi Informasi sehingga pelaksanaan dapat berjalan efisien dan efektif.



- b) Melakukan pemeriksaan pajak di Kantor Pemerintah dan Kantor Swasta berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 970/0424/Bapenda tentang Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan kendaraan bermotor milik pegawai baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dilakukan sebelumnya dan dilanjutkan dengan pemeriksaan kendaraan bermotor pegawai di Lingkungan Kantor Swasta.
 - c) Pemberian insentif fiskal berupa Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat serta melakukan sosialisasi melalui media cetak, media konvensional seperti baleho, video tron dan media online.
 - d) Surat Tim Pembina Samsat Nomor: B/46/V/2022; Nomor: 973/531/Bapenda-B; Nomor: P/R/36/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Himbauan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak dan Pemutakhiran Data Kendaraan Bermotor pada sektor pertambangan dan perkebunan yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
 - e) Surat Tim Pembina Samsat Nomor: B/65/VIII/2022; Nomor: 973/935/Bapenda-B; Nomor: P/R/55/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Peringatan Kewajiban untuk membayar Pajak dan Pemutakhiran Data Kendaraan Bermotor pada Sektor Pertambangan dan Perkebunan yang beroperasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- 4) Penggunaan teknologi informasi untuk kecepatan dan kemudahan pelayanan, yaitu:
- a) Inovasi dalam rangka peningkatan Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran dengan penggunaan fasilitas E-Samsat yang bekerja sama dengan Bank Kalbar dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dapat digunakan menggunakan Mobile Banking Bank kalbar.



- b) Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Barat telah membangun Aplikasi “Samsat Kalbar” berbasis android yang digunakan untuk mengecek nilai Pajak Kendaraan Bermotor dan integrasi fasilitas antrian online pada pelayanan yang ada di Samsat Pontianak.
- c) Loker Terpadu Kelompok Rentan (Lu Keren) yang disediakan UPT PPD Pontianak Wilayah I untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat kelompok rentan (lansia, ibu hamil dan membawa balita, serta penyandang disabilitas).
- d) Pelaksanaan Sistem Notifikasi Tagihan Pajak Daerah (Pemberitahuan Masa Jatuh Tempo Pajak Kendaraan Bermotor melalui media WA).
- e) Melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi yang telah dibangun dan perbaikan administrasi perpajakan di lingkungan UPT PPD se Kalimantan Barat antara lain yaitu:
 - (1) Pengembangan pembayaran Pajak Daerah melalui EDC dan QRIS.

Kemudahan pembayaran dengan menggunakan media *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dimana implementasi transaksi non tunai ini sudah dilaksanakan pada gerai Drive Thru di UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat, Samsat Outlet Pontianak, Samsat Corner Singkawang, Gerai Sungai Pinyuh, Mal Pelayanan Publik Sanggau, dan Samkel Ketapang. Selain itu pembayaran dengan menggunakan media dengan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) sudah dilaksanakan di Drive Thru Pontianak dan Samsat Outlet Pontianak.
 - (2) Pengembangan untuk Pengecekan Pajak Kendaraan Bermotor via website resmi Bapenda Provinsi Kalimantan Barat.
 - (3) Mengembangkan dashboard Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang digunakan mengakses informasi mengenai Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Ekstensifikasi pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB dilakukan melalui peningkatan koordinasi ke instansi/unit kerja/Organisasi Perangkat Daerah lainnya, yaitu:



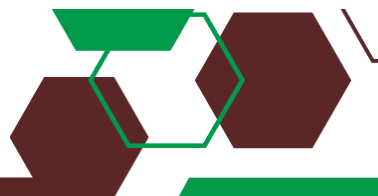
- 1) Bapenda bersama Tim Pembina Samsat juga telah melakukan upaya peningkatan kepatuhan kepada perusahaan sektor Perkebunan dan Pertambangan untuk melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa perpanjangan STNK maupun pengesahan STNK, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Pemutakhiran Data Kendaraan Bermotor sebagai syarat operasional kendaraan bermotor secara legal di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Penjalinan koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum (Kejaksaan Tinggi) untuk kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada OPD/UPT Penghasil untuk melakukan peninjauan tarif secara proporsional yang disesuaikan Retribusi dengan kondisi saat ini.
- 4) Mendorong PT. Bank Kalbar untuk lebih memasifkan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat mengakomodir berbagai platform aplikasi yang dipergunakan oleh pihak-pihak lain khususnya lembaga pembiayaan dan BUMDES sehingga mendukung pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Target PBBKB Tahun 2022 sebesar Rp.661.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.801.828.161.455,00 (121,21%). Tercapainya penerimaan PBBKB Tahun 2022 melebihi target yang sudah ditetapkan disebabkan sudah membaiknya perekonomian dunia yang berpengaruh pada penggunaan kuota pembelian BBM.

Pada bulan September 2022, terjadi kenaikan harga BBM dari jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax. Hal inilah yang kemudian juga menaikkan penerimaan PBBKB setiap bulannya, dimana sebelum kenaikan tersebut, rata-rata penerimaan PBBKB setiap bulannya adalah sebesar 64 miliar dan setelah adanya kenaikan BBM rata rata penerimaan PBBKB setiap bulannya menjadi 70 miliar.

Pergerakan harga minyak dunia sangat berpengaruh terhadap harga jual Bahan Bakar Minyak di Indonesia. Dengan adanya kenaikan dan penurunan harga minyak dunia mempengaruhi naik turunnya penerimaan PBBKB. Harga BBM akan selalu mengikuti harga minyak dunia, sehingga jika



harga BBM meningkat maka PBBKB akan ikut meningkat, begitu juga sebaliknya apabila harga BBM turun maka PBBKB akan ikut turun juga.

Intensifikasi dan upaya yang telah dilakukan dalam pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor antara lain yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dengan Wajib Pungut (Wapu) terkait penjualan BBM di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi koordinasi dengan BPH Migas melalui MoU pertukaran data penyaluran BBM di Kalimantan Barat yang ditindaklanjuti dengan mengirim surat permohonan data penyaluran BBM di Kalbar yang hingga kini masih belum mendapat respon dari BPH Migas serta MoU dengan PT. Pertamina masih belum maksimal karena dari PT. Pertamina masih belum mau memberikan data invoice penjualan BBM ke Bapenda sebagai bahan untuk rekonsiliasi PBBKB.
- b. Mengumpulkan data dan verifikasi laporan PBBKB dari Wapu yang terdaftar di Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian dikaji apakah telah memenuhi target atau belum.
- c. Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Wapu PBBKB Provinsi Kalimantan Barat untuk mengantisipasi kenaikan BBM dan dampaknya terhadap penerimaan PBBKB di Kalimantan Barat.
- d. Mempercepat proses pendaftaran kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mendaftarkan diri sebagai Wapu Provinsi Kalimantan Barat.
- e. Melakukan kajian lebih lanjut terkait pemberian Rekomendasi Pemungutan PBBKB untuk mesin tidak bergerak yang tidak dikenakan PBBKB sehingga tidak mengurangi Pendapatan Daerah, salah satunya dengan mensyaratkan bukti lunas PAP dan PKB bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan rekomendasi tersebut.

4. Pajak Air Permukaan

Target PAP pada Tahun 2022 sebesar Rp.16.000.000.000,00 dengan realisasi penerimaan PAP sebesar Rp.20.447.283.072,00 (127,80%). Lonjakan kenaikan penerimaan PAP ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh komponen yang meliputi Bapenda bersama UPT PPD se-Kalimantan Barat yang didukung oleh Tim Korsupgah KPK Provinsi melalui program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sehingga banyak perusahaan besar yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan dan industri lainnya membayar PAP yang tertunggak, baik yang merupakan tunggakan PAP pada tahun-tahun sebelumnya maupun tahun yang sedang berjalan. Penyumbang



terbesar PAP berasal dari UPT Sanggau, UPT. Ketapang dan Pontianak Wilayah I.

Melihat potensi penerimaan PAP di Kalimantan Barat ini cukup besar maka pada tahun mendatang perlu dilakukan upaya intensif pemungutan PAP di Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Kalimantan Barat antara lain yaitu:

- a. Intensifikasi Pajak Air Permukaan dilakukan melalui:
 - 1) Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Provinsi terkait dan instansi vertikal berkenaan dengan *database* perusahaan pengguna air permukaan pada sektor perkebunan dan pertambangan;
 - 2) Pendataan Wajib Pajak PAP dengan melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Prov. Kalbar untuk sektor Pertambangan, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar;
 - 3) Melaksanakan penyelarasan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2013 menjadi Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
 - 4) Meningkatkan dasar perhitungan pengenaan Pajak PAP dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Kalimantan Barat.
 - 5) Menerbitkan Instruksi Gubernur Kalimantan Barat Nomor 970/2091/BAPENDA tanggal 10 Juni 2022 tentang Kepatuhan Pembayaran Pajak Air Permukaan Perusahaan Perkebunan Yang Beroperasional di Provinsi Kalimantan Barat.
 - 6) Menerbitkan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 973/2092/Bapenda-B tanggal 10 Juni 2022 hal Surat Peringatan I (SP-1) yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan perkebunan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran PAP dan tunggakannya.



- 7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pemeriksaan kepatuhan penggunaan air permukaan pada perusahaan perkebunan dan pertambangan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Kegiatan Ekstensifikasi Pajak Air Permukaan dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada melalui kegiatan antara lain yaitu pendataan terhadap perusahaan-perusahaan baru melalui UPT PPD Bapenda Prov. Kalbar yang menggunakan air permukaan di wilayah Kalimantan Barat untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Air Permukaan serta wajib mematuhi peraturan yang berlaku mengenai pemungutan Pajak Air Permukaan.

5. Pajak Rokok

Target Pajak Rokok Tahun 2022 adalah sebesar Rp.380.531.427.441,00 dengan realisasi sebesar Rp.426.119.545.566,00 (111,98%).

Dalam proses penerimaan Pajak Rokok, Bapenda Provinsi Kalimantan Barat menerima transfer Pajak Rokok dari Kementerian Keuangan sebanyak 4 kali per triwulan setiap tahunnya. Pembagian Pajak Rokok berdasarkan jumlah penduduk pada Provinsi Kalimantan Barat. Setelah menerima transfer Pajak Rokok dari Kementerian Keuangan selanjutnya Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Barat membagikan Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/kota melalui Surat Keputusan Gubernur tentang Bagi Hasil Pajak Rokok untuk setiap Triwulannya.

Adapun Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/kota berdasarkan azas pemerataan 50% dan 50% lagi berdasarkan azas potensi persentase jumlah penduduk Kabupaten/kota. Untuk proses pelaporan Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/kota kepada Kementerian Keuangan dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Barat.

Terkait penggunaan Dana Pajak Rokok yang telah dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaannya melakukan monitoring kepada pemerintah Kabupaten/kota terkait penggunaan Dana Pajak Rokok yang telah dibagi hasilkan tersebut.



6. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Target penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp.345.727.927.069,00 dengan realisasi sebesar Rp.425.724.158.992,44 (123,14%).

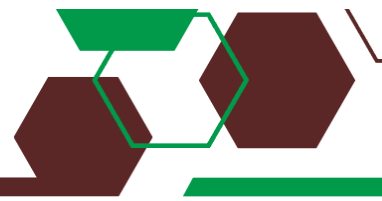
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada dasarnya suatu sumber pendapatan yang bersifat insidental yang sulit untuk diprediksi target yang akan terealisasi atau bahkan ditingkatkan penerimaannya yang terdiri dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan (penjualan alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga, hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan, hasil penjualan aset lainnya), hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan (hasil sewa BMD dan hasil dari bangun guna serah), penerimaan jasa giro (jasa giro kas daerah, jasa giro pemegang kas/bendahara dan jasa giro rekening dana BOS), pendapatan bunga (deposito Bank Kalbar), penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain (Collection Credit Bank Kalbar dan penerimaan bentuk lain dari pendapatan lainnya), denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak dan pendapatan BLUD.

Pendapatan BLUD bersumber dari RSUD Dokter Soedarso dengan target Tahun 2022 sebesar Rp.130.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.244.767.243.999,00 (122,96%) serta Rumah Sakit Jiwa Provinsi dengan target Tahun 2022 sebesar Rp.23.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.27.000.000,00 (122,96%). Realisasi melebihi target yang ditetapkan disebabkan oleh dikarenakan adanya pembayaran sisa klaim pasien Covid Tahun 2021 yang dibayarkan pada Tahun 2022.

Namun demikian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hanya dapat memaksimalkan pungutan terhadap objek-objek penerimaan yang diasumsikan akan tercapai seperti bunga deposito, jasa giro kas daerah, pendapatan denda pajak dan penerimaan lainnya. Untuk mencapai target dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan upaya antara lain yaitu melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna mengontrol sumber penerimaan sesuai target yang ditetapkan.

B. Retribusi

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh



Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dimaksudkan untuk mengganti seluruh atau sebagian biaya pengadaan layanan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur dengan tegas bahwa Retribusi Daerah adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dipungut oleh Daerah sesuai kewenangan Daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Dengan demikian Retribusi Daerah yang dipungut mempunyai konsekuensi logis harus ada timbal baliknya terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur dengan tegas objek-objek retribusi yang dapat dipungut oleh daerah dan daerah tidak dapat mengembangkan objek-objek retribusi baru diluar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hal ini berarti Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi hanya dapat melakukan intensifikasi dan tidak dapat melakukan ekstensifikasi karena objek retribusi sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang boleh dipungut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

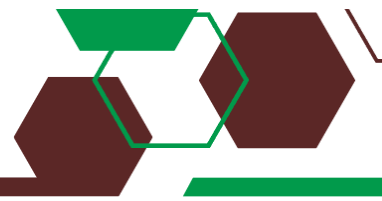
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa objek umum Retribusi Daerah dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu. Dalam pelaksanaannya dibagi dalam 2 kewenangan yaitu yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kewenangan Pemerintah Kab/Kota.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pungutan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi Retribusi pada Dinas/Instansi Pengelola Retribusi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan 4 (empat) kali dalam satu tahun dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Mengevaluasi Pencapaian Target Atau Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Sampai Dengan Akhir Triwulan IV;
- b) Merekon hasil penerimaan Retribusi Daerah antara Laporan Keuangan Dinas/Instansi terkait dengan Kas Daerah;
- c) Melakukan inventarisasi, sinkronisasi dan verifikasi kendala-kendala atau permasalahan secara teknis administratif dan teknis pelaksanaan



pengelolaan serta melakukan upaya-upaya kerjasama dalam menggali dan meningkatkan PAD khususnya di sektor Retribusi Daerah.

2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD Bidang Retribusi Daerah dengan jenis kegiatan sebagai berikut:

a. Melakukan Intensifikasi (Pembinaan terhadap dinas dan unit kerja pengelola Retribusi Daerah).

- 1) Melakukan pembinaan secara teknis administratif maupun teknis pelaksanaan pengelolaan terhadap Dinas/Unit kerja Pengelola Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Melakukan monitoring dan koordinasi secara langsung ke OPD pemungut retribusi, pembinaan serta evaluasi secara administratif per triwulan terhadap realisasi PAD pada sektor Retribusi Daerah Yang dikelola oleh Dinas / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar.
- 3) Melakukan Inventarisasi kendala-kendala atau permasalahan baik teknis maupun administratif terhadap pengelolaan Retribusi Daerah serta melakukan upaya-upaya kerjasama dalam menggali dan meningkatkan PAD khususnya sektor Retribusi Daerah.

b. Melakukan Ekstensifikasi sumber-sumber PAD Bidang Retribusi Daerah:

- 1) Melakukan konsultasi teknis/kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah lain yang dinilai memiliki Kompetensi dalam menggali potensi dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dengan harapan apa yang dilihat, diamati, dipelajari dan dikaji dari daerah lain khususnya dalam menggali dan mengelola retribusi, sehingga dapat diterapkan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Melakukan upaya-upaya kerjasama dalam menggali dan meningkatkan PAD khususnya di sektor Retribusi Daerah dengan Dinas/Unit Kerja Teknis terkait sehingga dapat dituangkan dalam proses penyusunan dan pembahasan Peraturan Perundang- Undangan tentang Retribusi Daerah.
- 3) Melakukan penggalian objek Retribusi yang baru dengan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk meningkatkan PAD khususnya pada sektor retribusi daerah.
- 4) Penjalinan kerjasama dan koordinasi dengan OPD/UPT terkait untuk menggali potensi pendapatan dari Barang Milik Daerah yang tercatat



dan dikelola oleh OPD/UPT yang bersangkutan agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap Retribusi Daerah.

- 5) Mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah untuk meningkatkan penerimaan dari Retribusi Daerah yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.

Target Retribusi Daerah Tahun 2022 adalah sebesar Rp.9.313.488.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.14.328.268.392,00 (153,84%) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum

Target Retribusi Jasa Umum Tahun 2022 sebesar Rp.6.552.940.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.9.952.983.637,00 (151,89%).

Pencapaian realisasi Retribusi Jasa Usaha melampaui target yang sudah ditetapkan disebabkan oleh meningkatnya pelayanan di bidang kesehatan khususnya di UPT Kesehatan Kerja dan Olah Raga, UPT Klinik Utama Sungai Bangkong dan UPT Laboratorium Kesehatan serta meningkatnya pelayanan di bidang pendidikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat Kalbar.

- 2) Retribusi Jasa Usaha

Target Retribusi Jasa Usaha Tahun 2022 sebesar Rp.2.410.898.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.937.944.575,00 (163,34%).

Pencapaian realisasi pada Retribusi Jasa Usaha melampaui target yang sudah ditetapkan disebabkan karena meningkatnya pendapatan retribusi dari pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga dan retribusi produksi penjualan usaha daerah.

- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Target Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2022 adalah sebesar Rp.349.650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.437.340.180,00 (125,08%).

Realisasi melebihi target yang ditetapkan dikarenakan adanya kenaikan tarif retribusi terbaru sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah dan meningkatnya izin



Penambahan/Perubahan SIUP, SIPI, SIKPI dan Andon pada Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan.

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 bersumber dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) yaitu dari PT. Bank Kalbar, PT. Asuransi Bangun Askrida dan PD. Aneka Usaha. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus mengoptimalkan penerimaan bagian laba secara rasional menyesuaikan dengan penyertaan modal yang telah dianggarkan dan dilaksanakan.

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2022 adalah sebesar Rp.101.025.671.578,00 dengan realisasi sebesar Rp.101.122.147.953,00 (100,10%) dengan rincian sebagai berikut:

1. PT. Bank Kalbar

Target yang ditetapkan pada Bank Kalbar Tahun 2022 adalah sebesar Rp.100.612.289.762,00 dengan realisasi sebesar Rp.100.608.766.137,00 (99,99%).

2. PT. Asuransi Bangun Askrida

PT. Asuransi Bangun Askrida merupakan Perusahaan yang dimiliki bersama oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia dan Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia.

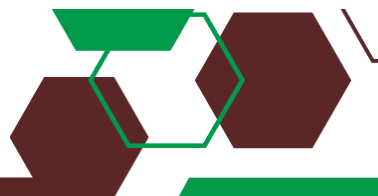
Adapun target yang ditetapkan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp.413.381.816,00 dan terealisasi sebesar Rp.413.381.816,00 (100%).

3. Perusda Aneka Usaha

PD. Usaha Aneka pada Tahun 2022 tidak ada target, tetapi ada realisasi sebesar Rp.100.000.000,00 (100%). Hal ini dikarenakan pasca pandemi Covid-19 usaha-usaha yang dijalankan Perusda Aneka Usaha terus mendapatkan peningkatan pendapatan usaha dan memberikan keuntungan Perusahaan sehingga dapat berkontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari deviden atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

D. Pendapatan Transfer

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun ketentuan yang



mengaturnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.

Target Pendapatan Transfer Tahun 2022 adalah sebesar Rp.2.715.855.183.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.826.541.835.787,00 (104,08%).

1. Dana Perimbangan

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DTU-DBH) terdiri dari:

Target Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2022 adalah sebesar Rp.256.965.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.410.149.687.562,00 (159,61%) yang terbagi dari DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH Non-Pajak/PNBP, sebagai berikut:

1) Dana Bagi Hasil dari Pajak

Target DBH Pajak Tahun 2022 adalah sebesar Rp.142.831.301.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.200.935.795.009,00 (140,68) yang terdiri dari:

a) Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), target Tahun 2022 sebesar Rp.60.848.849.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.102.217.382.593,00 (167,99%).

b) Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, target Tahun 2022 sebesar Rp.74.627.877.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.83.330.591.131,00 (111,66%).

c) Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, target Tahun 2022 sebesar Rp.7.354.575.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.15.387.821.285,00 (209,23%).

2) Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau

Target Tahun 2022 adalah sebesar Rp.122.665.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.122.665.000,00 (100,00%).

3) Dana Bagi Hasil dari Non-Pajak/PNBP

Target Tahun 2022 adalah sebesar Rp.114.011.884.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.209.091.227.553,00 (183,39%), terdiri dari:



- a) Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-luran Tetap (Landrent)
Target Tahun 2022 sebesar Rp.12.884.198.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.29.282.187.044,00 (227,27%).
- b) Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Hasil Produksi (Royalty)
Target Tahun 2022 sebesar Rp.82.099.035.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.160.780.389.509,00 (195,84%).
- c) Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Target Tahun 2022 sebesar Rp.3.887.237.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.887.237.000,00 (100,00%).
- d) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)
Target Tahun 2022 sebesar Rp.931.893.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 931.893.000,00 (100,00%).
- e) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
Target Tahun 2022 sebesar Rp.14.209.521.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.14.209.521.000,00 (100,00%).

Adapun ketentuan yang berlaku terhadap Sistemika Penyaluran DBH terhadap penyaluran Bagi Hasil ke Daerah dalam bentuk Dana Transfer Pemerintah Pusat Atas Besaran Dana Pagu Anggaran adalah berdasarkan Hitungan Penerimaan Murni yang sebelumnya melalui Rekonsiliasi. Bahwa besaran alokasi target DBH Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA. 2021 dan TA. 2022 secara sistematis menunjukkan Besaran Penerimaan Murni yang diterima.

- b. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)
Target Tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.572.247.838,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.553.304.284.810,00 (98,80%). Adapun tidak terealisasinya target DAU disebabkan oleh:
 - 1) Terlambatnya penyampaian laporan realisasi belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan gaji dan tunjangan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru dan Non Guru bulan November dan Desember 2022 dari



Pemerintah Daerah disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 14 pada bulan berikutnya setelah bulan berkenaan berakhir.

- 2) Begitu pula terlambatnya menyampaikan atas laporan realisasi belanja wajib perlindungan sosial untuk periode realisasi bulan November dan Desember 2022 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang harus disampaikan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan berkenaan berakhir.
- 3) Terhadap Laporan data bulanan, yang terdiri atas Laporan Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 bulan, Laporan Posisi Kas Bulanan, Ringkasan Realisasi APBD Bulanan, dan Laporan Data Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian serta informasi pada tabel Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk bulan November 2022 agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD paling lambat tanggal 5 Desember 2022, hal ini juga belum sepenuhnya dilaporkan dengan tepat waktu.

Diinformasikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait Laporan Realisasi APBD Semester I TA 2022 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA.2021 yang terdiri atas Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, telah disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD.

c. Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus terdiri dari:

1) Dana Alokasi Khusus Fisik

Target Tahun 2022 adalah sebesar Rp.307.262.553.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp.299.642.505.187,00 (97,52%).

Ketentuan dalam Pengelolaan DAK Fisik diatur oleh PMK No.198/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan DAK Fisik. Realisasi Target DAK Fisik Tahun 2022 tidak tercapai 100,00% disebabkan antara lain yaitu:

- a) Belum semua pengelola DAK Fisik mempedomani sebagaimana ketentuan terhadap beberapa kegiatan pada bidang/subbidang



DAK Fisik tentang batas waktu penyampaian ke KPPN untuk dokumen persyaratan DAK Fisik secara sekaligus dalam hal seluruh atau sebagian kegiatan pada bidang/subbidang DAK Fisik yang mendapatkan rekomendasi Kementerian Negara/Lembaga, atas ketentuannya paling lambat diterima KPPN Pontianak pada tanggal 15 Desember 2022, penyampaian dokumen persyaratan DAK Fisik tersebut di upload kepada KPPN Pontianak melalui aplikasi OM SPAN sesuai ketentuannya.

- b) Ada beberapa pengelola DAK Fisik belum memenuhi laporan sebagaimana ketentuan tentang laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang dengan capaian keluaran (output) 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang serta foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang.

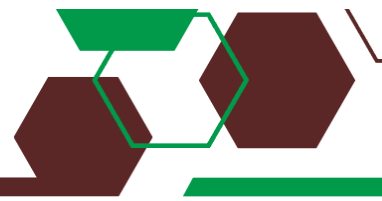
Dalam hal daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dan tidak memenuhi dari pada syarat salur yang telah ditentukan akan dilakukan penundaan penyaluran untuk semester II pada triwulan IV TA.2022, sehingga karena ketentuan tersebut maka Realisasi DAK Fisik untuk Target Tahun 2022 tidak dapat tercapai 100,00%.

Berkenaan ketentuan pengaturan DAK Non Fisik yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Target Tahun 2022 adalah sebesar Rp.563.048.292.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.547.114.708.228,00 (97,17%).

Sama halnya DAK Fisik, Realisasi Target DAK Non Fisik Tahun 2022 juga tidak tercapai 100,00% yang disebabkan karena beberapa ketentuan yang belum dipenuhi oleh pengelola DAK Non Fisik, seperti:

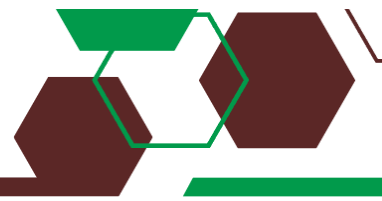


- a) Pedoman Pelaksanaan Transfer Dana Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negeri Daerah (TPG ASND), Dana Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negeri Daerah (Tamsil Guru ASND), dan Dana Tunjangan Khusus Guru Aparatur Sipil Negeri Daerah (TKG ASND) TA. 2022 pada akhir TA. 2022, terhadap laporan realisasi pembayaran disertai dengan rekapitulasi SP2D Dana TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND Semester I TA 2022.

Ketentuan ini digunakan sebagai dasar penyaluran triwulan III dan triwulan IV TA.2022, bagi daerah yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut sebagaimana yang direkomendasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maka sisa pagu TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2022 tidak disalurkan ke daerah dan Penyaluran Dana TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND triwulan III dan triwulan IV TA 2022 tidak dapat dilaksanakan sekaligus pada satu hari yang sama.

- b) Pedoman Pelaksanaan Transfer Dana DAK Non Fisik Jenis Lainnya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PK2UMK), Dana Pelayanan Kepariwisata, Dana Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS), Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Dana Fasilitas Penanaman Modal, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (PK2SIKM)) TA 2022, terhadap laporan realisasi penyerapan pada akhir TA 2022 disertai dengan rekapitulasi SP2D dan Laporan realisasi penggunaan Dana DAK Non Fisik Jenis Lainnya tahap I sebagai persyaratan penyaluran tahap II.

Laporan realisasi penyerapan disertai dengan rekapitulasi SP2D dan Laporan realisasi penggunaan Dana DAK Non Fisik Jenis



Lainnya tahap I tersebut tidak dapat dipenuhi, maka sisa pagu DAK Nonfisik Jenis Lainnya TA 2022 tidak disalurkan ke daerah.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas belum sepenuhnya dilaksanakan oleh beberapa pengelola DAK Non Fisik, sehingga Target DAK Non Fisik Tahun 2022 tidak dapat terealisasi 100,00%.

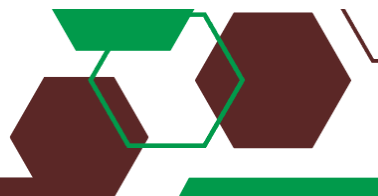
2. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah merupakan daya yang diberikan pemerintah pusat yang bertujuan memberikan penghargaan (reward) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam mengelola keuangan dan kesehatan fiskal daerah, pelayanan dasar masyarakat, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Target DID Tahun 2022 adalah sebesar Rp.16.330.650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.16.330.650.000,00 (100%).

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi Pendapatan Daerah di sektor penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain yaitu:

- a. Melakukan inventarisasi data-data Penerimaan Pajak Penghasilan dan data rekonsiliasi penerimaan pajak penghasilan melalui Koordinasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Dirjen Perbendaharaan (DJPB) Kantor Wilayah Kalimantan Barat.
- b. Melaksanakan Rapat Koordinasi Regional Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan (PBB-P3) dan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) maupun Pajak Sektor Lainnya serta Pajak Penghasilan (PPh) Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan antara Dirjen Pajak Kantor Wilayah Kalimantan Barat/Se-Kalimantan bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat/Se-Kalimantan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat/Se-Kalimantan serta bersama Badan Pendapatan maupun Badan Keuangan pada Pemerintah Kab/Kota Se-Kalimantan.



- c. Melaksanakan Rapat Koordinasi Regional Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan (PBB-P3) dan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) maupun Pajak Sektor Lainnya serta Pajak Penghasilan (PPh) Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Kalimantan antara Dirjen Pajak Kantor Wilayah Kalimantan Barat/Se-Kalimantan bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat/Se-Kalimantan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat/Se-Kalimantan serta bersama Badan Pendapatan maupun Badan Keuangan pada Pemerintah Kab/Kota Se-Kalimantan.
- d. Melakukan inventarisasi data-data Penerimaan Cukai Hasil Tembakau melalui Koordinasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Dirjen Bea dan Cukai Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Barat (DJBC-Kalbagbar).
- e. Melakukan inventarisasi data-data Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau melalui Koordinasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI.
- f. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (secara virtual) dalam rangka Penggunaan dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta dengan Badan Pendapatan maupun Badan Keuangan pada Pemerintah Kab/Kota bersama Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Direktorat Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan RI dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI,
- g. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Pembinaan Pengelolaan DBH-CHT dalam rangka penggunaan anggaran DBH-CHT oleh Pemerintah Kab/Kota terutama Kabupaten Bengkayang sebagai Kabupaten Penghasil untuk dapat mengalokasikan pembagian DBH-CHT ke dalam kegiatan Penegakan Hukum dan kegiatannya dapat terimplementasikan yang bersinergi dengan KPPBC Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- h. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Pelaporan Penggunaan DBH-CHT oleh Pemerintah Kab/Kota agar tertib sesuai mekanisme pelaporan



dan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat menindaklanjutinya dengan melaksanakan Konsolidasi hasil laporan penggunaan DBH-CHT Kab/Kota Se-Kalimantan Barat.

- i. Melakukan inventarisasi data-data Pertambangan pada Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara melalui Koordinasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM Provinsi Kalimantan Barat.
- j. Melaksanakan Rapat Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM Provinsi Kalimantan Barat dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Keuangan RI dan Biro Keuangan pada Kementerian ESDM.
- k. Melaksanakan Rapat Koordinasi Perencanaan Usulan Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM Provinsi Kalimantan Barat dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Keuangan RI dan Biro Keuangan pada Kementerian ESDM.
- l. Melakukan inventarisasi data-data Pemanfaatan pada Sumber Daya Alam Kehutanan dan data rekonsiliasi penerimaan pemanfaatan hutan melalui Koordinasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
- m. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Kegiatan Sumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dengan Biro Perencanaan Kementerian LHK RI serta Direktorat Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan RI.
- n. Rapat Koordinasi Kebijakan Pengelolaan DBH dan DAU berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah bersama Badan Pendapatan Daerah



Provinsi Kalimantan Barat, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat/ Badan Pendapatan Daerah/Badan Keuangan Daerah seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Indonesia dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Direktorat Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kemendagri RI, Direktorat Dana Transfer Umum Kemenkeu RI, Direktorat PNBPD SDA dan Kekayaan Alam Dipisahkan Kemenkeu RI, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

- o. Melakukan Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang “Forum Kerjasama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Barat dan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Kalbar.
- p. Nota Kesepakatan bermaksud untuk membentuk wadah sebagai sarana Konsultasi, Koordinasi, Asistensi, Rekonsiliasi dan Pendampingan dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat, serta bertujuan untuk dapat Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- q. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian Terkait di Pusat untuk mengetahui regulasi dan kebijakan ter-update, mensinkronkan data, mengakurasi data dan mendorong peningkatan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- r. Monitoring dan Evaluasi dengan melakukan koordinasi dan melaksanakan Rapat terkait Capaian Realisasi Dana Perimbangan dalam Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Fisik/Non-Fisik (DAK-F/NF) secara rutin berdasarkan Peningkatan Capaian Realisasi per-Triwulan.

E. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan



pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah dari Pendapatan Hibah Tahun 2022, Bapenda Provinsi Kalimantan Barat ikut mendorong pelaksanaan realisasi dari Program Hibah yang ada dengan melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penerima Hibah.

Target Hibah Tahun 2022 adalah sebesar Rp.59.408.038.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.59.117.535.980,00 (99,51%) yang terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat ini terdiri dari:

Target Tahun 2022 sebesar Rp.57.105.958.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.56.806.235.980,00 (99,48%) dengan rincian sebagai berikut:

a. Program Readsi

Target Tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.291.958.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.047.994.200,00 (81,12%).

b. Program Hibah Jalan Daerah

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-8/MK.7/2021 tentang Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) TA 2022 adalah sebesar Rp.55.814.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.55.758.241.780,- (99,90%). Sisa anggaran yang tidak terserap adalah sebesar Rp.55.758.220,-- dikarenakan ada 1 (satu) ouput Dinas PUPR yang tidak terpenuhi.

Hal ini disebabkan karena survey kondisi jalan yang diminta menggunakan aplikasi Province Kabupaten Road Management System (PKRMS) harus dilakukan terhadap seluruh ruas jalan provinsi, sedangkan PUPR hanya melakukannya pada ruas jalan Program Hibah Jalan Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
Target Tahun 2022 sebesar Rp.2.302.080.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.311.300.000,00 (100,40%) dengan rincian sebagai berikut:

a. PT. Jasa Raharja

Target yang ditetapkan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp.2.302.080.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.302.080.000,00(100%) dengan penjelasan sebagai berikut:



- 1) Bahwa sebagai BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berikut peraturan pelaksanaannya serta mengemban tugas sesuai Perpres Nomor 5 Tahun 2015, Jasa Raharja melaksanakan kegiatan operasional menghimpun Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) dalam mekanisme Kantor Bersama Sistem Manunggal di Bawah Satu Atap (KB Samsat);
 - 2) Jasa Raharja yang mendapatkan tugas menghimpun SWDKLLAJ dalam mekanisme KB Samsat tersebut bermaksud untuk berperan serta/berkontribusi mendukung optimalisasi pelayanan dan penerimaan samsat di dalam operasionalisasi KB Samsat di Provinsi Kalbar;
 - 3) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan dalam rangka kepastian penganggaran, terhadap penerimaan Pemerintah Daerah dari pihak lain yang diterima sebagai Hibah Daerah maka dituangkan dalam naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - 4) Pencairan uang Hibah setiap bulannya diperhitungkan secara proporsional dari jumlah sebagaimana dimaksud diatas dan yang disetor ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
 - 5) Dasar hukum pemberian hibah daerah kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan Naskah perjanjian Hibah Antara PT. Jasa Raharja Cabang Kalimantan Barat Dengan badan Pendapatan Ddaerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: P/3/SP/2022 dan Nomor 972/250/BAPENDA-D tanggal 15 Maret 2022;
 - 6) Sebagaimana dimaksud poin 5, diharapkan Dana Hibah Daerah dari Jasa Raharja tersebut dapat dipergunakan oleh Bapenda Provinsi Kalimantan Barat untuk menunjang kegiatan operasional Samsat sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku di Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- b. PT. Jasa Raharja Putera
- PT. Jasa Raharja Putera pada Tahun 2022 tidak ada targetnya, tetapi ada realisasi sebesar Rp.9.220.000,00 dikarenakan dilakukan pembukaan



Border PLBN (Entikong, Aruk) dimulai dari bulan April 2022 dan PLBN Badau dibuka mulai 1 Juli 2022 dengan jumlah kendaraan yang masuk dari Malaysia sebanyak 2.854 unit dengan PAD sebesar Rp.10.000,-/unit kendaraan s/d Desember 2022.

Adapun rincian penerimaan dari Border PLBN yaitu:

- 1) PLBN Aruk (Biawak) sebesar Rp.4.380.000,00
- 2) PLBN Entikong (Tebedu) sebesar Rp.3.950.000,00
- 3) PLBN Badau (Lubuk Antu) sebesar Rp.890.000,00

F. Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Daerah dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.5.658.492.045.088,00 dengan realisasi sebesar Rp.6.103.471.793.098,21 (107,86%). Berikut gambaran Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 yaitu:

Tabel 1.6

Realisasi Penerimaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Ta.2022

No.	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	
			(Rp)	(%)
	PENDAPATAN DAERAH	5.658.492.045.088,00	6.103.471.493.098,21	107,86
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.883.228.824.088,00	3.217.812.121.331,21	111,60
1.	Pajak Daerah	2.427.161.737.441,00	2.671.657.640.818,00	110,07
2.	Retribusi Daerah	9.313.488.000,00	14.328.268.392,00	153,84
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	101.025.671.578,00	101.122.147.953,00	100,10
4.	Lain-Lain PAD yang Sah	345.727.927.069,00	430.704.064.168,21	124,58
II.	PENDAPATAN TRANSFER	2.715.855.183.000,00	2.826.541.835.787,00	104,08
1.	Dana Perimbangan	2.699.524.533.000,00	2.810.211.185.787,00	104,10
a.	Dana Bagi Hasil (DBH)	256.965.850.000,00	410.149.687.562,00	159,61
b.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.572.247.838.000,00	1.553.304.284.810,00	98,80
c.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	870.310.845.000,00	846.757.213.415,00	97,29
2.	Dana Insentif Daerah (DID)	16.330.650.000,00	16.330.650.000,00	100,00
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59.408.038.000,00	59.117.353.980,00	99,51
1.	Hibah	59.408.038.000,00	59.117.353.980,00	99,51
a.	Hibah Pemerintah Pusat	57.105.958.000,00	56.806.235.980,00	99,48
b.	Hibah dari Badan /Lembaga /Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	2.302.080.000,00	2.311.300.000,00	100,40

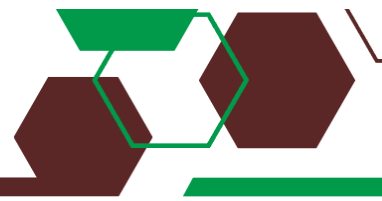
Sumber: LRA per tanggal 7 Februari 2023

1.1.1.3 Pengelolaan Belanja Daerah

A. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Arah dan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2021 masih menitikberatkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya alokasi anggaran di bidang infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang tentang

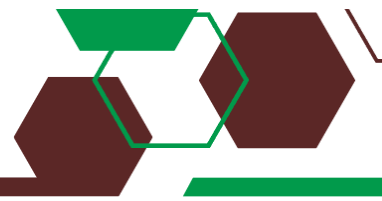


Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, mempunyai tugas: merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, serta menyusun laporan keuangan daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan keuangan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022.

Kurun waktu Tahun 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah telah memfasilitasi penerbitan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

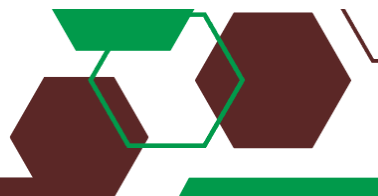
1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 8 November 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
3. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022.
5. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tanggal 21 April 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022.
6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023.
7. Peraturan Gubernur Nomor xx Tahun 2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.



8. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022.
9. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023.
10. Peraturan Gubernur Nomor xx Tahun 2022 tanggal xx 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.
11. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tanggal 7 September 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022.
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 81 Tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021.
13. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2022 Tanggal 8 November 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
14. Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2022 tanggal 16 November 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Dalam melaksanakan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, khususnya penganggaran, pada Tahun 2022 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD telah membahas bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 Nomor: 903/3268/TAPD dan Nomor: 900/191/DPRD-B Tanggal 7 September 2022 dan Perubahan PPAS Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 Nomor: 903/3269/TAPD dan Nomor: 900/192/DPRD-B tanggal 7 September 2022

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2022 merupakan arah dan sasaran kebijakan dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk



dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD), serta merupakan implementasi dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Sebagai tindak lanjut dari Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka telah disusun pula Perubahan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS). PPAS adalah Program Prioritas dan patokan batas maksimal anggaran sementara yang diberikan kepada masing-masing SKPD untuk dituangkan dalam program dan kegiatan yang kemudian dibahas bersama antara Eksekutif dan Legislatif

Adapun maksud dan tujuan penyusunan PPAS adalah sebagai berikut:

1. Membangun sinergi program pembangunan serta mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
2. Menggambarkan perkembangan asumsi ekonomi makro dan implikasinya terhadap sumber pendanaan pembangunan;
3. Untuk menampung program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan, organisasi, sasaran dan target kinerja serta pagu anggaran indikatif.

Sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

B. Target dan Realisasi Belanja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 8 November 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2022 tanggal 16 November 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, maka struktur APBD dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp5.392.933.970.527 (Lima Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) setelah perubahan menjadi sebesar Rp5.658.492.045.088 (Lima Triliun Enam Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp265.558.074.561 (Dua Ratus Enam Puluh Lima

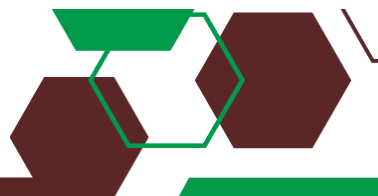


Miliar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah). Sedangkan realisasi pendapatan adalah sebesar Rp6.103.471.493.098,21 (Enam Triliun Seratus Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Sembilan Puluh Delapan Rupiah Koma Dua Satu) atau 107,86% (*unaudited*)

Belanja Daerah pada APBD Tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp5.684.417.499.951 (Lima Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) setelah perubahan menjadi sebesar Rp5.994.652.629.595 (Lima Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), bertambah sebesar Rp310.235.129.644 (Tiga Ratus Sepuluh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), dengan realisasi belanja pada Laporan Keuangan *unaudited* sebesar Rp5.726.863.899.070,96 (Lima Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Rupiah Koma Sembilan Enam) atau 95,53%.

Pembiayaan Daerah, pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021 semula ditargetkan sebesar Rp341.483.529.424 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), berubah menjadi sebesar Rp386.160.584.507 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Seratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah) sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 audited. Kemudian untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah, pada APBD dianggarkan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah), dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah) atau mencapai 100%.

Berdasarkan hasil penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 (*unaudited*) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022 adalah sebesar Rp712.768.098.535,12 (Tujuh Ratus Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah Koma Satu Dua).



Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berada pada peringkat keempat dari 34 Provinsi dalam pencapaian target pendapatan dan serapan belanja pada Tahun 2022.

Dari sisi belanja daerah, Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran pada 4 (empat) kelompok dalam belanja yaitu:

1. Belanja Operasi, yang digunakan untuk:
Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
2. Belanja Modal, yang digunakan untuk:
Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer, yang digunakan untuk:
Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022 dirumuskan dengan tetap memperhatikan ketujuh prioritas pembangunan daerah yaitu: meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat; meningkatnya kecerdasan sumberdaya manusia; meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; peningkatan sumber daya aparatur dan pelayanan publik; meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar; peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan; dan meningkatnya pemerataan pembangunan, keadilan, aman, damai serta ketahanan budaya.

Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.684.417.499.951 pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp5.994.652.629.595, bertambah sebesar Rp310.235.129.644. Adapun realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.726.863.899.070,96 atau 95,53%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, dialokasikan sebesar Rp3.743.692.395.527, dengan realisasi sebesar Rp3.542.937.437.772,38 atau 94,64%;
2. Belanja Modal, dialokasikan sebesar Rp1.045.718.637.804, dengan realisasi sebesar Rp1.003.966.698.357,78 atau 96,01%;
3. Belanja Tidak Terduga, dialokasikan sebesar Rp9.600.504.054, dengan realisasi sebesar Rp 465.740.000 atau 4,85%;



4. Belanja Transfer, dialokasikan sebesar Rp1.195.641.092.210, dengan realisasi sebesar Rp1.179.494.022.940,80 atau 98,65%.

Berkenaan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah atau Urusan Desentralisasi, terutama penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, pada tahun 2022 telah dianggarkan belanja untuk mendukung terselenggaranya kedua urusan tersebut dengan total anggaran sebesar Rp3.966.369.994.129. Dengan rincian untuk Urusan Wajib sebesar Rp3.780.664.260.823 dengan realisasi sebesar Rp3.581.142.074.749,02 dan Urusan Pilihan sebesar Rp185.705.733.306 dengan realisasi sebesar Rp169.904.699.622

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari SiLPA Tahun 2021 sebesar Rp386.160.584.507, yang selanjutnya digunakan untuk penyertaan modal atau investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp50.000.000.000. Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah, maka terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp712.768.098.535,12, dan SILPA tersebut akan dianggarkan sebagai Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk realisasi Pendapatan Tahun 2022 berdasarkan data unaudited dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 1.7
Realisasi Pendapatan APBD

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	2.883.228.824.088,00	3.217.812.121.331,21
2	Pendapatan Transfer	2.715.855.183.000,00	2.826.541.835.787,00
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	59.408.038.000,00	59.117.535.980,00
Total Pendapatan		5.658.492.045.088,00	6.103.471.493.098,21

Sumber: LRA 31 Desember 2022 (unaudited)

Adapun Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 (unaudited) sebesar Rp5.994.652.629.595,00 dengan realisasi sebesar Rp5.726.863.899.070,96 atau sebesar 95,53%, terdiri dari:

Tabel 1.8
Belanja Operasi Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.600.973.211.426,00	1.510.988.315.663,00
2	Belanja Barang	1.886.144.683.063,00	1.785.369.030.913,88
3	Hibah	248.115.707.956,00	238.155.740.850,50
4	Bantuan Sosial	8.458.793.082,00	8.424.350.345,00
Total		3.743.692.395.527,00	3.542.937.437.772,38

Sumber: LRA 31 Desember 2022 (unaudited)



Tabel 1.9
Belanja Modal Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tanah	2.369.416.004,00	194.000.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	234.208.402.243,00	224.930.925.535,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	430.016.383.756,00	413.421.870.792,50
4	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	353.341.760.291,00	340.270.448.258,28
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	21.116.318.419,00	20.890.386.056,00
6	Belanja Aset Lainnya	4.666.357.091,00	4.259.067.716,00
Total		1.045.718.637.804,00	1.003.966.698.357,78

Sumber: LRA 31 Desember 2022 (unaudited)

Tabel 1.10
Belanja Tidak Terduga Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	9.600.504.054,00	465.740.000,00

Sumber: LRA 31 Desember 2022 (unaudited)

Tabel 1.11
Belanja Transfer Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kab/Kota dan Desa	1.148.161.092.210,00	1.140.663.296.568,80
2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Kab/Kota	47.480.000.000,00	38.830.726.372,00
Total Belanja Transfer		1.195.641.092.210,00	1.179.494.022.940,80

Sumber: LRA 31 Desember 2022 (unaudited)

Tabel 1.12
Pembiayaan Tahun 2022

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan (silpa)	386.160.584.507,00	386.160.504.507,87
2	Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal)	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
Pembiayaan Netto		336.160.584.507,00	336.160.504.507,87

Sumber: LRA 31 Desember 2022 (unaudited)



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022



Tabel 1.13
 Perkembangan Struktur APBD menurut jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
 Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)						
		Murni	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Pergeseran 3	Pergeseran 4	Perubahan	Pergeseran Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PENDAPATAN DAERAH							
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.672.831.356.527	2.672.831.356.527	2.672.831.356.527	2.672.831.356.527	2.672.831.356.527	2.883.228.824.088	2.883.228.824.088
4.1.01	Pajak Daerah	2.343.271.581.063	2.343.271.581.063	2.343.271.581.063	2.343.271.581.063	2.343.271.581.063	2.427.161.737.441	2.427.161.737.441
4.1.02	Retribusi Daerah	13.447.743.000	13.447.743.000	13.447.743.000	13.447.743.000	13.447.743.000	9.313.488.000	9.313.488.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	96.368.227.301	96.368.227.301	96.368.227.301	96.368.227.301	96.368.227.301	101.025.671.578	101.025.671.578
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	219.743.805.163	219.743.805.163	219.743.805.163	219.743.805.163	219.743.805.163	345.727.927.069	345.727.927.069
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.660.721.446.000	2.660.721.446.000	2.660.721.446.000	2.660.721.446.000	2.660.721.446.000	2.715.855.183.000	2.715.855.183.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.660.721.446.000	2.660.721.446.000	2.660.721.446.000	2.660.721.446.000	2.660.721.446.000	2.715.855.183.000	2.715.855.183.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59.381.168.000	59.381.168.000	59.381.168.000	59.381.168.000	59.381.168.000	59.408.038.000	59.408.038.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	59.381.168.000	59.381.168.000	59.381.168.000	59.381.168.000	59.381.168.000	59.408.038.000	59.408.038.000
	Jumlah Pendapatan	5.392.933.970.527	5.392.933.970.527	5.392.933.970.527	5.392.933.970.527	5.392.933.970.527	5.658.492.045.088	5.658.492.045.088
5	BELANJA DAERAH							
5.1	BELANJA OPERASI	3.605.734.765.576	3.616.722.974.773	3.582.612.427.477	3.621.387.186.685	3.629.650.892.573	3.710.462.990.531	3.743.692.395.527
5.1.01	Belanja Pegawai	1.634.880.100.472	1.630.960.186.825	1.634.370.413.053	1.655.371.093.053	1.655.371.093.053	1.602.697.490.432	1.600.973.211.426
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.733.927.884.170	1.728.836.007.014	1.696.299.744.939	1.716.091.205.067	1.724.354.910.955	1.844.968.249.101	1.886.144.683.063
5.1.05	Belanja Hibah	229.333.078.852	249.333.078.852	244.348.567.403	242.331.186.483	242.331.186.483	254.338.457.916	248.115.707.956
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.593.702.082	7.593.702.082	7.593.702.082	7.593.702.082	7.593.702.082	8.458.793.082	8.458.793.082
5.2	BELANJA MODAL	896.649.751.630	885.661.542.433	963.222.089.729	976.942.200.906	977.459.758.006	1.078.698.042.800	1.045.718.637.804
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.771.900.904	2.771.900.904	2.771.900.904	2.771.900.904	2.771.900.904	2.369.416.004	2.369.416.004
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.774.868.819	136.414.849.696	167.102.878.141	185.050.700.406	185.568.257.506	233.415.899.658	234.208.402.243
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.351.866.782	380.797.226.708	399.624.205.559	394.927.479.471	394.927.479.471	438.125.805.756	430.016.383.756
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	315.419.087.554	315.293.087.554	343.694.627.554	343.794.627.554	343.794.627.554	353.341.760.291	353.341.760.291
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.814.076.471	49.866.526.471	45.727.839.412	45.487.874.480	45.487.874.480	50.905.769.991	21.116.318.419
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	517.951.100	517.951.100	4.300.638.159	4.909.618.091	4.909.618.091	539.391.100	4.666.357.091
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	18.631.767.042	9.850.504.054	9.850.504.054	9.600.504.054
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	18.631.767.042	9.850.504.054	9.850.504.054	9.600.504.054
5.4	BELANJA TRANSFER	1.152.032.982.745	1.152.032.982.745	1.152.032.982.745	1.152.032.982.745	1.152.032.982.745	1.195.641.092.210	1.195.641.092.210
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.089.637.982.745	1.089.637.982.745	1.089.637.982.745	1.089.637.982.745	1.089.637.982.745	1.148.161.092.210	1.148.161.092.210



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)						
		Murni	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Pergeseran 3	Pergeseran 4	Perubahan	Pergeseran Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	62.395.000.000	62.395.000.000	62.395.000.000	62.395.000.000	62.395.000.000	47.480.000.000	47.480.000.000
	Jumlah Belanja	5.684.417.499.951	5.684.417.499.951	5.727.867.499.951	5.768.994.137.378	5.768.994.137.378	5.994.652.629.595	5.994.652.629.595
	Total Surplus/(Defisit)	-291.483.529.424	-291.483.529.424	-334.933.529.424	-376.060.166.851	-376.060.166.851	-336.160.584.507	-336.160.584.507
6	PEMBIAYAAN DAERAH							
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	341.483.529.424	341.483.529.424	384.933.529.424	426.060.166.851	426.060.166.851	386.160.584.507	386.160.584.507
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	341.483.529.424	341.483.529.424	384.933.529.424	426.060.166.851	426.060.166.851	386.160.584.507	386.160.584.507
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	341.483.529.424	341.483.529.424	384.933.529.424	426.060.166.851	426.060.166.851	386.160.584.507	386.160.584.507
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	Pembiayaan Netto	291.483.529.424	291.483.529.424	334.933.529.424	376.060.166.851	376.060.166.851	336.160.584.507	336.160.584.507
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: APBD TA 2022 (data diolah)



Keterangan:

1. APBD Murni:

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2021 tentang APBD TA 2022 tanggal 31 Desember 2021.

Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2021 tentang penjabaran APBD TA 2022 tanggal 31 Desember 2021.

2. Pergeseran 1:

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2021 tentang penjabaran APBD TA 2022 tanggal 24 Februari 2022.

3. Pergeseran 2:

Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2021 tentang penjabaran APBD TA 2022 tanggal 21 April 2022.

4. Pergeseran 3:

Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2021 tentang penjabaran APBD TA 2022 tanggal 5 Juli 2022.

5. Pergeseran 4:

Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2021 tentang penjabaran APBD TA 2022 tanggal 7 September 2022.

6. Perubahan APBD

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD TA 2022 tanggal 8 November 2022.

Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2022 tentang penjabaran Perubahan APBD TA 2022 tanggal 8 November 2022.

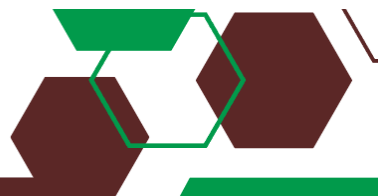
7. Pergeseran Perubahan:

Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2022 tentang penjabaran Perubahan APBD TA 2022 tanggal 16 November 2022.



Tabel 1.14
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 2022

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.672.831.356.527	2.883.228.824.088	210.397.467.561
Pajak Daerah	2.343.271.581.063	2.427.161.737.441	83.890.156.378
Retribusi Daerah	13.447.743.000	9.313.488.000	(4.134.255.000)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	96.368.227.301	101.025.671.578	4.657.444.277
Lain-lain PAD yang Sah	219.743.805.163	345.727.927.069	125.984.121.906
PENDAPATAN TRANSFER	2.660.721.446.000	2.715.855.183.000	55.133.737.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.660.721.446.000	2.715.855.183.000	55.133.737.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59.381.168.000	59.408.038.000	26.870.000
Pendapatan Hibah	59.381.168.000	59.408.038.000	26.870.000
JUMLAH PENDAPATAN	5.392.933.970.527	5.658.492.045.088	265.558.074.561
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI	3.605.734.765.576	3.710.462.990.531	104.728.224.955
Belanja Pegawai	1.634.880.100.472	1.602.697.490.432	(32.182.610.040)
Belanja Barang dan Jasa	1.733.927.884.170	1.844.968.249.101	111.040.364.931
Belanja Hibah	229.333.078.852	254.338.457.916	25.005.379.064
Belanja Bantuan Sosial	7.593.702.082	8.458.793.082	865.091.000
BELANJA MODAL	896.649.751.630	1.078.698.042.800	182.048.291.170
Belanja Modal Tanah	2.771.900.904	2.369.416.004	(402.484.900)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.774.868.819	233.415.899.658	95.641.030.839
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.351.866.782	438.125.805.756	47.773.938.974
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	315.419.087.554	353.341.760.291	37.922.672.737
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.814.076.471	50.905.769.991	1.091.693.520
Belanja Modal Aset Lainnya	517.951.100	539.391.100	21.440.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	9.850.504.054	(20.149.495.946)
Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	9.850.504.054	(20.149.495.946)
BELANJA TRANSFER	1.152.032.982.745	1.195.641.092.210	43.608.109.465
Belanja Bagi Hasil	1.089.637.982.745	1.148.161.092.210	58.523.109.465
Belanja Bantuan Keuangan	62.395.000.000	47.480.000.000	(14.915.000.000)
JUMLAH BELANJA	5.684.417.499.951	5.994.652.629.595	310.235.129.644
SURPLUS (DEFISIT)	(291.483.529.424)	(336.160.584.507)	(44.677.055.083)



Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	341.483.529.424	386.160.584.507	44.677.055.083
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	341.483.529.424	386.160.584.507	44.677.055.083
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	341.483.529.424	386.160.584.507	44.677.055.083
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	50.000.000.000	0
Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000	50.000.000.000	0
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	50.000.000.000	0
PEMBIAYAAN NETTO	291.483.529.424	336.160.584.507	44.677.055.083
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0

Sumber: Lampiran 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022

1.1.1.4 Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pelaksanaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2022 mengalami pergeseran anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah untuk kondisi darurat termasuk keperluan mendesak. Sepanjang tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan beberapa perubahan penjabaran APBD baik pada pelaksanaan APBD murni sebanyak 4 (empat) kali perubahan penjabaran maupun APBD perubahan sebanyak 1 (satu) kali perubahan penjabaran.

Berikut penjelasan berkenaan dengan perubahan penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022:

A. APBD Murni Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022

APBD murni tahun anggaran 2022 ditetapkan melalui **Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 216 Tahun 2021** dengan target pendapatan sebesar 5.39 Trilyun Rupiah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,67 Trilyun Rupiah, Pendapatan Transfer sebesar 2,66 Trilyun Rupiah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 59,38 Milyar Rupiah. Selanjutnya, untuk belanja daerah dialokasikan sebesar 5,68 Trilyun Rupiah yang terdiri dari Operasi sebesar 3,60 Trilyun Rupiah, belanja Modal sebesar 896 Milyar Rupiah, Belanja Tidak Terduga sebesar 30 Milyar Rupiah dan Belanja Transfer sebesar 1,15



Trilyun Rupiah serta Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar 341,48 Milyar Rupiah dan pengeluaran pembiayaan sebesar 50 Milyar Rupiah, sehingga volume total APBD murni menjadi sebesar 5,73 Trilyun Rupiah. Uraian terkait penjelasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.15

Penjabaran APBD Murni Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.672.831.356.527
4.1.01	Pajak Daerah	2.343.271.581.063
4.1.02	Retribusi Daerah	13.447.743.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	96.368.227.301
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	219.743.805.163
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.660.721.446.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.660.721.446.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59.381.168.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	59.381.168.000
	Jumlah Pendapatan	5.392.933.970.527
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	3.605.734.765.576
5.1.01	Belanja Pegawai	1.634.880.100.472
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.733.927.884.170
5.1.05	Belanja Hibah	229.333.078.852
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.593.702.082
5.2	BELANJA MODAL	896.649.751.630
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.771.900.904
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.774.868.819
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.351.866.782
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	315.419.087.554
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.814.076.471
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	517.951.100
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	1.152.032.982.745
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.089.637.982.745
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	62.395.000.000
	Jumlah Belanja	5.684.417.499.951
	Total Surplus/(Defisit)	(291.483.529.424)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	341.483.529.424
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	341.483.529.424
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	341.483.529.424
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000
	Pembiayaan Netto	291.483.529.424
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Sumber: Lampiran 1 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021



1. Penjabaran Pergeseran ke-1 (Satu) APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022

Perubahan ke-1 Penjabaran APBD ditetapkan melalui **Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2022 pada tanggal 24 Februari 2022** dengan Target pendapatan sebesar 5,39 Trilyun Rupiah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,67 Trilyun Rupiah, Pendapatan Transfer sebesar 2,66 Trilyun Rupiah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 59,38 Milyar Rupiah. Selanjutnya untuk belanja daerah dialokasikan sebesar 5,68 Trilyun Rupiah yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar 3,61 Trilyun Rupiah, Belanja Modal sebesar 885 Milyar, Belanja Tidak Terduga 30 Milyar dan Belanja Transfer sebesar 1,15 Trilyun Rupiah. Pembiayaan Netto sebesar 291 Milyar dengan penerimaan pembiayaan sebesar 341 Miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar 50 Milyar.

Hal-hal yang menyebabkan perubahan ke-1 penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat yaitu terbitnya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 serta pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Uraian terkait dengan penjelasan di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.16
Perubahan ke-1 Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.672.831.356.527	2.672.831.356.527	0	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	2.343.271.581.063	2.343.271.581.063	0	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	13.447.743.000	13.447.743.000	0	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	96.368.227.301	96.368.227.301	0	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	219.743.805.163	219.743.805.163	0	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.660.721.446.000	2.660.721.446.000	0	0,00



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.660.721.446.000	2.660.721.446.000	0	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59.381.168.000	59.381.168.000	0	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	59.381.168.000	59.381.168.000	0	0,00
	Jumlah Pendapatan	5.392.933.970.527	5.392.933.970.527	0	0,00
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	3.605.734.765.576	3.616.722.974.773	10.988.209.197	0,30
5.1.01	Belanja Pegawai	1.634.880.100.472	1.630.960.186.825	(3.919.913.647)	(0,24)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.733.927.884.170	1.728.836.007.014	(5.091.877.156)	(0,29)
5.1.05	Belanja Hibah	229.333.078.852	249.333.078.852	20.000.000.000	8,72
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.593.702.082	7.593.702.082	0	0,00
5.2	BELANJA MODAL	896.649.751.630	885.661.542.433	(10.988.209.197)	(1,23)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.771.900.904	2.771.900.904	0	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.774.868.819	136.414.849.696	(1.360.019.123)	(0,99)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.351.866.782	380.797.226.708	(9.554.640.074)	(2,45)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	315.419.087.554	315.293.087.554	(126.000.000)	(0,04)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.814.076.471	49.866.526.471	52.450.000	0,11
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	517.951.100	517.951.100	0	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.152.032.982.745	1.152.032.982.745	0	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.089.637.982.745	1.089.637.982.745	0	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	62.395.000.000	62.395.000.000	0	0,00
	Jumlah Belanja	5.684.417.499.951	5.684.417.499.951	0	0,00
	Total Surplus/(Defisit)	(291.483.529.424)	(291.483.529.424)	0	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	341.483.529.424	341.483.529.424	0	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	341.483.529.424	341.483.529.424	0	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	341.483.529.424	341.483.529.424	0	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00



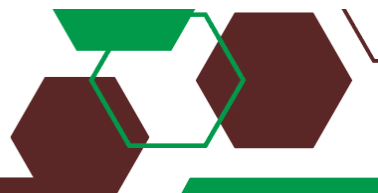
Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Pembiayaan Netto	291.483.529.424	291.483.529.424	0	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0,00

2. Penjabaran Pergeseran ke-2 (Dua) APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022

Perubahan ke-2 Penjabaran APBD ditetapkan melalui **Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2022 pada tanggal 24 Februari 2022** dengan Target pendapatan sebesar 5,39 Trilyun Rupiah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,67 Trilyun Rupiah, Pendapatan Transfer sebesar 2,66 Trilyun Rupiah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 59,38 Milyar Rupiah. Selanjutnya untuk belanja daerah dialokasikan sebesar 5,72 Trilyun Rupiah yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar 3,58 Trilyun Rupiah, Belanja Modal sebesar 963 Milyar, Belanja Tidak Terduga 30 Milyar dan Belanja Transfer sebesar 1,15 Trilyun Rupiah. Pembiayaan Netto sebesar 334 Milyar dengan penerimaan pembiayaan sebesar 384 Miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar 50 Milyar. Terdapat selisih perubahan anggaran sebesar 43,45 Milyar Rupiah, sehingga volume APBD pada perubahan ke-2 penjabaran menjadi sebesar 5,77 Trilyun Rupiah.

Perubahan ke-2 penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat dilakukan untuk melaksanakan rekomendasi LHP BPK RI melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 903/1333/BKAD-B tentang Pergeseran Anggaran Belanja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022, Penggunaan SiLPA Tahun 2021 BLUD oleh RSUD dr Soedarso untuk pengembangan rumah sakit serta penganggaran kewajiban pihak ketiga (utang belanja) yang telah diriviu oleh APIP.

Uraian terkait dengan penjelasan di atas dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1.17
Perubahan ke-2 Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.672.831.356.527	2.672.831.356.527	0	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	2.343.271.581.063	2.343.271.581.063	0	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	13.447.743.000	13.447.743.000	0	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	96.368.227.301	96.368.227.301	0	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	219.743.805.163	219.743.805.163	0	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.660.721.446.000	2.660.721.446.000	0	0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.660.721.446.000	2.660.721.446.000	0	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59.381.168.000	59.381.168.000	0	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	59.381.168.000	59.381.168.000	0	0,00
	Jumlah Pendapatan	5.392.933.970.527	5.392.933.970.527	0	0,00
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	3.605.734.765.576	3.582.612.427.477	(23.122.338.099)	(0,64)
5.1.01	Belanja Pegawai	1.634.880.100.472	1.634.370.413.053	(509.687.419)	(0,03)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.733.927.884.170	1.696.299.744.939	(37.628.139.231)	(2,17)
5.1.05	Belanja Hibah	229.333.078.852	244.348.567.403	15.015.488.551	6,55
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.593.702.082	7.593.702.082	0	0,00
5.2	BELANJA MODAL	896.649.751.630	963.222.089.729	66.572.338.099	7,42
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.771.900.904	2.771.900.904	0	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.774.868.819	167.102.878.141	29.328.009.322	21,29
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.351.866.782	399.624.205.559	9.272.338.777	2,38
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	315.419.087.554	343.694.627.554	28.275.540.000	8,96
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.814.076.471	45.727.839.412	(4.086.237.059)	(8,20)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	517.951.100	4.300.638.159	3.782.687.059	730,32
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.152.032.982.745	1.152.032.982.745	0	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.089.637.982.745	1.089.637.982.745	0	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	62.395.000.000	62.395.000.000	0	0,00



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Belanja	5.684.417.499.951	5.727.867.499.951	43.450.000.000	0,76
	Total Surplus/(Defisit)	(291.483.529.424)	(334.933.529.424)	(43.450.000.000)	14,91
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	341.483.529.424	384.933.529.424	43.450.000.000	12,72
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	341.483.529.424	384.933.529.424	43.450.000.000	12,72
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	341.483.529.424	384.933.529.424	43.450.000.000	12,72
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Pembiayaan Netto	291.483.529.424	334.933.529.424	43.450.000.000	14,91
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0,00

3. Penjabaran Pergeseran ke-3 (Tiga) APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022

Perubahan ke-3 Penjabaran APBD ditetapkan melalui **Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 46 Tahun 2022 pada tanggal 5 Juli 2022** dengan Target pendapatan sebesar 5,39 Trilyun Rupiah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,67 Trilyun Rupiah, Pendapatan Transfer sebesar 2,66 Trilyun Rupiah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 59,38 Milyar Rupiah. Selanjutnya untuk belanja daerah dialokasikan sebesar 5,76 Trilyun Rupiah yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar 3,62 Trilyun Rupiah, Belanja Modal sebesar 976 Milyar, Belanja Tidak Terduga 18,63 Milyar dan Belanja Transfer sebesar 1,15 Trilyun Rupiah. Pembiayaan Netto sebesar 376 Milyar dengan penerimaan pembiayaan sebesar 426 Miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar 50 Milyar. Terdapat selisih perubahan anggaran sebesar 84,57 Milyar Rupiah, sehingga volume APBD pada perubahan ke-3 penjabaran menjadi sebesar 5,81 Trilyun Rupiah.

Perubahan ke-3 penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat disebabkan oleh pengalokasian anggaran pelaksanaan BIMP EAGA sesuai Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik

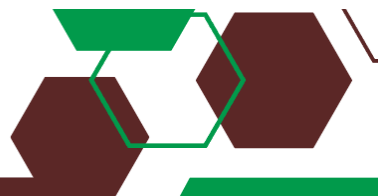


Indonesia Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Nomor: KSI.04.02/139/D.VII.M.EKON/11/2021 Perihal Permohonan Kesediaan Menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA Ke-25 Tahun 2022, Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 120.23/0383/PEM Hal Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Tuan Rumah Pertemuan Tingkat Menteri Ke-25 Kerja Sama BIMP-EAGA Tahun 2022, pergeseran anggaran DAK Bidang Pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 dan penggunaan SiLPA Tahun 2021 BLUD oleh RSUD dr Soedarso untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Tenaga RS.

Uraian terkait dengan penjelasan di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.18
Perubahan ke-3 Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.672.831.356.527	2.672.831.356.527	0	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	2.343.271.581.063	2.343.271.581.063	0	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	13.447.743.000	13.447.743.000	0	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	96.368.227.301	96.368.227.301	0	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	219.743.805.163	219.743.805.163	0	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.660.721.446.000	2.660.721.446.000	0	0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.660.721.446.000	2.660.721.446.000	0	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59.381.168.000	59.381.168.000	0	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	59.381.168.000	59.381.168.000	0	0,00
	Jumlah Pendapatan	5.392.933.970.527	5.392.933.970.527	0	0,00
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	3.605.734.765.576	3.621.387.186.685	15.652.421.109	0,43
5.1.01	Belanja Pegawai	1.634.880.100.472	1.655.371.093.053	20.490.992.581	1,25
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.733.927.884.170	1.716.091.205.067	(17.836.679.103)	(1,03)
5.1.05	Belanja Hibah	229.333.078.852	242.331.186.483	12.998.107.631	5,67



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.593.702.082	7.593.702.082	0	0,00
5.2	BELANJA MODAL	896.649.751.630	976.942.200.906	80.292.449.276	8,95
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.771.900.904	2.771.900.904	0	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.774.868.819	185.050.700.406	47.275.831.587	34,31
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.351.866.782	394.927.479.471	4.575.612.689	1,17
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	315.419.087.554	343.794.627.554	28.375.540.000	9,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.814.076.471	45.487.874.480	(4.326.201.991)	(8,68)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	517.951.100	4.909.618.091	4.391.666.991	847,89
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	18.631.767.042	(11.368.232.958)	(37,89)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	18.631.767.042	(11.368.232.958)	(37,89)
5.4	BELANJA TRANSFER	1.152.032.982.745	1.152.032.982.745	0	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.089.637.982.745	1.089.637.982.745	0	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	62.395.000.000	62.395.000.000	0	0,00
	Jumlah Belanja	5.684.417.499.951	5.768.994.137.378	84.576.637.427	1,49
	Total Surplus/(Defisit)	(291.483.529.424)	(376.060.166.851)	(84.576.637.427)	29,02
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	341.483.529.424	426.060.166.851	84.576.637.427	24,77
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	341.483.529.424	426.060.166.851	84.576.637.427	24,77
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	341.483.529.424	426.060.166.851	84.576.637.427	24,77
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Pembiayaan Netto	291.483.529.424	376.060.166.851	84.576.637.427	29,02
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0,00

4. Penjabaran Pergeseran ke-4 (Empat) APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022

Perubahan ke-4 Penjabaran APBD ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 67 Tahun 2022 pada tanggal 7



September 2022 dengan Target pendapatan sebesar 5,39 Trilyun Rupiah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,67 Trilyun Rupiah, Pendapatan Transfer sebesar 2,66 Trilyun Rupiah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 59,38 Milyar Rupiah. Selanjutnya untuk belanja daerah dialokasikan sebesar 5,76 Trilyun Rupiah yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar 3,62 Trilyun Rupiah, Belanja Modal sebesar 977 Milyar, Belanja Tidak Terduga 9,85 Milyar dan Belanja Transfer sebesar 1,15 Trilyun Rupiah. Pembiayaan Netto sebesar 376 Milyar dengan penerimaan pembiayaan sebesar 426 Miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar 50 Milyar.

Perubahan ke-4 penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 yang diwajibkan mengalokasikan anggaran penanganan inflasi minimal 2% dari alokasi DAU dan DBH triwulan 4.

Uraian terkait dengan penjelasan di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.19
Perubahan ke-4 Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.672.831.356.527	2.672.831.356.527	0	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	2.343.271.581.063	2.343.271.581.063	0	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	13.447.743.000	13.447.743.000	0	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	96.368.227.301	96.368.227.301	0	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	219.743.805.163	219.743.805.163	0	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.660.721.446.000	2.660.721.446.000	0	0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.660.721.446.000	2.660.721.446.000	0	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59.381.168.000	59.381.168.000	0	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	59.381.168.000	59.381.168.000	0	0,00
	Jumlah Pendapatan	5.392.933.970.527	5.392.933.970.527	0	0,00



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	3.605.734.765.576	3.629.650.892.573	23.916.126.997	0,66
5.1.01	Belanja Pegawai	1.634.880.100.472	1.655.371.093.053	20.490.992.581	1,25
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.733.927.884.170	1.724.354.910.955	(9.572.973.215)	(0,55)
5.1.05	Belanja Hibah	229.333.078.852	242.331.186.483	12.998.107.631	5,67
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.593.702.082	7.593.702.082	0	0,00
5.2	BELANJA MODAL	896.649.751.630	977.459.758.006	80.810.006.376	9,01
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.771.900.904	2.771.900.904	0	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.774.868.819	185.568.257.506	47.793.388.687	34,69
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.351.866.782	394.927.479.471	4.575.612.689	1,17
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	315.419.087.554	343.794.627.554	28.375.540.000	9,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.814.076.471	45.487.874.480	(4.326.201.991)	(8,68)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	517.951.100	4.909.618.091	4.391.666.991	847,89
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	9.850.504.054	(20.149.495.946)	(67,16)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	9.850.504.054	(20.149.495.946)	(67,16)
5.4	BELANJA TRANSFER	1.152.032.982.745	1.152.032.982.745	0	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.089.637.982.745	1.089.637.982.745	0	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	62.395.000.000	62.395.000.000	0	0,00
	Jumlah Belanja	5.684.417.499.951	5.768.994.137.378	84.576.637.427	1,49
	Total Surplus/(Defisit)	(291.483.529.424)	(376.060.166.851)	(84.576.637.427)	29,02
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	341.483.529.424	426.060.166.851	84.576.637.427	24,77
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	341.483.529.424	426.060.166.851	84.576.637.427	24,77
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	341.483.529.424	426.060.166.851	84.576.637.427	24,77
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Pembiayaan Netto	291.483.529.424	376.060.166.851	84.576.637.427	29,02
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0,00

**B. Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022**

Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan melalui **Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 84 Tahun 2022 pada tanggal 8 November 2022** dengan Target pendapatan sebesar 5,65 Trilyun Rupiah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,88 Trilyun Rupiah, Pendapatan Transfer sebesar 2,71 Trilyun Rupiah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 59,40 Milyar Rupiah. Selanjutnya untuk belanja daerah dialokasikan sebesar 5,99 Trilyun Rupiah yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar 3,71 Trilyun Rupiah, Belanja Modal sebesar 1,07 Trilyun Rupiah, Belanja Tidak Terduga 9,85 Milyar Rupiah dan Belanja Transfer sebesar 1,19 Trilyun Rupiah. Pembiayaan Netto sebesar 336 Milyar dengan penerimaan pembiayaan sebesar 386 Miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar 50 Milyar. Volume Anggaran pada Perubahan APBD sebesar 6,04 Trilyun Rupiah

Uraian terkait dengan penjelasan di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

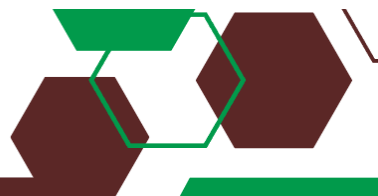
Tabel 1.20

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.672.831.356.527	2.883.228.824.088	210.397.467.561	7,87
4.1.01	Pajak Daerah	2.343.271.581.063	2.427.161.737.441	83.890.156.378	3,58
4.1.02	Retribusi Daerah	13.447.743.000	9.313.488.000	(4.134.255.000)	(30,74)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	96.368.227.301	101.025.671.578	4.657.444.277	4,83
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	219.743.805.163	345.727.927.069	125.984.121.906	57,33
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.660.721.446.000	2.715.855.183.000	55.133.737.000	2,07
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.660.721.446.000	2.715.855.183.000	55.133.737.000	2,07
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59.381.168.000	59.408.038.000	26.870.000	0,05
4.3.01	Pendapatan Hibah	59.381.168.000	59.408.038.000	26.870.000	0,05
	Jumlah Pendapatan	5.392.933.970.527	5.658.492.045.088	265.558.074.561	4,92
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	3.605.734.765.576	3.710.462.990.531	104.728.224.955	2,90
5.1.01	Belanja Pegawai	1.634.880.100.472	1.602.697.490.432	(32.182.610.040)	(1,97)



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.733.927.884.170	1.844.968.249.101	111.040.364.931	6,40
5.1.05	Belanja Hibah	229.333.078.852	254.338.457.916	25.005.379.064	10,90
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.593.702.082	8.458.793.082	865.091.000	11,39
5.2	BELANJA MODAL	896.649.751.630	1.078.698.042.800	182.048.291.170	20,30
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.771.900.904	2.369.416.004	(402.484.900)	(14,52)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.774.868.819	233.415.899.658	95.641.030.839	69,42
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.351.866.782	438.125.805.756	47.773.938.974	12,24
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	315.419.087.554	353.341.760.291	37.922.672.737	12,02
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.814.076.471	50.905.769.991	1.091.693.520	2,19
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	517.951.100	539.391.100	21.440.000	4,14
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	9.850.504.054	(20.149.495.946)	(67,16)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	9.850.504.054	(20.149.495.946)	(67,16)
5.4	BELANJA TRANSFER	1.152.032.982.745	1.195.641.092.210	43.608.109.465	3,79
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.089.637.982.745	1.148.161.092.210	58.523.109.465	5,37
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	62.395.000.000	47.480.000.000	(14.915.000.000)	(23,90)
	Jumlah Belanja	5.684.417.499.951	5.994.652.629.595	310.235.129.644	5,46
	Total Surplus/(Defisit)	(291.483.529.424)	(336.160.584.507)	(44.677.055.083)	15,33
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	341.483.529.424	386.160.584.507	44.677.055.083	13,08
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	341.483.529.424	386.160.584.507	44.677.055.083	13,08
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	341.483.529.424	386.160.584.507	44.677.055.083	13,08
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Pembiayaan Netto	291.483.529.424	336.160.584.507	44.677.055.083	15,33
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0,00

**1. Penjabaran Pergeseran ke-1 (Satu) APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022**

Perubahan ke-1 Penjabaran Perubahan APBD ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 89 Tahun 2022 pada tanggal 16 November 2022 sebagai tindak lanjut penyesuaian belanja DAK Bidang Pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022, dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 903/1333/BKAD-B tentang Pergeseran Anggaran Belanja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 dengan Target pendapatan sebesar 5,65 Trilyun Rupiah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,88 Trilyun Rupiah, Pendapatan Transfer sebesar 2,71 Trilyun Rupiah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 59,40 Milyar Rupiah. Selanjutnya untuk belanja daerah dialokasikan sebesar 5,99 Trilyun Rupiah yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar 3,74 Trilyun Rupiah, Belanja Modal sebesar 1,04 Trilyun Rupiah, Belanja Tidak Terduga 9,60 Milyar Rupiah dan Belanja Transfer sebesar 1,19 Trilyun Rupiah. Pembiayaan Netto sebesar 336 Milyar dengan penerimaan pembiayaan sebesar 386 Miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar 50 Milyar.

Uraian terkait dengan penjelasan di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.21
Perubahan ke-1 Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.672.831.356.527	2.883.228.824.088	210.397.467.561	7,87
4.1.01	Pajak Daerah	2.343.271.581.063	2.427.161.737.441	83.890.156.378	3,58
4.1.02	Retribusi Daerah	13.447.743.000	9.313.488.000	(4.134.255.000)	(30,74)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	96.368.227.301	101.025.671.578	4.657.444.277	4,83
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	219.743.805.163	345.727.927.069	125.984.121.906	57,33
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.660.721.446.000	2.715.855.183.000	55.133.737.000	2,07

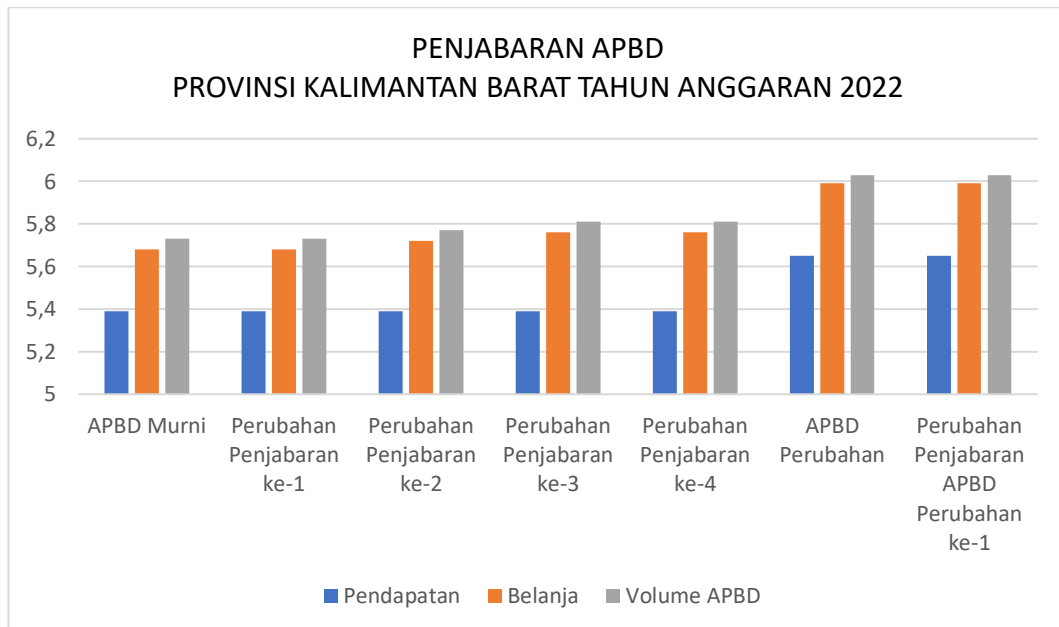


Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.660.721.446.000	2.715.855.183.000	55.133.737.000	2,07
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59.381.168.000	59.408.038.000	26.870.000	0,05
4.3.01	Pendapatan Hibah	59.381.168.000	59.408.038.000	26.870.000	0,05
	Jumlah Pendapatan	5.392.933.970.527	5.658.492.045.088	265.558.074.561	4,92
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	3.605.734.765.576	3.743.692.395.527	137.957.629.951	3,83
5.1.01	Belanja Pegawai	1.634.880.100.472	1.600.973.211.426	(33.906.889.046)	(2,07)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.733.927.884.170	1.886.144.683.063	152.216.798.893	8,78
5.1.05	Belanja Hibah	229.333.078.852	248.115.707.956	18.782.629.104	8,19
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.593.702.082	8.458.793.082	865.091.000	11,39
5.2	BELANJA MODAL	896.649.751.630	1.045.718.637.804	149.068.886.174	16,63
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.771.900.904	2.369.416.004	(402.484.900)	(14,52)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.774.868.819	234.208.402.243	96.433.533.424	69,99
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.351.866.782	430.016.383.756	39.664.516.974	10,16
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	315.419.087.554	353.341.760.291	37.922.672.737	12,02
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.814.076.471	21.116.318.419	(28.697.758.052)	(57,61)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	517.951.100	4.666.357.091	4.148.405.991	800,93
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	9.600.504.054	(20.399.495.946)	(68,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	9.600.504.054	(20.399.495.946)	(68,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	1.152.032.982.745	1.195.641.092.210	43.608.109.465	3,79
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.089.637.982.745	1.148.161.092.210	58.523.109.465	5,37
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	62.395.000.000	47.480.000.000	(14.915.000.000)	(23,90)
	Jumlah Belanja	5.684.417.499.951	5.994.652.629.595	310.235.129.644	5,46
	Total Surplus/(Defisit)	(291.483.529.424)	(336.160.584.507)	(44.677.055.083)	15,33
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	341.483.529.424	386.160.584.507	44.677.055.083	13,08
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	341.483.529.424	386.160.584.507	44.677.055.083	13,08
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	341.483.529.424	386.160.584.507	44.677.055.083	13,08
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0,00
	Pembiayaan Netto	291.483.529.424	336.160.584.507	44.677.055.083	15,33
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0,00

Keseluruhan kronologis perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Barat yang telah dijelaskan sebelumnya dirangkum dalam diagram berikut ini:



Gambar 1.6

Diagram Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dirangkum dalam dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana amanat ketentuan perundangan yang melingkupi sasaran dan prioritas pembangunan berdasarkan visi dan misi kepala daerah dengan mengacu kepada tujuan dan prioritas pembangunan nasional.



1.1.2.1 Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Perubahan 2018-2023 terdapat isu besar dengan adanya wabah virus Covid-19 di Tahun 2020, sehingga perencanaan yang dibuat mengantisipasi terjadinya virus dan dampak yang diakibatkan pasca berakhirnya virus terutama perbaikan perekonomian dan target-target capaian di tahun 2021, 2022 dan 2023.

Terkait permasalahan pembangunan akibat wabah virus Covid-19, maka untuk Kalimantan Barat sendiri, sampai tanggal 2 Desember 2020 ini, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 2.461 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.098 orang dinyatakan sembuh dan 22 orang diantaranya meninggal. Jika dilihat dari perkembangan kasus di Kalimantan Barat maka sebanyak 83% dari total kasus terkonfirmasi sembuh sehingga ada keoptimisan pemerintah provinsi dapat melakukan recovery ekonomi pada tahun-tahun berikutnya.

Penyebaran Covid-19 yang semakin pasif membuat beberapa negara mengambil kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) atau satu negara penuh, sehingga roda perekonomian menurun drastis. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi global akan melambat, bahkan resesi hampir pasti terjadi. *Internasional Monetary Fund* (IMF) merilis *World Economic Outlook* (WEO) edisi April 2020 telah merubah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dampak dari Pandemi Covid-19 di tahun 2020 yaitu 3,3% dan tahun 2021 adalah 3,4 % menjadi sebesar (-3%) di tahun 2020 dan 5,8% untuk tahun 2021. Proyeksi perbaikan ekonomi global yang dibuat IMF memperhitungkan skenario dasar pandemi virus *Corona*. Dalam asumsinya bahwa pandemi akan mereda pada semester kedua tahun 2020. Ekonomi sejumlah negara yang ditutup akibat karantina untuk mencegah penyebaran Covid-19 mulai dibuka. Namun pemulihan ekonomi akan sangat bergantung pada periode pandemi Corona berakhir. Hingga kini belum ada yang dapat memastikan kapan pandemi ini berakhir.

Perekonomian Indonesia tumbuh 5,02 persen pada tahun 2019 (lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 5,17 persen) artinya belum mencapai target pertumbuhan sebagaimana dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 8,00 persen. Berdasarkan data BPS tahun 2020, dari sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai Jasa Lainnya sebesar 10,55 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,62 persen.



Distribusi perekonomian Indonesia tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa (59,00 persen) dan Pulau Sumatera (21,32 persen) sedangkan Pulau Kalimantan sebesar 8,05 persen. Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi antar pulau, kelompok pulau Kalimantan tumbuh sebesar 4,99 persen. Pertumbuhan ekonomi dan kinerja perdagangan Indonesia tahun 2020 dan tahun 2021 diprediksi turut lesu sebagai dampak melorotnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Dalam skenario outlook indikator utama ekonomi makro nasional oleh Kementerian Keuangan dinyatakan pertumbuhan PDB (% yoy) tahun 2020 dengan dua skenario yaitu skenario berat (*moderat scenario*) tumbuh 2,3% dan sangat berat (*low scenario*) terkontraksi -0,4%. Sedangkan dalam proyeksi *high scenario* tahun 2021 pertumbuhan ekonomi diperkirakan di range 4,5 - 5,5 persen dan inflasi 2- 4 persen, dengan catatan kondisi penanganan Covid-19 sudah membaik di kuartal ketiga dan akselerasi di kuartal keempat.

Sebagaimana yang disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam Video Konfrensnya disaat pembukaan Musrenbang RKPD 2021 Provinsi Kalimantan Barat bahwa dampak Covid-19 terhadap perekonomian domestik secara umum dapat meliputi:

1. Terhadap rumah tangga seperti pendapatan yang hilang karena PHK dan kenaikan harga barang dan pembatasan pergerakan masyarakat.
2. Terhadap perusahaan/UMKM seperti permintaan barang/jasa untuk ekspor dan domestik turun, neraca keuangan perusahaan terganggu, PHK dan ancaman kebangkrutan, gangguan supply chain bagi perusahaan/UMKM yang melakukan ekspor dan impor
3. Terhadap pemerintah seperti pendapatan negara turun sebagai dampak turunnya aktivitas ekonomi dan harga komoditas global, belanja meningkat untuk memberikan bantuan stimulus pada masyarakat rentan dan dunia usaha
4. Terhadap Lembaga Keuangan menyebabkan *capital out flow* dan depresiasi rupiah
5. *Rest of the world* dari aktifitas manusia misalnya aktivitas pariwisata dan pergerakan manusia di dalam dan antar wilayah turun, perdagangan dan investasi dunia turun serta harga komoditas internasional turun.

Terkait Covid-19, maka Kalimantan Barat juga terkena dampak pandemi ini yang secara umum meliputi:



1. Kalimantan Barat mengalami resesi karena mengalami kontraksi sebesar 3,40 persen (y-o-y) pada kuartal pertama dan 4,46 persen (y-o-y) pada kuartal kedua.
2. Pertumbuhan pariwisata Kalbar menurun drastis dari 4,17 persen pada tahun 2019 menjadi - 23,44 persen pada Triwulan ke-III tahun 2020.
3. Terjadinya peningkatan pengangguran sebanyak 33.222 orang.
4. Daya beli masyarakat turun dan cenderung hanya membeli kebutuhan pokok saja.
5. Belanja jenis barang dan modal berkurang akibat adanya refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah.

Dampak tersebut diatas mengakibatkan penurunan PDB sisi Pengeluaran seperti konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan impor. Hanya konsumsi pemerintah saja yang melonjak naik karena banyaknya belanja sosial dalam upaya recovery dampak Covid 19 tahun 2020. Selain permasalahan wabah covid-19 tersebut permasalahan pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Politik, Ketentraman, dan Ketertiban

Upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa pengaruh/implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Masih adanya potensi benturan antar kelompok warga masyarakat, antara kelompok warga masyarakat dengan aparat dan antara kelompok warga masyarakat dengan sektor privat karena adanya kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, juga mempengaruhi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara.

2. Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat berpotensi untuk muncul di daerah-daerah yang terkait dengan bidang-bidang seperti: perkebunan, pertambangan serta berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan yang menyebabkan kerugian negara.



B. Permasalahan Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM

Dalam Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, masih terdapat permasalahan antara lain:

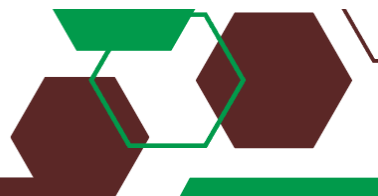
1. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mewujudkan Tiga Tertib Administrasi Kependudukan meliputi: Tertib Administrasi Kependudukan, Tertib Penerbitan NIK dan Tertib Penerbitan Dokumen Kependudukan, masih menghadapi beberapa permasalahan diantaranya:

- a. Belum tertatanya jumlah penduduk secara maksimal.
- b. Intensitas sosialisasi tentang berbagai kebijakan administrasi kependudukan belum maksimal.
- c. Masih terjadi multi tafsir terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- d. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dan teknologi informasi komunikasi
- e. Belum adanya regulasi tentang standar kompetensi dan jenjang karier ASN pengelolaan dan perencanaan TIK.
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja serta SDM yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi kependudukan, baik sarana teknologi maupun informasi.
- g. Masih adanya penduduk yang sudah menetap di luar daerah domisilinya lebih dari 1 tahun, namun yang bersangkutan tidak mau pindah, sehingga secara *de facto* terdata di domisili yang baru, tetapi secara *de jure* mereka masih terdata di daerah asalnya.
- h. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung terselenggaranya tertib administrasi kependudukan.

2. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan arsip merupakan rekaman informasi seluruh kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh para penyelenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang telah dipercayakan oleh masyarakat. Hal ini berarti, melalui urusan kearsipan, masyarakat dapat mengetahui keberhasilan, kegagalan ataupun penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Urusan kearsipan saat ini belum dimanfaatkan secara



optimal dalam proses manajemen pemerintahan dan pembangunan, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya:

- a. Kesadaran dan kepedulian aparatur pemerintah masih rendah sehingga menyebabkan arsip tidak dapat dikelola dengan baik
- b. Kualitas dan kuantitas SDM penyelenggara kearsipan masih belum memenuhi standar;
- c. Pembinaan SDM kearsipan belum berkesinambungan.

3. Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan mengenalkan kepada masyarakat tentang keberadaan perpustakaan daerah serta kekayaan koleksi buku-buku yang dimiliki serta dalam upaya menumbuh-kembangkan minat baca bagi masyarakat. Pengembangan perpustakaan meliputi beberapa hal diantaranya upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Secara umum, permasalahan pembangunan urusan kepustakaan adalah bagaimana membudayakan kegemaran membaca pada masyarakat serta penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu sebagai penunjang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4. Fungsi Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan

Adapun permasalahan pembangunan fungsi pendukung dan penunjang urusan pemerintahan, sebagai berikut:

- a. Masih belum optimalnya pelayanan publik serta rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- b. Selama ini dirasakan pelayanan publik belum maksimal dikarenakan beberapa faktor diantaranya kapasitas SDM belum merata, fasilitas yang terbatas serta prosedur yang belum baku;
- c. Masih belum optimalnya reformasi birokrasi Undang-undang tentang Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan Pemerintah belum disikapi secara baik dan benar oleh pihak-pihak terkait sehingga prosesnya berjalan lambat. Adapun tujuan dari Reformasi Birokrasi adalah sebagai arahan dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pelayanan publik.
- d. Perlunya peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN yang ditunjukkan dengan meningkatnya capaian indikator kinerja sehingga pembiayaan pembangunan dapat lebih efisien dan efektif;



- e. Belum optimalnya sistem peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS;
Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka diharapkan kinerja birokrasi dapat berjalan sesuai dengan harapan dan diperkuat dengan pengawasan oleh masyarakat serta diikuti dengan peningkatan tunjangan kesejahteraan aparatur (TKD)
- f. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
Pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja seharusnya dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel dimulai dari perencanaan anggaran (penyusunan RAPBD) dengan melibatkan stakeholders pembangunan daerah dalam bedah RAPBD sebelum ditetapkan dan evaluasi pelaksanaan APBD setelah selesai dilaksanakan.
- g. Penegakan hukum dan HAM;
Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Dengan demikian kepastian hukum, rasa aman dan ketentraman masyarakat dapat kita wujudkan. Pelaksanaan penegakan hukum yang transparan diharapkan dapat menekan dampak negatif, sekaligus membangun citra positif bagi pemerintah. Hukum pada dasarnya memberikan jaminan kepastian, dalam rangka melindungi setiap warga negara dan pemenuhan HAM.
- h. Luas wilayah.
Luasnya wilayah menyebabkan panjangnya rentang kendali pelayanan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik sehingga perlu ditempuh dengan pembentukan daerah otonom baru. Demikian juga pada aspek luasnya wilayah provinsi, diperlukan langkah- langkah nyata untuk mewujudkan terbentuknya provinsi baru di Kalimantan Barat.

C. Permasalahan Pembangunan Bidang Ekonomi

Sejumlah permasalahan mendasar dan faktor ketidakpastian masih berlanjut dan menjadi kendala bagi proses pemulihan ekonomi secara lebih cepat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, secara makro pembangunan bidang ekonomi lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan diharapkan mampu mencapai capaian rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan secara mikro, lebih diarahkan pada peningkatan perkembangan masing-masing



sektor perekonomian, yang mengarah pada peningkatan ekspor maupun hilirisasi industri. Permasalahan pembangunan bidang ekonomi akan dibahas dalam 9 (sembilan) urusan yaitu: penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, dan pariwisata.

1. Urusan Penanaman Modal

Keberhasilan pengembangan bidang investasi atau penanaman modal akan memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi riil dan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi selama ini sebagian besar ditopang dari sektor konsumsi, bukan dari pertumbuhan investasi maupun ekspor. Untuk mendorong pembangunan bidang ekonomi dalam lima tahun mendatang, maka fokus masalah yang menjadi perhatian adalah bagaimana upaya meningkatkan kinerja perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, peningkatan perdagangan dan ekspor daerah, serta pengembangan kegiatan UMKM dan koperasi serta lembaga keuangan mikro masyarakat lainnya. Kalimantan Barat menghadapi permasalahan klasik yang dialami oleh hampir semua provinsi di Indonesia yaitu terbatasnya modal yang dimiliki dengan pencapaian target investasi rata-rata kurang dari lima puluh persen, sehingga pemanfaatan sumber daya alam menjadi tidak maksimal. Untuk investasi pemerintah, perkembangan alokasi belanja pembangunan/belanja publik menunjukkan komposisi belanja publik terhadap total belanja terus membaik. Investasi pemerintah (belanja pembangunan) cukup tinggi, dimana sebagian besar investasi pemerintah diperuntukkan mengatasi permasalahan struktural seperti persoalan perekonomian, sosial, pembangunan infrastruktur publik dan prasarana pemerintahan.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka terdapat berbagai permasalahan dalam pembangunan urusan penanaman modal diantaranya perlunya dorongan peningkatan investasi melalui masuknya arus penanaman modal yang didukung dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Secara umum, realisasi investasi dengan fasilitasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) mulai menampakkan peningkatan namun pencapaiannya belum optimal karena realisasinya belum mampu mencapai lima puluh persen. Seperti realisasi investasi PMDN, pada tahun 2013 baru mencapai 11, 93 persen dan mengalami peningkatan di tahun



2017 menjadi 20,68 persen. Demikian pula realisasi investasi PMA, tahun 2013 mencapai 31,55 persen dan meningkat menjadi 36,38 persen di tahun 2017.

Persoalan ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu penyebab kurangnya minat investor menanamkan modal. Seperti sektor primer dengan bidang usaha perkebunan masih mendominasi bidang usaha yang paling diminati karena infrastruktur relatif tersedia. Sedangkan untuk sektor sekunder perkembangannya belum signifikan karena diperlukan infrastruktur (jalan, listrik dan pelabuhan) yang memadai. Disamping itu, pengembangan kerjasama antar pemerintah swasta dan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan promosi investasi perlu mendapat penguatan dalam upaya peningkatan realisasi investasi. Peningkatan investasi memang memerlukan penguatan kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk pengelolaan promosi investasi.

2. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (KUMKM)

Pembangunan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi, karena terkait pada penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi dengan kebutuhan modal investasi yang kecil serta dapat menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah. Hal ini membuat pembangunan urusan KUKM, termasuk lembaga pembiayaan mikro seperti Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi Simpan Pinjam maupun *Credit Union* (CU), tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal, bahkan justru mampu menangkap berbagai peluang. Oleh sebab itu, pengembangan KUKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural, yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.

Perkembangan kemajuan KUKM yang meningkat belum diimbangi dengan perkembangan kualitas yang masih menghadapi permasalahan klasik yaitu rendahnya produktivitas. Hal ini berkaitan dengan: masih rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya dalam manajemen, organisasi, teknologi dan pemasaran; lemahnya kompetensi kewirausahaan; serta terbatasnya kapasitas KUKM untuk mengakses permodalan, informasi teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya.

Sementara itu, selain permasalahan internal terdapat pula permasalahan eksternal yang dihadapi seperti kurang mendukungnya iklim usaha, masih terdapat beberapa praktik usaha yang tidak sehat dan



keterbatasan informasi dan jaringan pendukung usaha. Selain itu, KUMKM juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya perkembangan teknologi.

3. Urusan Pangan

Urusan pangan terkait dengan rumah tangga atau individu yang memiliki akses ketersediaan pangan yang cukup, aman serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan dalam menunjang kehidupan yang aktif dan sehat. Namun, pemenuhan kebutuhan pangan penduduk secara merata dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat tidak boleh terlupakan. Hal ini menunjukkan konsepsi ketahanan pangan merupakan konsep sangat luas dan beragam serta merupakan masalah yang kompleks. Walaupun demikian, intinya terletak pada bagaimana mewujudkan terjaminnya ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Untuk mencukupi kebutuhan bahan pangan utama daerah serta mengurangi ketergantungan impor atau masuknya bahan pangan antar pulau, maka daerah diharapkan mampu menyediakan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berasal dari sumberdaya lokal/produksi daerah. Ada beberapa aspek yang menjadi hambatan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah adalah: aspek produksi, aspek distribusi, dan konsumsi. Dalam pembahasan permasalahan urusan pertanian, perlu dilihat pada aspek tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan. Dalam pembahasan permasalahan urusan pertanian, perlu dilihat pada aspek tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan. Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan adalah masih rendahnya tingkat kualitas dan kuantitas SDM baik dari aspek teknologi, permodalan, serta pengairan sehingga produktivitas pertanian masih rendah jika dilihat dari rasio produksi sektor pertanian terhadap jumlah tenaga kerja disektor pertanian. Serta permasalahan terkait alih fungsi lahan tanaman pangan ke sektor lain seperti jasa dan perdagangan yang cukup berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas.

Peternakan dan Kesehatan Hewan. Salah satu produk peternakan yang mampu memenuhi kebutuhan daerah adalah produksi telur ayam dengan produksi 21.810 ton/tahun, 20% diantaranya dijual antar pulau seperti Natuna,



Bangka Belitung, Tambelan, Pangkalanbun, dan Jakarta. Namun untuk daging sapi, untuk memenuhi kebutuhan daging sapi setiap tahun harus mendatangkan dari luar (Jawa Timur, pulau Madura dan NTB). Permasalahan dalam mengembangkan ternak di Kalimantan Barat adalah faktor sumber bibit yang belum mampu disediakan oleh para penangkar bibit ternak di daerah, akibatnya sebagian besar masih mengimpor dari luar Kalimantan Barat. Permasalahan ini disebabkan oleh usaha ternak yang berbasis kerakyatan yang memenuhi standar belum berkembang, serta masih adanya kasus.

4. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan pangan terkait dengan rumah tangga atau individu yang memiliki akses ketersediaan pangan yang cukup, aman serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan dalam menunjang kehidupan yang aktif dan sehat. Namun, pemenuhan kebutuhan pangan penduduk secara merata dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat tidak boleh terlupakan. Hal ini menunjukkan konsepsi ketahanan pangan merupakan konsep sangat luas dan beragam serta merupakan masalah yang kompleks. Walaupun demikian, intinya terletak pada bagaimana mewujudkan terjaminnya ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Untuk mencukupi kebutuhan bahan pangan utama daerah serta mengurangi ketergantungan impor atau masuknya bahan pangan antar pulau, maka daerah diharapkan mampu menyediakan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berasal dari sumberdaya lokal/produksi daerah. Ada beberapa aspek yang menjadi hambatan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah adalah: aspek produksi, aspek distribusi, dan konsumsi. Dalam pembahasan permasalahan urusan pertanian, perlu dilihat pada aspek tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan. Dalam pembahasan permasalahan urusan pertanian, perlu dilihat pada aspek tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan. Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan adalah masih rendahnya tingkat kualitas dan kuantitas SDM baik dari aspek teknologi, permodalan, serta pengairan sehingga produktivitas pertanian masih rendah jika dilihat dari rasio produksi sektor pertanian terhadap jumlah tenaga kerja disektor pertanian. Serta permasalahan terkait alih fungsi lahan tanaman



pangan ke sektor lain seperti jasa dan perdagangan yang cukup berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas.

Peternakan dan Kesehatan Hewan. Salah satu produk peternakan yang mampu memenuhi kebutuhan daerah adalah produksi telur ayam dengan produksi 21.810 ton/tahun, 20% diantaranya dijual antar pulau seperti Natuna, Bangka Belitung, Tambelan, Pangkalanbun, dan Jakarta. Namun untuk daging sapi, untuk memenuhi kebutuhan daging sapi setiap tahun harus mendatangkan dari luar (Jawa Timur, pulau Madura dan NTB). Permasalahan dalam mengembangkan ternak di Kalimantan Barat adalah faktor sumber bibit yang belum mampu disediakan oleh para penangkar bibit ternak di daerah, akibatnya sebagian besar masih mengimpor dari luar Kalimantan Barat. Permasalahan ini disebabkan oleh usaha ternak yang berbasis kerakyatan yang memenuhi standar belum berkembang, serta masih adanya kasus.

5. Urusan Kehutanan

Luas kawasan hutan di Kalimantan Barat \pm 62 persen dari luas total Provinsi Kalimantan Barat. Namun dari luas tersebut masih terdapat \pm 20 persen merupakan lahan kritis. Selain itu dengan mulai berkurangnya potensi tegakan hutan alam pada hutan produksi, maka menyebabkan kontribusi sektor kehutanan menjadi menurun. Permasalahan utama pada urusan kehutanan adalah terjadinya degradasi hutan dan lahan. Beberapa permasalahan yang menyebabkan hal tersebut adalah belum mantapnya keberadaan fisik kawasan hutan akibat belum selesainya penataan batas kawasan hutan sehingga menyebabkan konflik kepentingan masyarakat disekitar hutan. Masalah kepastian kawasan hutan juga semakin diperparah dengan rendahnya taraf sosial- ekonomi masyarakat disekitar hutan, sehingga konflik antara masyarakat hutan dengan petugas kehutanan menjadi tinggi. Di satu sisi masyarakat hutan yang sebagian besar adalah petani lading berpindah semakin terbatas lahan yang dapat disuksesi pengelolaannya dalam jangka waktu tertentu, tetapi disisi lain berbenturan dengan penetapan kawasan hutan oleh pemerintah pusat beserta penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat terkait. Permasalahan lainnya adalah masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan konservasi yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.



6. Urusan Perdagangan

Secara umum pembangunan sektor perdagangan daerah melalui pengembangan pasar yang terintegrasi, penciptaan iklim usaha yang kompetitif, mendorong penumbuhan dan pengembangan sektor produksi perdagangan dalam dan luar negeri guna peningkatan ekspor, penciptaan tertib usaha dan upaya perlindungan konsumen. Namun yang menjadi isu penting adalah yang terkait dengan perdagangan luar negeri. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir perkembangan sub sektor perdagangan luar negeri mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 nilai ekspor tercatat sebesar US\$.1.348,61 juta, kemudian menurun pada tahun 2014 menjadi US\$.651,99 juta atau 51,65 persen, pada tahun 2015 nilai ekspor menurun menjadi US\$.565,96 juta. Kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi US\$.623,420 juta. Peningkatan ekspor Kalbar kembali dilanjutkan pada tahun 2017 sebesar US\$ 203,88 Juta atau sebesar 32,70% dengan nilai ekspor sebesar US\$ 827,30 Juta. Sedangkan pada tahun 2018, ekspor diperkirakan masih akan meningkat dibandingkan tahun 2017. Hal tersebut tergambar dari pencapaian ekspor sampai dengan bulan Agustus 2018 sebesar US\$ 658,29 Juta yang mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017 sebesar US\$ 571,05 Juta atau meningkat sebesar 15,27%.

Selanjutnya kekhawatiran terhadap penurunan kinerja ekspor daerah dalam tahun-tahun mendatang patut menjadi fokus perhatian, terkait dengan:

- a. Adanya kecenderungan semakin protektifnya perdagangan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat terutama terhadap komoditi yang berasal dari Cina, Korea Selatan dan Jepang yang merupakan pasar tradisional utama ekspor Kalbar;
- b. Struktur ekspor Kalbar masih didominasi oleh 3 (tiga) komoditi utama yang bersifat primer yaitu karet, hasil tambang dan produk perkayuan (diatas 80% nilai ekspor total Kalbar) sehingga perkembangan nilai ekspor Kalbar sangat rentan terhadap fluktuasi harga ketiga komoditi tersebut di pasar dunia;
- c. Pembatasan ekspor bahan tambang utamanya bauksit sebagai dampak kebijakan/regulasi nasional;
- d. Dari sisi perdagangan dalam negeri dihadapkan sistem logistik daerah yang tidak efisien yang menyebabkan pada rentannya ketersediaan dan fluktuasi harga bahan pokok dan bahan strategis masyarakat serta



permasalahan daya saing produk daerah akibat dari tingginya biaya distribusi. Permasalahan lainnya adalah tuntutan akan perlindungan konsumen bagi masyarakat yang semakin tinggi, dimana saat ini semakin banyak beredarnya barang dan jasa baik dari luar maupun dalam daerah yang dikonsumsi yang perlu diawasi peredarannya sehingga tidak merugikan masyarakat.

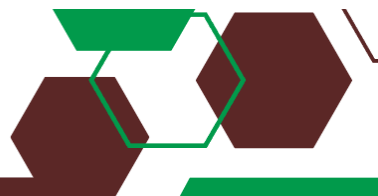
7. Urusan Industri

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir perkembangan pembangunan sektor industri belum begitu mengembirakan, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata dibawah 3%. Pertumbuhan ini jauh dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5-6% per tahun. Sebagai dampak dari kondisi pertumbuhan sektor industri dimaksud, kontribusinya terhadap perekonomian (PDRB total) Kalimantan Barat antara 16-17% dan belum menunjukkan kecendrungan membaik. Dalam garis besarnya permasalahan pembangunan urusan industri yang menyebabkan kondisi kinerja sektor industri dimaksud disebabkan oleh:

- a. Belum optimalnya pemberdayaan atau pengembangan pelaku industri kecil menengah di Provinsi Kalimantan Barat, hal ini disebabkan belum optimalnya pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi sumberdaya manusia pada sektor industri. Hal tersebut disebabkan masih lemahnya kerjasama antara pemerintah – swasta serta asosiasi-asosiasi yang bergerak di sektor industri;
- b. Belum optimalnya infrastruktur energi dan sistem logistik perindustrian di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan dua hal utama. Pertama, terbatasnya fasilitas-fasilitas utama dan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan industri antara lain belum tersedianya kawasan industri serta sentra industri kecil dan menengah. Permasalahan tersebut sangat erat kaitannya dengan minimnya investasi pada sektor industri, belum optimalnya pengembangan perwilayahan industri serta terbatasnya konektivitas pelaku usaha industri. Kedua, masalah sarana dan prasarana pelabuhan, pasokan air bersih, serta infrastruktur yang masih terbatas serta belum mampu memenuhi standar industri.

8. Urusan Pariwisata

Urusan pariwisata di daerah Kalimantan Barat termasuk sektor yang potensial untuk dikembangkan agar lebih maju lagi. Provinsi ini memiliki



potensi wisata yang beragam, yakni berupa wisata alam, agrowisata, wisata budaya dan wisata minat khusus. Berdasarkan obyek dan daya tarik wisata yang ada, Kalimantan Barat telah ditetapkan sebagai 10 (sepuluh) besar daerah tujuan wisata nasional, maka kegiatan pariwisata di daerah ini cukup potensial untuk menunjang pembangunan daerah. Dalam pengembangan potensi kepariwisataan di Provinsi Kalimantan Barat masih terkendala terhadap akses menuju lokasi destinasi wisata, sumberdaya manusia penggerak pariwisata minat khusus dan pengembangan desa wisata yang berinovasi masih minim. Disisi lain, pengembangan dan pengelolaan urusan pariwisata akan lebih memiliki nilai strategi, apabila dalam kemasannya juga dikaitkan dengan ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi kreatif di Kalimantan Barat cukup banyak dan mempunyai keahlian spesifik sesuai keahlian masing-masing, namun karena belum seluruhnya dilakukan pembinaan secara intensif maka pembuatan kerajinannya masih secara tradisional. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten/Kota se-Kalbar.

D. Permasalahan Bidang Sosial dan Budaya

Berbagai upaya pembangunan selama diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, yang secara komposit ditandai oleh makin membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, peningkatan IPM menjadi penting dalam pembangunan bidang sosial dan budaya. Dalam mendukung pembangunan bidang sosial dan budaya ada 10 (sepuluh) urusan pemerintahan yang akan disinergikan yaitu: urusan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, serta transmigrasi.

1. Urusan Pendidikan

Dimensi pendidikan merupakan salah satu indikator dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, pembangunan urusan pendidikan menjadi sangat berarti, terlebih terdapat dua aspek yang menjadi indikator pembentukan IPM, yaitu aspek rata-rata lama sekolah dan aspek angka melek huruf. Dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan urusan pendidikan perlu diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut:



- a. Perluasan akses dan pemerataan pendidikan masih terbatas;
Peningkatan angka serapan atau angka masukan (*intake rate*) dan angka transisi (*transition rate*) terjadi di semua jenjang pendidikan, namun belum seluruh anak mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan amanah Undang-Undang, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya Angka Serapan /angka masukan (*intakerate*) yang meliputi: APK, APM, dan APS jenjang pendidikan menengah dan Angka Transisi (*transitionintake*) yang meliputi: salah satunya masih tingginya angka putus sekolah di semua jenjang. Meningkatnya cakupan pelayanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) belum diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan seperti yang diharapkan. Disisi lain keberlanjutan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun (Wajar 9 Thn) dan Wajib Belajar 12 Tahun (Wajar 12 Thn) tidak hanya diarahkan pada segi kuantitas tetapi juga kualitas.
- b. Mutu dan relevansi pendidikan masih rendah
Berbicara masalah mutu dan relevansi pendidikan, maka ada dua hal pokok yang harus mendapat perhatian serius, yaitu mutu SDM PTK dan relevansi pendidikannya serta mutu sarana dan prasarana pendidikannya. Untuk mutu SDM PTK dan relevansinya, secara proporsional mutu guru sesuai kualifikasi akademik terus mengalami peningkatan namun dari segi profesionalismenya masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya tenaga guru yang belum mendapatkan sertifikasi guru sesuai dengan bidang keilmuan dan mata pelajaran yang diampunya belum lagi ditambah dengan masih sangat minimnya pengembangan keprofesionalisme guru melalui program diklat, bimtek maupun workshop. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan rehabilitasi ruang kelas senantiasa dilaksanakan setiap tahunnya, namun rehabilitasi ruang kelas belum sepenuhnya dapat dituntaskan. Selain itu, penyediaan bahan ajar, laboratorium, dan perpustakaan masih terbatas. Untuk mutu sarana dan prasarana pendidikan terkait terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas terutama di masa pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh dalam kualitas mutu pendidikan. Menanggapi hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 121 Tahun 2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Beasiswa Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah



Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri sehingga sebanyak 85,4 persen sekolah telah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka.

c. Manajemen dan tata kelola pendidikan belum optimal.

Perlunya peningkatan kapasitas aparatur di satuan pendidikan terkait dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) guna mewujudkan tatakelola pendidikan yang efektif. Untuk tata kelola yang berkaitan dengan manajemen ketenagaan, kalau dilihat dari kuantitasnya secara proporsional jumlah tenaga guru cukup, namun secara persebarannya belum merata keseluruh daerah karena masih terdapat penumpukan guru di daerah perkotaan sementara di daerah seperti perbatasan, terpencil dan terluar masih terdapat kekurangan guru. Sedangkan tata kelola dari segi keuangan, maka masih perlu pembiayaan pendidikan yang berkeadilan. Mekanisme alokasi dan penyaluran dana pendidikan perlu disederhanakan dalam rangka mendukung efisiensi alokasi dan akuntabilitas yang lebih baik. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan gratis harus tetap mengacu dan memenuhi komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi input, proses, output dan outcome proses pembelajaran. Dari isu-isu strategis tersebut, secara umum dapat dirumuskan bahwa isu strategis pembangunan urusan pendidikan yaitu peningkatan pemerataan layanan akses, mutu dan relevansi serta optimalisasi tata kelola pendidikan yang belum optimal.

2. Urusan Kesehatan

Kualitas Kinerja pelayanan publik, termasuk pembangunan urusan kesehatan, memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan urusan kesehatan yang dilaksanakan selama ini, disatu sisi menunjukkan peningkatan, namun dibeberapa aspek perlu perbaikan serta kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Sebagaimana pembangunan urusan pendidikan yang terkait dengan pembentukan IPM, pembangunan urusan kesehatan pun sangat terkait dengan indikator pembentukan IPM diantaranya dari aspek angka harapan hidup. Ada beberapa permasalahan pokok urusan kesehatan yang perlu ditangani dan dicarikan pemecahannya, terkait dengan pembangunan urusan kesehatan, yaitu:



- a. Status kesehatan ibu dan anak masih rendah;
Kesehatan ibu ditandai dengan indikator AKI (Angka Kematian Ibu), dimana jika dibanding dengan angka nasional, maka kematian ibu di Kalimantan Barat masih relatif tinggi. Kondisi yang sama terjadi pada indikator AKB (Angka Kematian Bayi) masih lebih tinggi sedikit dibanding dengan AKB Nasional. Demikian pula dengan AKABA (Angka Kematian Balita), dimana AKABA Kalimantan Barat lebih tinggi dari AKABA Nasional.
- b. Status gizi masyarakat masih rendah;
Kekurangan gizi pada anak balita masih tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cukup penting di Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) menunjukkan prevalensi gizi buruk Kalimantan Barat relatif membaik, namun cenderung meningkat di tahun 2015.
- c. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit masih tinggi;
Beberapa penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kalimantan Barat, diantaranya Demam Berdarah Dengue (DBD), diare, malaria, tuberculosis (TB), dan HIV/AIDS. Sedangkan pada penyakit tidak menular, yang masih menjadi tantangan terutama diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, dan kanker.
- d. Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas;
Tenaga kesehatan per 100.000 penduduk untuk dokter, dokter spesialis, dokter gigi, perawat dan bidan mengalami peningkatan, namun kesenjangan tenaga kesehatan lebih jelas terlihat antara daerah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, penempatan tenaga kesehatan di daerah perbatasan, pesisir dan kepulauan terus ditingkatkan.
- e. Pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat masih terbatas;
- f. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal;
- g. Manajemen pembangunan kesehatan belum efektif;
- h. Kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah masih lebar;
- i. Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas relatif masih rendah.



Adanya wabah pandemi covid-19 yang terjadi sejak awal bulan Februari tahun 2020 menyebabkan adanya rencana aksi penanganan Covid-19 dengan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 841/DINKES/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu

3. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Dalam pembaharuan dan pembangunan, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan peranannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Dalam proses pembangunan, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan. Untuk itu, tanggungjawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan.

Sedangkan pembangunan keolahragaan merupakan instrumen sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, serta upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Terdapat beberapa permasalahan terkait pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga, yaitu: meningkatnya krisis moral atau karakter di kalangan pemuda. Pembentukan karakter pemuda melalui pelatihan kewirausahaan belum optimal, prestasi dan budaya olahraga masih rendah; pembudayaan olahraga rekreasi baru menyentuh masyarakat perkotaan.

4. Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dalam pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak



dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. Terdapat beberapa permasalahan terkait pembangunan urusan ketenagakerjaan, diantaranya: masih tingginya tingkat pengangguran terbuka, masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan terhadap tenaga kerja, iklim hubungan industrial yang kurang kondusif, lokasi transmigrasi yang dicadangkan maupun dikembangkan belum clear dan clean, serta belum optimalnya pengelolaan potensi kawasan transmigrasi.

E. Permasalahan Pembangunan Bidang Infrastruktur

Permasalahan pembangunan bidang infrastruktur melingkupi 7 (tujuh) urusan yaitu:

1. Urusan Penataan Ruang

Adapun permasalahan pembangunan urusan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengaturan dan pembinaan penataan ruang Sesuai UU No. 26 Tahun 2007, serta masih kurangnya pemahaman mengenai UU No. 26 Tahun 2007 oleh pemangku kepentingan, serta lemahnya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang antar sektor dan antar wilayah melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
- b. Belum optimalnya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Masih lemahnya pengawasan penataan ruang. Perda RTRW Prov Kalbar No.10 Tahun 2014 belum operasional dan belum menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan RTRW Provinsi Kalbar belum menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.
- d. Perencanaan (Masterplan) kawasan budidaya untuk sektor tertentu sebagai turunan Perda RTRW Prov Kalbar belum semuanya disusun (seperti perkebunan, pertambangan, pertanian, kehutanan, dan lain sebagainya).



- e. Terdapatnya perbedaan penentuan kawasan hutan dengan Perda RTRW Prov Kalbar Nomor 10 Tahun 2014 sehingga memerlukan peninjauan kembali (PK) RTRWP.
- f. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) tidak dapat melakukan tugas pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian izin pemanfaatan ruang, dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang karena belum didukung dengan kebijakan daerah.
- g. Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang berupa Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kalbar dan Kabupaten/Kota belum ada yang ditetapkan.
- h. *One map policy* RT/RW yang berbasis spasial dan terintegrasi belum dilaksanakan dalam penyusunan disemua sektor sesuai Keppres yang telah ditetapkan dikarenakan Kabupaten/kota belum secara rutin menyampaikan laporan penyelenggaraan penataan ruang daerah.
- i. Belum disusunnya rencana tata ruang di pulau-pulau pesisir untuk keperluan wisata.
- j. Perlunya perencanaan dalam pembangunan terminal khusus (Tersus) di laut dan di sungai dalam RTRW.
- k. Perlunya integrasi perencanaan jalan khusus pertambangan, perkebunan, serta kehutanan tentunya dalam RTRW juga.

2. Urusan Lingkungan Hidup, terdiri dari:

- a. Kualitas Air
 - 1) Belum ditetapkannya kelas mutu kualitas air di sungai-sungai yang menjadi kewenangan provinsi (melalui Perda).
 - 2) Belum adanya *database* kualitas air di sungai-sungai yang menjadi kewenangan provinsi.
 - 3) Belum adanya *database* berbasis spasial perusahaan-perusahaan yang mencemari air di sungai-sungai kewenangan provinsi.
 - 4) Belum adanya *database* berbasis spasial terkait pencemaran air yang menyebabkan sedimentasi.
 - 5) Masih terdapatnya perusahaan penghasil limbah belum melakukan pengelolaan limbah sebelum di buang ke lingkungan.
 - 6) Masih terdapat perusahaan penghasil limbah yang membuang limbahnya dengan belum memenuhi baku mutu lingkungan.



- 7) Masih terdapat kegiatan usaha/perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai dokumen lingkungan.
 - 8) Masih terdapat kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan belum memiliki dokumen lingkungan.
 - 9) Limbah rumah tangga (domestik) dibuang langsung ke lingkungan sebelum diolah terlebih dahulu.
 - 10) Masih banyak kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan perusahaan yang menyebabkan pencemaran sumber air (erosi).
 - 11) Masih banyak terdapat aktifitas pertambangan ilegal yang merusak dan mencemari lingkungan.
 - 12) Belum adanya *database* status mutu kualitas air/indeks kualitas air di Kalbar
- b. Kualitas Udara
- Belum adanya *database* berbasis spasial sumber pencemar udara dari sektor industry (perusahaan), belum adanya *database* berbasis spasial sumber pencemar udara dari sektor energi (perusahaan), belum adanya *database* berbasis spasial sumber pencemar udara dari sektor transportasi, belum optimalnya pengawasan sumber pencemaran udara perusahaan oleh pemerintah, masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan, belum adanya *database* status mutu kualitas udara/indeks kualitas udara.
- c. Bencana dan Kebencanaan
- 1) Belum adanya *database* berbasis spasial mengenai daerah banjir dan daerah rawan banjir, intensitas dan luasan daerah/wilayah terjadi bencana banjir semakin meningkat.
 - 2) Belum adanya *database* berbasis spasial untuk lokasi bencana tanah longsor dan daerah rawan tanah longsor, serta lokasi bencana puting beliung dan daerah rawan puting beliung. Intensitas terjadi bencana tanah longsor dan puting beliung cenderung semakin meningkat. Selain itu, bencana kebakaran hutan dan lahan serta permukiman selalu berulang terjadi.
 - 3) Masih belum adanya *database* indeks resiko bencana daerah.
- d. Perubahan Iklim dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
- 1) Masih terus terjadinya deforestasi dan degradasi hutan, belum adanya *database* berbasis spasial penyebab emisi disektor lahan (pertanian, perkebunan, dan kehutanan).



- 2) Masih terdapat areal berhutan di kawasan budidaya (APL), Kalbar masih merupakan provinsi pengemisi Gas Rumah Kaca. Belum adanya *database* berbasis spasial daerah-daerah terdampak perubahan iklim (adaptasi perubahan iklim).
- 3) Belum adanya *database* berbasis spasial aksi-aksi mitigasi perubahan iklim.
- 4) Belum adanya *database* berbasis Permasalahan Lingkungan Hidup Lainnya.
- 5) Belum adanya *database* berbasis spasial kerusakan lingkungan pesisir dan kerusakan lahan akibat pertambangan ilegal (kerusakan lahan akses terbuka), daerah resapan air (resapan air cenderung berkurang), belum ada perlindungan gambut pada kawasan APL (budidaya).
- 6) Belum ada pengendalian pemanfaatan lahan gambut melalui kebijakan fiskal; misalnya melalui PBB kehutanan, perkebunan dan pertambangan.
- 7) Belum adanya data sampah untuk kab/kota, data kinerja pengelolaan sampah. Masih ada sampah yang tidak tertangani, belum ada data sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah akhir perkotaan (TPA) masih bersifat open dumping dan partisipasi stakeholder dalam pengelolaan sampah masih belum optimal. Masih adanya pengelolaan sampah dengan cara dibakar.
- 8) Belum adanya data dan informasi penanganan/kinerja pengelolaan sampah di wilayah provinsi.
- 9) Belum adanya *database* berbasis spasial pengguna B3 dan penghasil limbah B3, masih terdapat limbah B3 yang tidak ditangani dan dibuang langsung ke lingkungan, belum adanya data kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3, belum terintegrasinya pengelolaan lingkungan hidup dengan NGO/Swasta/masyarakat.
- 10) Belum terpenuhinya luasan minimal 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan. Masih terdapatnya konflik kepentingan antara mempertahankan keanekaragaman hayati dengan kegiatan-kegiatan ekonomi sehingga perlindungan biodiversity masih lemah. Mendorong pengelolaan TAHURA, KEE, Kebun Raya, Ekowisata, untuk kepentingan food, water, dan energy.



11) Masih terbatasnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), belum terdatanya kearifan-kearifan dan pengetahuan local dalam pengelolaan lingkungan hidup.

12) Masih terdapatnya Rencana Strategis (Renstra) daerah yang belum dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terutama pada kawasan- kawasan strategis provinsi.

3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Permasalahan pembangunan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, yaitu: provinsi Kalimantan Barat belum mempunyai Rencana Umum Energi Daerah (RUED), angka rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik PLN terus mengalami peningkatan, namun masih berada dibawah rata-rata nasional, pertumbuhan kebutuhan listrik Kalbar lebih pesat dibandingkan pertumbuhan pasokan energinya, proporsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi listrik Kalbar masih rendah, dan pada saat bersamaan ketergantungan pada energy listrik berbahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan masih tinggi, belum optimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan, banyaknya desa disekitar perkebunan, kawasan hutan dan pulau- pulau kecil yang belum teraliri listrik, belum terpetakannya lokasi-lokasi kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI).

4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Belum tersedianya *database* teknis jalan (umur jalan, penanganan dan pembiayaan jalan). Sumber daya manusia yang relative terbatas terutama untuk tenaga teknis di OPD, konsultan, maupun di pihak kontraktor. Ketersediaan material yang terbatas, hal ini terbentur oleh permasalahan Izin Usaha Pertambangan (IUP), dimana tidak semua kontraktor mempunyai IUP pertambangan, sehingga ada sebagian yang mendatangkan material dari luar seperti dari Serawak-Malaysia (untuk lokasi proyek yang ada di daerah perbatasan Negara). Hal tersebut tentunya maerugikan kontraktor dari segi waktu karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama dengan biaya yang besar. Kendaraan yang lewat melebihi daripada kapasitas tonase jalan, sehingga jalan menjadi cepat rusak, tidak sesuai dengan umur rencana jalan yang telah direncanakan.
- b) Alih status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi sudah ditetapkan Gubernur, namun aset jalan kabupaten belum diserahkan ke provinsi. Hal ini tentunya akan menghambat dalam proses penganggaran. Penyiapan



lahan untuk pelebaran/pembangunan jalan dan jembatan masih mengalami kendala. Perlunya peningkatan kondisi kemantapan jalan provinsi, karena kondisi kemantapannya masih relative rendah (56,81%) dibawah kondisi mantap jalan nasional (92,87%).

- c) Lambatnya progres pembangunan jalan lingkaran luar, jembatan Kapuas III, Jembatan Duplikasi Kapuas I di Pontianak dan sekitarnya, hal ini disebabkan oleh belum tuntasnya permasalahan pembebasan lahan. Selain itu juga masih belum optimalnya progress fisik pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar
- d) Masih adanya jalan nasional yang belum memenuhi standar teknis (lebar 7 meter), perlunya pelebaran jalan dalam kota (Sanggau, Sekadau, dan Sintang). Masih adanya *missing link* jalan lintas tengah (Nanga Pinoh-Batas Kalteng). Belum semua kawasan strategis/kawasan industri/kawasan ekonomi khusus maupun pusat kegiatan nasional yang dapat didukung dengan akses jalan.
- e) Belum tuntasnya pembangunan jalan parallel perbatasan dan akses parallel perbatasan. Belum adanya pembangunan jalan tol/bebas hambatan di Kalbar,
- f) Belum terealisasinya pembangunan *fly over* di Kota Pontianak

5. Urusan Sumber Daya Air

Belum adanya *database* berbasis spasial tentang irigasi, rawa, cakupan sawah, air baku, dan luasan daerah wilayah banjir. Kondisi irigasi yang baik 2.202 Ha, rusak ringan 1.492 Ha, rusak sedang 481 Ha dan rusak berat 2.590 Ha. Kondisi rawa yang baik 24.821 Ha, rusak ringan 6.795 Ha, rusak sedang 6.860 Ha, dan rusak berat 16.044 Ha. Belum dapat diketahui kondisi saah di Kalbar. Selain itu, belum tersedia *database* air baku berbasis spasial (untuk pemanfaatan dan potensi). Kondisi ketersediaan/kemampuan air baku belum juga diketahui.

6. Urusan Keciptakarya, yang mencakup Komunikasi dan Informatika

Belum optimalnya capaian air bersih dan sanitasi sesuai dengan Program Nawacita yaitu 100 - 0 – 100. Hal ini bermakna bahwa pada Tahun 2019 capaian pengguna air bersih dan sanitasi mencapai 100%. Berdasarkan BPS Nasional bahwa Capaian Rumah Tangga Air Bersih menurut RPJMD Tahun 2017 adalah 54,67%. Sedangkan untuk sanitasi adalah 49,65% dan realisasi RPJMD Tahun 2017 rumah tangga bersanitasi mencapai 47,525. Kemudian, belum adanya



database pelayanan rumah tangga air bersih, bersanitasi, dan persampahan berbasis spasial serata belum terbangunnya TPA Regional di Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sanggau.

7. Urusan Perhubungan, yang terdiri dari:

a. Perhubungan Darat

Belum adanya *database* bidang lalu lintas berbasis spasial, jumlah sumber daya manusia bidang perhubungan masih terbatas/kurang (data kebutuhan ASN) Standard pelayanan minimal perlengkapan jalan masih terbatas (faskes: marka jalan, guardrail, strumbel strip, dll) baru tersedia 30%. Serah terima asset dermaga provinsi ke kabupaten belum terlaksana, padahal operasionalnya sudah menjadi kewenangan kab/kota, yang akan mempengaruhi penilaian BPK. Belum ditetapkannya terminal tipe B di Kalbar, sehingga perlu mendorong terbitnya SK Gubernur tentang hal tersebut.

Angkutan *feeder* antara Negara belum tersedia di Terminal Sei. Ambawang, hal ini disebabkan karena pihak swasta belum ada yang bersedia karena dinilai tidak bernilai ekonomi (belum menguntungkan swasta). Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus dapat menyediakannya. Belum operasionalnya angkutan/trayek antar Negara (orang dan barang) di Badau dan Aruk. Belum dibangunnya terminal barang export-import di Aruk, Badau, Jagoi Babang, dan Sei Kelik-Jasa. Belum operasionalnya terminal barang export-import di Entikong.

b. Perhubungan Laut

- 1) Belum adanya *database* bidang pelayaran berbasis spasial;
- 2) Jumlah sumberdaya manusia bidang perhubungan masih terbatas/kurang (data kebutuhan ASN);
- 3) Belum adanya standar minimal pelayanan (SPM) bidang pelayaran;
- 4) Masalah tata hubungan kerja pemerintah provinsi (Dishub) dengan UPP-KSOP belum optimal, hal ini disebabkan oleh koordinasi yang belum begitu intens sehingga menghambat proses kegiatan rutin.
- 5) Banyaknya permohonan pembangunan terminal khusus (tarsus) yang belum ada aturan;
- 6) Belum ditetapkannya kelas alur sungai di Kalbar (perlu survey). Masih banyaknya pelabuhan-pelabuhan Pelindo II yang belum optimal pemanfaatannya.



c. Perhubungan Udara

Kapasitas bandara Rahadi Oesman-Ketapang sudah melebihi kapasitas tampungnya (*overload*), sehingga perlu segera dikembangkan, hal ini sudah disetujui dan direkomendasi oleh gubernur. Sedang rencana pembangunan Bandara Kabupaten Kayong Utara sudah dilengkapi dengan studi perencanaan dan sudah ada rekomendasi dari Gubernur akan tetapi realisasinya masih belum maksimal, sehingga rencana pembangunan Bandara Kayong Utara perlu dipercepat. Rencana pembangunan Bandara Singkawang juga masih belum mengalami kemajuan yang signifikan padahal Kota Singkawang mempunyai potensi daerah wisata yang menjanjikan sebagai tempat pariwisata di Kalimantan Barat, untuk itu rencana pembangunan Bandara Singkawang juga perlu segera direalisasikan. Sedang untuk pengembangan Bandara Paloh belum optimal padahal bandara ini telah masuk kedalam tataran kebandaraan nasional. Kondisi landasan pacunya mencapai 750 meter x 30 meter dengan dana pembangunannya dari Angkatan Udara Republik Indonesia, Bandara ini diusulkan menjadi bandara perintis dan sudah ada MoU antara Kabupten Sambas dengan pihak Angkatan Udara Republik Indonesia. Bandara Sanggau Ledo di Kabupaten Bengkayang merupakan Bandara milik Angkatan Udara Republik Indonesia. (AURI) yang pengelolaan dan pemanfaatannya oleh AURI. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dan AURI pernah melakukan MoU terkait pemanfaatannya oleh Sipil, akan tetapi dalam realisasinya masih belum optimal sehingga perlu dikaji lagi MoU tersebut. Sedang untuk proses pembangunan rel kereta api juga masih belum mengalami kemajuan yang signifikan padahal FS dan DED nya sudah tersedia.

8. Urusan Perumahan Pemukiman

Belum ada SK Penetapan Kawasan Kumuh di Prov. Kalbar. Belum adanya data yang valid tentang jumlah rumah layak huni. Belum optimalnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat tentang lingkungan perumahan sehat, untuk menyampaikan indikator lingkungan perumahan sehat.

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika adalah belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana, prasarana serta layanan komunikasi dan informatika. Pada aspek telekomunikasi,



cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah (masih banyak terdapat blankspot) terutama di kawasan terdepan, terluar, dan terdepan. Hal ini dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Peleburan signal di daerah perbatasan Negara. Kemudian masih kurangnya penanganan berita-berita hoax, cyber security. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya berita atau informasi hoax perlu ditangani dan diklarifikasi secara cepat oleh pemerintah. Masih kurangnya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi berkaitan dengan sosialisasi, literasi, dan diseminasi. Contohnya berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Selain itu, masih kurangnya teknologi pengamanan data Prov. Kalbar dan belum adanya database eksisting BTS serta kurangnya koordinasi untuk menangani databaseblankspot. Penetrasi internet di Kalbar baru mencapai 17% saja, dan kondisi ini masih tergolong rendah. Hal ini juga di kuatkan dengan kenyataan bahwa belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana layanan komunikasi dan informatika.

F. Permasalahan Utama Pembangunan Kalimantan Barat

Berdasarkan permasalahan pembangunan bidang-bidang pembangunan di Kalimantan Barat, perlu dirumuskan permasalahan utama pembangunan. Perumusan permasalahan utama pembangunan ini diarahkan agar implementasi program dan kegiatan dapat lebih terarah, fokus, sinergi dan berkelanjutan. Adapun permasalahan utama pembangunan Kalimantan Barat dirumuskan berdasarkan kriteria:

1. Berpengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD, Merupakan tugas dan tanggungjawab PD Provinsi;
2. Dampak yang ditimbulkan terhadap publik,
3. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;
4. Kemungkinan atau kemudahan pelaksanaannya.

Dari rumusan diatas maka permasalahan pembangunan utama Kalimantan Barat sebagai berikut:

1. Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan pada posisi perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1 yang mengakibatkan maraknya praktek-praktek ilegal dan potensi ancaman terhadap wawasan kebangsaan;



2. Wilayah perbatasan, pedalaman, terpencil, pesisir dan kepulauan yang belum berkembang secara optimal;
3. Rentang kendali pemerintahan yang panjang disebabkan belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas antar daerah di wilayah Kalimantan Barat serta kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang belum memadai;
4. Pemerataan Layanan Akses, Kualitas dan Relevansi serta Tata Kelola Pendidikan dan Tata Kelola Kesehatan yang belum optimal;
5. Rendahnya minat investasi di Kalimantan Barat, baik yang bersumber modal asing maupun penanaman modal dalam negeri;
6. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (K-UMKM), termasuk pemberdayaan ekonomi kreatif yang masih rendah;
7. Produksi dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah, belum mendukung peningkatan ketahanan pangan;
8. Nilai dan volume perdagangan Kalimantan Barat keluar negeri maupun dalam negeri masih rendah;
9. Masih belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi, termasuk peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN;
10. Belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa dan peran serta masyarakat desa dalam proses pembangunan;
11. Menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan;
12. Derajat kesejahteraan masyarakat masih rendah serta ketimpangan pendapatan yang cenderung stagnan.

G. Permasalahan Dimensi Kewilayahan

Pembahasan dimensi kewilayahan dikelompokkan berdasarkan kawasan yaitu pedalaman, perbatasan antar negara, serta pesisir dan kepulauan. Secara umum, Kalimantan Barat diklasifikasikan sebagai Daerah Tertinggal, disebabkan dari 14 (empat belas) kab/kota terdapat 8 (delapan) yang masih berstatus Tertinggal. Penyebab ketertinggalan beberapa daerah tersebut antara lain (i) letak geografis yang sulit dijangkau atau terisolir; (ii) kepadatan penduduk relatif rendah; (iii) memiliki potensi sumber daya alam namun tidak dikelola secara optimal; (iv) tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang sederhana, (v) minimnya ketersediaan akses prasarana perhubungan, transportasi, komunikasi, listrik, dan air bersih; (vi) karena beberapa faktor pembangunan, seperti keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah, termasuk pula prioritas penanganan dan pendekatan yang dilakukan.



1. Wilayah Pedalaman

- a. Rendahnya Ketersediaan dan Akses terhadap Sarana dan Prasarana;
- b. Terbatasnya Alternatif Lapangan Kerja;
- c. Rendahnya Akses terhadap Permodalan;
- d. Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat;
- e. Rendahnya Tingkat Ketahanan Pangan;
- f. Degradasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
- g. Belum Optimalnya Peran Kelembagaan;
- h. Masih lemahnya kemandirian desa;
- i. Masih lemahnya perencanaan pembangunan desa;
- j. Lemahnya kapasitas pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan lembaga Lembaga kemasyarakatan;
- k. Lemahnya komitmen pemerintah daerah.

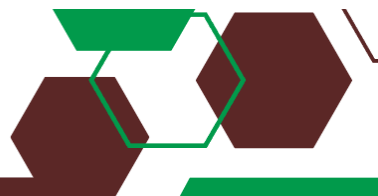
2. Wilayah Perbatasan antar Negara

Permasalahan dalam pengembangan wilayah perbatasan, antara lain meliputi yaitu:

- a. Belum tegasnya batas administrasi perbatasan antar negara; Penanganan dan pengelolaan keamanan, hukum, dan pertahanan di wilayah perbatasan;
- b. Rendahnya kesejahteraan masyarakat karena terbatasnya akses transportasi dan kurang optimalnya pelayanan sosial dasar termasuk ketersediaan energi kelistrikan yang menjangkau masyarakat di perbatasan dan terhambatnya kegiatan ekonomi lokal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
- c. Belum optimalnya kebijakan dan program-program dari berbagai sektor yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat perbatasan, belum optimalnya koordinasi antar Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
- d. Belum jelasnya mekanisme koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan perbatasan serta masih belum optimalnya keberpihakan dari kepemimpinan lokal dan kelembagaan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

3. Wilayah Pesisir dan Kepulauan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah pesisir dan kepulauan, antara lain:



- a. Terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah pesisir dan kepulauan dengan wilayah yang relatif lebih maju;
- b. Kepadatan penduduk relatif rendah dan terpencar di pulau-pulau kecil;
- c. Kebanyakan wilayah-wilayah ini miskin sumberdaya, khususnya sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang belum dikelola secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat luas;
- d. Masih belum memadainya ketersediaan energi dan kelistrikan. Masih ada wilayah pesisir dan kepulauan yang belum teraliri listrik, sementara pengelolaan energi terbarukan masih belum berkembang;
- e. Rendahnya Akses terhadap Modal Usaha;
- f. Rendahnya akses terhadap permodalan, akan menghambat pengembangan usaha masyarakat nelayan dan berpengaruh terhadap produktivitas nelayan;
- g. Belum optimalnya pembangunan di wilayah pesisir dan kepulauan;
- h. Belum memadainya fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih termasuk prasarana komunikasi dan informasi yang akan memperlancar dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir dan kepulauan;
- i. Degradasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
- j. Belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah ini.

1.1.2.2 Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat

A. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat

Misi jabatan Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan periode lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD dikemukakan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2025 adalah “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 berkomitmen melaksanakan kepemimpinannya mewujudkan visi RPJPD tersebut. Visi pembangunan daerah tahun 2018-2023, yaitu:

TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN



Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan Pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

B. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudera, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didrati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance***, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan

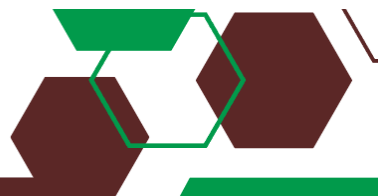


internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).

3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukimn, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi.

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan diselesaikan oleh seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangan sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan pilihan strategi pembangunan. Tujuan akan mempresentasikan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan



permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran akan menjabarkan tujuan dalam bentuk hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur dan rasional.

1.1.2.3 Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan maka dipilih strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk 5 tahun kedepan. Adapun program yang direncanakan sesuai dengan misi yang diemban adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.22

Program Yang Direncanakan Sesuai Dengan Misi yang Diemban

Misi 1: Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur		
No.	Perangkat Daerah	Program
1.	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
2.		Program Pengelolaan Energi Terbarukan
3.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan
4.		Program Pengelolaan Sumber Daya Air
5.		Program Pengelolaan Sumber Daya Air
6.		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
7.		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
8.		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
9.		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan
10.		Program Penataan Bangunan Gedung
11.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
12.		Program Kawasan Pemukiman
13.	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
14.		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
15.		Program Pengelolaan Pelayaran
16.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

**Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance**

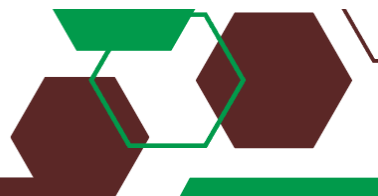
17.	Biro Administrasi Pembangunan	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
18.	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
19.	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
20.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
21.		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Penataan Desa
23.		Program Administrasi Pemerintahan Desa
24.	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
25.	Badan Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah
26.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
27.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
28.		Program Pengelolaan Arsip
29.		Program Perizinan Penggunaan Arsip
30.	Badan Penelitian Dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
31.	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
32.		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
33.	Biro Administrasi Pimpinan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
34.	Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
35.	Badan Penghubung Prov. Kalbar	Program Pelayanan Penghubung
36.	Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
37.		Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
38.	Biro Umum Setda Prov Kalbar	Program Penataan Administrasi Umum
39.	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan
40.		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
41.		Program Penyelenggaraan Pengawasan
42.		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
43.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah



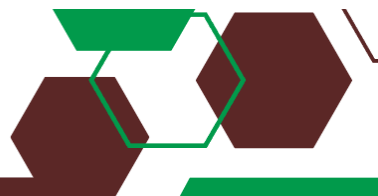
44.		Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan
45.		Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
46.		Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
47.		Program Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakarya Dan Kewilayahan
48.	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar	Program Penataan Organisasi
49.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
50.		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
51.		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
52.		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
53.	Biro Perekonomian	Program Perekonomian Dan Pembangunan
Misi 3: Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Produktif, Dan Inovatif		
54.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan
55.		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
56.		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
57.		Program Pengembangan Kesenian Tradisional
58.		Program Pengembangan Kebudayaan
59.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan
60.		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
61.	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
62.		Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
63.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
64.		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Dan Minuman
65.	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
66.		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan



67.		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
68.	Rsj Provinsi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
69.	Rsj Sungai Bangkong	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
70.	Rsud Dr. Soedarso	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
71.		Program Peningkatan Kapasitas Sdmk
72.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
73.		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
74.		Program Kualitas Keluarga
75.		Program Perlindungan Perempuan
76.		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
77.		Program Perlindungan Khusus Anak
78.	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk
79.	Dinas Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
80.		Program Penanganan Kerawanan Pangan
81.		Program Pengawasan Keamanan Pangan
82.		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
Misi 4: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera		
83.	Dinas Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
84.		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
85.		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
86.		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
87.		Program Perizinan Usaha Pertanian
88.		Program Penyuluhan Pertanian
89.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
90.		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya



91.		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
92.		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
93.		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
94.	Dinas Perkebunan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
95.		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
96.		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
97.		Program Penyuluhan Pertanian
98.		Program Perizinan Usaha Pertanian
99.	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
100.		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
101.		Program Penyuluhan Pertanian
102.		Program Perizinan Usaha Pertanian
103.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan
104.		Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
105.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
106.		Promosi Penanaman Modal
107.		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
108.		Program Pelayanan Penanaman Modal
109.	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
110.		Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
111.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
112.		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
113.		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
114.		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
115.		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasi



116.		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
117.		Program Pengembangan Umkm
118.	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
119.		Program Pemasaran Pariwisata
120.		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
121.		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
122.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Program Pengembangan Ekspor
123.		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
124.		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
125.		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
126.		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
127.		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
128.		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
129.		Program Pengendalian Izin Usaha Industri
130.		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
131.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Perencanaan Tenaga Kerja
132.		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
133.		Program Penempatan Tenaga Kerja
134.		Program Hubungan Industrial
135.		Program Pengawasan Ketenagakerjaan
136.		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
137.		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
138.		Program Pengembangan Nani Kawasan Transmigrasi
139.	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
140.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
141.		Program Peningkatan Kerjasama Desa
142.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Program Pengelolaan Perbatasan



Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib		
143.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
144.		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
145.		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
146.		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
147.		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
148.	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
149.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
150.		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
151.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
152.		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
153.		Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
154.		Program Pengelolaan Persampahan
155.		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
156.		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
157.		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh
158.		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
159.		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
160.		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)



161.		Program Pengelolaan Hutan
162.		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
163.		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)
164.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah khususnya pada urusan wajib pelayanan dasar memiliki standar pelayanan minimal per bidang urusan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bidang urusan yang memiliki SPM yaitu:

1. Urusan pendidikan
2. Urusan kesehatan
3. Urusan Pekerjaan umum
4. Urusan perumahan rakyat
5. Urusan sosial
6. Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri 100 tahun 2018, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Daerah wajib menyampaikan laporan penerapan SPM kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir/Tahun 2021;
2. Pengisian format penyusunan laporan SPM daerah Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018, sedangkan laporan SPM daerah tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

Sesuai dengan bidang urusan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan standar Pelayanan Minimal, terdapat beberapa jenis SPM berdasarkan bidang urusan yang menjadi kewenangan provinsi yaitu:

1. Pendidikan menengah
2. Pendidikan khusus



3. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
4. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
5. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota
6. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota
7. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi
8. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.
9. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi.
10. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti
11. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti
12. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti
13. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
14. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Tahapan penerapan SPM berpedoman pada ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Dalam pelaksanaan tiap tahapan di atas, Biro Pemerintahan selaku sekretariat tim penerapan SPM Provinsi Kalimantan Barat telah memfasilitasi dasar ketentuan pelaksanaan SPM dengan mengusulkan Peraturan Gubernur terkait pedoman pelaksanaan SPM dan telah ditetapkan.

Peraturan Gubernur tersebut menjadi dasar pelaksanaan bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar untuk menerapkan SPM pada masing-masing bidang urusan yang diampunya.

Penerapan SPM dilaksanakan dengan mengadakan rapat koordinasi dan pertemuan yang pada tahun 2021 mengalami kendala sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dengan adanya wabah Covid-19 menyebabkan dibatasinya kegiatan yang mengumpulkan banyak orang pada suatu lokasi. Kendala tersebut



diatasi dengan menyediakan ruang virtual untuk tetap melaksanakan kegiatan sehingga pelaksanaan pengawasan serta evaluasi tetap terselenggara dengan efektif.

secara umum pelaksanaan urusan SPM di Provinsi Kalimantan Barat berjalan dengan baik, penjelasan terkait hal ini akan digambarkan secara khusus pada Bab IV buku LPPD ini.

BAB II



CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	67.9	68.63	1.075%
2	Angka Kemiskinan	6.84	6.81	-0.439%
3	Angka Pengangguran	5.82	5.11	-12.199%
4	Pertumbuhan Ekonomi	4.78	5.07	6.067%
5	Pertumbuhan Per kapita	42.28	46.16	9.177%
6	Ketimpangan Pendapatan	0.315	0.311	-1.27%

Sumber: Data Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2023

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.



2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Pendidikan	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	429	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	14451	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	11595	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	100797	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	55898	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	4867	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	2878	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	7680	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	4365	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	1374	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	684	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	1528	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	889	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	9864	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	5348	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1),	754	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	357	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	20	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	16	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	1451	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	832	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)	21	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima	137	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			
	Pendidikan	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	952	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	340	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	239	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	69	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	61	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	144	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	42	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Pendidikan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	57	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
2	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	19	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	242	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	242	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Kebudayaan	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	45	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Kebudayaan	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	19	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Kebudayaan	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	9	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Kebudayaan	Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Kebudayaan	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	1	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Kebudayaan	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu)	19	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)			
	Kebudayaan	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	6074	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Kebudayaan	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	50353	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Kebudayaan	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Kebudayaan	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Kebudayaan	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	0	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Kebudayaan	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	45	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Kebudayaan	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	45	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Kebudayaan	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	45	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Kebudayaan	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	2	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	
	Kebudayaan	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	16	Dinas Pendidikan Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
3	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	5	Dinas Kesehatan Prov. Kalbar	
	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	53	Dinas Kesehatan Prov. Kalbar	
	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1748869	Dinas Kesehatan Prov. Kalbar	
	Kesehatan	Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	117	Dinas Kesehatan Prov. Kalbar	
	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	7920	Dinas Kesehatan Prov. Kalbar	
	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	9	Dinas Kesehatan Prov. Kalbar	
	Kesehatan	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	3	Dinas Kesehatan Prov. Kalbar	
	Kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	347	Dinas Kesehatan Prov. Kalbar	
	Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	11	Dinas Kesehatan Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Kesehatan	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	5	Dinas Kesehatan Prov. Kalbar	
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	1437917,8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	336360	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (HA)	103,41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	20681,72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	70659,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	57,57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	59,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Penataan Ruang			Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah SPALD Regional	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Total kapasitas SPALD Regional	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	1534,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang dibangun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yg dibangun	135	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	159	Dinas Pekerjaan Umum dan	



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Penataan Ruang			Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	167,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan yang dipelihara	18,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jembatan yang dipelihara	470	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui	0	Dinas Pekerjaan Umum dan	



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Penataan Ruang	kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)		Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
	Perumahan Rakyat dan	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	75	Dinas Pekerjaan Umum dan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Kawasan Pemukiman			Penataan Ruang Prov. Kalbar	
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	75	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	75	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	55	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	20	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	75	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	
	Perumahan Rakyat dan	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Kawasan Permukiman	rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Permukiman Prov. Kalbar	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah luasan (ha) kawasan permukiman kumuh \geq 10-15 Ha	856,033	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	55	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	23,84303	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah permukiman yang terfasilitasi PSU	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah pengembang yang teregistrasi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	
6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	110	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar	
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	293	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Perlindungan Masyarakat				
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	16	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar	
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	8	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar	
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	22	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar	
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	1	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar	
7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar	
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar	
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar	
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar	
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar	
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	1	Badan Penanggulangan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Perlindungan Masyarakat			Bencana Daerah Prov. Kalbar	
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar	
8	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	37	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	37	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	4	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	37	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	37	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	4	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	37	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	4	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	4	Dinas Sosial Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Sosial	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	4	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	6	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	37	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	37	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	37	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	1	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	40	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	40	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti)	3	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	0	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	40	Dinas Sosial Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Sosial	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	1	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	2	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	1	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	6	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	3	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	2	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	2	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	40	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	40	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	3	Dinas Sosial Prov. Kalbar	



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	35	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	35	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	5	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	35	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	35	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	4	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	3	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	1	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	6	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	2	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	2	Dinas Sosial Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar	12	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penuluruhan keluarga	32	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	7	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	6	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	340	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	20	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	3	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	32	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	1	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	1	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	20	Dinas Sosial Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Sosial	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	1	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	6	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	1	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	1	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti	0	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulurusan keluarga	340	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	340	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	14915	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	14915	Dinas Sosial Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Sosial	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	14	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	2	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	50	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
	Sosial	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	580	Dinas Sosial Prov. Kalbar	
9	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi.	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	88,76	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja.	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan.	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi KKNI / okupasi.	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	67,6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Tenaga Kerja	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan.	6,85	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Persentase penganggur yang dilatih	11,32	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	10,3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Persentase penyerapan lulusan.	32,5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Persentase LPK yang terakreditasi	95	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Tenaga Kerja	Data tingkat produktivitas total.	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP).	84,32	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yg telah memiliki PKB.	61,058	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan pada tahun n.	164849	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	85,802	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.	44,259	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit.	17,531	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	18,662	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah mogok kerja	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Tenaga Kerja	Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan kepentingan	46	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan hak	72	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah Perselisihan PHK	449	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	800	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	113	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.	15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Tenaga Kerja	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	85,593	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	6011	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	4391	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu provinsi	37	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi.	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi.	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi Pasar Kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER).	6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya.	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah ijin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diterbitkan.	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah Pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kebebasan Berserikat.	6948	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI).	6948	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Pengupahan.	6948	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Jaminan Sosial.	6948	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan.	6948	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	6948	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.	5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online.	10217	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
10	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	5663,758	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	706	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
	Transmigrasi	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
11	Pemberdayaan Perempuan dan	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	61	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Perlindungan Anak			Perlindungan Anak Prov. Kalbar	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	84	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	Tidak ada
12	Pangan	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	
	Pangan	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
				Perlindungan Anak Prov. Kalbar	
	Pangan	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	216363,25	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	
	Pangan	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	
	Pangan	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	
	Pangan	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	
	Pangan	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	
	Pangan	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Pangan	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	270,119	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	
	Pangan	Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	
13	Pertanahan	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar	
	Pertanahan	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar	
	Pertanahan	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar	
	Pertanahan	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
14	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	55,52	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	
	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	
	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	57,67	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	
	Lingkungan Hidup	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	
	Lingkungan Hidup	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	0,435	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	
	Lingkungan Hidup	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	450	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	
	Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	Dinas Lingkungan Hidup dan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
				Kehutanan Prov. Kalbar	
	Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	
	Lingkungan Hidup	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	
15	Kehutanan	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	88,2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	
	Kehutanan	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	73,529	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	
	Kehutanan	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	7015,1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	
	Kehutanan	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	0,1023	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Kehutanan	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	0,10233	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	
	Kehutanan	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6	64,8396	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	
	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	
	Kehutanan	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	
	Kehutanan	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	
	Kehutanan	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	
	Kehutanan	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	11,4942	Dinas Lingkungan Hidup dan	



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
				Kehutanan Prov. Kalbar	
	Kehutanan	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	80	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	
	Kehutanan	jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	333,33	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	
	Kehutanan	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	221	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	
	Kehutanan	terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	33,333	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	
	Kehutanan	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	
16	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi pelayanan Adminduk	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
17	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20,6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	31,2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	51,32	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	26	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	30	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	Pengendalian penduduk dan	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	61,5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	keluarga berencana				
	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	82,3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	43,35	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	20,48	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
18	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	2334	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	1603	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar	
19	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	59,78	Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	
	Perhubungan	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	87,84	Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	
	Perhubungan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	62,66	Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	
20	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	94,59	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	
	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	91,89	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	1	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	
	Komunikasi dan Informatika	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 te	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	
	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	
	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	
	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	
	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	62,5	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Komunikasi dan Informatika	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0,99	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	
	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	
	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	
	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	
	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	
	Komunikasi dan Informatika	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	
	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	
	Komunikasi dan Informatika	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	
	Komunikasi dan Informatika	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Komunikasi dan Informatika	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	80,38	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	
	Komunikasi dan Informatika	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	63,36	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	
	Komunikasi dan Informatika	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	88,89	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	
21	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	1	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	
	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	6	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	Daftar Survei Statistik Sektoral
	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	15	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	Daftar Kompilasi Statistik Sektoral
	Statistik	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	6	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Statistik	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	15	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	
	Statistik	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	Buku Meta Data statistik Sektoral
	Statistik	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	Buku Meta Data statistik Sektoral
22	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	Laporan Kegiatan Kontra Pengindraan 2021
	Persandian	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	Daftar Sistem Elektronik yang menerapkan SMKI
	Persandian	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	2,4	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	Daftar Sistem Elektronik yang telah di audit dengan kategori Resiko Rendah



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Persandian	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	Data Rekap Sanapati pemprov kalbar
23	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	3,39	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	
	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	70,07	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	
	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	24,54	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	
	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	67,06	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	
	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	87,66	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	37,81	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	
	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	33,77	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	
	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	33,12	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	
	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	10,06	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	
	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	19,48	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	
	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	100	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	6,82	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	
	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	3,87	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	
	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	28,16	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	
	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	31,33	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	
	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	9,78	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	
	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	4,71	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	
	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	4,53	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	
	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	4,53	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
24	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	0	DPMPTSP Prov. Kalbar	
	Penanaman Modal	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	DPMPTSP Prov. Kalbar	
	Penanaman Modal	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	DPMPTSP Prov. Kalbar	
	Penanaman Modal	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0	DPMPTSP Prov. Kalbar	
	Penanaman Modal	Kegiatan pameran penanaman modal	0	DPMPTSP Prov. Kalbar	
	Penanaman Modal	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	DPMPTSP Prov. Kalbar	
	Penanaman Modal	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	5	DPMPTSP Prov. Kalbar	
	Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	4207	DPMPTSP Prov. Kalbar	
	Penanaman Modal	Laporan realisasi penanaman modal	20,08	DPMPTSP Prov. Kalbar	
	Penanaman Modal	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	5	DPMPTSP Prov. Kalbar	
	Penanaman Modal	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	63	DPMPTSP Prov. Kalbar	
	Penanaman Modal	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi	6	DPMPTSP Prov. Kalbar	
25	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
				Pariwisata Prov. Kalbar	
	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	
	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kade pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	1110	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	
	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	
	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	
	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	38	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	
	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	286450	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	
	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	
26	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	569	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	
	Pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	736	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	
	Pariwisata	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	82069920	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	
	Pariwisata	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	5018	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	
	Pariwisata	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	216	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
				Pariwisata Prov. Kalbar	
	Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	39,25	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	
	Pariwisata	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	0	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	
	Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	27128	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	
	Pariwisata	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	1194417	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	
	Pariwisata	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	
	Pariwisata	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Pariwisata	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	
	Pariwisata	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0,53	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	
	Pariwisata	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	
	Pariwisata	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	
27	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,05	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
	Perpustakaan	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0,58	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
	Perpustakaan	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,0161	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	2,86	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
	Perpustakaan	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	28745	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
	Perpustakaan	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	43106	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
	Perpustakaan	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	1130	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
	Perpustakaan	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	567	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
	Perpustakaan	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
	Perpustakaan	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	2265	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
28	Kearsipan	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
	Kearsipan	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
	Kearsipan	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	35,52	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
	Kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
	Kearsipan	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
	Kearsipan	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
	Kearsipan	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
	Kearsipan	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Kearsipan	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
	Kearsipan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
29	Kelautan dan Perikanan	Jumlah laut pedalaman teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (wpp)	1	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar	
	Kelautan dan Perikanan	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 - 30 GT	421	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar	
	Kelautan dan Perikanan	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	41,66	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar	
	Kelautan dan Perikanan	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	126	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar	
	Kelautan dan Perikanan	Jumlah kapal yang terdaftar	50	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar	
	Kelautan dan Perikanan	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	1	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Kelautan dan Perikanan	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	28,08	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar (Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan)	
	Kelautan dan Perikanan	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	100	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar	
	Kelautan dan Perikanan	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	150	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar	
	Kelautan dan Perikanan	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	10	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar	
	Kelautan dan Perikanan	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku	23	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar	
	Kelautan dan Perikanan	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	50	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Kelautan dan Perikanan	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	30	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar	
	Kelautan dan Perikanan	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	24	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar	
30	Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	636	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikulura Prov. Kalbar	
	Pertanian	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	164	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikulura Prov. Kalbar	
	Pertanian	Dokumen pengawasan benih yang beredar	83	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikulura Prov. Kalbar	
	Pertanian	Prasarana pertanian yang digunakan	100	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikulura Prov. Kalbar	
	Pertanian	Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	19888,49	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikulura Prov. Kalbar	



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Pertanian	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	1525,79	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Kalbar	
	Pertanian	Penerbitan izin usaha pertanian	70	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Kalbar	
	Pertanian	Persentase sarana pertanian yang digunakan	96,82	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Kalbar	
	Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	85,85	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Kalbar	
	Pertanian	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	100	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Kalbar	
31	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	0	Dinas ESDM Prov. Kalbar	
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	0	Dinas ESDM Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	1	Dinas ESDM Prov. Kalbar	
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	1	Dinas ESDM Prov. Kalbar	
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	1	Dinas ESDM Prov. Kalbar	
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	0	Dinas ESDM Prov. Kalbar	
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	0	Dinas ESDM Prov. Kalbar	
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait IUJP	0	Dinas ESDM Prov. Kalbar	
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	0	Dinas ESDM Prov. Kalbar	
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	0	Dinas ESDM Prov. Kalbar	
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	0	Dinas ESDM Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Energi dan Sumber Daya Mineral	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	0	Dinas ESDM Prov. Kalbar	
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	1	Dinas ESDM Prov. Kalbar	
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	0	Dinas ESDM Prov. Kalbar	
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	0	Dinas ESDM Prov. Kalbar	
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	0	Dinas ESDM Prov. Kalbar	
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	1	Dinas ESDM Prov. Kalbar	
	Energi dan Sumber Daya Mineral	Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	262	Dinas ESDM Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
32	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	89	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
	Perdagangan	Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk ekspor	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
	Perdagangan	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
	Perdagangan	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi	50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
	Perdagangan	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
	Perdagangan	Indeks Kinerja BPSMB	6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Perdagangan	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
	Perdagangan	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
	Perdagangan	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
	Perdagangan	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
	Perdagangan	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
	Perdagangan	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	33,81	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
	Perdagangan	Jumlah barang beredar yang diawasi	50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
	Perdagangan	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Tersedianya bangunan pusat distribusi	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
	Perdagangan	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
	Perdagangan	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Beroperasinya pusat industri	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
	Perdagangan	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
	Perdagangan	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	6,71	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
	Perdagangan	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
33	Perindustrian	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
	Perindustrian	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
	Perindustrian	Persentase jumlah izin perluasan industri (IUI) bagi industri besar yang diterbitkan	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi			
	Perindustrian	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	78,35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	

**2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil**Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No.	Urusan	IKK Outcome (Hasil)	Capaian	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	87,0244407	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar	untuk data penyebut yaitu jumlah penduduk usia 16-18 tahun menggunakan data semester I Data Agregat Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022
2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	58,0435397	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar	data penyebut berdasarkan Data Agregat Kependudukan semester I tahun 2022 dari Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat
3	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1,1606012	Dinas Kesehatan Prov. Kalbar	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan di Provinsi Kalimantan Barat 1 : 1,16
4	Kesehatan	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	41,509434	Dinas Kesehatan Prov. Kalbar	Persentase RS Rujukan Negeri dan Swasta yang terakreditasi minimal utama di Provinsi Kalbar sebesar 41,51 %
5	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	Dinas Kesehatan Prov. Kalbar	Kabupaten yang terdampak bencana di Tahun 2022: Kab Sanggau (490.805), Kab Ketapang (575817), Kab Sintang (433.614), Kab Kapuas Hulu (266.651), Kab Sekadau (217.468), Kab Melawi (209.958), 100% penduduk di daerah



No.	Urusan	IKK Outcome (Hasil)	Capaian	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
6	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100	Dinas Kesehatan Prov. Kalbar	terdampak bencana yang mendapatkan pelaya Penduduk Kab/ Kota yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB (Suspek Rabies, Difteri, Campak, Diase, Keracunan Makanan) yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yaitu penduduk Kota Pontianak (673.400), Kab.Mempawah (308771), Kab Sambas (640.910), S
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	53,0167844	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	17,2613867	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	Satuan luas kawasan dalam hektar (Ha)
9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	56,9048136	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	Nilai capaian diperoleh dari realisasi capaian 2021 (34.491,64) ditambah dengan realisasi penanganan 2022 (1.150,69)



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No.	Urusan	IKK Outcome (Hasil)	Capaian	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	68,7891065	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	Tidak ada capaian fisik untuk 2022, data yang dilampirkan merupakan data capaian 2021 yang merupakan data kumulatif dari tahun sebelumnya.
11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	Belum terbangunnya sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) regional (surat keterangan sudah terlampir).
12	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kemandapan jalan	72,2756149	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
13	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	78,564941	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	Tidak ada rincian data tenaga ahli konstruksi yang bersertifikat diluar yang ditangani oleh Dinas PUPR.
14	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	Terjadi bencana tugas Provinsi Sesuai SK kebencanaan Prov.Kalbar (Lampiran Laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No.	Urusan	IKK Outcome (Hasil)	Capaian	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
15	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	Perumahan Rakyat Tahun 2022) Tidak terjadi relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni
16	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	2,7852933	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	- Kota Singkawang (Kec. Singkawang Tengah Kel.Roban Luas Kumuh 11.20 Ha) - Kab. Sanggau (Kec. Tayan Hulu Desa Sosok Luas Kumuh 14.70 Ha) - Kab. Mempawah (Kec. Jongkat Desa Jungkat Luas Kumuh 12.84 Ha) - Kab. Kubu Raya (Kec. Rasau Jaya Desa Rasa
17	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	
18	Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar	Data Layanan Trantibum Tahun 2022



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No.	Urusan	IKK Outcome (Hasil)	Capaian	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
19	Perindungan Masyarakat Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	84,2105263	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar	Data Penegakan Perda dan Perkada Tahun 2022
20	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	33,3333333	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar	
21	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan pra bencana	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar	
22	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar	
23	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	76,7857143	Dinas Sosial Prov. Kalbar	Data Bidang Rehabilitasi Sosial
24	Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	69,509434	Dinas Sosial Prov. Kalbar	Data Bidang Rehabilitasi Sosial



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No.	Urusan	IKK Outcome (Hasil)	Capaian	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
25	Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial Prov. Kalbar	Data Bidang Rehabilitasi Sosial
26	Sosial	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial Prov. Kalbar	Data Bidang Rehabilitasi Sosial
27	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	60,479463	Dinas Sosial Prov. Kalbar	Data Bidang Rehabilitasi Sosial
28	Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	85,7142857	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
29	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,0243396	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
30	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	5504932439	Data dari BPS	
31	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan	85,9626107	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No.	Urusan	IKK Outcome (Hasil)	Capaian	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).			
32	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	50,116725	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
33	Tenaga Kerja	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	68,0043065	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
34	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	40,4126516	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	
35	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	0,2578167	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	
36	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	16,650855	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	
37	Pangan	Persentase cadangan pangan	42,3248358	Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalbar	Sumber data dinas ketahanan pangan provinsi kalbar



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022



No.	Urusan	IKK Outcome (Hasil)	Capaian	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
38	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	Bukan Merupakan Kewenangan Provinsi
39	Pertanahan	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	
40	Pertanahan	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar	Bahwa Gubernur tidak ada kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Izin Lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, pada Pasal 7 menyatakan bahwa Izin Lokasi di
41	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	71,9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	ekspose capaian sementara IKHL Tahun 2022 tanggal 22 desember 2022 oleh KLHK dan dirilis pada website Ditjen PPKL KLHK
42	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang	20,3703704	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	Tabel Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi serta data usaha dan atau kegiatan dilakukan



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No.	Urusan	IKK Outcome (Hasil)	Capaian	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			pemeriksaan di Provinsi Kalbar Tahun 2022
43	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Kalbar	
44	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan data kependudukan	59,4594595	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Kalbar	Penyebutnya seharusnya Jumlah OPD Provinsi Kalimantan Barat
45	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	66,4285714	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar	Jumlah Desa Tertinggal 2021 (186 Desa) dikurang Jumlah Desa Tertinggal 2022 (94 Desa) dibagi Jumlah desa Tertinggal Tahun 2021 (280 Desa) dikali 100%
46	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	11,8681319	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar	Jumlah desa berkembang 2021 (910 Desa) dikurang Jumlah desa berkembang 2022 (802 Desa) dibagi jumlah desa berkembang 2021 (910 Desa) dikali 100%
47	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Kalbar	
48	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	61,0971899	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Kalbar	Data diunduh dari Aplikasi BKKBN periode Desember Tahun 2022



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No.	Urusan	IKK Outcome (Hasil)	Capaian	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
49	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	16,4000369	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Kalbar	Data diperoleh dari hasil koordinasi dengan BKKBN Perwakilan Prov. Kalbar, data Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani yg ditampilkan pada aplikasi SIGA BKKBN tidak tampil karna kesalahan sistem, sehingga kami menggunakan perhitungan manual d
50	Perhubungan	Rasio konektivitas Provinsi	0,86	Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	
51	Perhubungan	V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,58	Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	
52	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi dan Informatik Prov. Kalbar	
53	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	65,6	Dinas Komunikasi dan Informatik Prov. Kalbar	
54	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	100	Dinas Komunikasi dan Informatik Prov. Kalbar	



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No.	Urusan	IKK Outcome (Hasil)	Capaian	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
55	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	40,5844156	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	Elemen penyebut jumlah seluruh koperasi merupakan jumlah koperasi aktif binaan provinsi
56	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	58,3561228	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar	
57	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	14,4811859	Dinas PTSP Prov. Kalbar	Jumlah Investasi meningkat sebesar 14,48% dibandingkan dengan tahun lalu, dengan capaian dari target sebesar 96,59%
58	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	16,739993	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kalbar	Data Statistik Pemuda 2022
59	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,1704281	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kalbar	Data Statistik Pemuda 2022 dan Data Bidang Kepemudaan
60	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	12	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kalbar	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional Dibuat dalam daftar terpisah (emas, perak, perunggu) Emas : 1 Perak : 5 Perunggu : 6
61	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik	100	Dinas Komunikasi dan Informatik Prov. Kalbar	



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No.	Urusan	IKK Outcome (Hasil)	Capaian	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
62	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	Dinas Komunikasi dan Informatik Prov. Kalbar	
63	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	55,503876	Dinas Komunikasi dan Informatik Prov. Kalbar	
64	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	1273,684211	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar	
65	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	64,1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
66	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	65,32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
67	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	83,81	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	$T=(a=100+i=100+s=35.25+j=100)/4$



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No. -1	Urusan -2	IKK Outcome (Hasil) -3	Capaian -4	Sumber Data -5	Keterangan -6
68	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	$T = (m=100+b=0+g=100+a=100+c=0+i=0)/6$
69	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	111,4924363	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar	
70	Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	55,07	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang patuh sebanyak 3 unit dari 50 unit jumlah sampel, jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang patuh sebanyak 114 unit kapal ikan dari 150 unit sampel dan jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang patuh seba
71	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	31444,18605	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kalbar	Data BPS Provinsi Kalimantan Barat



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No.	Urusan	IKK Outcome (Hasil)	Capaian	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
72	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	111,7298887	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kalbar	Data BPS Provinsi Kalimantan Barat
73	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	1,3325907	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kalbar	Data BPS Provinsi Kalimantan Barat
74	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4,9045522	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kalbar	Data BPS Provinsi Kalimantan Barat
75	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	300,3499504	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Kalbar	Perhitungan produksi dan luas panen hanya diprioritaskan pada komoditi padi. data capaian ditampilkan dengan satuan kwintal jika dikonversikan dalam satuan ton menjadi 30,034 ton/ha/tahun.
76	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-8,3333333	Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Kalbar	
77	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	93,75	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	Kelompok Tani Hutan (KTH) dimaksud merupakan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang diberikan akses legal serta data jumlah Total Usulan KTH yang teregistrasi di Provinsi Kalbar pada Tahun 2022



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No. -1	Urusan -2	IKK Outcome (Hasil) -3	Capaian -4	Sumber Data -5	Keterangan -6
78	Kehutanan	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	0,082287	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	Luas Hutan yang rusak merupakan hutan yang terbakar serta data Luas Hutan keseluruhan di Provinsi Kalbar Tahun 2022 sesuai SK Menteri LHK Nomor SK.6630/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.1/10/2021
79	Kehutanan	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	0,9431636	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	Tabel Luas Lahan Kritis di provinsi yang direhabilitasi oleh BPDAS dari DLHK bersama UPT KPH se Kalbar pada Tahun 2022 serta data luas lahan kritis dari hasil review data lahan kritis Keputusan Menteri LHK Nomor SK.49/PDASRH/PPPDA/DAS.O/12/2022 tentang Pe
80	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	
81	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	85,6807512	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	
82	Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	31,1312038	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
83	Perdagangan	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No.	Urusan	IKK Outcome (Hasil)	Capaian	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
84	Perdagangan	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	56,9553806	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
85	Perdagangan	Tertib Usaha	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
86	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	95,4859067	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
87	Perdagangan	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	98	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
88	Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	6,71	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
89	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	3,7433155	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
90	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
91	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	



No.	Urusan	IKK Outcome (Hasil)	Capaian	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
92	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
93	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
94	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	90	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	



2.2.3 Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Fungsi Penunjang	IKK	Capaian	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	12,761778	Badan Keuangan dan Aset Prov. Kalbar	sumber data: LRA Unaudited per 9 Februari 2023
2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	52,721015	Badan Keuangan dan Aset Prov. Kalbar	Data berdasarkan LRA Unaudited 9 Februari 2023
3	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	57,559555	Badan Keuangan dan Aset Prov. Kalbar	Data berdasarkan LRA Unaudited per 9 februari 2023
4	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	9	Badan Keuangan dan Aset Prov. Kalbar	opini BPK 10 Tahun terakhir
5	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Badan Keuangan dan Aset Prov. Kalbar	
6	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat Prov. Kalbar	
7	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov. Kalbar	1. Tidak ada kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n 2. kontrak keseluruhan tahun n diambil



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No.	Fungsi Penunjang	IKK	Capaian	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		ditandatangani pada kuartal pertama			dari jumlah tender yang dilaksanakan melalui APBD dan APBN
8	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	159,52953	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov. Kalbar	<ol style="list-style-type: none">jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif berasal dari data e-katalog, toko daring, pengadaan langsung, penunjukan langsung, terder/seleksiJumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif adalah data yang berasal dari swakelo
9	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	61,34507	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov. Kalbar	<ol style="list-style-type: none">Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan adalah data yang diambil dari realisasi belanja barang dan jasa serta realisasi Belanja ModalTotal belanja operasi dan modal adalah data yang diambil dari realisasi belanja operasi dan
	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-50,81614	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov. Kalbar	Data yang diambil adalah angka realisasi yang sumber data berasal dari https://ukpbjkalbar.streamlit.app/Rencana-PBJ
10	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk	72,982595	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar	Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No.	Fungsi Penunjang	IKK	Capaian	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
		guru dan tenaga kesehatan)			
11	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 	23,239715	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar	Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
12	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar	Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
13	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0,746715	Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kalbar	Data berdasarkan LRA Unaudited per 9 februari 2023
14	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	20,389643	Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kalbar	Data berdasarkan LRA Unaudited per 9 februari 2023
15	Manajemen Keuangan	Assets management	4	Badan Keuangan dan Aset Prov. Kalbar	
16	Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	6,1264728	Badan Keuangan dan Aset Prov. Kalbar	Sumber Data LRA Audited 2021



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No.	Fungsi Penunjang	IKK	Capaian	Sumber Data	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
17	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	100	Badan Keuangan dan Aset Prov. Kalbar	
18	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	Badan Keuangan dan Aset Prov. Kalbar	



2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat 2005-2025.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Tahun 2018-2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 sebagai dasar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022 yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD. APBD ini pada hakekatnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pengukuran target kinerja terhadap 6 (enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

2.3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan	Indeks Infrastruktur	68,29		
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	B	
		Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat	BB	BB	100
3	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	70.29	68.63	97.63
4	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pertumbuhan Ekonomi	4.71-5.46	5.01	106.36
		Indeks Gini	0.323-0.321	0.314	102.78
		Desa Mandiri (jumlah)	319	586	183.69
		Tingkat Pengangguran Terbuka	5.53-4.29	5.11	107.59
		Angka Kemiskinan	7.31-7.23	6.73	107.93
5	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Konflik Sosial	0	0	100
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66.70	71.9	100.97



Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

2.3.1.1 Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan.

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

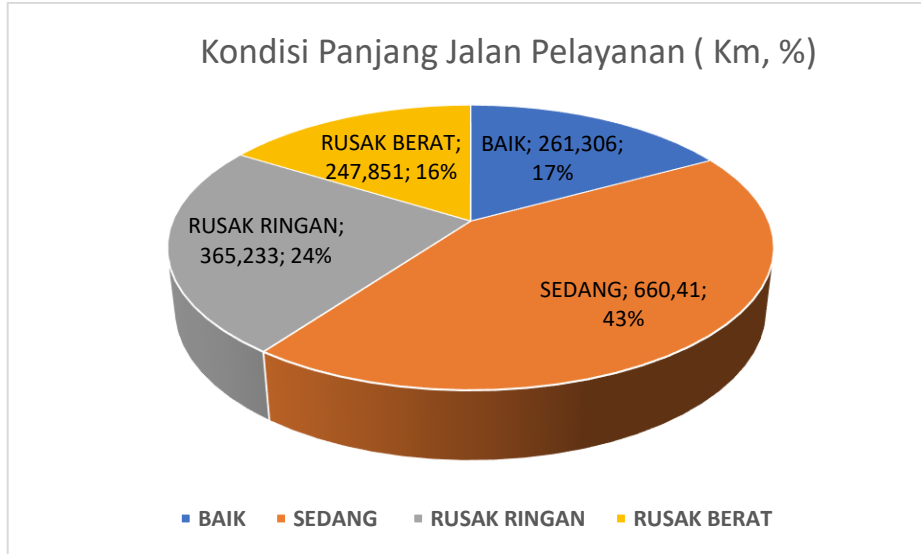
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan	Indeks Infrastruktur	68.29	69.59	101.90
Capaian Kinerja Sasaran 1					101.90

Indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta perbatasan dalam RPJMD tahun 2018 – 2023 yaitu indeks infrastruktur yang menggambarkan kondisi infrastruktur di Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi beberapa variabel sebagai berikut:

1. Jalan Kondisi Mantap
2. Jaringan Irigasi Kondisi baik
3. Rumah Tangga Bersanitasi
4. Rumah Tangga dengan Air Bersih
5. Rasio Elektrifikasi

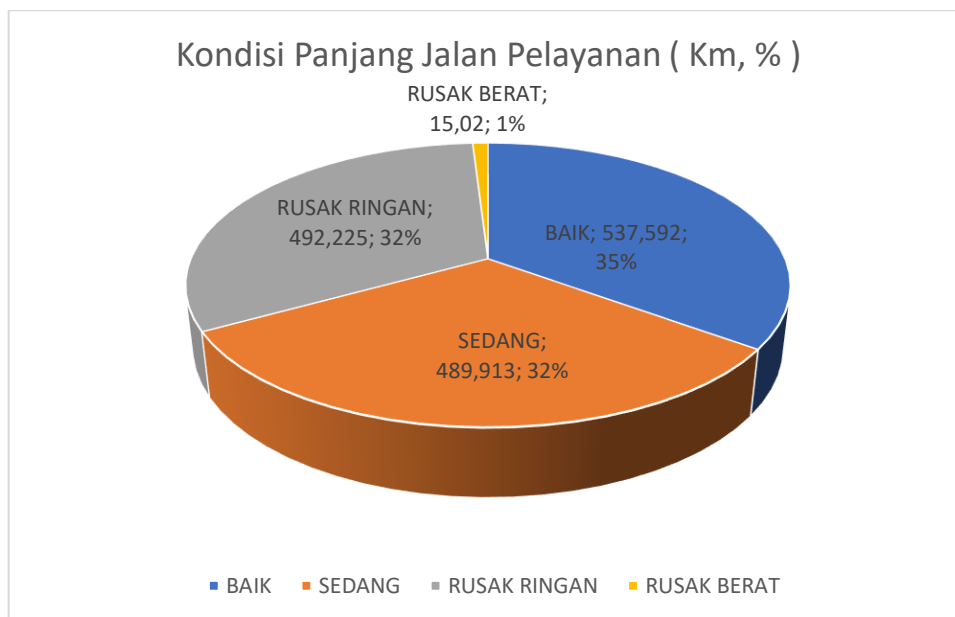
Target Indeks infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2022 sebesar 68.29 dan terealisasi (data indeks infrastruktur di rilis oleh Bappeda Provinsi Kalbar) sebesar 69.59.





Sumber: Dinas PU dan tata Ruang, 2020

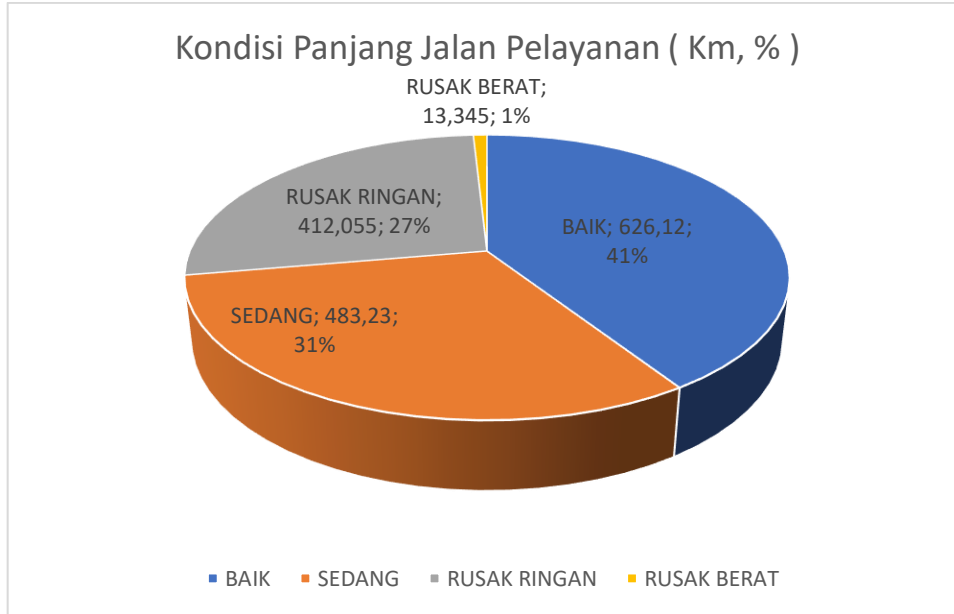
Gambar 2.1
Kondisi Panjang Jalan Pelayanan (Km, %) Tahun 2021



Sumber: Dinas PU dan tata Ruang, 2021

Gambar 2.2
Kondisi Panjang Jalan Pelayanan (Km, %) Tahun 2021





Sumber: Dinas PU dan tata Ruang, 2022

Gambar 2.3
Kondisi Panjang Jalan Pelayanan (Km, %) Tahun 2022

Tabel 2.6
Perkembangan Irigasi Provinsi

INDIKATOR KINERJA	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Kemantapan Jalan Provinsi	49,71%	56,81 %	60,05 %	66,95 %	72,28%

Sumber: Dinas PU dan tata Ruang, 2022

B. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan	1. Penyelenggaraan Jalan	414.835.027.949	402.850.686.149	97.11		
		2. Pengelolaan Sumber Daya Air	161.774.453.900	159.177.437.436	98.39		
		3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	82.150.000	75.540.424	91.95		
		4. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	82.150.000	79.798.246	97.14		
		5. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	253.390.000	251.290.000	99.17		





No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		6. Penataan Bangunan gedung	103.246.548.265	98.465.421.339	95.37		
		7. Pengembangan Jasa Konstruksi	351.155.900	331.592.652	94.43		
		8. Pengembangan Perumahan	4.771.729.280	4.690.172.115	98.29		
		9. Kawasan Permukiman	5.794.906.532	5.698.218.166	98.33		
		10. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	333.837.648.220	326.133.040.580	97.69		
		11. Pengadaan tanah bagi kepentingan umum	399.710.700	388.170.731	97.11		
		12. Penyelesaian sengketa tanah garapan	648.206.100	619.972.174	95.64		
		13. Pengelolaan aspek kegeologian	330.218.000	320.603.015	97.09		
		14. Pengelolaan Mineral dan batu bara	310.405.700	304.884.747	98.22		
		15. Pengelolaan Energi Terbarukan	94.069.700	92.135.570	97.94		
		16. Pengelolaan Ketenagalistrikan	3.269.203.600	3.145.154.080	96.21		
		17. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	8.932.022.800	8.887.228.878	99.50		
		18. Pengelolaan Pelayaran	368.954.800	345.717.180	93.70		
					96.84	101.90	3.16

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96.84 % dan realisasi capaian kinerja sasaran 101.90 di dapat tingkat efisiensi sebesar 3.16.

C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Program Penyelenggaraan Jalan memiliki anggaran sebesar Rp414.835.027.949,00 dengan realisasi sebesar Rp402.850.689.149,00 atau 97,11%, menyisakan anggaran sebesar Rp11.984.341.800,00 atau 2,89%. Berhasil mewujudkan pelebaran jalan menambah lajur sepanjang 2,28 Km, rekonstruksi jalan sepanjang 167,31 Km, pemeliharaan rutin jalan sepanjang 18,37 Km, jembatan yang dibangun sepanjang 135 m, penggantian jembatan sepanjang 159 m, jembatan yang dilakukan pemeliharaan sepanjang 470 m.





2. Program Penyelenggaraan Jalan memiliki satu Kegiatan yaitu kegiatan Penyelenggaraan Jalan provinsi namun memiliki 10 sub-kegiatan. Berbekal anggaran Rp414.835.027.949,00 secara keseluruhan berhasil mewujudkan 1.109,25 Km jalan provinsi kondisi mantap. Bertambah 81,73 Km jalan mantap pada tahun anggaran 2022. Mewujudkan pencapaian kinerja 72,28% Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Mantap. Dari 10 sub-kegiatan dalam kegiatan Penyelenggaraan Jalan provinsi, ada 4 sub – kegiatan yang menunjang keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Mantap, yaitu: Pembangunan Jalan, dengan realisasi 100%, Pelebaran Jalan Menambah Lajur, dengan realisasi 99,85%, Rekonstruksi Jalan, dengan realisasi 98,78%, Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan realisasi 99,54%. Fokus anggaran dititik beratkan pada Rekonstruksi Jalan yang memiliki porsi 69,63% dari total anggaran Program Penyelenggaraan Jalan, kedua pada Pemeliharaan Rutin Jalan yang memiliki porsi 17,22%. Pertimbangan ini didasarkan pada bencana banjir besar yang terjadi pada tahun 2021, membuat banyak ruas – ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan. Serta pemeliharaan jembatan yang pada tahun 2022 telah terealisasi sepanjang 470 meter dari target 120 meter.
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki anggaran Rp161.774.453.900,00 dengan realisasi Rp159.177.437.436,00 atau 98,39%. Menyisakan anggaran Rp2.597.016.464,00 atau 1,61%, berhasil mewujudkan 12.142,51 Km panjang jaringan irigasi provinsi kondisi baik, 87,31 Km panjang pengendalian banjir yang termasuk normalisasi sungai/saluran dan panjang bangunan perkuat tebing, 1,26 Km panjang unit air baku yang di bangun, 1 unit bangunan embung dan penampung air yang direhabilitasi. Pencapaian Persentase Irigasi Provinsi dalam Kondisi Baik dan Berfungsi dan Persentase Pengendalian Banjir (Sungai dan Saluran) dalam Kondisi Baik dinilai dari baiknya infrastruktur dalam mendukung irigasi baik dan pengendalian banjir. Irigasi provinsi kondisi baik di tunjang oleh sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa. Sedangkan pengendalian banjir ditunjang oleh sub kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing dan Normalisasi/Restorasi Sungai. Ke empat sub kegiatan di atas memiliki nilai penyerapan anggaran di atas 95%, menunjang infrastruktur irigasi dan pengendalian banjir.



4. Pelaksanaan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum masih berupa Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM bukan berupa pembangunan infrastruktur SPAM yang dapat meningkatkan layanan akan ases air minum bagi penduduk.
5. Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan pembangunan rumah khusus bagi korban bencana yang terkena relokasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tertangani di tahun 2022 sebanyak 78 unit rumah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi Rumah Kab.Sintang: 51 Unit
 - 1) Kec. Tempunak Desa Mensiap Jaya: 17 Unit
 - 2) Kec. Dedai Desa Dedai Kanan: 34 Unit
 - b. Rehabilitasi Rumah Kab.Mempawah: 7 Unit
 - 1) Kec. Mempawah Timur: 1 Unit
 - 2) Kec. Sungai Kunyit: 1 Unit
 - 3) Kec. Toho: 5 Unit
 - c. Pembangunan baru/Relokasi Korban Bencana Kab. Sambas: 20 Unit
 - 1) Kec. Jawai Selatan Desa Jawai Laut: 20 Unit
6. Total Luasan Penanganan Kawasan Permukiman kumuh dengan luasan 10-15 Ha yang ditangani selama Tahun 2022 adalah 0,56303 Ha dan dilaksanakan di 4 Kabupaten Kota di wilayah Kalimantan Barat. Total Luasan Kawasan Permukiman kumuh dengan luasan 10-15 Ha adalah 856,033 Ha.
7. Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan program penyelesaian sengketa tanah garapan, Pemerintah Provinsi Kalbar memfasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan yang masuk melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2022, dan telah difasilitasi penyelesaiannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki adalah sebagai berikut:
 - a. Data Jumlah Dokumen perencanaan yang diusulkan oleh Instansi Yang Memerlukan Tanah sebanyak 4 dokumen, yaitu:
 - 1) Surat Balai Pelaksana Jalan Nasional General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat, melalui Surat Nomor Ps.01.02 -Bb20/078, tanggal 24 Februari 2022 ,hal: Permohonan Penambahan Jangka Waktu Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Kembayan –



- Balai Karang – Entikong – Batas Serawak Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Surat dari Bupati Kayong Utara nomor: 590/2269/PERHUB.II tanggal 14 November 2022, hal: permohonan perpanjangan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara baru sukadana kab.kayong utara.
 - 3) Surat dari Direktur Utama PT. Pelindo II (Persero) Nomor pd.05.01/8/7/I/INVS/UTMA/PLND-22, tanggal 8 Juli 2022, telah mengajukan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Relokasi Jalan Nasional Ruas Sungai Duri – Mempawah Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Data Jumlah SK Penetapan Lokasi yang diterbitkan Tahun 2022 sesuai dengan usulan perencanaan yang terfasilitasi yaitu sebanyak 4 SK penetapan lokasi, antara lain:
- 1) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 270/PERKIM/2022 tentang Penambahan Jangka Waktu Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Kembang - Balai Karang - Entikong - Batas Serawak Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
 - 2) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 855/PERKIM/2022 tentang Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Relokasi Jalan Nasional Ruas Sungai Duri-Mempawah Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat
 - 3) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1339/PERKIM/2022 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara Baru Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.
8. Berdasarkan data PT.PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kalimantan Barat realisasi rasio elektrifikasi (RE) rumah tangga di Kalimantan Barat Tahun 2020 sebesar 92 % dan realisasi RE pada Tahun 2021 sebesar 93 % dan Tahun 2022 Rasio Elektrifikasi Kalimantan Barat sebesar 99,58%. Peningkatan rasio elektrifikasi di Kalimantan Barat ini terjadi karena adanya percepatan program listrik perdesaan, pembangunan pembangkit energi baru terbarukan, perluasan jaringan listrik PLN serta adanya penyambungan instalasi listrik gratis untuk



rumah tangga miskin dan tidak mampu dari Dinas ESDM Prov. Kalbar. Daya mampu sistem ketenagalistrikan di Kalimantan Barat pada Tahun 2020 mencapai 725.85 MW dan pada Tahun 2021 daya mampu sistem ketenagalistrikan di Kalimantan Barat mencapai 734,43 MW. Nilai Daya Mampun tersebut terdiri dari dari Sistem Khatulistiwa sebesar 576,7 MW dan Sub Sistem Isolated dengan Daya Mampu 157,726 MW. Sistem Khatulistiwa merupakan Sistem Kelistrikan yang menghubungkan Pontianak, Mempawah, Kubu Raya, Singkawang, Bengkayang, Sambas, Sanggau dan Landak, sementara untuk lainnya menggunakan sub Sistem Isolated. wilayah Kalimantan Barat, penyediaan listrik bukan hanya dilakukan oleh PLN namun juga diusahakan oleh Pihak lain dalam hal ini lebih banyak oleh dunia usaha baik itu pertambangan, industri maupun pertanian. Istilah untuk ini disebut Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang menurut data yang diolah Dinas Perindag ESDM kapasitas nya mencapai sekitar 625 MW di tahun 2021. Kapasitas tersebut tidak semuanya terpakai artinya ada Excess Power (Kelebihan Tenaga Listrik) yang sebenarnya dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan lain misal untuk membantu pencapaian target Rasio elektrifikasi bagi daerah yang belum terjangkau oleh PLN. Jenis tenaga pembangkit listrik yang diusahakan oleh pihak non PLN bisa dengan menggunakan Diesel PLTD, PLTBm, PLTU-Batu Bara, PLTBg, PLTS, PLTMH yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Sebagai bentuk dukungan untuk peningkatan Rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Perindag ESDM dapat memfasilitasi pemanfaatan excess power dari pihak non PLN untuk di salurkan kepada daerah yang belum teralirkan listrik non PLN baik sebagai bentuk CSR atau pun kerjasama penjualan listrik kepada PLN untuk pemenuhan target kinerja PLN. Pihak PLN sendiri telah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2021-2030 dalam upaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, mendukung pencapaian target bauran energi bari dan terbarukan, serta menurunkan emisi gas rumah kaca. Dalam mencapai target-target tersebut diperlukan peningkatan pembangunan infrastuktur ketenagalistrikan. Selain berbasis pembangunan infrastuktur fisik PLN juga setiap tahun memprogramkan Proyek Listrik Pedesaan (Lisdes) di mana pada tahun 2021 sasarannya sejumlah 81 lokasi (desa/dusun) di 33 Kecamatan dari 10 Kabupaten/kota. Sementara untuk tahun 2022 terdapat 56 lokasi (desa/dusun)



- melingkupi 35 kecamatan di wilayah 13 kabupaten/kota dengan anggaran yang dialokasikan di 2022 sebesar Rp. 197 Miliar Rupiah.
9. Sebagai informasi bahwa program-program yang dijalankan untuk pencapaian rasio elektrifikasi di dukung oleh kegiatan: Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun, pada Tahun 2022 telah dilakukan pendataan dan pembinaan pada perusahaan di beberapa Kabupaten antara lain Kapuas Hulu, Melawi, Mempawah, Sanggau, Sekadau dan Sintang. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi, Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri.
 10. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik dilaksanakan dalam 3 klaster kegiatan antara lain: memastikan aplikasi pengaduan subsidi listrik tepat sasaran diimplementasikan di setiap kecamatan yang belum melakukan login aplikasi pengaduan subsidi tepat sasaran, disertai dengan pemberian fasilitasi berupa bimbingan langsung kepada operator yang ditunjuk sebagai pengelola aplikasi dikecamatan yang belum memahami aplikasi ini. Tahun 2022 dilaksanakan di Kapuas Hulu, Melawi, Sintang, yang kedua penyusunan dokumen FS dan DED pembangunan PLT EBT, sebagai dokumen perencanaan pembangunan penyediaan infrastruktur kelistrikan di daerah belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan. Untuk Tahun 2022 telah disusun FS/DED PLTMH di Kapuas Hulu, dan Sintang serta FS/DED PLTS untuk di daerah Kabupaten Ketapang dan Melawi. Serta melakukan revitalisasi PLTS di Desa Songga Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak. Ketiga, berupa pemasangan instalasi dan penyambungan listrik gratis kepada masyarakat tidak mampu atau berada di wilayah 3T. Tahun 2022 ini telah di pasang sebanyak 250 unit penyambungan listrik gratis untuk keluarga tidak mampu yang berlokasi di Kapuas Hulu, Sintang dan Bengkayang.



D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2018–2022 dan Target RPJMD

Tabel 2.8

Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2022 dan target RPJMD
Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					TARGET RPJMD	Tingkat Kemajuan
			2018	2019	2020	2021	2022		
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan	Indeks Infrastruktur	56.61	62,31	67.28	67	69.59	66.80	1.90

Sedangkan pada tahun 2018 Indeks Infrastruktur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebagai alat ukur pencapaian sasaran strategis dan dapat terealisasi sebesar 56,61%. Sedangkan pada Tahun 2019 indeks infrastruktur dapat direalisasikan sebesar 62,31%. Pada Tahun 2020 terealisasi sebesar 67.28 %, dan pada Tahun 2021 terealisasi sebesar 67% dan pada tahun 2022 terrealisasi sebesar 69.59. Tahun 2023 sebesar 71.24%. untuk tingkat kemajuan yang diperoleh berdasarkan perbandingan dengan target RPJMD Tahun 2023 1.90.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Ada peningkatan jumlah anggaran pada Program Penyelenggaraan Jalan antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022. Hanya saja anggaran yang tersedia pada tahun 2022 tidak cukup untuk mendongkrak tinggi akan capaian kinerja secara keseluruhan. Bencana banjir pada tahun 2021 membuat anggaran di titik beratkan pada rekonstruksi dan pemeliharaan jalan akan ruas jalan provinsi yang rusak. Sehingga kondisi jalan mantap masih bisa dipertahankan, namun akibatnya jumlah penambahan jalan mantap menjadi berkurang dilihat capaian persentase jalan mantap hanya 72,28%. Jumlah ini menjadi beban tanggung jawab guna mencapai target 80% pada tahun 2023. Harus mewujudkan tambahan jalan mantap sepanjang 115,07 Km.
2. Belum adanya Rencana Induk untuk dapat melakukan pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang tepat dan memadai.





Karena tanpa rencana induk yang tepat sulit untuk menetapkan siapa, dimana, prasyarat dan kategori apa guna penerima layanan akses air minum.

3. Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Bidang Perumahan baik di Kabupaten/Kota dan Provinsi belum memahami secara maksimal tentang penerapan SPM.
4. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh.
5. Minimnya data PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kumuh di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Masih sulitnya Pemerintah daerah mendapatkan kemudahan akses terhadap data dan informasi terkait permasalahan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
7. Belum adanya payung regulasi yang mengikat hubungan kerja antara PLN dan Penyedia listrik mandiri untuk bersama-sama bersinergi dalam pencapaian peningkatan rasio elektrifikasi dan RDB
8. Persepsi terhadap desa berlistrik yang diindikasikan dengan angka rasio desa berlistrik masih bias karena banyak dusun merupakan bagian dari wilayah desa berlistrik tersebut belum terjangkau oleh infrastruktur kelistrikan.
9. Masih terdapat wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik PLN mengingat luas jangkauan yang harus ditempuh dikaitkan dengan keterbatasan SDM.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan secara komprehensif kedepannya tentang kebutuhan, untuk mencapai target 80% jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2023.
2. Pemerintah Pusat melalui Kementerian teknis dapat melakukan fasilitasi pendampingan konsultan terhadap Penerapan, Penyusunan Laporan dan Perhitungan Pembiayaan SPM, memonitoring secara berkala dan sosialisasi, bimtek terhadap SDM untuk membentuk sistem informasi SPM.
3. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang memadai sehingga tidak meluas permukiman kumuh serta mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh.



4. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi pendataan PKP kumuh di level Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi data dan informasi terkait permasalahan dan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan kepada Pemerintah Daerah dan Kantah masing-masing Kab/Kota.
6. Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Perindag ESDM Prov. Kalbar akan melakukan koordinasi dan evaluasi dengan PT.PLN untuk mencari solusi dan optimalisasi pelayanan PT.PLN khususnya pada wilayah isolated (masih menggunakan PLTD kapasitas kecil dan terpisah dari sistem ketenagalistrikan induk), mengingat PT. PLN mempunyai standar tingkat mutu pelayanan yang diatur oleh Peraturan Menteri ESDM;
7. Mempercepat pembangunan infrastruktur pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan dengan daya yang cukup besar.
8. Memberdayakan program CSR badan usaha dan akselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan di daerah yang sangat sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN.
9. Berkoordinasi dengan PT. PLN agar segera memanfaatkan PLTU yang sudah eksisting namun belum beroperasi.

2.3.1.2 Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 2.9

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	B	99.17
		Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat	BB	BB	100
Capaian Kinerja Sasaran 2					99.58

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Dalam RPJMD pada Tahun 2018-2023 indikator kinerja dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, antara lain Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 memperoleh predikat B dari target BB dengan nilai 69.43. Delapan area





perubahan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat antara lain:

a. MANAJEMEN PERUBAHAN

1) Tim Kerja Reformasi Birokrasi (RB)

Tim Kerja RB telah direvisi dengan Nomor 80/OR/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang sebelumnya dengan Keputusan Gubernur Kalbar No: 86/OR/2020 tentang Pembentukan Tim Kerja RB Provinsi Kalbar yang sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalbar No. 947/OR/2019. Revisi pertama dilakukan dilakukan karena menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru dan kebutuhan organisasi. Kemudian dilakukan revisi kedua dengan Keputusan Gubernur Kalbar No. 900/OR/2020. Dilakukan revisi kembali karena melibatkan seluruh OPD agar terlibat dalam Tim Kerja Reformasi Birokrasi.

2) Road Map Reformasi Birokrasi

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 64 Tahun 2013 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dan telah direvisi dengan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019 – 2023. Road Map periode 2024-2028 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan disusun pada Tahun 2023.

3) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

a) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan pada 39 (tiga puluh sembilan) perangkat daerah dalam rangka memenuhi 8 (delapan) rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB terhadap hal-hal yang harus disempurnakan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemprov Kalbar.

b) Nilai internal PMPRB Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 sebesar 69.43

c) Pemerintah Provinsi Kalbar telah melakukan upaya tindak lanjut perbaikan atas pelaksanaan RB Tahun 2022 pada tanggal 16-17 Februari 2023 pada seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.



4) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Dalam rangka meningkatkan kinerja, menumbuhkembangkan semangat dan etos kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:

- a) ASN Berakhlak.
- b) Penyelarasan Sistem, Berdasarkan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sasaran Kinerja Pegawai, core values ASN BerAKHLAK telah menjadi dasar pada penilaian perilaku oleh sebab itu perlu untuk melakukan penyelarasan terhadap penilaian perilaku BerAKHLAK. Untuk menyelaraskan perubahan tersebut pada tanggal 15 Desember 2022 telah dilaksanakan Rapat dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang hal-hal yang harus diselaraskan. Hasil rapat tersebut telah merumuskan bahwa untuk melakukan penyelarasan SKP, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan panduan dalam pengisian SKP melalui surat edaran Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor: 065/5000/RO-ORG, tanggal 28 Desember 2022. Surat Edaran tersebut kemudian menjadi dasar bagi Badan Kepegawaian Daerah memberikan panduan pada saat melaksanakan sosialisasi SKP.
- c) Perubahan Individu, Tahapan selanjutnya untuk melakukan perubahan individu, setiap perangkat daerah wajib melakukan pelatihan internalisasi berAKHLAK di lingkungan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.
- d) Pemetaan Budaya, Pada Tahun 2022, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengadakan survey indeks berAKHLAK dan survey Employee Engagement. Survei Employee Engagement terdiri dari perwakilan perangkat daerah dari masing-masing perangkat daerah dan telah diikuti lebih dari 225 partisipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.



- e) Penentuan agenda perubahan, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar menyusun rencana aksi budaya kerja.
- f) Pengelolaan agen perubahan, dalam rangka aktivasi dan pengelolaan agen perubahan, telah dibentuk Tim Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 46 Tanggal 4 Januari 2022.
- g) Eksekusi rencana aksi, Setiap rencana kerja/rencana aksi yang telah dibuat di awal tahun kemudian dilaporkan pelaksanaannya di akhir tahun melalui kegiatan penyusunan laporan budaya kerja tahun 2022.
- h) Kampanye berkelanjutan, Pelaksanaan kampanye berkelanjutan dilakukan melalui media sosial antara lain Instagram Biro Organisasi dan melalui Channel Youtube budkerpemprovKalbar2022 serta channel Youtube @biroorganisasikalbar8346.
- i) Monitoring dan evaluasi berkala, Dalam rangka mengawal pelaksanaan internalisasi di masing-masing perangkat daerah, Biro Organisasi melakukan pembinaan dalam bentuk konsultasi secara online maupun offline terutama lewat grup yang terdiri dari para kasubag TU di seluruh perangkat daerah serta melakukan monitoring langsung ke perangkat daerah untuk melihat sejauhmana pelaksanaan budaya kerja di masing-masing perangkat daerah. Pembinaan diperlukan sebagai upaya pendampingan setelah coaching clinic diberikan kepada para sekretaris, maka tindak lanjutnya adalah perlu untuk menyebarluaskan pemahaman tentang ASN BerAKHLAK kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
- j) Penghargaan dan Apresiasi (Kegiatan Kompetisi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK), Setelah dua upaya internalisasi dilakukan secara searah, maka untuk membangkitkan semangat kompetisi, pemberian penghargaan dan apresiasi maka diadakanlah kegiatan Kompetisi Budaya Kerja (video penerapan budaya kerja BerAKHLAK).

**b. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penataan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengefisienkan produk hukum yang telah ada dan mengevaluasi produk hukum yang tumpang tindih dan tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Terkait Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundangan:

- 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama DPRD Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan 7 (tujuh) Peraturan Daerah pada Tahun 2022.
- 2) Provinsi Kalimantan Barat juga telah menetapkan sebanyak 84 (delapan puluh empat) Peraturan Gubernur pada Tahun 2022.
- 3) Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar melalui Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 180/0055/HK juga melakukan pembinaan dan Fasilitasi terhadap Rancangan Produk Hukum baik Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah.
- 4) Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar pada Tahun 2021 telah mengembangkan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) yang sebelumnya hanya berbasis Web Service menjadi sistem berbasis Android melalui Aplikasi Jariku (Jaringan Informasi Hukum).

c. PENATAAN ORGANISASI

Penataan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan perangkat daerah secara proporsional sesuai visi dan misi kepala daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi yang dibentuk menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5).

Perubahan ini dilakukan untuk menciptakan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) dalam pelaksanaan tugasnya. Guna mendapatkan organisasi yang tepat fungsi



dan ukuran serta berkinerja, pada tahun 2022 telah dilakukan perubahan tugas dan fungsi yang terdiri dari: 1 (satu) Staf Ahli Gubernur, 1 (satu) Dinas, 1 (satu) Badan, 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso, 5 (lima) UPT serta 1 (satu) UPT yang dibentuk baru yakni UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Adapun Sekretariat, Dinas, Badan serta UPT yang dilakukan perubahan, Penghapusan dan pembentukan baru selama Tahun 2022 terdiri dari:

- 1) Perangkat Daerah yang dilakukan Penataan:
 - a) Staf Ahli Gubernur Kalimantan Barat
 - b) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 - c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - d) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso
- 2) UPT yang dilakukan penataan:
 - a) UPT Satuan Pendidikan Menengah
 - b) UPT Satuan Pendidikan Khusus
 - c) UPT Laboratorium Kesehatan Kerja
 - d) UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma
 - e) UPT Klinik Pratama
- 3) UPT yang dibentuk baru:
 - a) UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 4) UPT yang dihapus: -
- 5) Perangkat Daerah yang dihapus: -

Pada Tahun 2023 akan dilakukan kajian serta evaluasi lanjutan untuk beberapa perangkat daerah dan UPT. Dengan demikian pada Tahun 2023 direncanakan untuk melaksanakan penataan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalbar dan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalbar. Serta UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi pada saat ini, maka sangat dibutuhkan sistem informasi untuk menyajikan informasi yang mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan berupa Data Base Kelembagaan



Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota secara terintegrasi informasi kelembagaan perangkat daerah telah disusun database perangkat daerah skala provinsi melalui web www.organisasi.kalbarprov.go.id.

d. PENATAAN TATALAKSANA

Area perubahan pada Penataan Tatalaksana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2022, yaitu:

- 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar melaksanakan penyusunan SOP Perangkat Daerah berdasarkan materi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan dan Materi teknis penyusunan SOP dan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi .
- 2) Dalam peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) , Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Peraturan Gubernur mengenai Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berisi rencana induk penerapan TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang disesuaikan dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Masterplan tersebut adalah berisi rencana secara umum. Untuk selanjutnya, diperlukan peraturan/pedoman turunan yang membahas lebih detail mengenai pengelolaan TIK di OPD Pemprov. Kalbar, diantaranya yang utama adalah penyusunan peraturan terkait Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagai landasan Keterpaduan Layanan Digital di Provinsi Kalimantan Barat. Penyusunan Pedoman Tata Kelola SPBE Pemprov. Kalbar dimaksudkan untuk mendukung proses penerapan TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar tertib dan optimal. Mengakomodir proses penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemprov. Kalbar sebagai landasan implementasi TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang mengatur mengenai Arsitektur dan Peta Rencana untuk diterapkan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar sesuai dengan arah kebijakan dan pembangunan. Arsitektur



SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi dan terpadu. Melalui Arsitektur SPBE dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan menyeluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada semua area dan tingkatan, Selanjutnya berdampak pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang diimplementasikan pada semua lini dan aspek pemerintahan berbasis e-government.

- 3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Draft Peraturan Gubernur yang mengatur tentang sistem kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- 4) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

e. PENATAAN SDM

Penataan SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi, serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kinerja. Guna mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2021 telah melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain:

- 1) Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pengumuman Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 15/PANSEL-JPT/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Seleksi Terbuka tersebut dilaksanakan pada tanggal



1 Agustus - 30 Agustus 2022 pada 9 (sembilan) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang lowong antara lain:

- a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
- b) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
- c) Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- d) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- e) Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- f) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- g) Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- h) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
dan
- i) Wakil Direktur I Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat.

Seleksi Terbuka tersebut telah diumumkan ke seluruh Indonesia melalui pengumuman resmi Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat yang termuat pada Media Cetak maupun Media Elektronik dan dapat diikuti oleh peserta yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia, Instansi Vertikal Pemerintah serta Pemerintah Pusat. Panitia Seleksi berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari untuk Akademisi, Psikolog serta Unsur Internal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

- 2) Perencanaan kebutuhan pegawai disusun berdasarkan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan analisis jabatan (ANJAB) dan analisis beban kerja (ABK) dari masing-masing perangkat daerah sehingga kebutuhan pegawai yang diusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk



mendapatkan penetapan formasi. Penetapan kebutuhan formasi untuk pengadaan ASN Tahun 2020 ditiadakan dan diakumulasikan pada usulan Tahun 2021 sebanyak 1.108 Formasi sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 417 Tahun 2021 Tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021. Formasi kebutuhan CASN tersebut dialokasikan untuk PPPK tenaga guru sebanyak 964 Formasi, PPPK tenaga kesehatan sebanyak 54 Formasi, PPPK tenaga teknis sebanyak 37 formasi dan CPNS Tenaga Teknis dan Kesehatan sebanyak 53 Formasi. Untuk kebutuhan ASN Tahun 2022, Pemerintah Provinsi telah menyusun kebutuhan ASN yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 530 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 sebanyak 1.777, dengan rincian tenaga guru sebanyak 1.333 Formasi, PPPK tenaga kesehatan sebanyak 151 Formasi dan PPPK tenaga teknis sebanyak 293 Formasi.

- 3) Pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pemetaan potensi terhadap 1010 orang PNS yang terdiri dari:
 - a) 237 orang Pejabat Administrator;
 - b) 618 orang Pejabat Pengawas; dan
 - c) 155 orang Pejabat Pelaksana
- 4) Pemetaan Potensi dan Kompetensi dilakukan dengan membandingkan antara kemampuan individu dan standar Potensi serta Kompetensi pada tiap Jenjang Jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Sebagai informasi, Adapun aspek – aspek potensi yang diukur dalam pemetaan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.10

Aspek Potensi Dalam Pemetaan Tahun 2021

No.	Aspek Potensi	Level Minimal
1	Kesaran Diri	3
2	Kemampuan Berfikir Kritis	3
3	Kemampuan Menyelesaikan Masalah	3
4	Kecerdasan Emosional	3
5	Kemampuan Belajar Cepat dan Mengembangkan Diri	3
6	Motivasi dan Komitmen	3

Sedangkan Aspek Kompetensi dilakukan pemetaan terhadap 9 Aspek yaitu:

Tabel 2.11

9 Aspek Kompetensi

No.	Aspek Kompetensi	Level Minimal		
		Administrator	Pengawas	Pelaksana
1	Integritas	3	2	1
2	Kerjasama	3	2	1
3	Komunikasi	3	2	1
4	Orientasi Pada Hasil	3	2	1
5	Pelayanan Publik	3	2	1
6	Pengembangan Diri dan Orang Lain	3	2	1
7	Mengelola Perubahan	3	2	1
8	Pengambilan Keputusan	3	2	1
9	Perekat Bangsa	3	2	1

Untuk hasil dari pemetaan potensi yang telah dilakukan, berikut adalah data peserta yang belum mencapai level minimal aspek potensi (level 3) menurut jenis jabatannya:

Tabel 2.12

Data Peserta Yang Belum Mencapai Level Minimal Aspek Potensi (Level 3)

No	Aspek Potensi	Jumlah dan Persentase Peserta					
		Administrator		Pengawas		Pelaksana	
1	Kesaran Diri	26	11%	100	16%	36	23%
2	Kemampuan Berfikir Kritis	39	16%	168	27%	40	19%
3	Kemampuan Menyelesaikan Masalah	20	8%	146	24%	23	15%
4	Kecerdasan Emosional	43	18%	133	22%	22	14%





No	Aspek Potensi	Jumlah dan Persentase Peserta					
		Administrator		Pengawas		Pelaksana	
5	Kemampuan Belajar Cepat dan Mengembangkan Diri	44	19%	115	19%	23	15%
6	Motivasi dan Komitmen	14	6%	56	9%	17	11%

Kemudian, untuk kesesuaian pada aspek kompetensi, berikut ini adalah **data peserta yang belum mencapai level minimal tiap jenjang jabatan**, menurut jenis jabatannya:

Tabel 2.13

Data Peserta Yang Belum Mencapai Level Minimal Tiap Jenjang Jabatan

No	Aspek Potensi	Jumlah dan Persentase Peserta				Pelaksana
		Administrator		Pengawas		
1	Integritas	151	64%	60	10%	Seluruh peserta telah mencapai standar minimal kompetensi jabatannya pada level 1
2	Kerjasama	56	24%	2	0.3%	
3	Komunikasi	32	14%	11	2%	
4	Orientasi Pada Hasil	36	15%	2	0.3%	
5	Pelayanan Publik	143	60%	53	9%	
6	Pengembangan Diri dan Orang Lain	46	19%	5	1%	
7	Mengelola Perubahan	140	59%	24	4%	
8	Pengambilan Keputusan	129	54%	15	2%	
9	Perekat Bangsa	101	43%	173	28%	

5) Penegakan aturan disiplin, kode etik dan kode perilaku pegawai.

Pemerintah Provinsi Kalbar telah menetapkan Kode Etik bagi Pegawai ASN berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan berkomitmen tinggi dalam penegakan disiplin pegawai sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Pelanggaran Disiplin CPNS dan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah PNS yang telah dijatuhi hukuman disiplin pada Tahun 2018 terdapat sebanyak 7 orang, pada Tahun 2019 sebanyak 3 orang dan pada Tahun 2020 meningkat kembali menjadi 10 orang PNS yang diberikan sanksi disiplin, selanjutnya pada Tahun 2021 terdapat 8 keputusan penjatuhan hukuman disiplin dan pada Tahun 2022 sebanyak 9 orang PNS telah ditetapkan keputusan penjatuhan



hukuman disiplin yang salah satu diantaranya diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat.

6) Sistem Informasi Pegawai

Pemerintah Provinsi Kalbar telah memiliki sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh seluruh pegawai melalui aplikasi www.simpeg.kalbarprov.go.id. Sistem ini selalu dimuktahirkan dan juga digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan dalam pengelolaan manajemen SDM, sedangkan untuk Tahun 2023 sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh seluruh pegawai melalui aplikasi www.sapakalbar.kalbarprov.go.id.

7) Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

Guna mendukung penataan SDM secara periodik dilakukan evaluasi jabatan dengan melihat peta jabatan dan informasi faktor jabatan. Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun 2019 telah menetapkan kelas jabatan dengan Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan. Pada Tahun 2021 Pemerintah Provinsi kalbar merevisi peraturan tersebut dengan Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

f. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2022 telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Gratifikasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk Unit Pengendali Gratifikasi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 675/ITPROV/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Sekretariat UPG di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Unit pengendali gratifikasi pada tahun 2022 telah menerima sebanyak 1 (satu) laporan gratifikasi.



2) Penerapan SPIP

Hasil Penilaian Baseline Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, bahwa berdasarkan hasil penilaian baseline maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: LAP-340/PW14/3/2018 tanggal 1 November 2018 Hal: Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memenuhi karakteristik maturitas penyelenggara SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,0375.

3) Pengaduan Masyarakat

Terhadap pengaduan masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 03/ITPROV/2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selama tahun 2022 jumlah surat masuk rahasia/dumas pengaduan sebanyak 15 (lima belas) pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Pengaduan Masyarakat

No.	Jenis Saluran Pengaduan	Jumlah Pengaduan
1.	<i>Whistleblowing System (WBS)</i>	3
2.	Aplikasi SP4N-LAPOR!	4
3.	Pengaduan Secara Langsung	6
4.	Pelimpahan Dari Aparat Penegak Hukum (APH)	2
Total		15

Sumber: Itprov, 2022

4) Pengelolaan Pengaduan Melalui SP4N-LAPOR!

Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan aplikasi LAPOR! atau yang disebut SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara pelayanan publik dan dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi



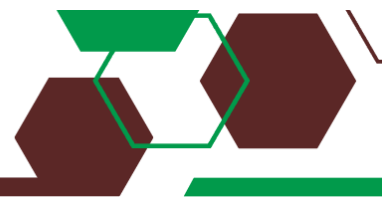
Birokrasi bekerjasama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia. Pengelolaan pengaduan dilakukan secara berjenjang mulai dari Admin Instansi pada Inspektorat Provinsi kemudian diteruskan/didisposisi kepada pejabat penghubung pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan urusan pengaduan terlapor.

Berikut merupakan rekapitulasi pengelolaan pengaduan yang masuk pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui kanal aplikasi SP4N-LAPOR!.

Tabel 2.15
Pengelolaan Pengaduan Berdasarkan Jenis Pengaduan Tahun 2022

No.	Urusan / Jenis Pengaduan	Jumlah Pengaduan	Persentase (%)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	12	21%
2	Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Kalimantan Barat	7	13%
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	7	13%
4	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat	6	11%
5	Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	4	7%
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat	3	5%
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar	3	5%
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	3	5%
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat	2	4%
10	Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kalimantan Barat	2	4%
11	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	1	2%
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	1	2%
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar	1	2%
14	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Kalbar	1	2%
15	Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	1	2%
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kalbar	1	2%
17	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat	1	2%
Total		56	100%

Sumber: Itprov, 2022



No	Status Pengaduan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Belum di Verifikasi	-	-
2	Belum ditindaklanjuti	-	-
3	Dalam Proses	1	1,79
4	Selesai	55	98,21
TOTAL		56	100

Sumber: *Itprov, 2022*

5) Whistleblower system

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Inspektorat Provinsi melakukan langkah konkrit guna mensinergikan pola penerapan whistleblowing system, antara lain:

- a) Memperbarui aturan whistleblowing system dengan mencabut Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 37 Tahun 2013 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan diganti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 182 Tahun 2021 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi;
- b) Berkoordinasi dengan tim WBS KPK terkait pelaksanaan WBS di Kalimantan Barat
- c) Menerbitkan Surat Edaran terkait WBS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d) Menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Penanganan Whistleblowing System di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- e) Mengoperasikan kanal pengaduan WBS yang telah dibangun bersama dengan KPK yaitu wbs.kalbarprov.go.id;
- f) Melakukan penunjukan petugas yang menangani pengaduan masuk melalui kanal wbs.kalbarprov.go.id.
- g) Jumlah pengaduan melalui WBS selama Tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) pengaduan dan telah ditindaklanjuti dengan status "Selesai".

g. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Guna mewujudkan tujuan tersebut, dalam tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:



1) Keterlibatan Pimpinan

Gubernur telah mengadakan evaluasi kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk memastikan kinerja dan indikator kinerja telah berorientasi kepada hasil serta memastikan keterpaduan perencanaan level provinsi terhadap perencanaan level PD.

2) Pengelolaan akuntabilitas kinerja

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki aplikasi yang telah terintegrasi dari aspek perencanaan dan aspek keuangan serta aspek pelaporan akuntabilitas kinerja. Aplikasi pada sektor perencanaan yaitu Aplikasi Simdalrenbang (<https://www.simdalrenbang.com/>) merupakan aplikasi yang dapat membantu dalam menyusun RPJMD, Renstra, Renja Perangkat Daerah, RKPD, Usulan Musrenbang kabupaten/ Kota, pokok-pokok pikiran dewan dan realisasi melalui proses rekapitulasi dan simulasi untuk menghasilkan skenario perencanaan anggaran yang optimal. Sedangkan pada aspek keuangan aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Simakda (sistem informasi manajemen anggaran dan akuntansi keuangan daerah SKPD) <http://simakda-bpkpd.kalbarprov.go.id>. Aplikasi pelaporan kinerja yang digunakan adalah aplikasi e-kinerja. Aplikasi ini pada tahun 2022 diperbaharui kembali pengukuran kinerja setiap perangkat daerah berdasarkan triwulanan serta fitur- fitur terkait rencana aksi program, updating nomenklatur Perangkat Daerah. alamat aplikasi e-kinerja Pemprov kalbar yaitu <https://esakip.kalbarprov.go.id> pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 91 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan peraturan Gubernur tersebut dilakukan juga peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja pada masing-masing perangkat daerah. Pada Tahun 2020 juga Pemerintah Provinsi Melalui Dinas Kominfo dan BKD mengembangkan sistem penilaian dan perhitungan kinerja seluruh ASN di Lingkungan Pemprov Kalbar yang berdampak pada *reward* dan



punishment bagi setiap individu. Sistem tersebut dinamakan e-activity dan e-presensi. E-activity dan e-presensi diterapkan pada Tahun 2021. Pada Tahun 2022 BKD dan Dinas Kominfo melakukan perumusan integrasi data pada e-activity dan e-skp bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2022 telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015. Terkait penerapan Standar Pelayanan Publik, maka Pemprov Kalbar melalui Biro Organisasi melakukan asistensi dan monev standar pelayanan publik kepada seluruh Perangkat Daerah, Biro dan UPT. Selain itu Ombudsman RI pada Tahun 2022 telah melakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik kepada Pemprov Kalbar dan seluruh Kabupaten/Kota se-Kalbar. Pemprov Kalbar mendapatkan hasil penilaian 84,19 dalam kategori B (kualitas tinggi) pada zona hijau dan berada pada peringkat 10 besar nasional. Hasil tersebut merupakan hasil penilaian dari 4 sampel lokus yaitu DPMPTSP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.

Terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Kalbar telah dilaksanakan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB kepada Pemprov Kalbar maupun 14 (empat belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilakukan oleh Kementerian PANRB pada tahun 2022, Pemprov Kalbar memperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,42 dengan kategori Sangat Baik. Adapun lokus PEKPPP ini adalah DPMPTSP dan UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah 1.



2) Budaya Pelayanan Prima

Dalam rangka meningkatkan mewujudkan budaya pelayanan prima, Pemerintah Provinsi Kalbar menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat. Kode Etik Pelayanan Publik dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara dan Pelaksana pelayanan publik dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik Pelayanan Publik bertujuan untuk:

- a) menjaga martabat, kehormatan dan citra Penyelenggara serta sebagai bentuk profesionalisme sumber daya manusia Pelaksana pelayanan publik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada masyarakat;
- b) mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur oleh Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak diskriminatif.

Penyusunan Kode Etik Pelayanan Publik menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a) kejujuran dan transparansi dalam melakukan hubungan dengan para pihak yang berkepentingan dengan menjunjung tinggi ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) kesadaran akan tanggung jawab pada masyarakat, komunitas sekitar, lingkungan hidup serta kehidupan berbangsa dan bernegara;
- c) memperhatikan nilai-nilai luhur kemanusiaan;
- d) menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan tidak berpihak dalam melakukan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- e) selalu siap dan loyal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku ASN dan abdi masyarakat; dan
- f) memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta berupaya untuk melakukan inovasi demi peningkatan kinerja dan kualitas pekerjaan.

3) Inovasi Pelayanan Publik

Pada tahun 2022 terdapat 15 inovasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang disampaikan kepada



Kementerian PAN dan RB untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2022, sebagai mana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.16

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022

No.	Nama Inovasi	Kelompok - Kategori	Perangkat Daerah / Unit Pelayanan Publik
1	BANG ELIS HADIR, Kampung Kami Jadi Terang (Pembangkit Energi Listrik Tenaga Matahari di Daerah Pedalaman Kalbar)	Undangan Khusus – Efektivitas Institusi Publik untuk Mencapai TPB	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
2	DAPAT PULSA (Datang Berobat Pulang Sama-Sama)	Umum – Efektivitas Institusi Publik untuk Mencapai TPB	RSJ Provinsi
3	<i>Green Collaboration</i>	Umum – Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif & Berkeadilan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	KANDAU	Umum – Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif & Berkeadilan	UPT Klinik Utama Sungai Bangkong
5	KEMBARA (Kembali Berkarya Nyata)	Umum – Efektivitas Institusi Publik untuk Mencapai TPB	RSJ Provinsi
6	KHATULISTIWA ONE MAP	Umum – Efektivitas Institusi Publik untuk Mencapai TPB	Badan Penelitian dan Pengembangan
7	KLINIK HATI JASOKA (Klinik Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja)	Umum – Ketahanan Institusi Publik di Masa Pandemi dan Antisipasi di Masa Pasca Pandemi Covid-19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	LANTAS HEBAT (Layanan Berantas Hoax Kesehatan Kalimantan Barat)	Umum – Ketahanan Institusi Publik di Masa Pandemi dan Antisipasi di Masa Pasca Pandemi Covid-19	Dinas Kesehatan
9	LU KEREN (Loket Terpadu Kelompok Rentan)	Umum – Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif & Berkeadilan	UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah 1
10	MTAK KEPO (<i>Mobile Acceleration</i> Kolaborasi Kepariwisata, Ekraf, Pemuda, Olahraga)	Umum – Ketahanan Institusi Publik di Masa Pandemi dan Antisipasi di Masa Pasca Pandemi Covid-19	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
11	Rumah Sakitku, Rumah Keduaku Bersama SIDOREMI	Umum – Efektivitas Institusi Publik untuk Mencapai TPB	RSUD Dokter Soedarso
12	SIAPBESIBOK	Umum – Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif & Berkeadilan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
13	SIMULIASARI (Sistem Simulasi dan Informasi Desa Mandiri)	Umum – Efektivitas Institusi Publik untuk Mencapai TPB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
14	SIP SIPPAN (Sistem Informasi Penataan dan Pemeliharaan Arsip Perizinan dan Non Perizinan)	Umum – Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif & Berkeadilan	DPMPTSP
15	Sistem Informasi Industri Daerah (SIIDA) Kalbar	Umum – Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif & Berkeadilan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber: Biro Organisasi Setda Prov Kalbar, 2022



Tabel 2.17

Prestasi Yang Telah Diraih Provinsi Kalimantan Barat Pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 s.d. 2022

Tahun	Prestasi	Judul Inovasi	Perangkat Daerah / Pemda
2022	Pemenang OAPSI (<i>Outstanding Achievement of Public Service Innovation</i>) Top 5	BANG ELIS HADIR, kampung kami jadi terang (pembANGkit Energi LIStrik tenaga mataHARI DI daerah pedalaman kalbar)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalbar
	Top 99	Rumah Sakitku Rumah Keduaku Bersama SIDOREMI	RSUD dr. Soedarso Provinsi Kalbar
2021	Top 45	CMS Desa (<i>Cash Management System</i> / Transaksi Keuangan Desa secara Non Tunai)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Kubu Raya
2020	Top 99	Rumah Sakitku Rumah Keduaku	RSUD dr. Soedarso Provinsi Kalbar
2019	Top 99	Cegah Si Manis yang Berujung Kronis	RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadrie Kota Pontianak
2018	Top 99	Posduren (Posyandu Remaja Entikong)	Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau
2017	Top 40	BANG ELIS HADIR, kampung kami jadi terang (pembANGkit Energi LIStrik tenaga mataHARI DI daerah pedalaman kalbar)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalbar
	Top 40	BCL (Bisnis Cakep Lalu Lintas Lancar)	Dinas Perhubungan Kota Pontianak
2016	Top 35; Peserta Kompetisi Pelayanan Publik Internasional (UNPSA); 4 besar role model nasional UPP RSUD	Pelayanan Anti Diskriminasi	RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadrie Kota Pontianak
	Top 99	Pemberdayaan Masyarakat Melalui "Pos Gita" dalam Pencegahan Gizi Buruk di Kecamatan Sejangkung	Puskesmas Sejangkung, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas
	Best Practises / Kluster Inovasi SAMSAT	SAMSAT Keliling (SAMKEL)	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar
2015	Top 99	Penggunaan Simulator Risiko Karies (Gigi Berlubang) Melalui Pendekatan Interpersonal dalam Pelaksanaan Upaya Pengembangan dan Inovasi Program di Poli Gigi Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh	Puskesmas Sungai Pinyuh, Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah
2014	Top 99	Layanan Gerai SAMSAT	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar
	Top 99	Pelayanan Administrasi Terpadu Gratis	Kantor Camat Pemangkat Kabupaten Sambas

Sumber: Biro Organisasi Setda Prov Kalbar, 2022



- 4) Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan
Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2022 mendapatkan nilai 86,22 dengan kategori Baik (B), nilai ini meningkat 1,21 poin dari tahun sebelumnya (2021). Untuk kemudahan dan integrasi data terkait SKM, maka Pemprov Kalbar mengembangkan aplikasi SEKAMPADI (Survei Kepuasan Masyarakat Aplikasi Daring) yang dapat melakukan SKM secara elektronik/online.
- 5) Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menggunakan aplikasi pelayanan terpadu untuk melayani semua perizinan yaitu: www.oss.go.id. Selain itu transformasi pelayanan publik digital juga dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui peningkatan penggunaan pelayanan secara digital yang terintegrasi.

2. Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat

Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 sebesar 71,04 dan memperoleh predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “sangat baik”, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Predikat Nilai B tersebut memang dirasakan belum cukup memuaskan, sehingga kami memandang perlu melakukan langkah- langkah perbaikan dalam penyelenggaraan SAKIP, langkah-langkah perbaikan yang dilakukan antara lain:

- a. Telah dilakukan reviu kinerja PD yang di pimpin Gubernur kepada seluruh PD dengan memastikan bahwa terdapat keterpaduan antara perencanaan kinerja pemerintah daerah dengan perencanaan kinerja PD dan hasil revisi tersebut dituangkan pada Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022
- b. Telah menyusun perbaikan pohon kinerja di tingkat pemerintah daerah memastikan berfokus pada isu strategis daerah dan mengidentifikasi *crosscutting* yang mempengaruhi kondisi kerja strategis yang diterapkan dan akan dijadikan rujukan penyusunan awal RPJMD transisi (RPD) Tahun 2024-2026.



- c. Telah berupaya mengoptimalkan aplikasi pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang dimiliki dengan menambahkan fitur monitoring secara berkala
- d. Telah berupaya meningkatkan kapasitas pemahaman perencana di pemerintah Kab/Kota.
- e. Melakukan penguatan pemahaman SAKIP secara internal kepada seluruh PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- f. Telah melakukan penyusunan pedoman evaluasi internal sebagai panduan PD untuk melakukan evaluasi internal di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- g. Dalam rangka membangun budaya kinerja dan pemahaman dalam penjabaran kinerja yang berorientasi pada hasil Pemprov Kalbar melaksanakan *Workshop* SAKIP Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2022 secara luring yang dibuka oleh Gubernur Kalbar bertempat di Aula BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan *Workshop* SAKIP dilaksanakan selama tiga hari. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah/ Biro.

B. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.18
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.024.058.585	5.967.260.154	99,06		
		Program Pendaftaran penduduk	403.714.300	371.991.990	92,14		
		Program Pencatatan sipil	430.169.300	382.609.152	88,94		
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	777.773.700	744.485.619	95,72		
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	82.070.000	78.634.630	95,81		
		Program Pengendalian penduduk	87.184.500	80.228.626	92,02		
		Program Pelayanan Penghubung	1.446.189.804	1.367.465.971	94,56		
		Program Penataan Organisasi	2.203.256.579	2.163.854.588	98,21		
		Program Administrasi umum	108.126.728.487	100.180.601.597	92,65		
		Program Pemerintahan dan Otda	3.286.064.914	3.202.384.086	97,45		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		Program Kesejahteraan rakyat	77.060.655.881	73.072.427.269	94.82		
		Program perekonomian dan pembangunan	1.563.621.107	1.525.204.894	97.54		
		program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa	5.541.580.940	5.422.877.612	97.86		
		program kebijakan administrasipembangunan	993.449.900	969.139.800	97.55		
		program fasilitasi dan koordinasihukum	2.668.225.400	2.533.334.632	94.94		
		Program administrasi umum sekretariat dprd provinsi	66.923.472.236	65.545.082.202,35	97.94		
		program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	57.092.831.900	50.318.501.647	88.13		
		program penyelenggaraan pengawasan	7.352.721.200	717.4834.396	97.58		
		program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	2.802.634.000	2.717.883.369	96.98		
		Program pengelolaan aplikasi informasi	19.155.525.383	18.962.373.912	98.99		
		program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	4.282.128.000	4.240.002.630,5	99.02		
		program penyelenggaraan statistik sektoral	343.348.400	318.416.762	92.74		
		program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	429.156.900	414.495.233	96.58		
		program pengelolaan keuangan daerah	1.221.220.361.812	1.194.060.500.401,8	97.78		
		program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	2.572.916.500	2.301.380.872	89.45		
		program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	4.673.090.800	4.397.503.630	94.10		
					95.32	99.58	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95.32 % dan realisasi capaian kinerja sasaran 99.58.





C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah ditunjang berbagai program- program core business yang di laksanakan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalbar, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Inspektorat Provinsi dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Program prioritas yang berpengaruh langsung atau berdampak terhadap pencapaian target sasaran strategis Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang dapat dilihat pada Tabel 2.18 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

D. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018–2022 dan target RPJMD

Tabel 2.19
Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2022 dan
Target RPJMD Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					TARGET RPJMD	Tingkat Kemajuan
			2018	2019	2020	2021	2022		
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B	A	n/a
		Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat	B	B	B	B	BB	A	n/a

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 mendapatkan nilai 67.37 dengan kategori “B”. Rincian nilai nya sebagai berikut:

1. Komponen pengungkit

- Manajemen perubahan : 2.80
- Penataan perundang- undangan : 2.30
- Penataan dan penguatan organisasi : 3.32
- Penataan tatalaksana : 3.23





- Penataan sistem manajemen SDM : 11.53
- Penguatan akuntabilitas : 3.62
- Penguatan pengawasan : 6.63
- Peningkatan kualitas pelayanan publik : 3.37

2. Komponen hasil

- Nilai akuntabilitas kinerja : 8.87
- Survey internal integritas organisasi : 4.01
- Survey eksternal persepsi korupsi : 5.79
- Opini BPK : 3.00
- Survey eksternal pelayanan publik : 8.90

Sedangkan untuk Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 mendapatkan nilai 68,15, dengan kategori B. Rincian nilai nya sebagai berikut:

1. Komponen pengungkit

- Manajemen perubahan : 2.91
- Penataan perundang- undangan : 2.40
- Penataan dan penguatan organisasi : 3.47
- Penataan tatalaksana : 3.40
- Penataan sistem manajemen SDM : 11.68
- Penguatan akuntabilitas : 3.73
- Penguatan pengawasan : 6.71
- Peningkatan kualitas pelayanan publik : 3.46

2. Komponen hasil

- Nilai akuntabilitas kinerja : 8.96
- Survey internal integritas organisasi : 4.43
- Survey eksternal persepsi korupsi : 6.17
- Opini BPK : 2.00
- Survey eksternal pelayanan publik : 8.83

Berdasarkan perbandingan tersebut, terjadi kenaikan sebesar 1.29 poin walaupun masih tetap kategori B. Untuk Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 mendapatkan nilai n/a

1. Komponen pengungkit

- Pemenuhan : 13.13
- Hasil Antara area perubahan : 6.52





- Reform : 16.13

2. Komponen hasil

- akuntabilitas kinerja dan keuangan : 7.61
- kualitas pelayanan publik : 9.08
- Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN : 9.45
- Kinerja Organisasi : 6.57

Berdasarkan perbandingan tersebut, terjadi kenaikan sebesar poin walaupun masih tetap kategori B. Untuk Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 mendapatkan nilai 68.57.

1. Komponen pengungkit

- Pemenuhan : 13.43
- Hasil Antara area perubahan : 7.05
- Reform : 16.64

2. Komponen hasil

- akuntabilitas kinerja dan keuangan : 7.70
- kualitas pelayanan publik : 8.54
- Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN : 8.07
- Kinerja Organisasi : 7.14

Berdasarkan perbandingan tersebut, terjadi kenaikan sebesar poin walaupun masih tetap kategori B. Untuk Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 mendapatkan nilai 69.43

1. Komponen pengungkit

- Pemenuhan : 14.02
- Hasil Antara area perubahan : 7.13
- Reform : 16.96

2. Komponen hasil

- akuntabilitas kinerja dan keuangan : 7.97
- kualitas pelayanan publik : 9.15
- Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN : 7.81
- Kinerja Organisasi : 6.39

Sementara itu Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Penilaian Tahun 2018 mendapatkan nilai 64,01 kategori B. Rincian nilai komponen SAKIP:

1. Perencanaan Kinerja : 21.04
2. Pengukuran Kinerja : 13.72





3. Pelaporan Kinerja : 10.31
4. Evaluasi Internal : 6.32
5. Capaian Kinerja : 12.61

Sedangkan Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 mendapatkan nilai 65,85 dengan kategori B. Dengan rincian nilai komponen SAKIP Tahun 2019:

1. Perencanaan Kinerja : 21.55
2. Pengukuran Kinerja : 14.44
3. Pelaporan Kinerja : 10.52
4. Evaluasi Internal : 6.32
5. Capaian Kinerja : 12.72

Untuk Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Penilaian Tahun 2020 mendapatkan nilai 67,16 Dengan rincian nilai komponen SAKIP Tahun 2020:

1. Perencanaan Kinerja : 21.73
2. Pengukuran Kinerja : 15.07
3. Pelaporan Kinerja : 10.70
4. Evaluasi Internal : 6.76
5. Capaian Kinerja : 12.90

Untuk Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Penilaian Tahun 2021 mendapatkan nilai Dengan rincian nilai komponen SAKIP Tahun 2021:

1. Perencanaan Kinerja : 21.98
2. Pengukuran Kinerja : 15.38
3. Pelaporan Kinerja : 10.83
4. Evaluasi Internal : 6.76
5. Capaian Kinerja : 13.09

Untuk Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Penilaian Tahun 2022 mendapatkan nilai Dengan rincian nilai komponen SAKIP Tahun 2022:

1. Perencanaan Kinerja : 22.23
2. Pengukuran Kinerja : 20.69
3. Pelaporan Kinerja : 10.76
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 17.36





Realisasi predikat dan nilai Indeks RB dan nilai SAKIP Pemprov Kalbar dapat dilihat dalam tabel 2.20.

Tabel 2.20
Realisasi Predikat dan Nilai Indeks RB dan Nilai SAKIP
Pemerintah Provinsi Kalbar

Indikator Kinerja	2018	Nilai	2019	Nilai	2020	Nilai	2021	Nilai	2022	Nilai
Indeks RB	B	67.37	B	68.15	B	68.34	B	68.57	B	69.43
Nilai SAKIP	B	64.01	B	65.85	B	67.16	B	68.04	BB	71.04

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Indeks RB

- a. Sudah dilakukan identifikasi peraturan khususnya terhadap peraturan yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya. Dalam identifikasi tersebut telah disertai dengan informasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang terdampak, serta rekomendasi tindak lanjut. Namun, dari hal tersebut belum dilakukan pemetaan atas dampak dari kebijakan yang dihasilkan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan;
- b. Perlu dilakukan reviu kesesuaian Arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE yang telah ada dengan Perpres no 132 tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional;
- c. Perencanaan kinerja belum sepenuhnya terbangun dengan baik, hal ini disebabkan oleh penjenjangan kinerja yang disusun belum sepenuhnya disusun berdasarkan isu strategis dan kerangka logis yang mempertimbangkan Critical Success Factor (CSF) yang perlu dicapai, sehingga masih banyak terdapat ketidakselarasan rumusan kinerja antara level atas hingga ke level paling bawahnya.
- d. Dalam Area Pengawasan:
 - 1) Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengawal setiap PD dalam memitigasi risiko belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. belum terdapat laporan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian risiko yang disampaikan oleh PD kepada APIP. Sehingga efektivitas rencana



- tindak yang dirumuskan untuk mengendalikan risiko yang ada belum dapat dipastikan;
- 2) Belum seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan pelaporan harta kekayaannya. implementasi Zona Integritas dari unit yang belum lolos masih perlu ditingkatkan lagi.
- e. Belum seluruh PD menerapkan kebijakan terkait kompensasi atas pelayanan yang tidak sesuai standar, utamanya pada PD yang melakukan layanan langsung kepada masyarakat.
 - f. Pada komponen hasil, survei internal organisasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, artinya persepsi pegawai mengenai efektivitas sistem pengendalian internal organisasi, struktur organisasi, pengelolaan keuangan, serta praktik penerapan integritas dan kode etik, dirasa menurun dari tahun sebelumnya.

2. SAKIP

- a. Perencanaan Kinerja
 - 1) Terdapat ketidakselarasan kinerja sasaran strategis yang dituangkan antara dokumen RPJMD dengan Perjanjian Kinerja Gubernur.
 - 2) Belum seluruh Perangkat daerah memiliki perumusan sasaran strategis yang mampu menggambarkan kinerja yang berorientasi outcome dan indicator kinerja yang relevan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
 - 3) Penjejang kinerja yang telah dimiliki disusun dengan merumuskan pohon kinerja, namun pohon kinerja belum sepenuhnya berdasarkan kerangka berpikir logis/logical framework dan hubungan antar level kinerja belum disusun dengan mempertimbangkan critical success factor (CSF).
- b. Pengukuran Kinerja
 - 1) Masih terdapat data kinerja di tingkat Perangkat Daerah yang belum relevan dan mendukung pencapaian kinerja, karena formulasi perhitungan yang memiliki tidak sesuai dengan indicator kinerja.
 - 2) Meskipun telah memiliki pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara elektronik, namun belum terlihat komitmen dari seluruh Perangkat Daerah untuk mau memanfaatkan aplikasi tersebut dengan baik.



- 3) Meskipun dalam kebijakan pemberian TPPD telah memperhitungkan pencapaian kinerja individu sebagai salah satu komponennya, namun kinerja individu yang disampaikan baru sebatas menggambarkan aktivitas sehari-hari/daily activity bukan ukuran kinerja individu yang menunjang pencapaian kinerja unit kerja.
- c. Pelaporan Kinerja
- 1) Masih terdapat laporan kinerja di tingkat Perangkat Daerah yang belum menginformasikan secara detail setiap pencapaian indicator kinerja yang dimiliki sehingga laporan kinerja belum dapat optimal dimanfaatkan sebagai perbaikan pencapaian kinerja.
 - 2) Data kinerja dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- 1) Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi belum sepenuhnya dapat diketahui sejauh mana sudah ditindaklanjuti.
 - 2) Laporan hasil evaluasi belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup serta konkrit sesuai dengan permasalahan utama yang dialami oleh setiap Perangkat daerah dalam implementasi SAKIP.
 - 3) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah seperti pada indikator tingkat pengangguran terbuka.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Indeks RB:

- a. Menyusun pemetaan atas dampak dari kebijakan/peraturan yang telah diterbitkan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan untuk menjamin efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang telah disusun dan diidentifikasi;
- b. Meningkatkan penerapan manajemen SPBE di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan melakukan reviu dan penyesuaian Arsitektur SPBE yang ada dengan Perpres Nomor 132 tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional;





- c. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 tahun 2021 sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah dapat selaras dan mampu mendukung dalam pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi;
- d. Meningkatkan kualitas dan peran APIP dalam mendorong penilaian risiko serta perencanaan mitigasi risiko yang baik di setiap PD untuk mendukung tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan;
- e. Mendorong peningkatan kepatuhan pengisian LHKPN dan LHKASN kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- f. Melanjutkan upaya pembangunan Zona Integritas dengan memaksimalkan peran Tim Penilai Internal (TPI) dalam proses pembangunan Zona Integritas sebagai pendamping, fasilitator dan evaluator bagi unit-unit kerja, sehingga diharapkan bisa meningkatkan keberhasilan pembangunan Zona Integritas. Dibutuhkan penguatan pemahaman terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas dari TPI kepada unit-unit kerja Zona Integritas yang telah dibangun dengan mendorong pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala atas seluruh rencana pembangunan yang telah disusun sebelumnya
- g. Menetapkan kebijakan kompensasi terkait layanan yang tidak sesuai dengan standar dan menerapkan sistem pemberian reward and punishment bagi petugas pemberi layanan, serta melakukan peningkatan kompetensi terkait penerapan budaya pelayanan prima kepada seluruh petugas pelayanan;
- h. Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal organisasi, struktur organisasi, pengelolaan keuangan, serta praktik penerapan integritas dan kode etik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

2. SAKIP:

- a. Memastikan kembali keselarasan perencanaan kinerja di tingkat pemerintah daerah dengan cara memastikan kinerja sasaran strategis yang dituangkan ke perjanjian kinerja sesuai dengan kinerja tahun berjalan yang ada di RPJMD sehingga perencanaan kinerja di tingkat pemerintah daerah lebih berkualitas;



- b. Mendorong PD untuk memastikan kembali penetapan sasaran strategis yang dimiliki untuk dapat menggambarkan kinerja yang berorientasi outcome dan indikator kinerja yang relevan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja yang ditetapkan sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung dampak kinerja yang dihasilkan;
- c. Melakukan reviu atas pohon kinerja yang telah disusun untuk dapat merumuskan penjenjangan kinerja berdasarkan kerangka berpikir logis/logical framework dan memastikan hubungan antara level kinerja disusun dengan mempertimbangkan critical success factor (CSF) sehingga pencapaian kinerja strategis berpotensi besar untuk tercapai.
- d. Mendorong pengidentifikasi crosscutting yang dilakukan di level pemerintah daerah mengarah ke pengidentifikasian kondisi hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan lintas PD yang mempengaruhi pencapaian kinerja strategis/final outcome di level pemerintah daerah;
- e. Memastikan bahwa data kinerja di tingkat PD memiliki formulasi perhitungan yang dapat menjelaskan indikator kinerja secara tepat dan akurat sehingga data kinerja dapat semakin handal dan dapat menggambarkan keberhasilan pencapaian kinerja yang ditetapkan;
- f. Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh PD untuk memanfaatkan aplikasi pengukuran dan pengumpulan data kinerja dengan melakukan pengisian data kinerja tepat waktu dan juga adanya mendorong pimpinan PD untuk memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk controlling pimpinan PD terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki;
- g. Memastikan kembali pemberian TPPD berdasarkan kinerja individu yang terkait dengan pencapaian kinerja organisasi sehingga pemberian TPPD sebagai pelaksanaan reward and punishment berdasarkan kinerja dapat terwujud;
- h. Meningkatkan kualitas laporan kinerja di tingkat PD dengan cara memastikan informasi secara detail pencapaian kinerja setiap indikator kinerja yang dimiliki sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pencapaian realisasi indikator kinerja yang dimiliki;
- i. Mendorong pemanfaatan data kinerja pada laporan kinerja untuk perbaikan penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga perencanaan kinerja ke depan dapat menggambarkan adanya perbaikan/peningkatan kinerja;



- j. Membangun evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara elektronik, sehingga mempermudah monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi;
- k. Inspektorat selaku yang melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Internal agar memberikan temuan dan rekomendasi agar semakin konkrit dan sesuai dengan akar permasalahan, dan menjadi solusi dalam perbaikan implementasi SAKIP dari setiap PD;
- l. Memastikan bahwa semua rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti oleh seluruh PD sehingga mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja.

2.3.1.3 Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kualitas SDM

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 2.21

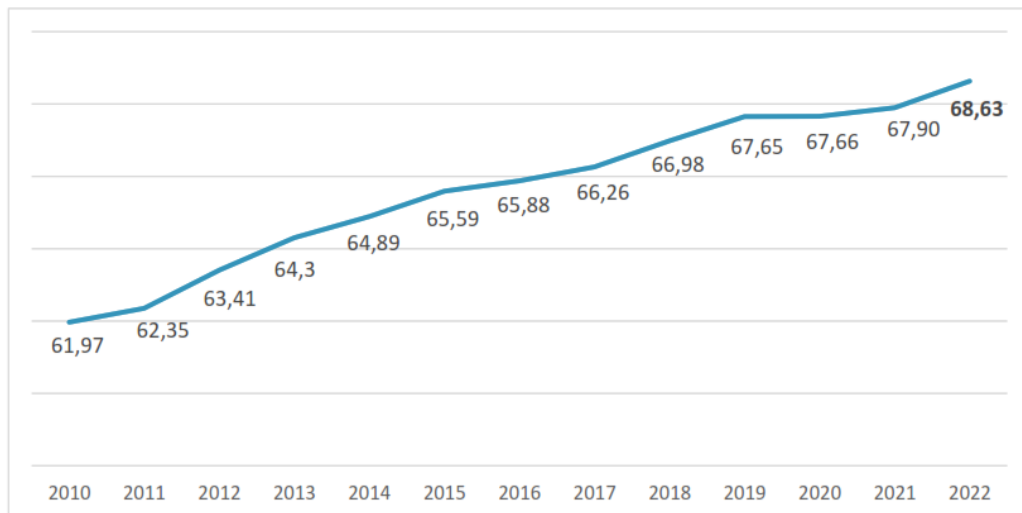
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	70,29	68,63	97,64
Capaian Kinerja Sasaran 3					97,64

1. Perkembangan IPM Kalimantan Barat Tahun 2010-2022

Berdasarkan data BPS Provinsi Kalbar dalam satu dekade ini, pembangunan manusia di Kalimantan Barat terus mengalami kemajuan. Selama 2010-2022, IPM Kalimantan Barat rata-rata meningkat sebesar 0,86 persen (%) per tahun dari 61,97 pada tahun 2010 menjadi 68,63 pada tahun 2022. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena Pandemi COVID-19, peningkatan IPM Kalimantan Barat sudah kembali membaik pada tahun 2022 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan).





Sumber: BPS Prov Kalbar, 2022

Gambar 2.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat, 2010-2022

- Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Kalimantan Barat tahun 2010-2022
Capaian IPM tahun 2022 yang meningkat 0,73 poin di tahun 2022 didukung oleh peningkatan semua komponen penyusunnya. Hal ini menunjukkan peningkatan positif dibandingkan tahun 2021, berbeda dengan tahun 2020 yang mengalami perlambatan akibat penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

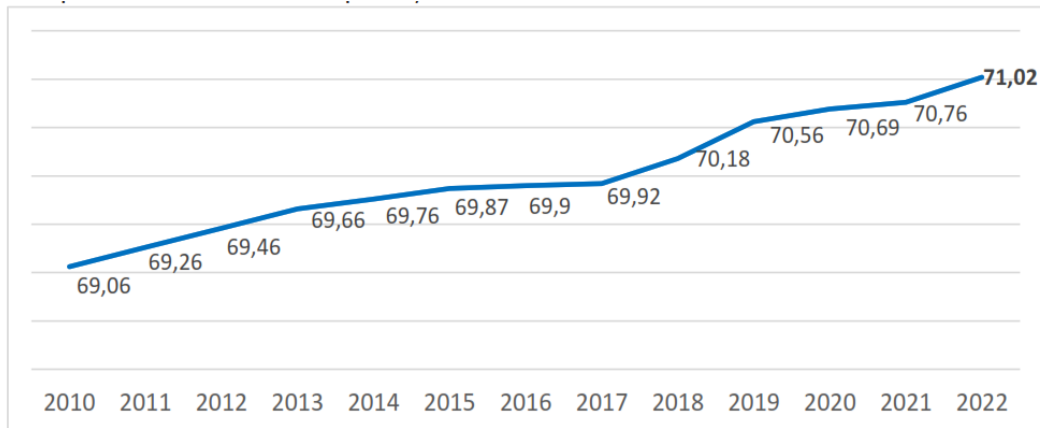
Tabel 2.22
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat
Menurut Komponen, 2012-2022

Komponen	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Umur Panjang dan Hidup Sehat												
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	69,46	69,66	69,76	69,87	69,90	69,92	70,18	70,56	70,69	70,76	71,02
Pengetahuan												
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,11	11,60	11,89	12,25	12,37	12,50	12,55	12,58	12,60	12,65	12,66
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,62	6,69	6,83	6,93	6,98	7,05	7,12	7,31	7,37	7,45	7,59
Standar Hidup Layak												
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp 000	8.002	8.127	8.175	8.279	8.348	8.472	8.860	9.055	8.930	8.974	9.355
IPM		63,41	64,3	64,89	65,59	65,88	66,26	66,98	67,65	67,66	67,90	68,63



3. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2022, Kalimantan Barat telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup sebesar 1,96 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,23 persen per tahun. Pada tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kalimantan Barat hanya sebesar 69,06 tahun, dan pada tahun 2021 telah mencapai 71,02 tahun.



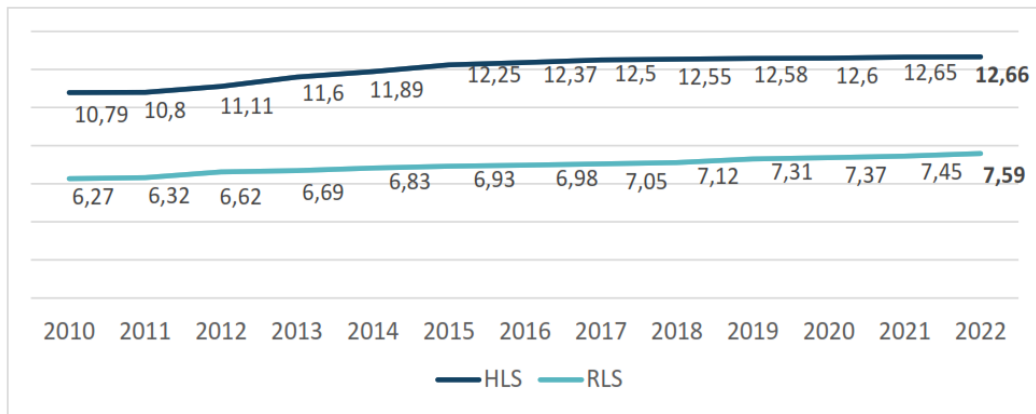
Sumber: BPS Prov Kalbar, 2022

Gambar 2.5

Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Kalimantan Barat (tahun), 2010-2022

4. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, meski pada saat pandemic COVID-19 mengalami sedikit perlambatan. Selama periode 2010 hingga 2022, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kalimantan Barat telah meningkat sebesar 1,35 tahun, sementara rata-rata lama sekolah (RLS) meningkat 1,61 tahun.



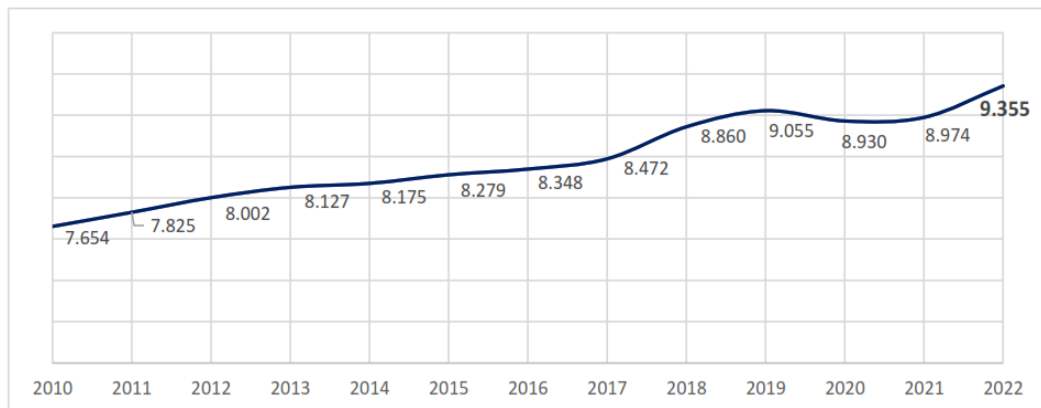
Sumber: BPS Prov Kalbar, 2022

Gambar 2.6

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah Kalimantan Barat, 2010-2022

5. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kalimantan Barat mencapai Rp 9,35 juta per tahun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,26 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari satu tahun pandemi COVID-19 melanda Kalimantan Barat, pengeluaran riil per kapita mulai meningkat kembali.



Sumber: BPS Prov Kalbar, 2022

Gambar 2.7

Pengeluaran Per Kapita per Tahun Kalimantan Barat, 2010-2022 (Rp 000)

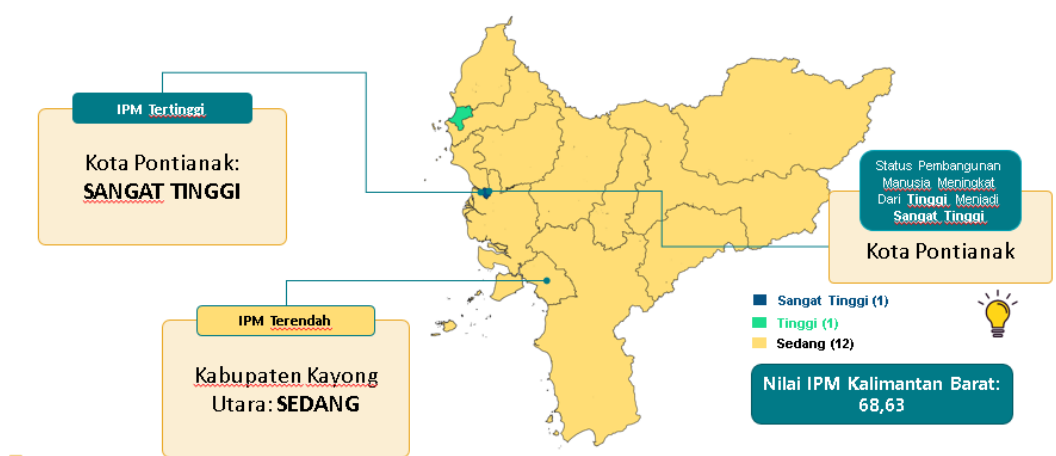




6. Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

Peningkatan IPM Tahun 2022 terjadi di seluruh kabupaten/kota. Terdapat sedikit perubahan pada peringkat capaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten. Peringkat Kabupaten Sambas bertukar dengan Kabupaten Ketapang, meningkat dari urutan ke-6 menjadi urutan ke-5. Kemudian peringkat Kabupaten Mempawah bertukar dengan Kabupaten Sanggau, meningkat dari urutan ke-10 menjadi urutan ke-9. Dari sisi perbandingan antar Kabupaten, terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing Kabupaten. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Kayong Utara (63,81), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Pontianak (80,48), Kota Singkawang ada di urutan ke 2 dengan IPM 72,89.

Pada tahun 2022, status pembangunan di Kota Pontianak meningkat dari “Tinggi” menjadi “Sangat Tinggi” ($80 \leq \text{IPM} < 100$) dengan capaian IPM 80,48. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah Kabupaten/Kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) pada tahun 2022 ada 1 yaitu Kota Singkawang, dengan status “sedang” (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$) adalah 12 Kabupaten, dan dengan status “rendah” ($\text{IPM} < 60$) sudah tidak ada lagi.



Sumber: BPS Prov Kalbar, 2022

Gambar 2.8

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2022

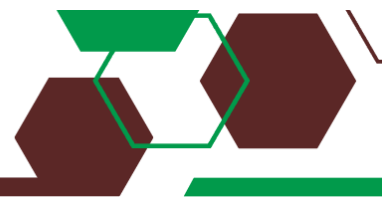
**B. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tabel 2.23

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
3.	Meningkatnya kualitas SDM	Program Pengelolaan Pendidikan	894.105.317.231,00	865.037.406.832,00	96,75		
		Program Pengembangan Kurikulum	1.217.316.300,00	1.184.508.910,00	97,30		
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	999.687.600,00	885.134.800,00	88,54		
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	108.529.800,00	50.465.800,00	46,50		
		Program Pengembangan Kebudayaan	15.049.733.045,00	14.219.624.286,00	94,48		
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	204.997.500,00	204.887.500,00	99,95		
		Program Pembinaan Perpustakaan	5.186.300.750,00	4.462.926.283,00	86,05		
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	124.661.000,00	122.999.313,00	98,67		
		Program Pengelolaan Arsip	623.223.200,00	601.269.972,00	96,48		
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.718.505.000,00	1.616.416.984,00	94,06		
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	21.856.726.035,00	21.454.154.390,00	98,16		
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	650.000.000,00	650.000.000,00	100		
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.725.840.274,00	3.458.071.612,00	92,81		
		Program Pemasaran Pariwisata	8.916.842.300,00	8.429.031.950,00	94,53		
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	2.448.895.000,00	2.338.003.289,00	95,47		
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	606.504.300,00	536.437.400,00	88,45				





No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	92.257.590.268,00	84.643.071.325,00	91,75		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.214.727.900,00	2.916.929.680,00	90,74		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	502.507.000,00	446.852.600,00	88,91		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	90.742.382.556,00	85.681.002.303,00	94,42		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	35.947.570.940,00	25.470.928.784,00	70,86		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	6.218.638.019,00	5.041.549.617,00	81,07		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	20.000.000,00	16.930.000,00	84,65		
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	170.390.400,00	122.408.242,00	71,84		
		Program Perlindungan Perempuan	477.863.457,00	406.391.974,00	85,04		
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	382.668.300,00	355.869.145,00	93,00		
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	219.543.300,00	203.385.686,00	92,64		
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	408.413.500,00	387.548.600,00	94,89		
		Program Perlindungan Khusus Anak	1.222.232.100,00	1.149.226.100,00	94,03		
			3978,25	89,73		97,64	n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 89,73% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 97,64 maka tingkat efisiensinya n/a.

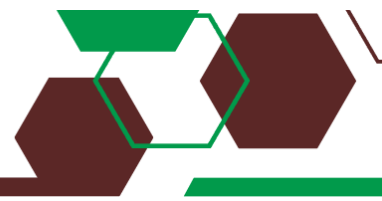




C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dan perlu ditingkatkan lagi antara lain:

1. Keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang oleh 6 program prioritas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, Program Pengembangan Kebudayaan, dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Anggaran yang disediakan untuk program ini sebesar Rp 894.105.317.231,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 865.165.611.512,00 atau 96,76% dari anggaran. Adapun persentase pencapaian kinerja atau Fisik program ini pada Tahun 2022 sebesar 99,82 persen. Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pengelolaan Pendidikan Khusus. Anggaran yang disediakan untuk program ini sebesar Rp 1.217.316.300,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 1.184.508.910,00 atau 97,30% dari anggaran. Adapun persentase pencapaian kinerja atau Fisik program ini pada tahun 2022 sebesar 100 persen. Kegiatan yang menunjang program ini adalah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus dengan capaian kinerja 100 persen. Anggaran yang disediakan untuk program ini sebesar Rp 108.529.800,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 50.465.800,00 atau 46,50 persen dari anggaran. Adapun persentase pencapaian kinerja atau fisik program ini pada tahun 2022 sebesar 53,50 persen. Anggaran yang disediakan untuk program ini sebesar Rp 14.746.729.300,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 13.951.216.355,00 atau 94,61% dari anggaran. Adapun persentase pencapaian kinerja atau Fisik program ini pada tahun 2022 sebesar 100 persen. Anggaran yang disediakan untuk program ini sebesar Rp 204.997.500,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 204.887.500,00 atau 99,95% dari anggaran. Adapun persentase pencapaian kinerja atau fisik program ini pada tahun 2022 sebesar 100 persen.
2. Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Program Pembinaan Perpustakaan dengan alokasi anggaran awal Rp. 5.495.288.850,- dan mengalami refocusing anggaran sebesar Rp. 308.988.100,-, sehingga anggaran yang tersedia untuk



program ini sebesar Rp. 5.186.300.750,- termasuk alokasi dana DAK Fisik sebesar Rp. 4.569.217.000,-. pada program ini terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain: Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp. 732.025.450,- dan mengalami refocusing anggaran sehingga anggaran yang tersedia sebesar Rp. 444.664.750,- kegiatan ini berorientasi pada prosentase perpustakaan yang dibina dan dikembangkan, prosentase peningkatan koleksi perpustakaan, prosentase peningkatan Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang sesuai standar serta prosentase peningkatan pengunjung perpustakaan. Dimana ditahun 2022 sebagaimana dari penyebaran Covid-19 pada tahun sebelumnya berpengaruh pada layanan pengunjung perpustakaan belum maksimal mengikuti peaturan pemerintah dalam antisipasi penyebaran virus Covid-19 di Provinsi Kalimantan Barat. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran semula Rp. 4.763.263.400,- dan setelah refocusing, anggaran tersedia sebesar Rp. 4.741.636.000,- dimana kegiatan ini berorientasi pada pengembangan minat baca masyarakat dan pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang mengikut sertakan masyarakat dan penggiat literasi dalam meningkatkan keterampilan masyarakat dalam berbagai kegiatan inklusi sosial. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan alokasi anggaran semula sebesar Rp. 157.733.300,- dan mengalami refocusing anggaran sebesar Rp. 33.072.300,- sehingga anggaran yang tersedia pada program ini sebesar Rp. 124.661.000,-. Program ini berorientasi pada pencapaian jumlah karya cetak dan karya rekam yang dihimpun menjadi koleksi deposit daerah, jumlah katalog induk daerah dan jumlah terbitan bibliografi daerah serta jumlah naskah budaya dan kearifan lokal yang dikoleksi, namun beberapa capaian tidak dapat memenuhi target karena mengalami beberapa kali refocusing anggaran.

3. Peningkatan terhadap indikator kinerja yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian kinerja pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, yaitu Bidang Olahraga yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang olahraga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan layanan khusus, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang olahraga. Peningkatan



terhadap indikator kinerja yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian kinerja Bidang Kepemudaan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kepemudaan. Peningkatan terhadap indikator kinerja yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian kinerja Bidang Pemasaran Pariwisata yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang strategi dan pemasaran pariwisata, promosi pariwisata, riset dan analisis data pariwisata serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang pemasaran pariwisata dan Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang daya tarik dan tata kelola destinasi pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata, usaha dan industri pariwisata dan pemberdayaan masyarakat pariwisata, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata. Peningkatan terhadap indikator kinerja yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian kinerja Bidang Ekonomi Kreatif, Sarana dan Prasarana yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif, akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif, sarana dan prasarana serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ekonomi kreatif, sarana dan prasarana.

4. Pada Dinas Kesehatan, keberhasilan dari pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh sinergitas antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemahaman definisi operasional dalam perhitungan nilai ketersediaan obat. Mengoptimalkan penggunaan anggaran obat dari Dana Alokasi Khusus melakukan bimbingan teknis langsung ke sarana IFK Kab/Kota. Uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pejabat fungsional kesehatan yang dilakukan oleh tim penguji dalam rangka memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan perlu dilaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

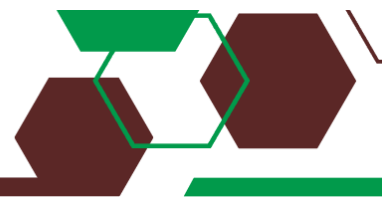


dan Provinsi sebagai penyelenggara memiliki tugas pokok dan fungsi merencanakan penyelenggaraan uji kompetensi hingga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan uji kompetensi. Alokasi anggaran untuk Uji Kompetensi jabatan fungsional kesehatan dari APBD khususnya untuk indikator ini sangat minim untuk pelaksanaan uji kompetensi 30 jenis jabatan fungsional kesehatan. Selama ini Upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) merupakan bentuk peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dibawah kesatuan Posyandu yang dalam penyelenggaraan telah masuk dalam Lembaga Ketahanan Desa (LKD). Posyandu memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Indikator pembinaan UKBM sangat ditentukan oleh lintas sektor dan masyarakat, utamanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa, Tim Penggerak PKK, dan Lintas sektor lain. Dukungan dari Dinas yang terintegrasi adalah kegiatan pelayanan sosial dasar keluarga dalam aspek pemantauan tumbuh kembang anak. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif dan integratif. Kegiatan yang dikembangkan merupakan upaya pemberian reward keaktifan UKBM/posyandu terbaik di level kabupaten/kota dan juga sebagai bentuk kemitraan dalam Pokja Posyandu. Program/kegiatan meskipun tidak secara langsung menunjang pencapaian kinerja akan tetapi akan meningkatkan motivasi Kabupaten/ kota dalam mengembangkan Posyandu. Kegiatan ini belum dapat mendongkrak indikator secara signifikan akan tetapi mendorong kabupaten/kota untuk mencapai indikator pembinaan Posyandu.

5. Pada RSUD dokter Soedarso, keberhasilan sasaran strategis didukung oleh program dan kegiatan yang menunjang terlaksananya indikator kinerja utama. Pencapaian indikator kinerja utama efektif dilaksanakan dengan adanya efisiensi anggaran. Beberapa kebijakan strategis adalah pemberian insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien covid-19 diberikan sesuai jumlah kasus covid-19 secara bulanan. Penurunan kasus Covid-19 berdampak terjadinya efisiensi anggaran. Penambahan bangunan Gedung Jantung dan Radioterapi merupakan wujud transformasi layanan rujukan untuk kasus penyakit katastropik.



6. RSJP: Program yang menunjang keberhasilan sasaran di atas pada RSJ Provinsi adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan dan sub kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan rujukan utama bagi masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan kesehatan baik untuk pengobatan maupun untuk pemulihan kesehatannya. Sebagai pusat rujukan kesehatan utama, rumah sakit dituntut mampu memberikan pelayanan yang komprehensif bagi setiap pasiennya. Pelayanan kesehatan yang komprehensif adalah berbagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh tim multi tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pasien. Kepuasan Pelanggan (Pasien) merupakan salah satu indikator penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan kesehatan. Kepuasan pasien sangat ditentukan oleh kinerja pegawai terutama tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang prima. Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting. Sumber daya manusia merupakan pilar utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam upaya mewujudkan visi dan misinya. SOM di rumah sakit menjadi hal penting yang mendukung berkembangnya rumah sakit dan menjadi tolak ukur penting dalam penilaian pengembangan mutu pelayanan di rumah sakit. Untuk itu agar tercipta mutu pelayanan yang efektif dan efisien diperlukan pemberdayaan SOM kesehatan di Rumah Sakit. Peningkatan mutu pelayanan sebuah rumah sakit tidak terlepas dari pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu pendidikan berkelanjutan dan pelatihan sebagai bagian dari pengembangan SOM perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan, sehingga seiring dengan peningkatan kualitas SOM maka meningkat pula mutu pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Tahun 2022 telah melaksanakan 5 kegiatan pelatihan (In House Training)
7. Pada DPPA program memuat kegiatan untuk meningkatkan implementasi PUG di Perangkat Daerah dengan memberikan Sosialisasi dan Advokasi kepada seluruh OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk implementasi PUG melalui PPRG yang dapat dilihat melalui ARG. Program ini juga untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan melalui peningkatan kapasitas perempuan pada sektor ekonomi, politik dan hukum, yang dapat dilihat melalui



keterwakilan perempuan pada lembaga legislative dan pengambilan keputusan. Untuk mencapai target kinerja sasaran 3 ini didukung 1 (satu) program yaitu Program, yaitu Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. Program ini memuat kegiatan untuk meningkatkan penyediaan data gender dan anak pada perangkat daerah dan penyajian data gender dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Target perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, ekonomi dan hukum diketahui dengan melihat jumlah perempuan yang mendapatkan Peningkatan Kapasita pada sektor politik, ekonomi dan hukum pada tahun 2022 adalah 30%, dari kegiatan yang dilaksanakan terkait peningkatan kapasitas pada sektor politik, ekonomi dan hokum pada tahun 2022 sudah mencapai target kinerja, dimana jumlah peserta yang mengikuti atau diberikan peningkatan melalui sosialisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi indikator ini mencapai 30%. Dari pencapaian tersebut sasaran ini sudah mencapai target yang diperjanikan pada tahun 2022 serta tidak mendapatkan hambatan pada proses pencapaian kinerjanya. Selain itu terdapat 3 progam yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, yaitu Progaram Perlindungan perempuan, Pemehunan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Program tersebut memenuhi perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan termasuk TPPO serta memperhatikan kebutuhan hak – hak anak.

D. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 - 2022 Dan Target RPJMD

Tabel 2.24

Perbandingan Realisasi Kinerja 2019-2022 dan target RPJMD Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					TARGET 2022	Tingkat Kemajuan
			2018	2019	2020	2021	2022		
3.	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	66.98	67.65	67.66	67.90	68,63	70,29	0,98

Pembangunan manusia di Kalimantan Barat terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2018 IPM Kalimantan Barat diangka 66.98. Kemudian pada Tahun 2019 IPM Kalimantan Barat diangka 67,65 maka pada tahun 2020 IPM Kalimantan Barat telah mencapai 67,66. Sementara IPM Kalimantan Barat pada tahun 2021 tercapai diangka 67,90. Pada Tahun 2022 IPM kalbar sebesar 68,62 mengalami





kenaikan namun belum mencapai target 2022 yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Bayi yang baru lahir pada tahun 2018 memiliki peluang hidup hingga 70.18 tahun dan meningkat 0.26 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun pada tahun 2018 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12.55 tahun (Diploma I), meningkat 0.05 tahun apabila dibandingkan tahun 2017. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun keatas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7.12 tahun (kelas VII), meningkat 0.07 tahun di bandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021 bayi yang lahir memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70.76 tahun. Pada Tahun 2021 penduduk berusia 7 Tahun memiliki harapan lama sekolah selama 12.65 Tahun / setingkat kelas 3 SMA. Sementara rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas meningkat 0.08 tahun menjadi 7.45 tahun pada tahun 2021. Pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan) masyarakat telah mencapai 8.97 juta rupiah pada tahun 2021. Pada Tahun 2022 bayi yang lahir memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,02 tahun, lebih lama 0,26 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, pada Tahun 2022 penduduk berusia 7 Tahun keatas memiliki harapan lama sekolah selama 12.66 Tahun / setingkat kelas 3 SMA, meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas meningkat 0.14 tahun dari 7,45 tahun menjadi 7,59 tahun pada tahun 2022. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan), meningkat 381 ribu Rupiah (4,25%) dibandingkan tahun sebelumnya.

E. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dan Realisasi Nasional

Tabel 2.25

Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dan target Nasional Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	IPM Nasional 2022
3.	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	68,63	72.91

IPM Nasional pada tahun 2021 sebesar 72,91. Nilai tersebut meningkat 0,62 poin (0,86%) apabila dibandingkan capaian tahun sebelumnya (72,29). Selama Tahun 2010-2022, IPM Indonesia rata- rata meningkat 0,77% per tahun.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada Tahun 2022 memiliki harapan hidup hingga 71,85 tahun, meningkat 0,28 tahun dibanding



tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lamasekolah penduduk umur 7 tahun meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,08 menjadi 13,10 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,15 tahun, dari 8,54 tahun menjadi 8,69 tahun pada tahun 2022. Sementara pengeluaran riil perkapita masyarakat Indonesia mencapai Rp. 11,479 Juta per tahun pada Tahun 2022. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 323 ribu Rupiah (2,90 %) dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari satu tahun pandemi covid-19 melanda Indonesia, pengeluaran riil perkapita mulai meningkat kembali setelah sempat mengalami penurunan pada Tahun 2020 dan 2021. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya untuk meningkatkan angka IPM sehingga dapat melampaui target nasional dengan terus menjalankan program pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik pada masa mendatang.

F. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Secara umum, capaian indikator untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kebudayaan dan Literasi yang menjadi alat ukur keberhasilan kinerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2022 telah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya meskipun untuk indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah dan Skor Mutu Pendidikan Sekolah Menengah masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Belum tercapainya target yang telah ditetapkan disebabkan oleh kendala dan hambatan yang dihadapi selama Tahun 2022.
2. Luasnya wilayah Kalimantan Barat mengakibatkan belum meratanya akses pelayanan pendidikan sehingga menyebabkan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah juga masih rendah. Disamping itu, dengan adanya pembatasan kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka terjadi stigma antar Pemerintah Daerah hanya merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dan mengurus pendidikan sesuai kewenangannya saja, dimana Pemerintah Provinsi hanya bertanggung jawab terhadap Pendidikan Menengah dan Khusus, sementara Pemerintah Kabupaten/ Kota bertanggung jawab terhadap



- Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal; Pemetaan pendidikan di Kabupaten/Kota terhadap data pendidikan di Provinsi masih belum sinkron terhadap capaian pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat; Belum optimalnya pembinaan manajemen sekolah, sehingga informasi data dari sekolah validitasnya tidak dijamin keakuratannya; Koordinasi, Komunikasi, Sosialisasi, Penyampaian Informasi belum/tidak berjalan baik;
3. Penempatan SDM spesikasi kualifikasi akademik dengan bidang tugas tidak sesuai keahlian; Masih terdapat kesenjangan ekonomi, khususnya untuk daerah tertinggal dan terpencil serta terjadi kecemburuan sosial, peradaban status, persaingan di lingkungan guru dan sekolah; Masih rendahnya minat guru meningkatkan kompetensi/ pengembangan diri/penguasaan IT;
 4. Belum terintegrasinya sistem aplikasi pendataan antar kementerian sehingga pelaksanaan ditingkat daerah belum bisa optimal;
 5. Keberhasilan capaian target yang diperoleh pada dasarnya disebabkan telah dibuka kembali layanan perpustakaan yang pada tahun sebelumnya ditutup sebagai langkah dalamantisipasi penyebaran virus covid-19. Namun pada Tahun 2022 dimana mulai dari layanan umum, layanan keliling, layanan koleksi deposit hingga pada layanan anak telah dibuka jam layanan secara normal dan penambahan jam layanan pada hari sabtu. Selain itu juga, tersedianya layanan perpustakaan online yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, pada tahun 2022 terdapat beberapa kali refocusing anggaran yang mengakibatkan beberapa kegiatan ditangguhkan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadi catatan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat agar dapat melakukan inovasi baru guna meningkatkan pelayanan perpustakaan dan pengembangan kegemaran membaca masyarakat; Selain itu terdapat beberapa kegiatan yang direasonalisasi kembali anggarannya karena penanggulangan wabah bencana covid-19 serta keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat, hal tersebut juga berpengaruh terhadap jumlah akhir target yang hendak dicapai.
 6. Penyebab keberhasilan terhadap meningkatnya pelayanan kesehatan yaitu dengan adanya komitmen terhadap proses pelayanan yang berkualitas dan terakreditasi dengan penandatanganan komitmen bersama dan melakukan survei internal terhadap proses pelayanan dengan menggunakan instrumen penilaian akreditasi dan berusaha dalam memberikan pelayanan yang terbaik



kepada pelanggan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap triwulan dalam mengukur keberhasilan proses pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan.

7. Dalam upaya memberikan advokasi kepada perangkat daerah untuk melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) belum semua perangkat memahami anggaran yang tersedia merupakan PPRG.
8. Persentase keluarga yang menjadi kewenangan provinsi sangat luas sehingga belum optimalnya pelayanan pembangunan keluarga.
9. Perempuan diorganisasi kemasyarakatan mengalami peningkatan, namun kualitas perempuan untuk mengikuti daya saing masih belum optimal.
10. Permasalahan dalam hal pemberdayaan perempuan bukan hanya tugas Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak melainkan sinergisitas antar OPD, namun perangkat daerah mempunyai tujuan dan sasaran strategis masing-masing yang ingin dicapai.
11. Permasalahan kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak biasanya terjadi di lingkungan keluarga, sehingga masih adanya budaya tabu untuk mengungkapkan ke pihak lain/luar.
12. Belum optimalnya lembaga penyedia layanan sebagai pemerhati perempuan dan anak.
13. Anggaran yang tersedia belum dapat mengakomodir semua upaya meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Forum OPD dan menjadikan program pendidikan di daerah 3T sebagai salah satu prioritas dan mendorong kabupaten/ kota untuk menetapkan daerah khusus.
2. Mengoptimalkan peran dan partisipasi MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) Kabupaten/ Kota untuk mengefektifkan dan memudahkan untuk berkoordinasi dengan sekolah-sekolah.
3. Data pokok pendidikan yang akurat dan valid serta terintegrasi.
4. Sinkronisasi Perencanaan program dan kegiatan prioritas agar tepat sasaran antara Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam kaitannya peningkatan Pendidikan.



5. Melakukan pemetaan program kegiatan yang tepat sasaran sesuai dengan pemutakhiran data.
6. Payung hukum yang jelas (UU, PP, Permen, Perda, dan turunannya).
7. Keterlibatan dan komitmen pemangku kebijakan penyelesaian masalah pendidikan dapat terlaksana dengan baik (DPRD, BAPPEDA, Kemenag, Kemkes, PU, PLN, BKAD, Penegak Hukum, Dewan Pendidikan, PGRI, Masyarakat, DUDI, dll).
8. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar bersama dengan DPRD Komisi D Provinsi Kalimantan Barat akan berupaya mengusulkan ke MENPAN-RI dalam hal mengatasi kekurangan guru tersebut dengan mengadakan program sistem guru kontrak.
9. Adanya workshop dan pelatihan untuk sinkronisasi data pendidikan baik dengan unsur dinas kabupaten/kota maupun dengan pimpinan satuan pendidikan di tingkat sekolah agar lebih efektif.
10. Lebih mengoptimalkan peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana seperti perbaikan dan penambahan USB, RKB, dll, dalam meningkatkan Angka Parsipasi Sekolah.
11. Adanya dukungan dana dari pemerintah (BOS) yang memungkinkan sekolah-sekolah lebih mampu melaksanakan program-program yang direncanakan. Namun, untuk sekolah-sekolah (SD) kecil dengan siswa kurang dari 100 siswa, perlu tambahan dukungan dana dari daerah (BOSDA) yang diberikan ke sekolah tanpa mempertimbangkan jumlah siswa.
12. Guna meningkatkan mutu pendidikan dan sarana prasarana pendidikan di Kalimantan Barat, diharapkan agar pemerintah Kabupaten/Kota juga menganggarkan dana sharing pada APBD Kabupaten/Kota masing-masing mengingat kemampuan APBD Provinsi tidak mampu mengakomodir seluruh kebutuhan anggaran semua Kabupaten/Kota.



2.3.1.4 Sasaran Strategis 4

**Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui
Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran**

A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 2.26

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran Strategis 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pertumbuhan Ekonomi	4.71-5.46	5.01	106.36
		Indeks Gini	0.323-0.321	0,314	100,37
		Desa Mandiri (Jumlah)	319	586	161,08
		Tingkat Pengangguran Terbuka	5.53-4.29	5,11	107.59
		Angka Kemiskinan	7.31-7.23	6,73	107.29
Capaian Kinerja Sasaran 4					116.53

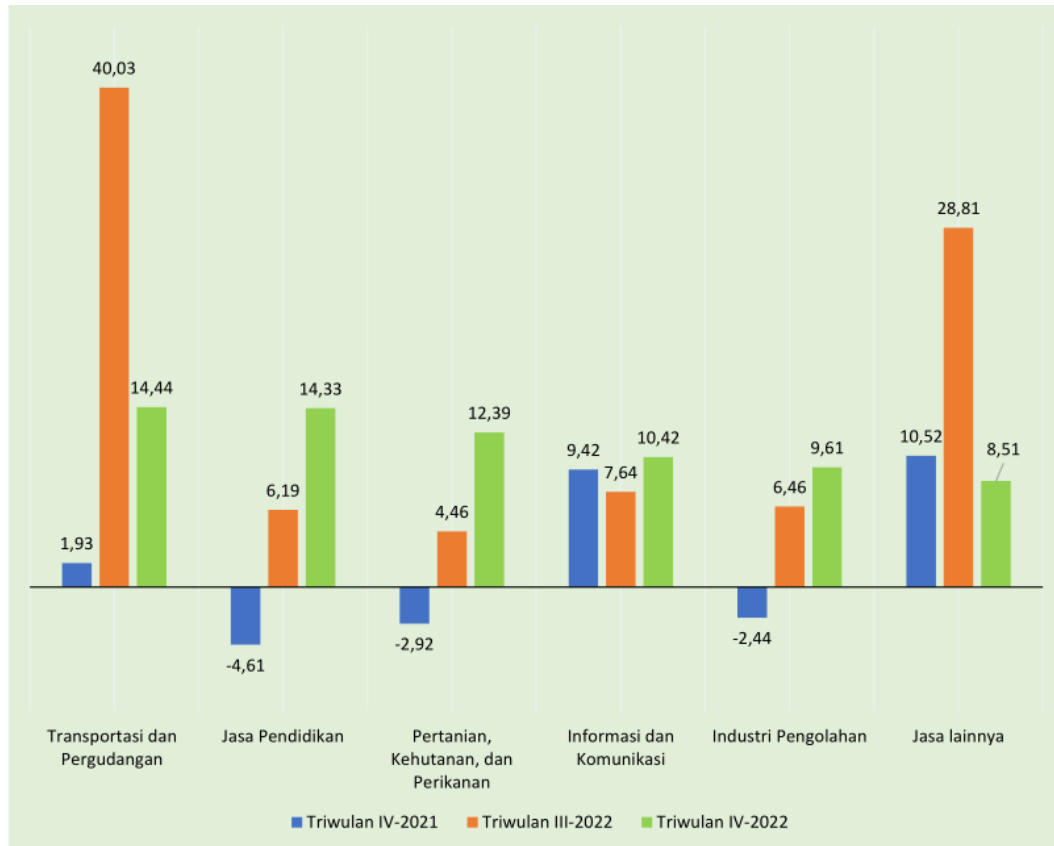
1. Pertumbuhan Ekonomi

a. PDRB Menurut Lapangan Usaha

1) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2021 Terhadap Triwulan IV-2020 (y-on-y)

Ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV-2022 dibanding triwulan IV-2021 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan diatas 10 persen adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 14.44 persen; Jasa Pendidikan sebesar 14,33 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,39 persen; dan Informatika dan Komunikasi sebesar 10,42 persen. Sedangkan Lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah Pertambangan dan Penggalian terkontraksi sedalam 28,93 persen.





Sumber: BPS Kalbar, 2022

Gambar 2.9
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (Y-On-Y) (Persen)

2) Pertumbuhan Ekonomi Kumulatif Triwulan IV-2022 Terhadap Kumulatif Triwulan IV-2021 (c-to-c)

Ekonomi Kalimantan Barat kumulatif sampai triwulan IV-2022 dibanding kumulatif triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,07 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha kecuali Administrasi Pemerintah berkontraksi sedalam 1,77 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 24,10 persen; Jasa Lainnya sebesar 13,61 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,48 persen; Jasa Perusahaan sebesar 12,29 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,57 persen. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan sebesar 2,18 persen.

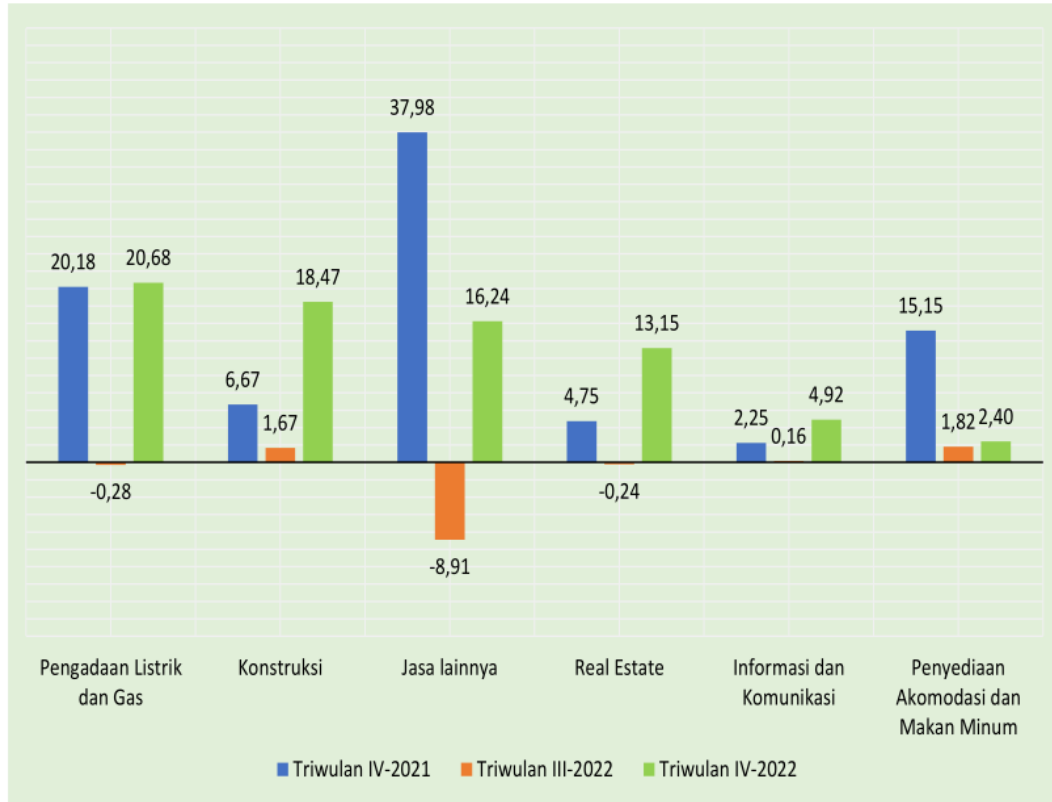


Sumber: BPS Kalbar, 2022

Gambar 2.10
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)

3) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2022 Terhadap Triwulan III-2022 (q-to-q)

Ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV-2022 dibanding triwulan III-2022 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 1,81 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagai besar lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dialami oleh Lapangan Usaha Pegadanan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 20,68 persen. Diikuti Lapangan Usaha Konstruksi yang tumbuh sebesar 18,47 persen, Jasa lainnya tumbuh sebesar 16,24 persen; Real Estate tumbuh sebesar 13,15 persen, Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 4,92 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 2,40 persen.



Sumber: BPS Kalbar, 2022

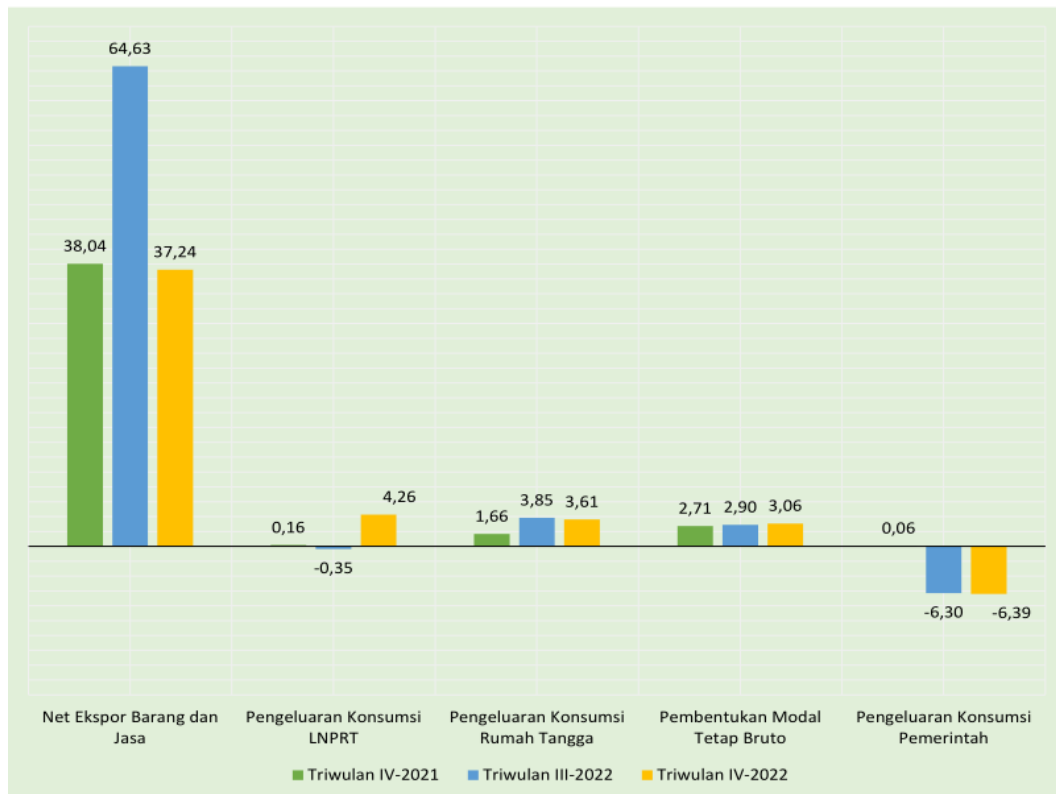
Gambar 2.11

Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)

b. PDRB Menurut Pengeluaran

1) Pertumbuhan Ekonomi Kumulatif Triwulan IV-2022 Terhadap Kumulatif Triwulan IV-2021 (c-to-c)

Ekonomi Kalimantan Barat kumulatif triwulan IV-2022 dibanding kumulatif triwulan IV-2021 tumbuh sebesar 5,07 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Net Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 37,24 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) tumbuh sebesar 4,26 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang masing-masing tumbuh sebesar 3,61 persen dan 3,06 persen. Sedangkan komponen yang mengalami kontraksi yaitu, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 6,39 persen.



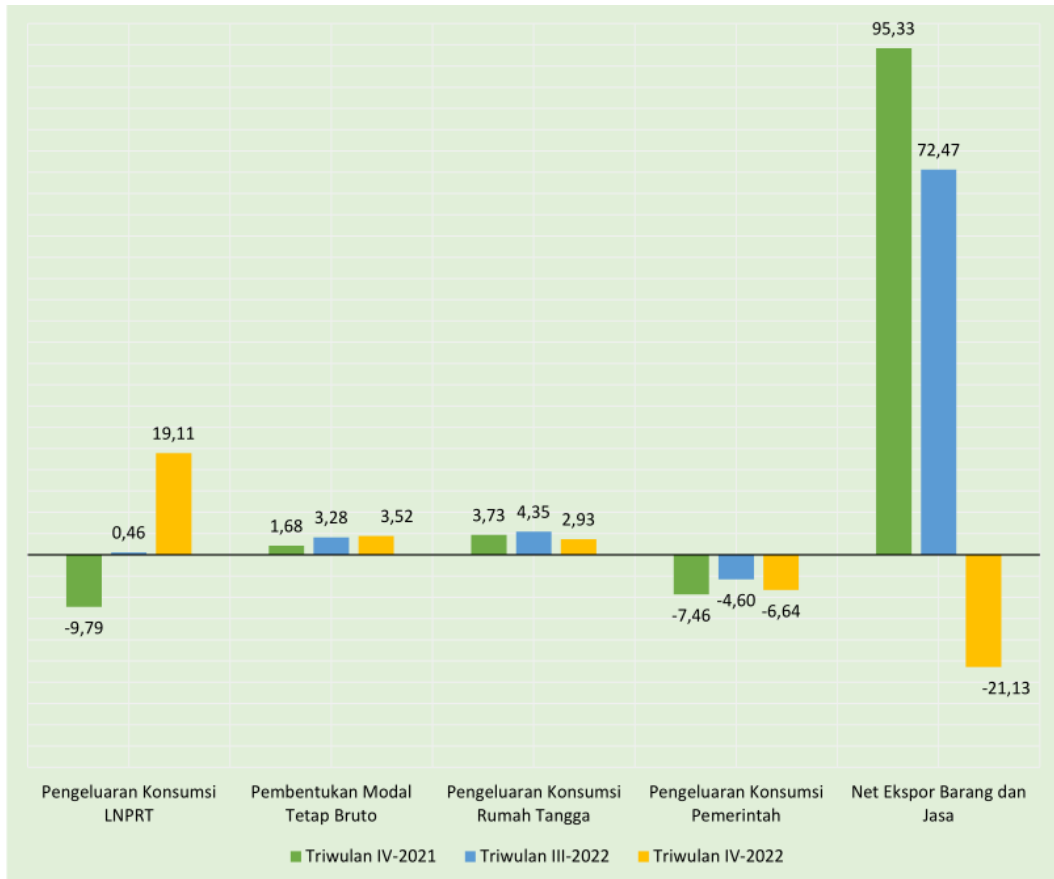
Sumber: BPS Kalbar, 2022

Gambar 2.12

Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen)

2) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2022 Terhadap Triwulan IV-2021 (y-on-y)

Ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV-2022 dibanding triwulan IV-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,01 persen. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh Komponen PK-LNPRT tumbuh sebesar 19,11 persen; diikuti oleh Komponen PMTB tumbuh sebesar 3,52 persen; dan Komponen PK-RT tumbuh sebesar 2,93 persen. Sedangkan komponen yang mengalami kontraksi cukup dalam yaitu Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 21,13 persen dan Komponen PK-P yang terkontraksi sedalam 6,64 persen.



Sumber: BPS Kalbar, 2022

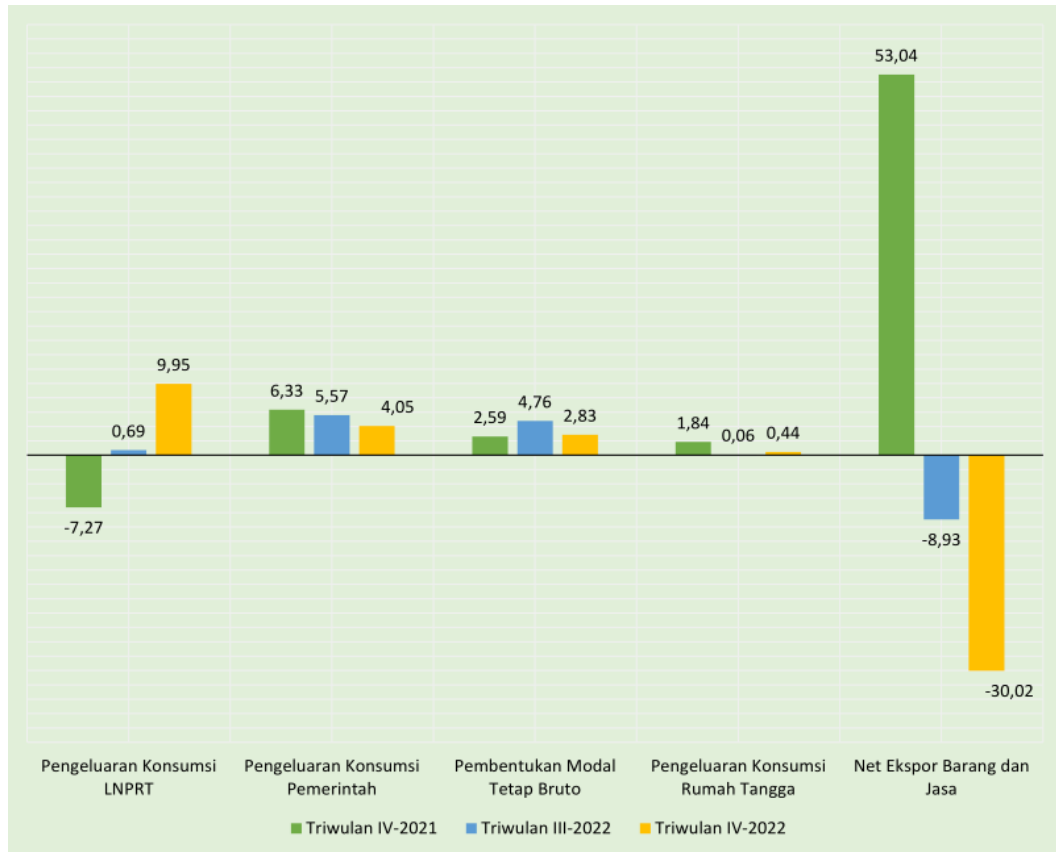
Gambar 2.13

Pertumbuhan Ekonomi Komponen Pengeluaran (y-to-y) (persen)

3) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2021 Terhadap Triwulan III-2021 (q-on-q)

Ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 1,81 persen (q-to-q). Komponen yang berhasil tumbuh paling besar yaitu Komponen PK-LNPR tumbuh sebesar 9,95 persen; Komponen PK-P sebesar 4,05 persen; Komponen PMTB tumbuh sebesar 2,83 persen; dan Komponen PK-RT sebesar 0,44 persen. Sedangkan Komponen Net Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 30,02 persen.





Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Kalbar

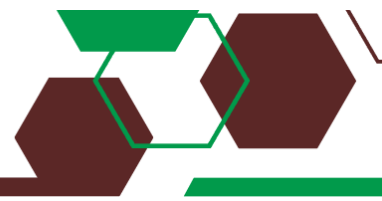
Gambar 2.14
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) (persen)



Tabel 2.27
Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Belaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2021, Triwulan IV-2022 dan Tahun 2022 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Belaku			Harga Konstan 2010		
	2021	Triw IV-2022	2022	2021	Triw IV-2022	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	49.220,07	13.830,99	53.976,00	33.811,57	8.717,59	34.547,57
B. Pertambangan dan Penggalian	16.066,18	4.026,63	16.777,17	8.136,12	1.985,40	8.333,88
C. Industri Pengolahan	38.038,46	10.934,45	42.105,44	22.727,91	6.139,95	23.645,17
D. Pengadaan Listrik dan Gas	276,96	89,29	298,58	159,61	48,28	166,53
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	284,38	78,18	305,58	219,54	59,73	234,13
F. Konstruksi	29.715,67	9.315,44	32.041,19	14.949,06	4.300,29	15.072,03
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	29.599,86	8.822,96	35.051,42	19.258,83	5.372,98	21.661,51
H. Transportasi dan Pergudangan	7.937,05	2.791,43	10.906,50	4.437,20	1.344,73	5.506,38
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.738,51	1.391,43	5.337,23	2.846,28	814,00	3.147,05
J. Informasi dan Komunikasi	9.510,14	2.685,29	10.255,14	8.217,37	2.317,34	8.849,92
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	7.935,95	2.198,00	8.543,43	5.227,31	1.334,78	5.276,37
L. Real Estat	6.293,88	1.775,97	6.436,32	3.955,63	1.091,21	3.976,69
M,N. Jasa Perusahaan	884,66	266,80	1.032,92	604,71	172,32	679,01
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15.848,03	4.176,85	16.257,39	6.807,18	1.684,20	6.686,93
P. Jasa Pendidikan	7.848,32	2.137,17	8.539,60	5.100,45	1.337,98	5.408,76
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.471,34	1.458,10	5.999,47	3.437,24	889,84	3.681,94
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1.651,70	522,69	1.933,89	1.316,02	400,68	1.495,07
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	231.321,16	66.501,69	255.797,28	141.212,04	38.011,30	148.368,94

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Kalbar



Tabel 2.28

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat
Triwulan IV-2022 Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triw III- 2022 Terhadap Triw II- 2022 (q-to-q)	Triw IV- 2022 Terhadap Triw III- 2022 (q-to-q)	Triw III- 2022 Terhadap Triw III- 2021 (y-on-y)	Triw IV- 2022 Terhadap Triw IV- 2021 (y-on-y)	Kum Triw IV-2022 Terhadap Kum Triw IV-2021 (c-to-c)	Sumber Pertumbuhan Triw IV-2022 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,01	0,63	4,46	12,39	2,18	1,18
B. Pertambangan dan Penggalian	-1,96	2,32	4,64	-28,93	2,43	0,28
C. Industri Pengolahan	4,82	0,82	6,46	9,61	4,04	0,81
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-0,28	20,68	3,76	4,19	4,34	0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1,63	1,96	5,67	7,84	6,65	0,01
F. Konstruksi	1,67	18,47	-7,33	2,92	0,82	0,51
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-7,04	-1,00	14,18	5,42	12,48	0,74
H. Transportasi dan Pergudangan	-2,43	-7,82	40,03	14,44	24,10	0,19
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,82	2,40	16,57	3,66	10,57	0,11
J. Informasi dan Komunikasi	0,16	4,92	7,64	10,42	7,70	0,30
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,02	0,09	3,35	2,34	0,94	0,18
L. Real Estat	-0,24	13,15	-2,89	4,89	0,53	0,14
M,N. Jasa Perusahaan	0,48	0,64	15,73	0,63	12,29	0,02
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,18	-4,44	5,09	-0,14	-1,77	0,23
P. Jasa Pendidikan	11,60	-9,56	6,19	14,33	6,04	0,18
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,64	-8,04	11,46	2,24	7,12	0,13
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-8,91	16,24	28,81	8,51	13,61	0,05
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1,14	1,81	6,53	5,01	5,07	5,07

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Kalbar



Tabel 2.29

Struktur PDRB Provinsi Kalimantan Barat Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	2021			2022		
	Triw III	Triw IV	Tahunan	Triw III	Triw IV	Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	21,12	19,06	21,28	20,76	20,80	21,10
B. Pertambangan dan Penggalian	6,30	8,98	6,95	6,05	6,05	6,56
C. Industri Pengolahan	16,72	15,81	16,44	16,71	16,44	16,46
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,13	0,12	0,11	0,13	0,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
F. Konstruksi	13,52	14,09	12,85	12,12	14,01	12,53
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,71	12,94	12,80	13,82	13,27	13,70
H. Transportasi dan Pergudangan	3,19	3,51	3,43	4,55	4,20	4,26
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,98	2,15	2,05	2,10	2,09	2,09
J. Informasi dan Komunikasi	4,14	4,01	4,11	3,96	4,04	4,01
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,42	3,34	3,43	3,39	3,31	3,34
L. Real Estat	2,76	2,75	2,72	2,43	2,67	2,52
M,N. Jasa Perusahaan	0,38	0,41	0,38	0,41	0,40	0,40
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,83	6,58	6,85	6,68	6,28	6,36
P. Jasa Pendidikan	3,71	3,01	3,39	3,66	3,21	3,34
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,42	2,32	2,37	2,45	2,19	2,35
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,58	0,77	0,71	0,70	0,79	0,76
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Kalbar

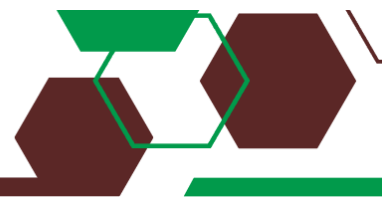


Tabel 2.30

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Barat Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2021, Triwulan IV-2022 dan Tahun 2022 (miliar rupiah)

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2021	Triw IV-2022	2022	2021	Triw IV-2022	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	114.514,53	31.577,04	124.483,56	72.674,31	18.948,97	75.301,46
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.803,63	846,65	3.070,25	1.638,76	462,63	1.708,62
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	27.469,46	7.286,86	26.301,27	15.439,98	3.912,51	14.452,76
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	69.934,89	20.663,29	75.686,68	41.890,79	11.350,95	43.172,70
5. Perubahan Inventori	(9.499,80)	(1.146,67)	(11.051,73)	(9.943,63)	(1.579,00)	(13.044,38)
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	26.098,44	7.274,52	37.307,24	19.511,84	4.915,23	26.777,78
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	231.321,16	66.501,69	255.797,28	141.212,04	38.011,30	148.368,94

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Kalbar



Tabel 2.31

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat
Triwulan IV-2022 Menurut Pengeluaran (persen)

Komponen	Triw III- 2022	Triw IV- 2022	Triw III- 2022	Triw IV- 2022	Kum Triw IV-2022	Sumber Pertumbuhan Triw IV-2022 (y-on-y)
	Terhadap Triw II- 2022 (q-to-q)	Terhadap Triw III- 2022 (q-to-q)	Terhadap Triw III- 2021 (y-on-y)	Terhadap Triw IV- 2021 (y-on-y)	Terhadap Kum Triw IV- 2021 (c-to-c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,06	0,44	4,35	2,93	3,61	1,49
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,69	9,95	0,46	19,11	4,26	0,21
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,57	4,05	(4,60)	(6,64)	(6,39)	(0,77)
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,76	2,83	3,28	3,52	3,06	1,07
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	(8,93)	(30,02)	72,47	(21,13)	37,24	(3,64)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1,14	1,81	6,53	5,01	5,07	5,01

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Kalbar

Tabel 2.32

Struktur PDRB Provinsi Kalimantan Barat Menurut Pengeluaran (persen)

Komponen	2021			2022		
	Triw III	Triw IV	Tahunan	Triw III	Triw IV	Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	48,74	48,64	49,50	48,60	47,48	48,66
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,25	1,08	1,21	1,17	1,27	1,20
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,73	12,91	11,88	10,69	10,96	10,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,26	30,35	30,23	30,74	31,07	29,59
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	9,28	15,76	11,28	14,59	10,94	14,58
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

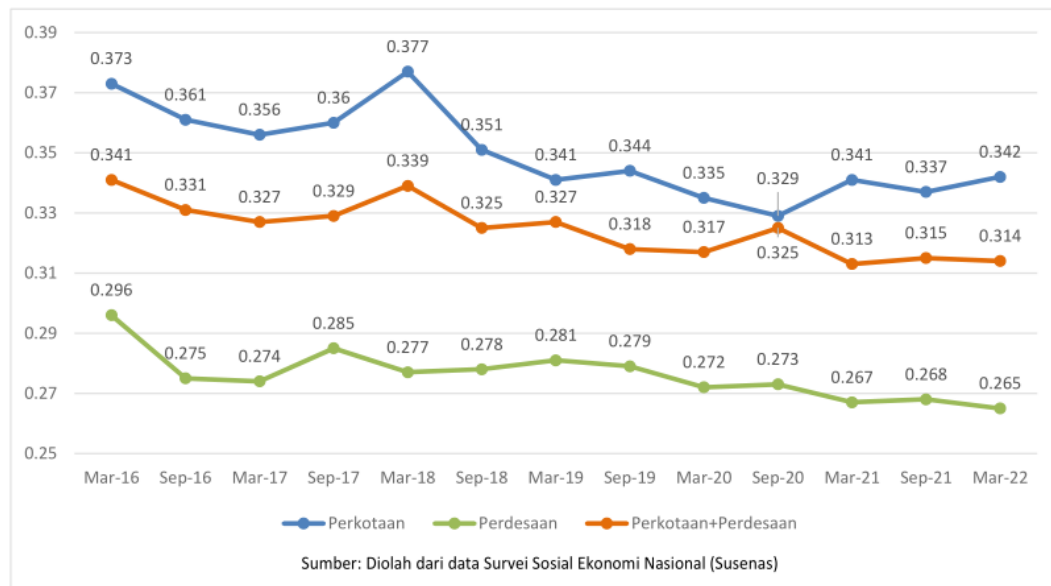
Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Kalbar



2. Indeks Gini

a. Perkembangan Gini Ratio Tahun Maret 2016- Maret 2022

Salah satu metode untuk mengukur pemerataan pendapatan adalah Gini Ratio. Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi/mendekati angka satu, menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Perkembangan angka Gini Ratio Provinsi Kalimantan Barat dalam periode Maret 2016 berfluktuasi hingga maret 2022 yang menunjukkan pada angka 0,314. Pada Maret 2022 Gini Ratio mengalami penurunan jika dibandingkan dengan September 2021 (0,315) dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Maret 2021 (0,313).



Gambar 2.15
Perkembangan Gini Ratio, Maret 2016-Maret 2022

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibanding dengan daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan diperkotaan selalu diatas perdesaan. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan di perkotaan selalu diatas perdesaan. Pada Maret 2022 Gini Ratio perkotaan adalah 0,342 naik 0,005 poin dibanding Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,337 dan naik 0,001 poin dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,341

Pada wilayah perdesaan nilai Gini Ratio pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,265 turun 0,003 poin dibanding Gini Ratio September 2021 yang sebesar



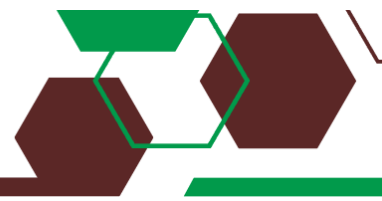
0,268 dan turun 0,002 poin dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,267.

b. Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2021 – Maret 2022

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada Maret 2022, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 21,48 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan Maret 2022 ini meningkat dibanding dengan September 2021 yang sebesar 21,12 persen, dan naik jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 21,27 persen.

Jika dibedakan menurut daerah, pada Maret 2022 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 20,15 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Angka ini tercatat lebih rendah dibanding kondisi September 2021 yang sebesar 20,35 persen dan lebih tinggi dibanding kondisi Maret 2021 yang sebesar 19,57 persen. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 23,40 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Angka ini tercatat lebih tinggi dibanding kondisi September 2021 yang sebesar 23,01 persen dan Maret 2021 yang sebesar 23,18 persen.



Tabel 2.33

Distribusi Pengeluaran Penduduk di Kalimantan Barat Maret 2021, September 2021 dan Maret 2022 (persentase)

Daerah/Tahun (1)	Penduduk 40 Persen Terbawah (2)	Penduduk 40 Persen Menengah (3)	Penduduk 40 Persen Atas (4)	Gini Ratio (5)
Perkotaan				
Maret 2021	19.57	37.90	42.52	100
September 2021	20.35	37.23	42.42	100
Maret 2022	20.15	36.52	43.32	100
Perdesaan				
Maret 2021	23.18	40.89	35.93	100
September 2021	23.01	40.76	36.23	100
Maret 2022	23.40	40.41	36.19	100
Perkotaan + Perdesaan				
Maret 2021	21.27	38.45	40.28	100
September 2021	21.12	38.54	40.33	100
Maret 2022	21.48	38.01	40.51	100

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

3. Desa Mandiri

Salah satu sasaran RPJMN terkait pembangunan kewilayahan Tahun 2020-2024 akan di capai melalui 5 prioritas, antara lain; pengembangan kawasan strategis, pengembangan sektor unggulan, pengembangan kawasan perkotaan; pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi serta pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah.

Salah satu indikator pembangunan pada prioritas pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi yaitu perkembangan status pembangunan desa.

Tabel 2.34
Status Pembangunan Desa

Status Pembangunan Desa	Baseline 2019	Target 2024
Desa mandiri	1.444	10.559
Desa Berkembang	54.291	59.879
Desa Tertinggal	19.152	3.232

Sumber: RPJMN 2020-2024

Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu di lindungi dan di berdayakan agar menjadi kuat, maju dan mandiri dan demokratis sehingga menjadi landasan yang kokoh untuk mewujudkan pemerintahan yang baik menuju masyarakat yang sejahtera. Pemerintah Provinsi dapat melakukan penataan desa, hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang bertujuan untuk:

- mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;



- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa
- e. meningkatkan daya saing Desa

Guna mewujudkan pembangunan dan menjawab keinginan masyarakat desa dalam meningkatkan status kemandirian desa, pada tahun 2019 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengubah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal menjadi desa berkembang, serta dari desa berkembang dan desa maju menjadi desa mandiri. Untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui perangkat daerah terkait telah menetapkan Rencana Aksi Daerah tentang sasaran percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa seluruh desa di Wilayah Kalimantan Barat untuk digunakan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan pembangunan dan percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa.

Rencana Aksi Daerah Percepatan Kemajuan dan Kemandirian Desa dibutuhkan sebagai pendorong kepada seluruh lembaga pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian desa. Desa mandiri merupakan wujud keberhasilan pembangunan desa di suatu wilayah dan untuk mewujudkan tujuan ini diperlukan komitmen dan kepedulian dari pemerintah serta seluruh komponen dalam melaksanakan berbagai program sesuai bidang tugasnya masing masing.

Mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya, selama tahun 2020 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mendukung dan menciptakan Desa Mandiri di Wilayah Kalimantan Barat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan Instansi Vertikal. Program dan kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2021 antara lain:

- a. Program Peningkatan Indeks Ketahanan Sosial, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan desa dalam penyediaan pelayanan dasar yang meliputi kesehatan, pendidikan, Infrastruktur, Keamanan, pemberdayaan, olah raga, gotong royong, budaya, Air bersih dan sanitasi. Adapun strategi



pencapaian peningkatan Indeks Ketahanan Sosial yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Penguatan sarana pelayanan dasar dengan pembangunan sarana dan prasana, rehabilitasi, penyediaan tenaga kesehatan, Penyediaan pusat pelatihan, Sarana olah raga, kebudayaan, keamanan dan pemberian edukasi dan penyuluhan.
 - 2) Penguatan potensi seluruh lembaga terkait pelayanan dasar dari unsur pemerintah, swasta, Lembaga pendidikan, LSM, dan Lembaga kemasyarakatan.
- b. Program Peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan desa dalam kemandirian ekonomi masyarakat. Penyediaan Sarana dan kemampuan ekonomi desa yang terdiri dari Fasilitas Perbankan, pelayanan kredit, angkutan/Transportasi, infratraktur jalan, ketersediaan sarana perdagangan, jasa pengiriman, UKM. Adapun strategi pencapaian peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi yang dapat dilakukan antara lain:
- 1) Penguatan ekonomi dengan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, Fasilitas Perbankan dan perkreditan, Pembinaan UKM, fasilitas perdagangan rehabilitasi, penyediaan tenaga kesehatan, Penyediaan pusat pelatihan, pemberian edukasi dan penyuluhan.
 - 2) Penguatan potensi seluruh lembaga terkait pelayanan dasar dari unsur pemerintah, swasta, Lembaga pendidikan, LSM, dan Lembaga kemasyarakatan.
- c. Program Peningkatan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi, dimaksudkan untuk meningkatkan Kualitas lingkungan, dan pencegahan bencana. Adapun strategi pencapaian peningkatan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi yang dapat dilakukan antara lain:
- 1) Penguatan Kualitas Lingkungan dengan pembangunan dan pengadaan sarana Mitigasi penanggulangan bencana, dan peningkatan kualitas lingkungan.
 - 2) Penguatan potensi seluruh lembaga terkait Ketahanan lingkungan dari unsure pemerintah, swasta, Lembaga pendidikan, LSM, dan Lembaga kemasyarakatan.



Sebagai informasi status desa tahun 2022 berdasarkan kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

Tabel 2.35
Status Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

NO	KABUPATEN	JUMLAH		STATUS DESA 2018					STATUS DESA 2019				
		KEC	DESA	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	SAMBAS	19	193	18	99	71	5	-	3	45	108	29	8
2	MEMPAWAH	9	60	2	21	30	7	-	-	2	7	35	16
3	SANGGAU	15	163	24	96	37	6	-	-	73	66	19	5
4	KETAPANG	20	253	88	103	54	8	-	36	96	91	18	12
5	SINTANG	14	390	212	148	29	1	-	86	180	104	14	6
6	KAPUAS HULU	23	278	124	125	25	4	-	3	75	169	23	8
7	BENGKAYANG	17	122	26	74	20	2	-	2	48	63	6	3
8	LANDAK	13	156	65	72	17	2	-	26	99	20	8	3
9	SEKADAU	7	87	8	50	25	4	-	4	43	30	6	4
10	MELAWI	11	169	93	63	13	-	-	47	83	32	3	4
11	KAYONG UTARA	6	43	1	17	20	4	1	-	7	26	6	4
12	KUBU RAYA	9	117	16	60	31	10	-	1	30	51	21	14
TOTAL		163	2,031	677	928	372	53	1	208	781	767	188	87

NO	KABUPATEN	JUMLAH		STATUS DESA 2020					STATUS DESA 2021					STATUS DESA 2022				
		KEC	DESA	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	SAMBAS	19	193	-	1	81	73	38	-	-	46	82	65	-	-	10	64	119
2	MEMPAWAH	9	60	-	2	6	23	29	-	2	3	19	36	-	2	3	13	42
3	SANGGAU	15	163	-	49	81	25	8	-	22	58	41	42	-	-	41	65	57
4	KETAPANG	20	253	4	67	119	33	30	-	26	142	43	42	-	11	113	66	63
5	SINTANG	14	390	1	143	161	56	29	-	72	206	68	44	-	10	233	82	65
6	KAPUAS HULU	23	278	-	43	184	32	19	-	27	154	57	40	-	9	140	76	53
7	BENGKAYANG	17	122	-	31	64	21	6	-	25	65	20	12	-	13	46	39	24
8	LANDAK	13	156	7	99	39	6	5	-	54	63	26	13	-	24	71	31	30
9	SEKADAU	7	87	-	21	43	11	12	-	4	46	21	16	-	-	20	39	28
10	MELAWI	11	169	-	99	48	14	8	-	43	78	25	23	-	20	91	23	35
11	KAYONG UTARA	6	43	-	-	30	8	5	-	-	18	15	10	-	-	11	14	18
12	KUBU RAYA	9	117	-	11	51	30	25	-	5	31	39	42	-	5	23	37	52
TOTAL		163	2,031	12	566	907	332	214	-	280	910	456	385	-	94	802	549	586

RATA-RATA NILAI IDM																			
2018				2019				2020				2021				2022			
IKS 2018	IKE 2018	IKL 2018	IDM 2018	IKS 2019	IKE 2019	IKL 2019	IDM 2019	IKS 2020	IKE 2020	IKL 2020	IDM 2020	IKS 2021	IKE 2021	IKL 2021	IDM 2021	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	IDM 2022
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
0.6626	0.472	0.5993	0.578	0.7491	0.5388	0.6484	0.6454	0.7895	0.5955	0.7896	0.7249	0.8186	0.6615	0.8152	0.7651	0.8453	0.732	0.9022	0.8265
0.6807	0.5375	0.6133	0.6105	0.8784	0.7172	0.6889	0.7615	0.8792	0.7389	0.76	0.7927	0.8811	0.7442	0.7956	0.807	0.8975	0.7717	0.8344	0.8345
0.6319	0.4674	0.5673	0.5555	0.7315	0.4959	0.627	0.6181	0.7602	0.5156	0.6565	0.6441	0.7767	0.5672	0.8123	0.7187	0.8118	0.6239	0.8708	0.7688
0.6116	0.4411	0.5691	0.5406	0.7044	0.4982	0.5731	0.5919	0.7537	0.543	0.6709	0.6558	0.7729	0.5709	0.7281	0.6906	0.8023	0.6161	0.7729	0.7304
0.548	0.3647	0.5365	0.4831	0.6563	0.4094	0.6038	0.5565	0.7154	0.4883	0.7075	0.6371	0.741	0.5134	0.7535	0.6693	0.7713	0.5463	0.7906	0.7027
0.5779	0.3838	0.5566	0.5061	0.7382	0.5282	0.6113	0.6259	0.7564	0.5655	0.6571	0.6597	0.7727	0.5872	0.7079	0.6893	0.7945	0.6128	0.7492	0.7188
0.6051	0.4357	0.5714	0.5374	0.7169	0.4801	0.6159	0.6043	0.761	0.5352	0.6585	0.6516	0.777	0.5546	0.688	0.6732	0.8028	0.6217	0.7219	0.7155
0.5753	0.4054	0.5563	0.5123	0.6721	0.434	0.538	0.548	0.6978	0.4654	0.5774	0.5802	0.7373	0.5347	0.6509	0.641	0.7659	0.587	0.7265	0.6931
0.6551	0.4515	0.5924	0.5663	0.7318	0.4866	0.577	0.5985	0.7905	0.5669	0.6375	0.665	0.8237	0.5933	0.7111	0.7094	0.8535	0.6615	0.8276	0.7809
0.5512	0.3575	0.5629	0.4905	0.6642	0.3975	0.5649	0.5422	0.7271	0.4602	0.6422	0.6098	0.7715	0.5114	0.7093	0.6641	0.7917	0.5599	0.742	0.6979
0.6745	0.5302	0.6248	0.6099	0.7851	0.5826	0.6527	0.6735	0.8092	0.626	0.6837	0.7063	0.8205	0.6461	0.7442	0.7369	0.8411	0.6946	0.7861	0.7739
0.6554	0.4873	0.5795	0.5741	0.7598	0.5543	0.7111	0.6751	0.7944	0.6071	0.7487	0.7168	0.822	0.6531	0.8017	0.759	0.8473	0.6808	0.8097	0.7793
0.6008	0.4215	0.5666	0.5296	0.7124	0.4855	0.6081	0.602	0.7534	0.5373	0.6818	0.6575	0.778	0.5741	0.7412	0.6978	0.8049	0.6192	0.7906	0.7382

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022





Tabel 2.36

Status Desa Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Kab/Kota	Jumlah Desa	Status Desa				
			Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
1	Kabupaten Sambas	195	0	0	10	64	119
2	Kabupaten Mempawah	60	0	2	3	13	42
3	Kabupaten Sanggau	163	0	0	41	65	57
4	Kabupaten Ketapang	253	0	11	113	66	63
5	Kabupaten Sintang	390	0	10	233	82	65
6	Kabupaten Kapuas Hulu	278	0	9	140	76	53
7	Kabupaten Bengkayang	122	0	13	46	39	24
8	Kabupaten Landak	156	0	24	71	31	30
9	Kabupaten Sekadau	94	0	0	20	39	28
10	kabupaten Melawi	169	0	20	91	23	35
11	Kabupaten Kayong Utara	43	0	0	11	14	18
12	Kabupaten Kuburaya	123	0	5	23	37	52
Jumlah		2046	-	94	802	549	586

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022

Hasil yang dicapai pada tahun 2022 merupakan keberhasilan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya meningkatkan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan tersebut Faktor pendukungnya antara lain:

- a. Adanya tim Satgas percepatan kemajuan dan kemandirian desa
- b. Adanya sinergi percepatan kemajuan dan kemandirian desa baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten
- c. Ketersediaan data indikator Indeks Ketahanan Sosial, untuk melakukan peta intervensi pada desa sasaran
- d. Potensi SDA yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendukung ekonomi desa
- e. Adanya sinergi percepatan kemajuan dan kemandirian desa baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten
- f. Ketersediaan data indikator Indeks Ketahanan Ekonomi, untuk melakukan peta intervensi pada desa sasaran

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

a. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Pengangguran

Berdasarkan Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021. Jumlah angkatan kerja di Kalimantan Barat mencapai 3,85 juta orang. Jika dibandingkan dengan Agustus 2020, angkatan kerja tersebut naik sebanyak 59,19 ribu orang.



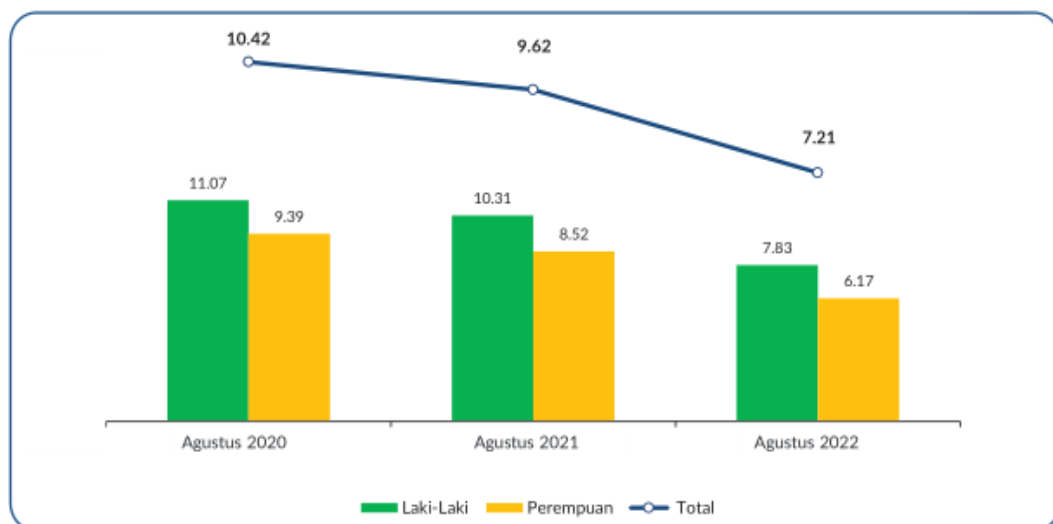


Tabel 2.37
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja,
Agustus 2020-Agustus 2022

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2020 ¹⁾	Agustus 2021 ¹⁾	Agustus 2022 ²⁾	Perubahan Ags 2020–Ags 2021		Perubahan Ags 2021–Ags 2022	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	3.791,66	3.850,85	3.907,55	59,19	1,56	56,70	1,47
Angkatan Kerja	2.609,86	2.635,76	2.695,20	25,90	0,99	59,44	2,25
- Bekerja	2.458,30	2.482,45	2.557,52	24,16	0,98	75,07	3,02
- Pengangguran	151,56	153,31	137,68	1,75	1,15	-15,63	-10,19
Bukan Angkatan Kerja	1.181,80	1.215,09	1.212,35	33,29	2,82	-2,74	-0,23
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,83	68,45	68,97	-0,39		0,52	
- Laki-Laki	83,35	83,05	85,01	-0,30		1,97	
- Perempuan	53,86	53,43	52,51	-0,43		-0,91	

Sumber: Sakernas Agustus 2022

Pada Agustus 2022, tingkat setengah pengangguran laki-laki sebesar 7,83 persen, sedangkan tingkat setengah pengangguran perempuan sebesar 6,17 persen. Dibandingkan Agustus 2021, tingkat setengah pengangguran laki-laki mengalami penurunan sebesar 2,48 persen poin, dan tingkat setengah pengangguran perempuan juga mengalami penurunan sebesar 2,35 persen poin.



Gambar 2.16
Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin (persen)
Agustus 2020-Agustus 2022



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 5,11 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang pengangguran. Pada Agustus 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 0,71 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021.

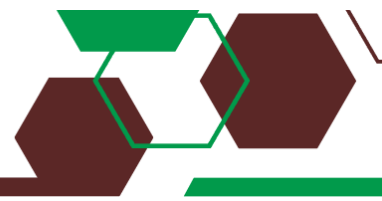
Pada Agustus 2022, TPT laki-laki sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan yang sebesar 5,10 persen. TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,09 persen poin dan 0,11 persen poin jika dibandingkan Agustus 2021.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (8,75 persen) dua kali lebih tinggi TPT di daerah perdesaan (3,11 persen). TPT menurut daerah tempat tinggal memiliki pola yang sama dengan TPT Provinsi yaitu turun dibandingkan Agustus 2021, masing-masing sebesar 0,82 persen poin untuk TPT Perkotaan dan 0,75 persen poin untuk TPT Perdesaan.

Tabel 2.38
Karakteristik Pengangguran (persen), Agustus 2020-Agustus 2022
(BPS Kalbar 2022)

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Ags 2020–Ags 2021	Perubahan Ags 2021–Ags 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,81	5,82	5,11	0,01	-0,71
TPT menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	6,17	6,20	5,11	0,03	-1,09
- Perempuan	5,22	5,21	5,10	-0,01	-0,11
TPT menurut Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan	9,56	9,57	8,75	0,01	-0,82
- Perdesaan	3,95	3,86	3,11	-0,09	-0,75

Sedangkan jika dilihat dari jenis kelamin, TPT laki-laki tercatat lebih tinggi dibanding perempuan. Pada Agustus 2022, TPT laki-laki sebesar 5,11 persen sedangkan TPT perempuan sebesar 5,10 persen. Dibandingkan Agustus 2021, TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,09 persen poin dan TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 0,11 persen poin.



b. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Jumlah penduduk bekerja pada setiap kategori lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2022 didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 48.37%; perdagangan besar dan eceran sebesar 14.27 %.

Tabel 2.39
Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kalimantan Barat

Karakteristik Penduduk Bekerja	Agustus 2020 ¹⁾		Agustus 2021 ¹⁾		Agustus 2022 ¹⁾		Perubahan Agu 2020–Agu 2021		Perubahan Agu 2021–Agu 2022	
	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen poin ²⁾	ribu orang	persen poin ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Lapangan Pekerjaan Utama										
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.211,20	49,27	1.175,22	47,34	1.237,00	48,37	-35,98	-1,93	61,79	1,03
B. Pertambangan dan Penggalian	81,39	3,31	90,82	3,66	82,80	3,24	9,43	0,35	-8,02	-0,42
C. Industri Pengolahan	142,96	5,82	150,89	6,08	124,01	4,85	7,93	0,26	-26,88	-1,23
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8,21	0,33	8,58	0,35	7,59	0,30	0,367	0,01	-0,99	-0,05
E. Pengadaan Air	2,75	0,11	4,82	0,19	3,64	0,14	2,07	0,08	-1,18	-0,05
F. Konstruksi	146,130	5,94	150,39	6,06	140,75	5,50	4,26	0,11	-9,64	-0,56
G. Perdagangan Besar dan Eceran	350,20	14,25	351,74	14,17	365,01	14,27	1,54	-0,08	13,27	0,1
H. Transportasi dan Pergudangan	66,73	2,71	61,42	2,47	82,78	3,24	-5,31	-0,24	21,36	0,77
I. Akomodasi dan Makan Minum	121,43	4,94	135,31	5,45	130,78	5,11	13,88	0,51	-4,53	-0,34
J. Informasi dan Komunikasi	8,31	0,34	7,52	0,30	9,06	0,35	-0,79	-0,04	1,54	0,05
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	15,72	0,64	17,31	0,70	14,80	0,58	1,59	0,06	-2,51	-0,12
L. Real Estat	2,13	0,09	2,20	0,09	3,71	0,14	0,07	0,00	1,51	0,05
M, N. Jasa Perusahaan	14,73	0,60	15,59	0,63	22,60	0,88	0,87	0,03	7,01	0,25
O. Administrasi Pemerintahan	88,12	3,58	92,16	3,71	98,45	3,85	4,04	0,13	6,30	0,14
P. Jasa Pendidikan	92,20	3,75	112,17	4,52	122,43	4,79	19,97	0,77	10,26	0,27
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32,22	1,31	35,42	1,43	36,84	1,44	3,20	0,12	1,42	0,01
R,S,T,U. Jasa Lainnya	73,89	3,01	70,92	2,86	75,27	2,94	-2,97	-0,15	4,35	0,08
Jumlah	2.458,30	100,00	2.482,45	100,00	2.557,52	100,00	24,16	—	75,07	—

Sumber: BPS Kalbar, 2022

Tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar jika dibandingkan dengan Agustus 2021 adalah Pertanian, Kehutanan, Perikanan (1,03 persen poin); Transportasi dan Pergudangan (0,77 persen poin); dan Jasa Pendidikan (0,27 persen poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja paling besar adalah Industri Pengolahan (-1,23 persen poin); Konstruksi (-0,56 persen poin); Pertambangan dan Penggalian (-0,42 persen poin).

c. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Dari 2,55 juta penduduk bekerja di Kalimantan Barat pada Agustus 2022, status pekerjaan utama yang terbanyak yaitu sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu 977.14 orang atau 38,21 persen diikuti status berusaha sendiri sebesar 575.27 orang atau 22,49 persen. Sementara penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh



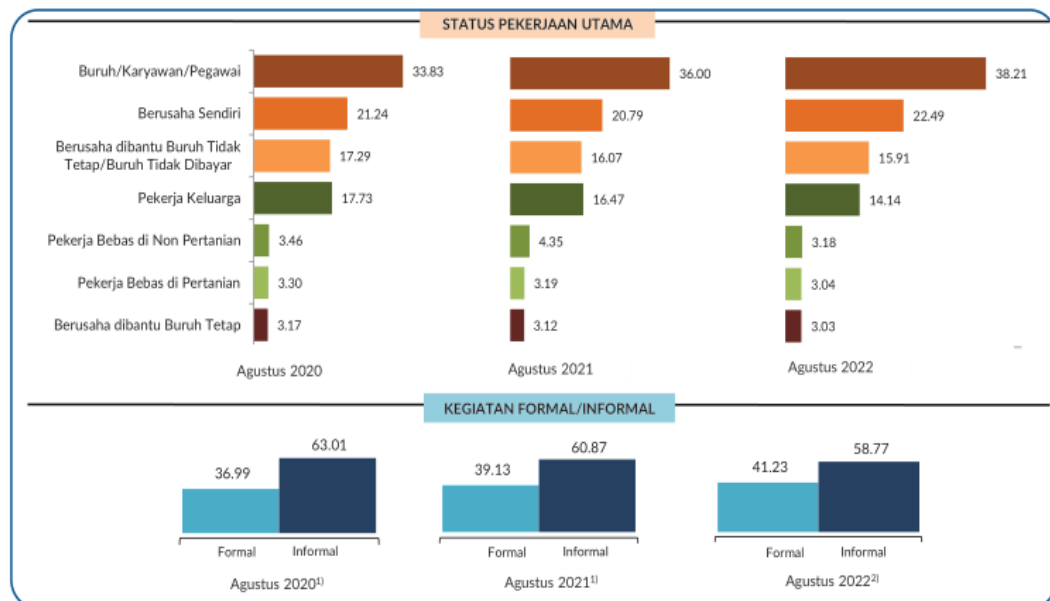


tetap/dibayar memiliki persentase yang paling kecil yaitu sebesar 3,03 persen Perbandingan penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut status pekerjaan di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40
Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2020-Agustus 2022

Status Pekerjaan Utama (1)	Agst 2020 (2)	Agst 2021 (3)	Agst 2022 (4)
Berusaha Sendiri	522.067	516.165	575.27
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	424.967	398.851	406.91
Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar	77.867	77.576	77.410
Buruh/Karyawan/Pegawai	831.555	893.742	977.14
Pekerja Bebas Pertanian	81.029	79.283	77.84
Pekerja Bebas Non Pertanian	84.982	107.915	81.22
Pekerja Keluarga/tak Dibayar	435.829	408.921	361.74
Total	2.458.296	2.482.453	2.557.520

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022



Sumber: BPS Kalbar, 2022

Gambar 2.17
Persentase Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal Provinsi Kalimantan Barat, Agustus 2020- Agustus 2022

Gambaran ketenagakerjaan menurut pendidikan merupakan hal yang menarik pula untuk dicermati. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar pasar tenaga kerja dapat menyerap tenaga kerja dengan





tingkat keahlian atau keterampilan tertentu sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2022, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 45,56 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas sebesar 11,05 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama baik pada Agustus 2022 Tabel 2.41.

Tabel 2.41

Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2020 - 2021

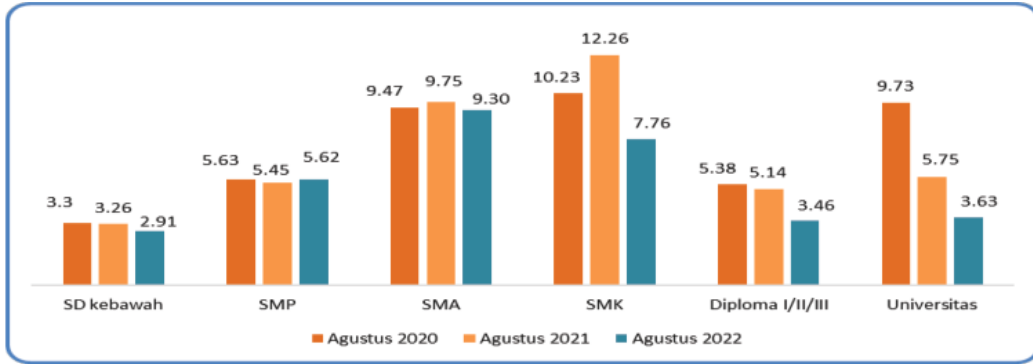
No.	Pendidikan	Agustus 2020		Agustus 2021		Agustus 2022	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	<= SD	1.211.102	49,27%	1.171.449	47,19%	1.165.150	45.56%
2	SMP	427.694	17,40%	424.640	17,11%	435.06	17.01%
3	SMA Umum	459.158	18,68%	484.769	19,53%	519.05	20.29%
4	SMA Kejuruan	144.611	5,88%	163.769	6,60%	155.68	6.09%
5	Diploma I/II/III	60.610	2,47%	57.635	2,32%	67.42	2.64%
6	Universitas	155.121	6,31%	180.191	7,26%	215.16	8.41%
Total		2.458.296	100,00%	2.482.453	100,00%	2.557.520	100,00%

Sumber: Sakernas Agustus 2022

1) Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Agustus 2022 mempunyai pola yang sedikit berbeda dengan Agustus 2021. Pada Agustus 2022, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamat jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,30 persen. Sementara TPT yang paling rendah terdapat pada pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah, sebesar 2,91 persen. Dibandingkan Agustus 2021, penurunan TPT terjadi pada semua kategori kecuali SMP yang mengalami kenaikan sebesar 0,17 persen. Kategori yang mengalami penurunan terbesar adalah kategori pendidikan SMK yaitu sebesar 4.50 persen poin.



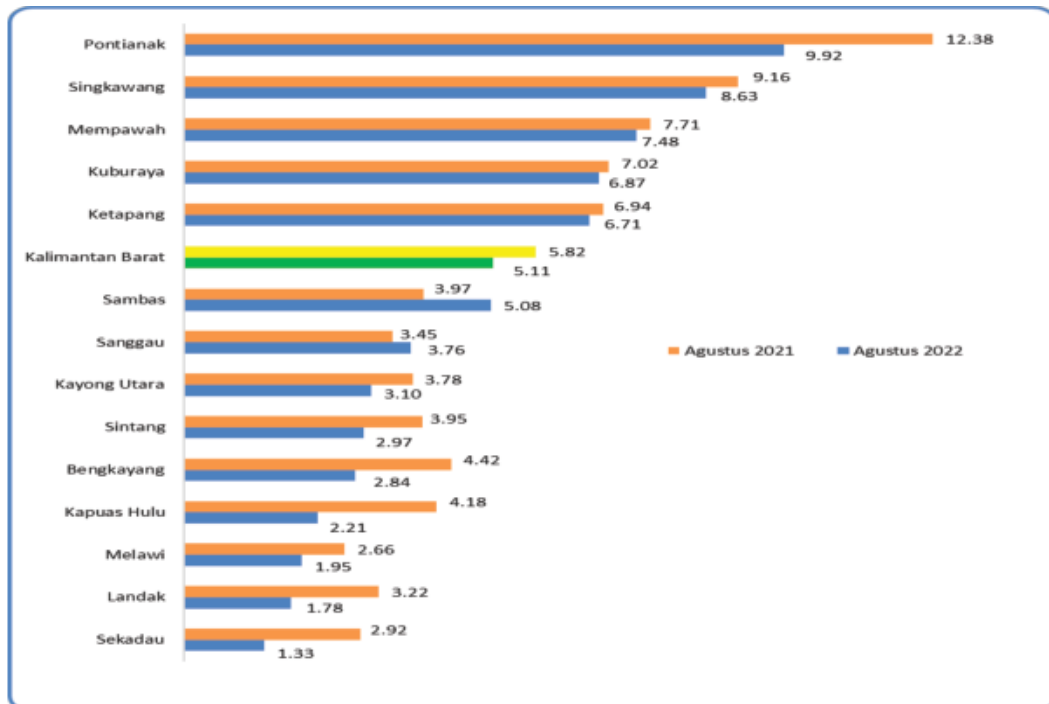


Gambar 2.18

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kalimantan Barat (persen), Agustus 2020-Agustus 2022

2) Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat pada Agustus 2022 dapat dilihat Gambar 2.19, dimana TPT tertinggi pada Agustus 2022 terdapat di Kota Pontianak dan terendah terdapat di Kabupaten Sekdau. Jika dilihat dari perubahannya, penurunan TPT terbesar terjadi di Kota Pontianak sebesar 2,46 persen dan kenaikan terbesar terjadi di Kabupaten Sambas sebesar 1,11 persen.



Gambar 2.19

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, Agustus 2022





3) Pandemi Covid-19 dan Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat

Pandemi COVID-19 berdampak terhadap kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Barat. Pandemi COVID-19 membuat sebagian penduduk kehilangan atau berhenti bekerja dan menjadi pengangguran atau Bukan Angkatan Kerja (BAK). Pandemi COVID-19 juga membuat sebagian penduduk menjadi sementara tidak bekerja atau mengalami pengurangan jam kerja. Adapun penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 berdasarkan hasil Sakernas dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: (1) Pengangguran karena COVID-19; (2) Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19; (3) Sementara tidak bekerja karena COVID-19; dan (4) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Kondisi (1) dan (2) merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi (3) dan (4) merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang masih bekerja.

Tabel 2.42

Pandemi Covid-19 dan Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat

Komponen	Agustus 2021 ¹⁾	Agustus 2022 ²⁾	Perubahan Agu 2021–Agu 2022	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen
(1)	(3)	(4)	(7)	(8)
1. Pengangguran ²⁾ karena COVID-19	29,05	2,68	-26,37	-90,77
2. BAK ³⁾ karena COVID-19	5,40	1,31	-4,09	-75,74
3. Sementara tidak bekerja ⁴⁾ karena COVID-19	12,11	1,98	-10,13	-83,65
4. Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19	169,50	38,67	-130,83	-77,19
Total	216,06	44,63	-171,43	-79,34
Penduduk Usia Kerja (PUK)	3.850,84	3.907,55	56,71	1,47
	persen	persen	persen poin	
Persentase terhadap PUK	5,61	1,14	-4,47	

Dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2022 sebanyak 44.63 ribu orang, mengalami penurunan sebanyak 171.43 ribu orang atau sebesar 79.34 persen dibandingkan dengan Agustus 2021. Apabila dilihat menurut komposisi penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19, sebanyak 2,68 ribu orang merupakan pengangguran karena COVID-19; 1,31 ribu orang bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19; 1,98 ribu orang sementara tidak bekerja



karena COVID-19; dan 38,67 ribu orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19.

5. Angka Kemiskinan

a. Perkembangan Tingkat Kemiskinan September 2011 – Maret 2022

Secara umum, pada periode September 2011 -Maret 2022, tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun presentase. Jumlah penduduk miskin di provinsi Kalimantan Barat menurun dari 382,27 ribu orang di September 2011 menjadi 350,25 ribu orang pada Maret 2022. Penurunan persentase kemiskinan juga terjadi dari 8,48 persen menjadi 6,73 persen.

b. Perkembangan Tingkat Kemiskinan September 2020 - September 2021

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat pada bulan Maret 2022 mencapai 350,25 ribu orang. Dibandingkan September 2021, jumlah penduduk miskin menurun 3,8 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2021, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 17,64 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 tercatat sebesar 6,73 persen, menurun 0,11 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,42 poin terhadap Maret 2021.

Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, periode Maret 2021-Maret 2022, Jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang sebesar 1,86 ribu orang dari 85,90 ribu orang Maret 2021 menjadi 85,04 ribu orang Maret 2022. Sejalan dengan kondisi di perkotaan, penduduk miskin di perdesaan juga mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang 15,78 ribu orang dari 280,99 ribu orang Maret 2021 menjadi 265,21 ribu orang Maret 2022.

Periode September 2021- Maret 2022, jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang sebesar 4,00 ribu orang dari 89,04 ribu orang September 2021 menjadi 85,04 ribu orang Maret 2022. Situasi berbeda dengan peningkatan penduduk miskin di perkotaan, penduduk miskin di perdesaan mengalami peningkatan. Jumlah Penduduk miskin di perdesaan meningkat 0,3 ribu orang dari 264,96 ribu orang September 2021 menjadi 265,21 ribu orang Maret 2022.



Tabel 2.43

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2021 -
September 2022

Daerah/Tahun (1)	Jumlah Penduduk Miskin (2)	Persentase Penduduk Miskin (3)
Perkotaan		
Maret 2021	86,90	4,68
September 2021	89,04	4,72
Maret 2022	85,04	4,44
Perdesaan		
Maret 2021	280,99	8,54
September 2021	264,96	8,05
Maret 2022	265,21	8,06
Perkotaan + Perdesaan		
Maret 2021	367,89	7,15
September 2021	354,00	6,84
Maret 2022	350,25	6,73

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Kalbar

c. Perkembangan Garis Kemiskinan Maret 2021 - September 2022

Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak akan terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) merupakan rata-rata pengeluaran per kapita perbulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin Maret 2022 adalah Rp 520.660,- (kapita/bulan).

Selama periode Maret 2021 – Maret 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,05 persen. Kenaikannya dari Rp 483,454,- perkapita per bulan pada Maret 2021 menjadi Rp 520,660,- perkapita per bulan pada Maret 2022. Sementara pada periode Maret 2021 – Maret 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 7,70 persen, yaitu dari Rp 474,259,- perkapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 520,660,- per kapita per bulan pada September 2021.

Jika dibandingkan antara Maret 2021 dengan Maret 2022, maka garis kemiskinan daerah perkotaan meningkat sebesar 8,85 persen. Sedangkan di daerah perdesaan meningkat 3,39 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM).



Tabel 2.44

Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah, Maret 2021 – Maret 2022

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan		Total
	Makanan	Bukan Makanan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2021	388,798	124,543	513,341
September 2021	407,296	133,177	540,474
Maret 2022	418,006	140,781	558,787
Perubahan Mar'21 – Mar'22	7,51	13,04	8,85
Perubahan Sept'21 – Mar'22	2,63	5,71	3,39
Perdesaan			
Maret 2021	360,819	106,543	467,362
September 2021	377,369	109,174	486,544
Maret 2022	387,226	112,823	500,049
Perubahan Mar'21 – Mar'22	7,32	5,89	6,99
Perubahan Sept'21 – Mar'22	2,61	3,34	2,78
Perkotaan + Perdesaan			
Maret 2021	370,423	113,031	483,454
September 2021	387,342	117,885	505,228
Maret 2022	397,561	123,009	520,660
Perubahan Mar'21 – Mar'22	7,33	8,91	7,70
Perubahan Sept'21 – Mar'22	2,64	4,42	3,05

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Kalbar

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan ninmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan pada Maret 2022, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hamper sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 19,19 persen di perkotaan dan 24,68 persen di perdesaan. Lima Komoditi makanan yang memberikan sumbangan besar terhdap garis kemiskinan perkotaan di Kalimantan Barat antara lain beras, rokok kretek filter, telur ayam ras , daging ayam ras dan mie instan. Jika dibandingkan dengan September 2021, pada Maret 2022 ini komoditi mie instan telah menggeser komoditi kembung. Di perdesaan lima contributor utama komoditi penyusun GK meliputi beras, rokok kretek filter, telur ayam ras daging ayam ras, dan gula pasir.

Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK perkotaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, pakaian jadi perempuan dewasa dan perawatan kulit,



muka,kuku,rambut sedangkan komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK perdesaan adalah perumahan, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, sabun cuci dan perawatan kulit, muka, kuku, rambut.

Jenis Komoditi (1)	Perkotaan (2)	Jenis Komoditi (3)	Perdesaan (4)
Makanan			
Beras	19,19	Beras	24,68
Rokok Kretek Filter	13,82	Rokok Kretek Filter	13,89
Telur Ayam Ras	4,71	Telur Ayam Ras	4,07
Daging Ayam Ras	4,08	Daging Ayam Ras	3,91
Mie Instan	3,37	Gula Pasir	3,44
Tongkol/Tuna/Cakalang	2,92	Mie Instan	3,01
Kembung	2,82	Kopi bubuk & Kopi	2,67
Gula Pasir	2,68	Bawang Merah	1,77
Kue Basah	1,91	Tongkol/Tuna/Cakalang	1,65
Kopi bubuk & Kopi	1,88	Cabe Rawit	1,59
Cabe Rawit	1,65	Roti	1,33
Bawang Merah	1,55	Kembung	1,23
Lainnya	14,23	Lainnya	14,20
Bukan Makanan			
Perumahan	8,85	Perumahan	9,40
Bensin	3,64	Bensin	3,25
Listrik	2,82	Listrik	1,48
Pendidikan	1,90	Pendidikan	1,29
Perlengkapan Mandi	1,22	Perlengkapan Mandi	1,26
Pakaian jadi perempuan dewasa	0,77	Sabun cuci	0,72
Perawatan kulit, muka,kuku	0,67	Perawatan kulit, muka,kuku	0,58
Lainnya	5,32	Lainnya	4,58

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

d. Garis Kemiskinan Per Rumah Tangga Miskin

Garis Kemiskinan per Rumah Tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2022 adalah sebesar Rp.2.723.052,-/bulan naik sebesar 5,27 persen dibanding kondisi September 2021 yang sebesar Rp.2.586.767,-/bulan.





B. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.45
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
4	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.563.621.107,00	1.525.204.894,00	97.54		
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	966.669.419,00	720.648.508,00	74.54		
		Program Penempatan Tenaga Kerja	258.143.250,00	227.978.958,00	88.31		
		Program Hubungan Industrial	717.448.800,00	684.439.912,00	95.39		
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	2.595.184.060,00	2.491.279.021,00	95.99		
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	132.948.600,00	101.219.500,00	76.12		
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	286.998.700,00	258.739.428,00	90.15		
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	250.579.200,00	232.045.650,00	92.60		
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.725.840.274,00	3.458.071.612,00	92.81		
		Program Pemasaran Pariwisata	8.916.842.300,00	8.429.031.950,00	94.52		
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	2.448.895.000,00	2.33.003.289,00	95.47		
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	606.504.300,00	536.437.400,00	88.44		
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	346.947.034,00	339.437.314,00	97.83		
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.342.264.520,00	1.299.859.746,00	96.84		
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	4.529.563.365,00	4.408.875.929,00	97.33		





No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		Lembaga Adat dan Masyarakat Desa					
		Program Pemberdayaan Sosial	758.280.800,00	749.845.907,00	98.88		
		Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	450.0003.232,00	435.949.867,00	96.87		
		Program Rehabilitasi Sosial	3.793.064.838,00	3.395.323.683,81	89.51		
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	8.510.035.900,00	8.457.297.356,00	99.38		
		Program Penanganan Bencana	1.168.288.200,00	1.087.959.191,00	93.12		
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	497.848.800,00	496.107.060,00	99.65		
		Program Promosi Penanaman Modal	722.210.200,00	696.010.666,00	96.37		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	850.110.028,00	826.783.957,00	97.25		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	939.800.798,00	832.971.041,00	88.63		
		Program Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal	95.574.300,00	93.182.800,00	97.49		
		Program Pengelolaan Hutan	44.161.113.200,00	43.690.543.828,00	98.93		
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	830.578.400,00	770.958.701,00	92.82		
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	75.156.000,00	74.341.000,00	98.91		
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	152.192.700,00	143.590.192,00	94.34		
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	178.775.500,00	176.724.472,00	98.85		
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.358.850.800,00	1.292.122.280,00	95.08		
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	341.064.080,00	335.144.380,00	98.26		





No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		Program Pengembangan UMKM	2.673.219.300,00	2.563.726.136,00	95.90		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	7.054.431.005,00	6.751.085.700,00	95.69		
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	582.874.500,00	568.264.521,00	97.49		
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.225.316.848,00	2.183.736.400,00	98.13		
		Program Pengelolaan Perikanan tangkap	7.843.615.600,00	7.765.423.730,00	99		
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.792.533.100,00	2.765.262.051,00	99		
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	861.223.600,00	861.118.700,00	99		
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.661.144.200,00	1.629.818.991,00	98.11		
		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	330.218.000,00	320.603.015,00	97.08		
		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	310.405.700,00	304.884.747,00	98.22		
		Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	2.300.065.720,00	2.067.933.935,00	89.90		
		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	5.344.037.200,00	5.115.830.474,00	95.72		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	7.045.431.005,00	6.751.085.700,00	95.69		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.537.321.599,00	11.270.455.645,00	97.68		
		Program Penyuluh Pertanian	4.268.103.550,00	3.206.586.584,00	75.12		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.729.434.611,00	4.528.663.951,00	95.75		
		Program Penyediaan dan Pengembangan	2.109.421.300,00	2.090.014.900,00	99.08		





No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		Prasarana Pertanian					
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.183.845.924,00	2.043.676.646,00	93.58		
		Program pengendalian dan pengurangan bencana Pertanian	369.846.000,00	325.971.900	88.13		
		Program Perizinan Usaha Pertanian	301.022.554,00	248.694.189,00	82.61		
		Program penyuluh Pertanian	1.131.996.630,00	1.019.944.960,00	90.10		
					94.13	116.53	5,87

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 94.13% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 116.53 % di dapat tingkat efisiensi sebesar 5,87.

C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Sebagai informasi bahwa jumlah produksi perkebunan Kalimantan Barat tahun 2022 produksi perkebunan sebesar 5.999.820 ton. Nilai ini mencapai target dikarenakan tingkat produksi komoditas perkebunan sudah memasuki masa puncaknya dan luasan tanaman yang menghasilkan semakin bertambah. Indeks harga yang diterima perkebunan pada tahun 2022 dari bulan Januari ke Desember mengalami pluktuasi dengan angka tertinggi di bulan April yaitu 207.04 dan terendah di bulan Juli yaitu 163.01 dengan rata-rata tahun 2022 adalah 186.25. Tingginya harga jual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit berpengaruh sangat signifikan terhadap kenaikan Indeks harga yang diterima (It) petani khususnya sub sektor perkebunan rakyat. Dari target 123,21 berhasil tercapai dengan angka 186.25.
2. Pada sektor perkebunan, jumlah produksi perkebunan mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya luas tanaman menghasilkan. Selain itu juga karena harga komoditi yang cenderung naik sehingga perawatan tanaman semakin bagus. Sedangkan untuk Nilai Indeks Harga yang diterima pekebun sudah diatas target dan diatas angka nasional. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingginya harga komoditas kelapa sawit di Kalimantan Barat.





3. Capaian kinerja tujuan (NTP dan Laju PDRB), NTP Hortikultura melampaui target dari target sebesar 101,90 tercapai 102,05 (100,15%). Sedangkan NTP Tanaman Pangan tidak mencapai target, dari target sebesar 95,14 hanya terealisasi sebesar 92,60 (97,33%). Sementara itu untuk kinerja Laju Pertumbuhan PDRB baik Tanaman Pangan maupun Hortikultura, berdasarkan publikasi Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2023 yang dirilis oleh BPS tanggal 28 Februari 2023, belum menampilkan data laju pertumbuhan PDRB pada level subsektor. Sehingga data yang digunakan masih menggunakan data sampai dengan triwulan III dan tidak mencapai target. Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan sebesar -0,33% dan Laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura juga sebesar -0,33%.
4. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, capaian produksi tanaman pangan tahun 2022 sebesar 88,38% yaitu dari target produksi sebesar 1.136.315 ton hanya terealisasi sebesar 1.004.259 ton. Penyebab utama tidak tercapainya target kinerja produksi tanaman pangan terutama adalah menurunnya produktivitas padi sebesar 1,96 ku/ha atau sekitar -6,14% dan produktivitas jagung sebesar 7,46 ku/ha atau sekitar -14,1%. Ini menunjukkan indeks pertanaman padi yang masih rendah meskipun luas panen padi menunjukkan adanya peningkatan dari 223.166 ha pada tahun 2021 menjadi 272.116 ha pada tahun 2022.
5. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Kalimantan Barat masih menghadapi beberapa kendala dan hambatan antara lain belum optimalnya pemanfaatan lahan sawah yang hanya ditanami 1 kali setahun sekitar 29,02%, kurangnya dukungan infrastruktur pengairan dan alsintan, pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan belum optimal, belum optimalnya penerapan teknologi usaha tani sehingga produktivitas lahan pertanian terutama padi yang masih rendah.
6. Pada tahun 2022, pemulihan pasca pandemi, capaian realisasi mencapai target, sehingga memenuhi harapan berkurangnya angka pelanggaran perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan, namun diharapkan kedepannya angka pelanggaran ini dapat kembali turun dibandingkan tahun ini. Mengingat masih banyak hambatan ataupun kendala yang akan dihadapi seperti: belum optimalnya perusahaan yang menjalankan norma K3 dan masih terbatasnya perusahaan yang memahami dan menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Untuk itu penambahan sumber daya berupa pagu dana



dan jumlah fungsional pengawas perlu dilakukan untuk mencapai target yang lebih baik di masa depan. Jumlah pengawas ketenagakerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah perusahaan yang diawasi, letak perusahaan yang menyebar di daerah pedesaan dengan jarak tempuh yang cukup jauh, kualitas pengawas ketenagakerjaan terhadap penguasaan dalam penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan, kuantitas tenaga pengawas spesialis, dan keterbatasan sarana pengawasan ketenagakerjaan berupa peralatan pemeriksaan dan pengujian sarana transportasi operasional pengawasan.

7. Terdapat 2 (dua) program yang mendukung dan mendorong pencapaian target peningkatan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian didukung oleh kegiatan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin penggalian, Izin Pemakaian dan Izin perusahaan air tanah dalam daerah Provinsi. Kegiatan ini dibreakdown dalam 2 subkegiatan yaitu Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin serta sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Perusahaan Air Tanah. Sementara kegiatan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah di breakdown melalui sub kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi nilai perolehan air tanah.
8. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara didukung oleh kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut dengan sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah. Kemudian kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut dibreakdown melalui sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut.



Kegiatan lainnya yaitu Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat dibreakdown melalui sub kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam wilayah izin pertambangan rakyat. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat berkontraksi cukup dalam mencapai angka minus 1.82. hal ini terjadi dampak dari pandemic Covid 19 yang mengguncang perekonomian dunia. Namun demikian sektor pertambangan dan pennggalian berdasarkan data pada tabel di atas justru mencatatkan laju pertumbuhan tertinggi sepanjang sejarah Kalimantan Barat dengan capaian sebesar 21,20 %. Sektor pertambangan dan penggalian tidak terdampak terhadap kondisi pandemic, mengingat produk tambang yang dihasilkan dari Kalimantan Barat memang sebelumnya telah terikat kontrak pemenuhan supply utamanya ke negara Tiongkok serta produk tambang ini merupakan produk yang masih dalam rangkaian proses industri yang masih cukup Panjang untuk sampai dilepas Kembali produk jadinya ke pasar. Sementara itu apa yang terjadi pada tahun 2021 yang hanya mencapai angka pertumbuhan 2,6 % kemungkinan disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mendorong hilirisasi produk tambang dengan mempersyaratkan pembangunan smelter dan mengurangi ekspor bahan tambang mentah. Untuk tahun 2022 menjadi tahun persiapan bagi IUP untuk bersiap menghadapi larangan ekspor bahan mentah bauksit. Kalbar yang merupakan daerah dengan cadangan bauksit terbesar di Indonesia mencapai 60 % tentunya sangat terpengaruh dengan kondisi ini. Secara produksi mungkin tidak terlalu berdampak karena hasil produksi yang tadinya untuk keperluan ekspor akan dialihkan untuk kebutuhan smelter atau industri, namun di sisi pencapaian ekspor akan sangat berdampak. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama untuk mencari substitusi terhadap ruang kosong yang ditinggal oleh valuasi ekspor bauksit dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi Kalbar di tahun 2023 dan tahun-tahun ke depannya tentunya.

9. Sektor perdagangan merupakan sektor makro yang dipengaruhi oleh banyak hal dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. dalam pelaksanaan Pembangunan urusan perdagangan banyak terlibat dan melibatkan pemangku kepentingan lain, baik itu instansi pemerintah, pemerintah kabupaten/kota,



dunia usaha, BUMN, perguruan tinggi, akademisi, serta kelompok masyarakat lainnya. Hubungan kerja tersebut ada yang bersifat kerja sama antar instansi karena adanya persinggungan tugas dan fungsi dan juga ada yang terikat melalui sebuah forum, seperti Forum kinerja ekspor, forum pengendalian inflasi daerah, satuan tugas pengendalian harga dan stok barang pokok dan barang penting. Tentu bagaimana memberdayakan SDM Perdagangan yang ada di Kalimantan Barat yang berada di berbagai instansi dengan berbagai latar belakang dan kepentingan menjadi kunci bangkitnya sektor perdagangan setelah di tahun yang lalu babak belur menghadapi pandemi.

10. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan / Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir, Program ini untuk mendukung Dinas Perindag ESDM yang ditunjuk sebagai IPSKA yang prosesnya dilakukan secara elektronik (e-ska) yang sistemnya dibangun oleh Kementerian Perdagangan. SKA adalah Surat Keterangan Asal atau COC Certificate Of Origin merupakan sertifikat asal barang yang digunakan untuk mendapatkan preferensi atau keringanan bahkan penghapusan bea masuk ke negara tujuan ekspor yang memiliki kesepakatan Perdagangan Bebas. Sosialisasi e SKA dan dorongan bagi para pelaku ekspor untuk memanfaatkan fasilitas SKA Di tahun 2022 IPSKA Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Perindag ESDM Prov Kalbar telah menerbitkan sebanyak 4.333 sertifikat.
11. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan bahan pokok maupun bahan penting dengan kerja kolaborasi bersama dengan satuan tugas pangan yang diketuai oleh Polda Kalbar. Adapun instansi yang masuk ke dalam satuan tugas pangan sebagaimana Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1161/EKON/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Kartel Pangan adalah DPESDM, Dinas Ketahanan Pangan, Biro Ekonomi, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan, Balai Karantina, BPPOM, Disbunak, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, BULOG.
12. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan, dilaksanakan operasi pasar murah di 14 Kabupaten Kota.



13. Program Pengembangan Ekspor, dengan melaksanakan pengembangan perdagangan luar negeri untuk pemasaran produk local, dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain: Pameran Inacraft di Jakarta memfasilitasi 3 Pelaku usaha kerajinan berbasis produk rotan, kulit, kayu dan tenun. Pameran trade Expo Indonesia Di Tangerang banten. Memfasilitasi 2 pelaku usaha Kopi Liberica dan Asia Oil (tengkawang) untuk promosi produk unik asli Kalimantan Barat. Mendukung Dekranasda Prov Kalbar pada Pameran Kriya Nusa di Jakarta, tentang produk kain tenun dan batik daerah untuk dekorasi stand pameran. Memfasilitasi kegiatan BIMP EAGA untuk bidang pameran dengan menampilkan produk kerajinan dan makanan khas dengan jumlah pelaku usaha yang dilibatkan berjumlah 6 pelaku usaha. Pembinaan pelaku ekspor dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan total pelaku yang difasilitasi sebanyak 90 Pelaku usaha dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang ekspor dan memberikan informasi seputar peluang ekspor atau pasar luar negeri.
14. Program standardisasi dan perlindungan konsumen, pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh Kabupaten/ Kota, Di tahun 2022 ini tercatat 27 kasus sengketa konsumen dari 4 unit BPSK yang diadakan ke BPSK dimana seluruhnya tuntas di selesaikan.
15. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Tahun 2022 telah diijazahi dan di fasilitasi kerjasama perdagangan untuk pemenuhan bahan pokok dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
16. Program Perdagangan Luar Negeri, dukungan pengembangan ekspor di Kalimantan Barat berupa fasilitasi promosi dan pembinaan teknis dan peluang pasar luar negeri.
17. Nilai investasi di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2022 sebesar 20,08 Triliun hal ini mengalami kenaikan dibanding Tahun 2021 yakni sebesar 17,54 Triliun. Dibanding dengan target nilai investasi nasional yakni sebesar 23.50 T Provinsi Kalbar belum mampu mencapai target nasional walau terus mengalami kenaikan.
18. Peningkatan kualitas koperasi didukung beberapa program antara lain Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan Program Pemberdayaan



- dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM.
19. Produksi Perikanan untuk Tahun 2022 sebesar 260.536.64 Ton atau sebesar 111.49 % dari target yang ditetapkan yakni 233.680.89 ton. Program yang mendukung perikanan ini antara lain Program pengelolaan perikanan tangkap dan program pengelolaan perikanan budidaya. Rata Pertumbuhan untuk produksi perikanan ini sebesar 1.76%. Pada Tahun 2022 pertumbuhan produksi perikanan mengalami peningkatan sebesar 12,42 persen yang mana ditahun sebelumnya mengalami penurunan. Pertumbuhan produksi perikanan di tahun 2021 secara target memang sudah tercapai namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar -2.03 % jika dibanding dengan tahun 2020, pada tahun 2020 juga terjadi penurunan -4.72 % dan 2019 sebesar -2.01 %. Penyebab yang paling signifikan turunnya produksi perikanan tangkap tahun 2021 adalah kondisi pandemi. Sejak mewabahnya pandemi 6 (enam) bulan pertama pemasaran ikan laut mengalami kendala penetrasi pasar berkurang 50% baik lokal maupun antar provinsi bahkan ekspor perbatasan entikong tidak ada aktifitas akibat kebijakan lockdown dari pihak Malaysia.
20. Program perlindungan dan jaminan social, dilaksanakan antara lain pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan diberikan bantuan sarana penampungan air dan peralatan kerja bagi 857 keluarga penerima manfaat (KPM) di 15 kelurahan di Pontianak, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Tanjung Miru, Kayan Hulu Kabupaten Sintang, dalam bentuk pelatihan bercocok tanam dengan jumlah 50 peserta bertujuan untuk memberikan akses usaha dan kesempatan kerja bagi warga KAT. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan terluar, dalam bentuk pemberian bantuan sosial barang berupa peralatan kerja, sarana penampungan air dan ambulan bagi 629 KPM di Kabupaten Kayong Utara, Bengkayang, Kota Pontianak, Kubu Raya, Sambas, Kapuas Hulu dan Kabupaten Mempawah. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan, dalam bentuk pemberian bantuan sosial barang berupa peralatan kerja bagi 803 KPM di Kabupaten Sanggau, Sekadau, Kubu Raya, Sintang dan Pesisir Kota Pontianak.



D. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019-2022 Dan Target Akhir Jangka Menengah 2022

Tabel 2.46

Perbandingan Realisasi Kinerja 2019-2022 dan Target 2022 Sasaran Strategis 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				TARGET 2023	Tingkat Kemajuan
			2019	2020	2021	2022		
4.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang Merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pertumbuhan Ekonomi	5.00	-2.22	4.31	5.01	5.02-5.68	-0.19
		Indeks Gini	0.318	0.325	0.315	0.314	0.321-0.318	2.78
		Desa Mandiri (jumlah)	86	214	385	586	425	37.88
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4.45	5.81	5.82	5.11	5.42-3.98	-5.71
		Angka Kemiskinan	7.28	7.24	6.84	6.73	7.08-7.00	-4.94

Pada Tahun 2019 Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mencapai 5,00 %, dari sisi produksi, pertumbuhan di dorong oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 8,26%, sementara dari sisi pengeluaran didorong oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 10,12 %. Pada Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat terkontraksi 2,22% (y-on-y), sedangkan pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan sebesar 4,31% (y-on-y). Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,44 persen. Dari sisi Pengeluaran, Pertumbuhan tertinggi dialami oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga Sebesar 9,95 persen.

Pada Bulan September 2019, gini rasio Kalimantan Barat sebesar 0.318. gini rasio tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan pada bulan Maret Tahun 2019 sebesar 0.327. Pada Tahun 2020, gini ratio Kalimantan Barat sebesar 0.325 dan pada tahun 2021 gini ratio Kalimantan Barat mengalami penurunan sebesar 0.010 menjadi 0,315. Pada Tahun 2022, gini ratio Kalimantan Barat sebesar 0.314, Angka ini menurun 0.001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 sebesar 0.315.

Sedangkan untuk Tahun 2019 pada Bulan Agustus angka TPT sebesar 4.45% atau naik 0,19 poin apabila dibandingkan bulan Agustus 2018 sebesar 4,26%. TPT tertinggi dijumpai di Kota Pontianak dan Kota Singkawang masing-masing 9,13% dan 6,44% terhadap angkatan kerjanya. Pada Tahun 2020, angka TPT Kalimantan Barat sebesar 5,81 dan 2021 sebesar 5,82. Pada Tahun 2021, angka TPT Kalimantan Barat sebesar 5,11% turun sebesar 0.71 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021.



Pada Bulan September 2019, jumlah penduduk miskin sebanyak 370,47 ribu jiwa, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dibandingkan bulan Maret 2019 sebesar 7,9 ribu orang. Persentase penduduk miskin perkotaan bulan September 2019 sebesar 4,61%. Sedangkan persentase penduduk miskin pedesaan bulan September 2019 sebesar 8,73%. Pada Tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat sebesar 370,71 ribu jiwa (7,24) dan pada 2021, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat turun menjadi 354 ribu jiwa (6,84). Pada Bulan Maret 2022, jumlah penduduk miskin sebanyak 350,25 ribu jiwa menurun 3,8 ribu orang terhadap September 2021 dan menurun 17,64 ribu orang terhadap Maret 2021.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial yang belum sesuai standar pelayanan minimal baik dari sisi sarana prasarana maupun pemenuhan kebutuhan SDM pekerja sosial yang bersertifikasi. Konsentrasi yang tinggi diperlukan untuk mendukung kelengkapan dalam pemenuhan SPM urusan sosial.
2. Belum tersedianya RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center) untuk menampung warga Negara migran korban tindak kekerasan dan orang terlantar sebelum mereka dipulangkan ke daerah asal, sambil menunggu jadwal pemulangan mereka ditampung di rumah dinas yang difungsikan sebagai shelter penampungan.
3. Lokasi ternak yang tersebar masih cukup sulit untuk dijangkau terutama dari pelayanan petugas sehingga proses pelayanan baik inseminasi buatan dan PKB masih belum mencakup seluruh populasi di Kalimantan Barat;
4. Sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan reproduksi ternak yang belum optimal;
5. Pola konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam, tingginya ketergantungan pada beras sebagai pangan pokok yang ditunjukkan tingginya konsumsi kelompok pangan biji-bijian dan rendahnya konsumsi umbi-umbian. Sedangkan ketersediaan beras masih sangat terbatas. Beras merupakan kelompok karbohidrat yang diproduksi dengan input produksi yang tinggi, dan kebutuhan luas dan kelas lahan yang tinggi



6. Pengalihan dan meningkatkan keragaman konsumsi sumber karbohidrat melalui pengembangan tepung-tepungan selain beras masih juga dihadapkan pada kendala keterbatasan bahan baku pangan local baik jumlahnya maupun kontinuitasnya.
7. Dari hasil pemetaan Ketahanan dan Keterentanan Pangan tingkat kecamatan, 17,82 persen (31 dari 174) kecamatan rentan pangan. Jika dipetakan per indikator, dari hasil analisis ketahanan dan ketentanan pangan, indikator pada sub sistem pemanfaatan pangan yang paling berpengaruh terhadap status kerentanan pangan seperti prevalensi stunting dan tingkat pendidikan perempuan.
8. Pengelolaan cadangan pangan memerlukan teknis dan prasarana dan sarana pendukung yang memadai. Dengan Pertambahan jumlah penduduk, maka jumlah cadangan pangan yang disiapkan oleh pemerintah bertambah, yang berdampak pula pada peningkatan sumber daya (manusia, biaya dan fisif) untuk mendukung operasional pengelolaan cadangan pangan (pengadaan, Penyimpangan dan penyaluran).
9. Belum Optimalnya penyediaan faktor-faktor penunjang dalam merangsang dan mempercepat masuknya investasi. Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online ke DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota, Berdasarkan Pemantauan terhadap seluruh Perizinan Berusaha baik yang diterbitkan melalui sistem OSS, PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/kota atau Instansi Teknis lainnya baik di Pusat maupun daerah, masih banyak pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran melalui Lembaga Penyelenggara Online Submission (OSS) perlu perbaikan data rencana investasi dalam Form Aplikasi, belum melakukan migrasi ke OSS RBA, Pelaku usaha yang belum melaksanakan kewajiban Penyampaian LKPM secara berkala terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan Daerah.
10. Belum optimalnya konektivitas intra dan antar pedesaan dengan pusat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang ada di desa, serta belum optimalnya penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dan terbatasnya pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat desa.
11. Adanya perubahan kriteria Usaha dari UU No 20 th 2008 dan dengan diterbitkannya PP No 7 th 2021 perlindungan dan kemudahan perijinan dan PP



No 5 tentang perijinan berbasis resiko sehingga menyebabkan penurunan kelas UMKM.

12. Letak geografis koperasi yang tersebar dan sulit dijangkau.
13. Masih dominannya skala usaha nelayan kecil belum efisien dan memiliki produktivitas usaha yang rendah. Masih rendahnya akses permodalan dari perbankan/lembaga keuangan untuk mendukung usaha nelayan.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan anggaran yang ada untuk pemberdayaan PSKS serta membuka peluang adanya CSR yang memberikan bantuan bagi pemberdayaan masyarakat.
2. Urusan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar dan telah memiliki Standar Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi, oleh karena itu perlu didukung oleh anggaran, sarana dan prasarana serta SDM yang memadai dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Secara bertahap proses ini dilakukan, salah satunya dengan wacana penempatan lokasi panti rehabilitasi sosial dalam satu lingkungan di eks kampus IPDN Kalbar sehingga menggunakan konsep multilayanan, Memanfaatkan shelter yang ada untuk menampung WNM korban tindak kekerasan dan orang terlantar sebelum dipulangkan ke daerah asal.
3. Penguatan demplot peternakan sebagai wadah penyuluhan dan pelatihan;
4. Fokus penyebaran ternak pada daerah yang berpotensi pengembangan dan Kawasan peternakan dengan memperhatikan aspek ketersediaan pakan, kelembagaan dan sumber daya;
5. Teknologi pengolahan pangan diperlukan untuk mendukung percepatan penganeekaragaman pangan, khususnya mendorong pengolahan pangan asal umni-umbian dan biji-bijian.
6. Kampanye dan promosi mengonsumsi pangan yang berbasis sumber daya local dan peningkatan konsumsi sayur dan buah.
7. Edukasi dan penyuluhan peningkatan kemampuan dan keterampilan wanita putus/ rendah tingkat pendidikan mengedepankan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbangan dengan memanfaatkan sumber daya dan lahan yang terdekat, sehingga akses terhadap pangan semakin mudah. Salah satunya dengan mendorong pemanfaatan pekarangan pangan.



8. Kemitraan dalam pengelolaan cadangan pangan, baik dengan lembaga pemerintah yang berwenang dan kompeten lainnya atau dengan swasta/ kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan pengelolaan beras/ cadangan pangan setara beras.
9. Mengkoordinasikan dengan Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Dalam Negeri dan BPSDM untuk lebih memperbanyak kegiatan yang berkaitan dengan Peningkatan Kapasitas/Diklat SDM bagi penyelenggara perizinan. Khusus untuk Kementerian Investasi /BKPM dimintakan penyelenggaraan perizinan. Khusus untuk Kementerian Investasi/ BKPM dimintakan penyelenggaraan diklat/Bimtek agar diselenggarakan perwilayah sehingga satu daerah dapat mengusulkan peserta diklat dengan jumlah yang memadai.
10. Sinergi program dan kegiatan percepatan kemajuan dan kemandirian desa pada indikator indeks ketahanan sosial dan indeks ketahanan ekonomi mulai dari Pemerintah Provinsi sampai Kabupaten.
11. Perlu adanya pendampingan dan pembinaan untuk pelaku usaha dengan besinergi dengan stakeholder terkait. Mengarahkan pelaku usaha agar malakukan pemasaran menggunakan pasar on-line berbasis digital, Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan akses permodalan.
12. Modernisasi kapal perikanan dengan armada yang dilengkapi dengan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, mesin kapal perikanan dan tempat penyimpanan ikan yang layak dan memadai.

2.3.1.5 Sasaran Strategis 5

Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 2.47

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran Strategis 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Konflik Sosial	0	0	100%

Konflik sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 yang selanjutnya disebut konflik, adalah perseteruan dan / atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam





waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan:

1. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat
2. Menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
3. Melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik
4. Mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat
5. Menegakkan hukum tanpa diskriminasi
6. Membangun karakter bangsa
7. Melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal
8. Menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023. Terciptanya kesejahteraan di masyarakat, maka di harapkan dapat meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kalimantan Barat sehingga tidak lagi terjadi konflik antar etnis.

Selama Tahun 2022 konflik sosial yang terjadi terealisasi Nol, dengan capaian 100%. Hal ini merupakan hal yang baik dan harus terus di jaga bagi kehidupan bermasyarakat di wilayah Kalimantan Barat dan menjadi modal berharga dalam melanjutkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.





TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

Tabel 2.48

Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B 08, B 12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PENANGANAN KONFLIK FAKTUAL							
Monitoring, pengawasan dan pemantauan kerawanan terhadap ATHG di Daerah (RA: 01)	<ul style="list-style-type: none"> • POLDA Kalbar • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kodam XII/TPR ▪ Binda Kalbar ▪ Kejati Kalbar ▪ Kemenag ▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Dinas Perkebunan dan Peternakan ▪ Diskominfo ▪ Bakesbangpol Kab/Kota 	Terwujudnya pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pemantauan kerawanan terhadap ATHG di Daerah	TARGET: Terlaksananya monitoring, pengawasan dan pemantauan kerawanan terhadap ATHG di Daerah	<p>TARGET B 08: Terlaksananya monitoring, pengawasan dan pemantauan kerawanan terhadap ATHG di Daerah sebanyak 1 (satu) kali</p> <p>TARGET B 12: Terlaksananya monitoring, pengawasan dan pemantauan kerawanan terhadap ATHG di Daerah sebanyak 1 (satu) kali</p>		Kegiatan dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rapat Koordinasi ➤ Kegiatan lapnangan dsb
B. PENANGANAN KONFLIK BERKAITAN DENGAN P3AKS							
Fasilitasi penanganan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPPA Provinsi Kalbar 		Terlaksananya penguatan dan	TARGET:	TARGET B. 08: Terlaksananya dan		Kegiatan dapat berupa:



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B 08, B 12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
konflik dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial/P3AKS (RA: 02)	<ul style="list-style-type: none"> POLDA Prov. Kalbar 	<ul style="list-style-type: none"> Biro Hukum Setda Prov. Kalbar Satpol PP Prov. Kalbar DAMKAR 	Fasilitasi penanganan konflik dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial/P3AKS	Tersedianya data penanganan konflik dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial/P3AKS	tersedianya data penanganan konflik dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial/P3AKS sebanyak 1 (satu) kali TARGET B 12: Terlaksananya dan tersedianya data penanganan konflik dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial/P3AKS sebanyak 1 (satu) kali		<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi masalah dan pendataan Rapat koordinasi pencegahan & penanganan Tinjauan lapangan Pemenuhan dan bantuan sosial ekonomi Dan rapat-rapat lainnya
C. RAPAT KOORDINASI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
Terlaksananya rakor rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tahun 2022 tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat (RA: 05)	<ul style="list-style-type: none"> Bakesbang pol 	<ul style="list-style-type: none"> Tim terpadu tingkat provinsi Tim terpadu tingkat kabupaten/ kota 	Terlaksananya rencana aksi penanganan konflik sosial tahun 2022 tingkat provinsi dan kabupaten/kota	TARGET: Terlaksananya rakor bersama/monitoring, verifikasi dan evaluasi rencana aksi penanganan konflik sosial tahun 2022 tingkat provinsi dan kabupaten/ kota	TARGET B 08: Terlaksananya rakor bersama/monitoring, verifikasi dan evaluasi rencana aksi penanganan konflik sosial tahun 2022 tingkat provinsi dan kabupaten/ kota sebanyak 1 (satu) kali		Kegiatan dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B 08, B 12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					TARGET B 12: Terlaksananya rakor bersama/monitoring , verifikasi dan evaluasi rencana aksi penanganan konflik sosial tahun 2022 tingkat provinsi dan kabupaten/ kota sebanyak 1 (satu) kali		
D. PENYUSUNAN PETA KONFLIK DAERAH							
Pemetaan konflik (Conflict Mapping) di Prov. Kalbar (RA. 04)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ POLDA Kalimantan Barat ▪ BAKESBANGPOL 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kodam XII/TPR ▪ Kejati ▪ BINDA Kalbar 	Pemetaan konflik (Conflict Mapping) Yang meliputi peta potensi rawan konflik atau peta peristiwa konflik pada tahun 2022	TARGET: Tersedianya data dan peta potensi rawan konflik atau peta peristiwa konflik pada tahun 2022	TARGET B. 08: Terlaksananya penetapan dan penerbitan dokumen Pemetaan konflik (Conflict Mapping) yang meliputi peta potensi rawan konflik atau peta peristiwa konflik pada tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kali TARGET B 12: Terlaksananya Pemetaan konflik (Conflict Mapping) yang meliputi peta potensi rawan konflik atau peta peristiwa konflik pada tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kali		Kegiatan berupa: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rapat ➤ Monev ➤ Penerbitan dokumen ➤ Penyusunan naskah ➤ Kegiatan lapangan

**B. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**Tabel 2.49
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
5.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	542.503.400,00	539.913.432,00	99,52	100	
		program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	7.075.933.787,00	7.069.106.687,00	99,90		
		program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	203.643.400,00	198.972.732,00	97,70		
		program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	20.139.286.690,00	20.138.920.940,00	99,99		
		program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	1.482.253.970,00	1.413.644.600,00	95,37		
		program fasilitasi dan koordinasi hukum	2.668.225.400,00	2.533.334.632,00	99,94		
		Program penanggulangan bencana	1.987.122.950,00	1.853.262.532,00	93,26		
		Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	3.213.925.478,00	3.153.001.514,00	98,10		
					97,35	100	2.64

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97.35% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 %, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya 2.64.





C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor yang dapat mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini salah satunya adalah melalui program yang dijalankan bersama dengan kementerian / lembaga lain, maupun yang di laksanakan oleh Pemerintah Provinsi:

1. Program Penanggulangan Bencana, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Berdasarkan realisasi kinerja, seluruhnya capaian kinerja dinyatakan berhasil. Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Program guna penanganan konflik sosial diantaranya dilakukan dengan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
3. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang pelaksanaan pada program ini didukung kegiatan sebagai berikut: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan pelaksanaan penanganan gangguan yang dapat ditindaklanjuti selama setahun sebanyak 528 kali tindakan pencegahan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kalbar melalui deteksi dini dan cegah dini serta koordinasi baik ditingkat kab/kota maupun provinsi untuk memperoleh informasi untuk mengatasi gangguan kerawanan sosial, serta melakukan patroli, pengamanan asset dan tempat penting dan pengawalan pejabat dan tamu penting di wilayah Kalbar. Hal ini termasuk pelayanan trantibum dengan penindakan gangguan akibat unjuk rasa dan kerusuhan massa, serta koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat provinsi. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, Perda dan Perkada yang ditegakan secara keseluruhan sebanyak



349 kali termasuk dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada yang telah dilakukan baik di kabupaten maupun kota di Kalimantan Barat. Selain itu telah dilakukan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebanyak 96 kali di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah dengan sasaran pada siswa sekolah menengah dan mahasiswa, tokoh masyarakat, pelaku usaha badan usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi, kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS telah dilakukan rapat koordinasi anggota PPNS Tahun 2022 yang telah diikuti sebanyak 30 orang peserta anggota PPNS, sebagai bentuk sarana untuk meningkatkan kompetensi kapasitas peran dan fungsi PPNS serta meningkatkan sinergitas dan eksistensi PPNS dalam penegakan Perda dan Perkada. Selain itu telah dilakukan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang di Tempat, dan Penguatan Sekretariat Bersama PPNS dalam menciptakan masyarakat dan pelaku usaha yang tertib dan taat regulasi daerah yang telah ditetapkan melalui pola repressif non yustisial dengan tujuan pembinaan secara administratif kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

4. Program Penanggulangan Bencana, terdiri dari tiga kegiatan, antara lain; pelayanan informasi rawan bencana provinsi, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pemerintah Provinsi Kalbar melalui BPBD Provinsi juga melakukan penyebarluasan informasi dengan melalui website / media sosial sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan atau mengakses informasi tentang kebencanaan secara langsung sehingga lebih banyak masyarakat yang mendapatkan informasi.
5. Program fasilitasi dan koordinasi hukum, dilaksanakan dengan beberapa kegiatan antara lain advokasi hukum, bantuan hukum kepada masyarakat miskin, fasilitasi penyelesaian sengketa hukum dalam masyarakat melalui mediasi bantuan hukum di luar siding pengadilan, pembinaan terhadap siswa/siswi sekolah, serta pembinaan penilaian peduli hak asasi manusia pada 14 Kabupaten Kota.

**D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2018-2021 dan Target Akhir Jangka Menengah 2023**

Tabel 2.50

Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2022 dan Target 2023 Sasaran Strategis 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					TARGET 2023	Tingkat Kemajuan
			2018	2019	2020	2021	2022		
5.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Konflik Sosial	0	0	0	0	0	0	-

Pada Dokumen perencanaan RPJMD 2018-2023 sasaran strategis ini dan indikator kinerja konflik sosial di jadikan alat ukur untuk mencapai keberhasilan. sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tidak ada konflik sosial yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat. Tentunya jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 berdasarkan RPJMD 2018-2023 konflik sosial yang di diharapkan tetap pada angka Nol (tidak ada konflik).

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Gudang Logistik dan Peralatan BPBD masih menumpang di wilayah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat sehingga untuk pengawasan pemeliharaan tidak maksimal.
2. Luas wilayah Provinsi Kalbar, hal ini tentu memerlukan rencana / solusi alternatif penanganan konflik sosial atau bencana.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mengoptimalkan peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
2. Optimalisasi program / kegiatan berdasarkan sumber daya yang ada untuk digunakan sebaik mungkin dalam penanganan konflik sosial.
3. Perlunya sosialisasi / dialog / forum kerukunan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, antar etnis maupun golongan baik melalui media cetak, elektronik serta pertemuan langsung antar umat beragama atau tokoh masyarakat untuk meningkatkan nilai nasionalisme dan persatuan.





4. Updating data sebaran daerah yang memiliki potensi bencana dan solusi alternatif penanganan bencana, mengingat Provinsi Kalimantan Barat memiliki daerah yang sangat luas.
5. Membuat Gudang Peralatan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Barat yang sesuai standar yang telah ditetapkan.
6. Pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait sinkronisasi program dan kegiatan prioritas penanganan konflik sosial.
7. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia relawan, pokmas anggota yang berwenang dalam urusan penanganan konflik sosial, melalui kerjasama dengan instansi vertikal baik TNI/ Polri dan instansi vertikal lainnya.

2.3.1.6 Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 2.51

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran Strategis 6

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,21	71,9	100,97 %

Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH) yang dikembangkan sejak Tahun 2009, merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Namun sejak tahun 2021 komponen IKLH bertambah menjadi 4 yang terdiri dari: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kulit Air Laut (IKAL). Pengaturan perhitungan target IKLH menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Salah satu prioritas Nasional di dalam RPJMN 2020-2024 adalah upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, yang diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim





3. Menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon

Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 target IKLH Tahun 2022 sebesar 71,21. Pada Tahun 2022 IKLH Provinsi Kalbar terealisasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebesar 71,9 sehingga capaian kinerja sebesar 100,97 %.

B. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.52
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
Meningkatnya Kualitas Air dan Udara		3.754.428.032,00	3.606.032.584,00	96,05%		
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	631.861.600,00	616.846.222,00	97,62		
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	945.042.940,00	888.453.117,00	94,01		
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	154.690.100,00	142.276.557,00	91,98		
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	782.454.992,00	755.950.941,00	96,61		
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	332.664.300,00	317.942.307,00	95,57		
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	226.825.500,00	209.579.700,00	92,40		





SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
	Program Pengelolaan Persampahan	680.888.600,00	674.983.740,00	99,13		
					100.97	4.92

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95,06% dengan realisasi capaian kinerja IKLH sebesar 100,97%, maka diperoleh tingkat efisiensi sebesar 4,92%.

C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2022 yaitu:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, di lakukan dengan kegiatan penyusunan KLHS untuk revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat,
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup:
 - a. Status Mutu Air

Status mutu air realisasi adalah sebesar 55,52. Perhitungan tersebut di ambil dari hasil pemantauan yang dilakukan APBD Provinsi Kalimantan Barat di Tahun 2022 dilakukan pada titik pantau seperti yang terlihat pada table di bawah ini. Hasil Pemantauan dilakukan dua kali dalam setahun dikolektifkan oleh Kementerian LHK untuk diolah menjadi data resmi IKA sebagaimana disajikan dalam aplikasi IKLH milik KLHK. Data tersebut merupakan bahan yang mendukung perhitungan IKLH tahun 2022.

Tabel 2.53
Titik Pantau Kualitas Air Prov. Kalimantan Barat Tahun 2022

NO	NAMA LOKASI	ALAMAT	KOORDINAT	
			LATITUDE	LONGITUDE
1	Kabupaten Mempawah			
	MPWH1	Sejegi Makam Raden Adinata	0.381165	108.976097
	MPWH2	SMK Islam Insan Cendekia	0.331906	108.969451
	MPWH3	Jembatan Toho Dekat SMPN 6 Toho	0.455689	109.178576
	MPWH4	Terusan	0.3747333	108.955275
	MPWH5	Jl. Gusti M. Taufik, Pulau Pedalaman	0.3698374	108.9599932





NO	NAMA LOKASI	ALAMAT	KOORDINAT	
			LATITUDE	LONGITUDE
		Mempawah Hilir, Kab. Mempawah		
	MPWH6	Jl. Jend Ahmad Yani, Jembatan Antibar, Kab. Mempawah	0.3552402	108.96456
		Kuala Mempawah	0.321799	109.968208
2	Kabupaten Bengkayang			
	BGKY1	Sebalo	0.836842	109.49264
	BGKY2	Jl. Raya SANGGAU LEDO SMA N 2 Ledo Bengkayang	0.871804	109.51888
	BGKY3	Sebalo	0.795105	109.453141
	BGKY4	Sungai Sambas Besar Jembatan Sanggau Ledo	1.038877	109.615926
	BGKY5	Jl. Raya Sanggau Ledo Lumar	0.939368	109.539079
	BGKY6	Jl. Raya Sanggau Ledo Lumar	0.979038	109.956871
3	Kabupaten Sambas			
	SMS 1	Sungai Bantan	1.561031	109.383617
	SMS 2	Sungai Sambas Besar SD 33 Ds. Puringan	1.3836	109.228782
	SMS 3	Sungai Sambas Kecil	1.401473	109.36138
	SMS 4	Sungai Bantan	1.542707	109.358439
	SMS 5	Sungai Sambas Besar	1.438241	109.320356
	SMS 6	Sungai Bantan	1.47856	109.299754
	SMS 7	Sungai Bantan Penyebrangan Kubung	1.401527	109.240415
	SMS 8	Sungai Sambas Besar	1.391137	109.247431
	SMS 9	Sungai Bantan Sekura	1.468635	109.225793
	SMS 10	Sungai Sambas Besar	1.239274	109.138618
4	Kabupaten Ketapang			
	PW1	Sungai Pawan Pelabuhan Sukabangun	-1.791275	109.956871
	PW2	Sungai Pawan Negeri Baru	-1.842728	110.010235
	PW3	Sungai Pawan Jl. Gajah Mada Dalam	-1.839846	109.960358



NO	NAMA LOKASI	ALAMAT	KOORDINAT	
			LATITUDE	LONGITUDE
	PW4	PDAM Intake	-1.851787	109.984973
	PW5	Sungai Pawan Jl. Wolter Monginsidi	-1.852932	109.967952
	PW6	Sungai Pawan Kantor Imigrasi	-1.828822	110.003916
	PW7	Sungai Pawan Jembatan Pawan-Sukadana	-1.794785	109.98603

Sumber: Dinas LHK Prov Kalbar, 2022

b. Status Kualitas Udara

Status Kualitas udara Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dicapai pada angka 90,90 atau 99,89% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 91. Data Status kualitas Udara merupakan hasil pemantauan kualitas udara yang dilaksanakan oleh 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat pada 4 titik pemantauan, yaitu pada area permukiman, perkantoran, industri, dan transportasi. Adapun pemantauan itu sendiri menggunakan dana pembiayaan dari APBN KLHK tahun 2022. Data hasil pemantauan dikolektifkan oleh Kementerian LHK melalui aplikasi IKLH milik KLHK, untuk diolah menjadi data resmi IKU yang merupakan bahan yang mendukung perhitungan IKLH tahun 2022.

Tabel 2.54

Data Kualitas Udara Metode Passive Sampler
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Rataan Per Parameter	
		NO ₂ (Åµg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (Åµg/m ³) (Sulfur Dioksida)
1	Kabupaten Mempawah	14.23	7.30
2	Kabupaten Bengkayang	5.68	6.46
3	Kabupaten Sambas	5.78	6.45
4	Kabupaten Sanggau	7.41	5.53
5	Kabupaten Ketapang	8.50	8.33
6	Kabupaten Sintang	7.08	4.43
7	Kabupaten Kapuas Hulu	4.78	8.90
8	Kabupaten Landak	6.54	4.10
9	Kabupaten Sekadau	3.96	4.28
10	Kabupaten Melawi	4.89	9.63
11	Kabupaten Kayong Utara	5.32	7.57
12	Kabupaten Kubu Raya	5.23	7.50
13	Kota Pontianak	11.82	8.40
14	Kota Singkawang	13.20	6.67

Sumber: Dinas LHK Prov Kalbar, 2022



c. Status Kualitas Lahan

Status Kualitas Lahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dicapai pada angka 59,05 atau 95,03% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 62,14. Data Status kualitas Lahan merupakan hasil pendataan lahan yang dilakukan oleh 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Data kemudian dikolektifkan oleh Kementerian LHK melalui aplikasi IKLH milik Kementerian LHK, untuk diolah menjadi data resmi IKL yang merupakan bahan yang mendukung perhitungan IKLH tahun 2022.



Tabel 2.55
Data Indeks Kualitas Lahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

NO	KAB/KOTA	Luas Hutan (HA)	Luas Belukar Dalam Kawasan (HA)	Luas Belukar pada Fungsi Lindung (HA)	Kebun Raya (data LIPI) (HA)	RTH (HA)	Taman Kehati (HA)	Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya (HA)	RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) (HA)	DKK
1	Kabupaten Bengkayang	'78291.4652606677	'7784.51317149875	'1903.82264170726	'0	'3.4	'0	'1190	'591.7053855	'-0.0002233818
2	Kabupaten Kapuas Hulu	'2218785.45519186	'60337.8061562635	'9932.84779017121	'0	'0	'0	'0	'2202.060662	'-0.0004030987
3	Kabupaten Kayong Utara	'225048.590074741	'38881.1727634075	'4748.10711264309	'0	'0	'0	'674.79	'3289.805736	'-0.0081126352
4	Kabupaten Ketapang	'978572.84420446	'275316.507510444	'17311.0663604964	'99.71	'93	'0	'0	'2242.585147	'-0.0046992167
5	Kabupaten Kubu Raya	'338551.486776999	'44056.8156549469	'4280.17504457934	'0	'0	'0	'0	'1537.115823	'0.00733826220 687247
6	Kabupaten Landak	'92507.6616835752	'4466.19104369882	'512.022608625069	'0	'3.0553	'0	'900	'3878.930111	'-0.0097658454
7	Kabupaten Melawi	'348913.949026256	'22283.6652029534	'1006.87327202465	'0	'0	'0	'0	'4810.096542	'-0.0001581707
8	Kabupaten Mempawah	'41766.8230216019	'8324.78077942199	'1002.74499015747	'0	'41.68853	'0	'0	'339.3407384	'-0.0091967002
9	Kabupaten Sambas	'101559.82003572	'18446.6739525897	'1602.17277108287	'0	'9.9677	'0	'1251.65	'1218.496393	'-0.0076114199
10	Kabupaten Sanggau	'136371.148386247	'18145.585298856	'1441.36630125435	'328	'0	'0	'0	'1159.934379	'-0.006309249
11	Kabupaten Sekadau	'40718.6648541108	'3379.74796468495	'288.476478986851	'0	'15	'0	'0	'436.705113	'-0.0000834452
12	Kabupaten Sintang	'1000614.85610893	'39504.087308835	'2354.02166196958	'0	'5.695407	'0	'195.43	'2350.787224	'-0.001612436
13	Kota Pontianak	'1075.13672277382	'29.66025077938	'0	'0	'0	'0	'0	'5.021015004	'0.0098342149
14	Kota Singkawang	'4339.46736429807	'409.295489028718	'830.204823586414	'0	'3.452748	'0	'0	'33.88754553	'-0.0069181854

Sumber: Dinas LHK Prov Kalbar, 2022

**d. Status Kualitas Air Laut**

Status Kualitas Air Laut Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dicapai pada angka 63,30 atau 103,09% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 61,4. Data Status kualitas air laut merupakan hasil pemantauan kualitas air laut yang dilakukan oleh DLHK Prov. Kalbar dan KLHK. Data kemudian dikolektifkan oleh Kementerian LHK melalui aplikasi IKLH milik Kementerian LHK, untuk diolah menjadi data resmi IKAL yang merupakan bahan yang mendukung perhitungan IKLH tahun 2022.

Tabel 2.56

Titik Pantau Kualitas Air Laut Prov. Kalimantan Barat Tahun 2022

NO	NAMA LOKASI	ALAMAT	KAB/KOTA	KOORDINAT	
				LATITUDE	LONGITUDE
1	Kalbar01	Muara Sungai Duri	Kabupaten Bengkayang	'0.56419	'108.92286
2	Kalbar02	Depan Pelabuhan Internasional	Kabupaten Mempawah	'0.5127	'108.899
3	Kalbar03	Depan Mangrove Mempawah	Kabupaten Mempawah	'0.46994	'108.902
4	Kalbar04	Muara Mempawah 1	Kabupaten Mempawah	'0.30147	'108.93105
5	Kalbar05	Muara Mempawah 2	Kabupaten Mempawah	'0.29344	'108.94538
6	Kalbar06	Depan Muara Bakau	Kabupaten Mempawah	'0.27255	'108.97216
7	Kalbar07	Depan Muara Pinyuh	Kabupaten Mempawah	'0.25869	'109.02038
8	Kalbar08	Depan Muara Segendong	Kabupaten Mempawah	'0.2512	'109.03902
9	Kalbar09	Depan Muara Peniti 1	Kabupaten Mempawah	'0.19372	'109.11677
10	Kalbar10	Depan Muara Peniti 2	Kabupaten Mempawah	'0.16447	'109.12
11	Kalbar11	Pantai Gosong 1	Kabupaten Bengkayang	'0.6915	'108.863
12	Kalbar12	Pantai Gosong 2	Kabupaten Bengkayang	'0.71753	'108.85151
13	Kalbar13	Pantai Gratis	Kabupaten Bengkayang	'0.7634	'108.8548
14	Kalbar14	PLTU 1	Kabupaten Bengkayang	'0.828	'108.832
15	Kalbar15	PLTU 2	Kabupaten Bengkayang	'0.83359	'108.83905
16	Kalbar16	PLTU 3	Kabupaten Bengkayang	'0.8407	'108.8466
17	Kalbar17	Pasir Panjang	Kabupaten Bengkayang	'0.84405	'108.85417
18	Kalbar18	Jungkat 1 (Mempawah)	Kabupaten Mempawah	'0.1549	'109.1141
19	Kalbar19	Jungkat 2 (Mempawah)	Kabupaten Mempawah	'0.1404	'109.1091
20	Kalbar20	Jungkat 3 (Mempawah)	Kabupaten Mempawah	'0.1216	'109.1071
21	Kalbar21	Muara Sungai Kapuas 1	Kabupaten Kubu Raya	'-0.0094	'109.0981



NO	NAMA LOKASI	ALAMAT	KAB/KOTA	KOORDINAT	
				LATITUDE	LONGITUDE
22	Kalbar22	Muara Sungai Kapuas 2	Kabupaten Kubu Raya	'-0.0547	'109.0886
23	Kalbar23	Muara Sungai Kapuas 3	Kabupaten Kubu Raya	'-0.1336	'109.0621
24	Kalbar24	Muara Sungai Kapuas 4	Kabupaten Kubu Raya	'-0.163	'109.03
25	Kalbar25	Titik Kontrol Depan Sungai Kapuas	Kabupaten Kubu Raya	'-0.1538	'109.0255
26	Muara Sungai Sambas 1	Muara Sungai Sambas 1	Kabupaten Sambas	'1.186906	'108.928096
27	Muara Sungai Sambas 2	Muara Sungai Sambas 2	Kabupaten Sambas	'1.204853	'108.944691
28	Muara Sungai Pawan 1	Muara Sungai Pawan 1	Kabupaten Ketapang	'-1.756368	'109.930446
29	Muara Sungai Pawan 2	Muara Sungai Pawan 2	Kabupaten Ketapang	'-1.762431	'109.908981
30	Muara Sungai Pawan 3	Muara Sungai Pawan 3	Kabupaten Ketapang	'-1.816344	'109.895462

Sumber: Dinas LHK Prov Kalbar, 2022

3. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)

a. Persentase Limbah B3 yang dikelola dari penghasil limbah B3 yang bekerjasama dengan pengumpul limbah B3 skala provinsi.

Persentase limbah B3 yang terkelola dari penghasil limbah B3 yang bekerjasama dengan pengumpul limbah B3 realisasi 100% didapat dari Jumlah B3 yang terkelola di Tahun 2022 sesuai aturan oleh pengumpul limbah B3 skala provinsi (770,0994 Ton) dibagi dengan jumlah limbah B3 yang diserahkan pengumpul limbah B3 skala Provinsi (770,0994 Ton).

1) Neraca Limbah B3 PT. Primanru Jaya Cabang Pontianak Tahun 2022

Tabel 2.57

Tabel Data Dukung Limbah B3 Yang Terkelola Sesuai Aturan Oleh Pengumpul Limbah B3 Skala Provinsi Di Tahun 2022 PT. Primanru Jaya Cabang Pontianak

No	Limbah B3	Jenis/ Kode LB3	Total Limbah Masuk TA 2022 (Ton)
1	Majun Terkontaminasi	B110d	5,9443
2	Filter Bekas	B110d	22,7192
3	Accu Bekas	A102d	32,5993
4	Kemasan Terkontaminasi	B104d	33,2744
5	Pelumas Bekas	B105d	1,2775
6	Bahan Kimia Kadaluarsa	A338-1	5,1007
7	Lampu TL	B107d	1,0820
8	Sludge IPAL	B108d	0,2100
9	Sludge IPAL	B304-2, B304-3	2,2400
10	Sludge IPAL	B333-3	0,2927



No	Limbah B3	Jenis/ Kode LB3	Total Limbah Masuk TA 2022 (Ton)
11	Limbah Terkontaminasi	A108d	2,5288
12	Toner Bekas	B353-1	0,0290
13	Pelarut Bekas	A107d	1,6868
14	Limbah Laboratorium	A106d	15,7780
15	Kemasan Bekas Tinta	B321-4	0,2364
16	Filter Bekas	B109d	8,5773
17	Oli Bekas	B105d	447,4608
18	Minyak Kotor	A332-1	56,4652
19	Sludge Paint	B323-2	1,0810
20	Dust Grinding	B323-1	1,0120
21	Tinta Cadtrige	B353-1	0,0040
Total			639,5994

Sumber: Dinas LHK Prov Kalbar, 2022

2) Neraca Limbah B3 PT. Putra Limbah Khatulistiwa Tahun 2022

Tabel 2.58

Tabel Data Dukung Limbah B3 Yang Terkelola Sesuai Aturan Oleh Pengumpul Limbah B3 Skala Provinsi Di Tahun 2022 PT. Putra Limbah Khatulistiwa

No	Limbah B3	Jenis/ Kode LB3	Total Limbah Masuk TA 2021 (Ton)
1	Oli Bekas	B105d	130,5
Total			130,5

Sumber: Dinas LHK Prov Kalbar, 2022

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - a. Persentase investasi kewenangan provinsi yang memiliki dokumen lingkungan (%)

Persentase investasi kewenangan provinsi yang memiliki dokumen lingkungan mencapai realisasi sebesar 80,68%. Didapat dari banyaknya investasi di Tahun 2022 yang memilikidokumen (689) dibagi investasi kewenangan provinsi (847).
5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - a. Persentase peningkatan penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi(%)

Capaian Indikator Persentase peningkatan penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi di Tahun 2022 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, karena pembanding nilai penghargaan tahun sebelumnya (2021) lebih besar dari pada tahun 2022. Pada tahun 2021 terdapat 13 penghargaan



lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat, dalam bentuk jenis penghargaan Adiwiyata maupun Kalpataru, sedangkan pada tahun 2022 penghargaan yang diberikan hanya sebanyak 12 penghargaan yang terdiri dari 4 penghargaan Adiwiyata Nasional, 7 Penghargaan Adiwiyata Provinsi dan 1 penghargaan Kalpataru. Adapun data penghargaan lingkungan hidup yang ada di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut.

No	Sekolah	Kecamatan	Kabupaten/Kota
1	2	3	4
Adiwiyata Tingkat Nasional			
1	Sds Bumitama Metro Kendawangan		Kabupaten Ketapang
2	Sdn 9 Segedong		Kabupaten Mempawah
3	Smpn 03 Pontianak Selatan		Kota Pontianak
4	Sdn 06 Pontianak Timur		Kota Pontianak
Adiwiyata Tingkat Provinsi			
1	Smpn 1 Mempawah Hilir	Mempawah Hilir	Mempawah
2	Sman 7 Pontianak	Pontianak Selatan	Pontianak
3	Sds Bawamai Pontianak	Pontianak Kota	Pontianak
4	Sdit Almumtaz Pontianak	Pontianak Kota	Pontianak
5	Sdn Tubang Raeng	Jelimpo	Landak
6	Smp Swasta Makedonia	Ngabang	Landak
7	Sdn 03 Benua Kayong	Benua Kayong	Ketapang
Penghargaan Kalpataru			
1	Rudi Hartono	Dusun Sejahtera, Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap	Kubu Raya

Sumber: Dinas LHK Prov Kalbar, 2022

6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup kewenangan provinsi yang ditangani. Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup kewenangan provinsi yang ditangani realisasi sudah mencapai 100%. Dimana untuk setiap kasus dan pengaduan lingkungan hidup di Tahun 2022 semuanya tertangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.





Tabel 2.59

Rekapitulasi Data Pengaduan Masyarakat
Tentang Lingkungan Hidup Tahun 2022

Tahun	No	Kasus Lingkungan yang Masuk	Kab/Kota	Kasus sudah ditangani	Kasus yang belum ditangani
2022	1	PT. Energi Unggul Persada	Mempawah	√	-
	2	PT. Persada Pratama Cemerlang	Sanggau	√	-
	3	PT. Mandara Prima Nusantara	Sanggau	√	-
	4	PT. Satria Multi Sukses	Landak	√	-
	5	PT. Ledo Lestari	Bengkayang	√	-
	6	PT. Harapan Kita Utama	Sintang	√	-
	7	PT. Utan Sibau Persada	Sintang	√	-
	8	PT. Wahana Plantation and Product	Sintang	√	-
	9	PT. BUmi Khatylistiwa Bauksit	Sanggau	√	-
	10	PT. Permata Hijau Sarana	Sekadau	√	-

Sumber: Dinas LHK Prov Kalbar, 2022

7. Program Pengelolaan Persampahan

a. Prosentase penanganan sampah pada kondisi khusus

Persentase Pengelolaan dan penanganan sampah yang dilakukan oleh kabupaten/kota dicapai pada angka 78,57%, karena hanya 11 kabupaten/kota dari 14 seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan penangan sampah dengan baik, salah satunya dengan membentuk Bank Sampah.

Tabel 2.60

Bank Sampah di Setiap Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat

NO	Kab/Kota	Jumlah Bank Sampah	Nama Bank sampah	Keterangan
1	Kota Pontianak	23	Bank Sampah Borneo, Bank Sampah Kampung Caping, Bank Sampah Rosella Purnama, Bank Sampah Dansen Sejahtera, Bank Sampah Beting Permai, Bank Sampah Slamet Sejahtera, Bank Sampah Rumput Hias, Bank Sampah Palem Asri, Bank Sampah Laily Raya, Bank Sampah DLH, Bank Sampah Melati, Bank	Data DLH Kota Pontianak Tahun 2022



NO	Kab/Kota	Jumlah Bank Sampah	Nama Bank sampah	Keterangan
			Sampah Rosella Siantan, Bank Sampah Sejahtera Asri, Bank Sampah Arwana Khatulistiwa, Bank Sampah Mahasiswa UNTAN, Bank Sampah Maju Bersama, Bank Sampah KLHK, Bank Sampah Pokok Telok, Bank Sampah Ananda, Bank Sampah Parit Pengkong, Bank Sampah Nilam 7, Bank Sampah Paris 2, Bank Sampah Milenial	
2	Kubu Raya	3	Bank Sampah Maju Bahagia, Bank Sampah Induk Parit Baru, ATM Bank Sampah Kuala Dua	Data DLH Kubu Raya Tahun 2021
3	Mempawah	1	Bank Sampah Aisyiyah Mempawah	Data DPLH Kab. Mempawah Tahun 2022
4	Singkawang	14	Bank Sampah Besaprah, Bank Sampah Muslimah, Bank Sampah Serumpun Asoka, Bank sampah Delima, Bank sampah Griya Makmur, Bank Sampah Serumpun Sejati, Bank Sampah Teluk Mak Jantu, Bank Sampah Periok Kampung Batu, Bank Sampah SMPN 4 Singkawang, Bank Sampah Fantasi, Bank Sampah Maju Jaya, Bank Sampah Limpah Ruah, Bank Sampah Nyarungkop, Bank Sampah SMANJU	Data DLH Kota Singkawang Tahun 2022
5	Sambas	5	Bank Sampah Tengguli Permai (BTSP), Bank Sampah Rezeki, Bank Sampah Bela Terigas, Bank Sampah Aisyiyah, Bank Sampah Harum	Data DPRKPLH Kab. Sambas Tahun 2022
6	Bengkayang	3	Bank Sampah Kelurahan Bumi Emas, Bank Sampah Desa Setia Jaya, Bank Sampah Sungai Duri (Bank Sampah tersebut sudah terbentuk namun belum operasional)	Data DPRPLH Kab. Bengkayang Tahun 2022
7	Landak			Belum terbentuk Bank Sampah
8	Sanggau	1	Bank Sampah Kampung Lestari	Data DLH Kab. Sanggau Tahun 2022
9	Sekadau	1	Bank Sampah Mekar Lestari	Data DLH Kab. Sekadau Tahun 2022
10	Sintang	4	Bank Sampah Berkah Bersemi, Bank sampah Rezeki, Bank Sampah Sehat Puskesmas Dara Juanti, Bank Sampah Duta Gemilang	Data DLH Kab. Sintang Tahun 2022
11	Melawi	1	Bank Sampah Eksperindo	Data DLH Kab. Melawi Tahun 2022
12	Kapuas Hulu	-	-	Belum terbentuk bank sampah
13	Kayong Utara	-	-	Belum terbentuk bank sampah



NO	Kab/Kota	Jumlah Bank Sampah	Nama Bank sampah	Keterangan
14	Ketapang	6	Bank Sampah Kedaung Mandiri, Bank Sampah Hijau Mandiri, Bank sampah Cinta, Bank sampah Usaha Bersama, Bank Sampah Berkah, Bank Sampah Mandiri Lestari	Data DPRKPLH Kab. Ketapang Tahun 2022

Sumber: Dinas LHK Prov Kalbar, 2022

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2018-2022 dan Target Akhir Jangka Menengah 2018-2023

Tabel 2.61

Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2022 dan Target RPJMD Sasaran Strategis 6

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					TARGET 2023	Tingkat Kemajuan
			2018	2019	2020	2021	2022		
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,09	65,92	70,07	72,90	71,9	71,43	

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 sebesar 65,92. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2018 yaitu 73,09 atau menurun sebesar 7,17. Penurunan ini di pengaruhi oleh penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU). Sedangkan untuk tahun 2020, dicapai angka 70,07 terjadi peningkatan dari tahun 2019 sebesar 4,15. Untuk Tahun 2021 IKLH Provinsi Kalimantan Barat dicapai 72,90 atau naik sebesar 2,83 dari capaian IKLH tahun 2020. Sedangkan tahun 2022 capaian IKLH mengalami penurunan sebesar 1,0 yaitu menjadi 71,9.

Perbandingan realisasi yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini yaitu IKLH Tahun 2018-2022.

Tabel 2.62

Perubahan IKLH Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKAL	IKLH
2018	69,38	88,68	64,19		73,09
2019	50,00	90,07	59,76	67,97	65,92
2020	51,67	88,88	54,22	73,25	70,07
2021	54,35	90,71	59,35	77,83	72,90
2022	55,52	90,9	59,09	63,3	71,9

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Kalbar.

Naik turunnya angka IKLH Kalimantan Barat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.62 IKLH Provinsi Kalimantan Barat selama 9 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2022 berfluktuatif seperti pada tabel berikut ini:



Tabel 2.63

IKLH Kalimantan Barat dari 2014 – 2022

Tahun	IKLH
2014	68.31
2015	75.88
2016	72.24
2017	74.17
2018	73.09
2019	65,92
2020	70,07
2021	72.90
2022	71,90

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Kalbar.

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2014 nilai IKLH adalah 68,31, pada tahun 2015 meningkat menjadi 75,88 dan pada tahun 2016 menurun menjadi 72,24, kemudian tahun 2017 meningkat menjadi 74,17 lalu ditahun 2018 turun menjadi 73,09. Jadi belum ada tren yang stabil yaitu meningkat, tetap atau menurun. Tapi walaupun tren belum stabil perubahan nilai tidak terlalu jauh. Yaitu pada tahun 2014 angka IKLH 68,31 dan masih dalam kategori sedang maka pada pada 4 tahun berikutnya yaitu tahun 2015 sampai dengan 2018 angka IKLH mengalami peningkatan dan berkisar pada angka 72 sampai 75 dan dan angka tersebut berada pada kategori atau predikat cukup baik. Pada tahun 2019 angka IKLH menurun sebanyak 7,17 namun beranjak naik kembali pada tahun 2020 pada angka 70,07. Sedangkan pada Tahun 2021 angka IKLH sebesar 72,90. Namun capaian IKLH tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 71,9.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan yang tidak mencapai target Pernyataan Kinerja:

1. Permasalahan yang signifikan menyebabkan menurunnya capaian indeks kualitas lahan (IKL) adalah terdapat 6 kabupaten/kota yang tidak menginput data RTH pada aplikasi IKLH, hanya terdapat 2 kabupaten yang memiliki kebun raya, sedangkan tidak ada kabupaten/kota yang memiliki taman kehati.
2. Menurunnya capaian Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) antara lain disebabkan meningkatnya hasil pada parameter ortophospat pada semua titik. Hal ini disebabkan adanya perbedaan analisa pada laboratorium.



3. Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) masih berada di bawah target, walaupun sebenarnya capaian tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Hal ini tampak bahwa kualitas udara di Kalimantan Barat sudah semakin meningkat, namun titik pemantauan udara masih belum mewakili kondisi keseluruhan area di Kalimantan Barat, karena pemantauan udara hanya bersumber dari pendanaan APBN KLHK.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan kepada masyarakat perlu ditingkatkan, melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan, khususnya kepada pemilik usaha.
2. Penyiapan Peraturan Daerah yang mengatur kelas mutu air sungai yang menjadi kewenangan provinsi.
3. Perlunya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam meningkatkan kualitas udara khususnya dalam upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
4. Perlu adanya sinergisitas dengan kabupaten/kota terkait pengelolaan DAS dan lingkungan hidup secara terpadu.
5. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kepada pelaku usaha khususnya yang berada di daerah pesisir.
6. Meningkatkan kemampuan SDM yang bertugas melakukan pemantauan lingkungan hidup dan pengawasan terhadap ketaatan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

2.3.1.7 Kinerja Lainnya

Sebagai apresiasi atas prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menerima beberapa penghargaan baik tingkat nasional dan internasional dari Pemerintah maupun dari Organisasi/LSM tingkat Nasional, yaitu:

1. Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2022 Kategori Sangat Baik Dari Kementerian Pendayagunaan Dan Reformasi Birokrasi RI.
2. Penghargaan Public Leader 2022 Kategori Infrastruktur Dari Berita Satu Media Holdings.
3. Penghargaan Top Pembina Bumd 2022 Dari Topbusiness.





4. Penghargaan Nirwasita Tantra Award 2021 Atas Partisipasi Dalam Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD).
5. Penghargaan UPP Terbaik Dalam Program Pemberantasan Pungutan Liar Dari Masyarakat Anti Pungutan Liar Indonesia Tahun 2022.
6. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Dari BPK-RI.
7. Penghargaan “Kategori A” Implementasi Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Tahun 2021 Dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
8. Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2021 Dari Kemenpan RB.
9. Penghargaan Kategori PMT/TTIC Dengan Penjualan Beras Segar Tertinggi Best PMT Award 2021 Badan Ketahanan Pangan Kementan RI.
10. Penghargaan Kategori PMT/TTIC Dengan Omzet Tertinggi Best PMT Award 2021 Badan Ketahanan Pangan Kementan RI.
11. Penghargaan Peringkat II Nasional Persentaser Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Se-Indonesia Tahun 2022 Dari Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri.
12. Penghargaan “Kategori A” Implementasi Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Tahun 2022 Dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
13. Penghargaan Komitmen Dan Konsistensi Pengelolaan Tata Kelola Manajemen ASN Kanreg V BKN Award 2022.
14. Penghargaan Atas Kepedulian Terhadap Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2022.
15. Penghargaan Daerah Perlindungan Konsumen Tahun 2022 Dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI).
16. Penghargaan 5 Besar Nasional Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia Tahun 2022 Dari Dewan Pers Indonesia.
17. Penghargaan BKN Award 2022 Kategori Implementasi Manajemen ASN Terbaik.
18. Penghargaan BKN Award 2022 Kategori Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN.



19. Penghargaan BKN Award 2022 Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja Golongan Pemerintah Tipe B.
20. Penghargaan BKN Award 2022 Kategori Perencanaan Kebutuhan Dan Mutasi Kepegawaian Golongan Pemerintah Tipe B.
21. Penghargaan Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dengan Predikat Sangat Baik Dari Komisi Aparatur Sipil Negara.
22. Penghargaan Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Dengan Kategori Baik Dari Komisi Aparatur Sipil Negara.
23. Penghargaan Dari Consortium Of Universities For Global Health Atas Komitmen Terhadap Kesehatan Ibu Dan Anak.
24. Penghargaan Wilayah Terbaik Dan Nomor 1 Di Indonesia Dalam Penanganan Covid-19 Dengan Tingkat Kesembuhan Tinggi Dari Kementerian Kesehatan RI.
25. Penghargaan Indeks Literasi Digital 2021 Kategori Provinsi Literasi Digital Terbaik Dari Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI.
26. Penghargaan Atas Keberhasilan Menyusun Dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2021 Dengan Opini WTP Dari BPK RI.
27. Penghargaan Atas Apresiasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Diberikan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Yang Telah Berperan Aktif Dalam Memacu Pertumbuhan Kreativitas Dan Inovasi Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.
28. Penghargaan Atas Prestasi Dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 Dengan Predikat Nilai BB Dari Kemenpan RB.
29. Penghargaan Atas Inovasi "Bang Elis Hadir, Kampung Kami Jadi Terang (Pembangkit Energi Listrik Tenaga Matahari Di Daerah Pedalaman Kalbar) Sebagai 5 Pemenang Outstanding Achievement Of Public Service Innovation 2022 Dari Kemenpan RB.
30. Penghargaan Atas Anugerah Meritokrasi Tahun 2022 Instansi Pemerintah Provinsi Kategori Sangat Baik Dari Komisi Aparatur Sipil Negara RI.
31. Penghargaan Dari Ombudsman RI Atas Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 Dengan Perolehan Nilai 84,19 (Zona Hijau) Dan Meraih Opini "Kualitas Tinggi".



32. Penghargaan Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Sebagai Badan Publik Informatif Pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2022.
33. Penghargaan Monitoring Centre Prevention (MCP) Kepegawaian Dari KPK Dengan Nilai 99,72%.
34. Penghargaan Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat RSUD Dokter Soedarso Atas Inovasi Rumah Sakitku, Rumah Keduaku Bersama Sidoremi Sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 Dari Kemenpan RB.
35. Penghargaan Sebagai Tokoh Pemberdayaan 2021 Dari Rumah Zakat.
36. Penghargaan Atas Penerapan Kebijakan Dan Dukungan Pada Upaya Pengendalian Resistensi Antimikroba Dari Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
37. Penghargaan Sebagai Nomine Atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2022 Dari Kementerian Investasi/BKPM.
38. Penghargaan Atas Komitmen Dan Kerja Keras Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Desa Sehingga Provinsi Kalimantan Barat Mencapai 0% Desa Sangat Tertinggal Dari Kemendes PDTT.
39. Penghargaan Pembangunan Daerah Sebagai Nominasi Dengan Kategori Perencanaan Dan Pencapaian Daerah Tingkat Provinsi Dalam Penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah 2022 Oleh Kementerian PPN/Bappenas.
40. Penghargaan Atas Inovasi “Bang Elis Hadir, Kampung Kami Jadi Terang” (Pembangkit Energi Listrik Tenaga Matahari Di Daerah Pedalaman Kalbar) Sebagai 5 Pemenang Outstanding Achievement Of Public Service Innovation 2022 Dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
41. Pembangunan PLTS Komunal/Terpusat di Kalbar tahun 2013 s.d. 2021 berjumlah 59 unit/lokasi (APBD 16 unit & APBN 43 unit) di daerah pedalaman pada 8 Kabupaten se-Kalbar (4 kabupaten diantaranya adalah perbatasan langsung dengan Malaysia), total kapasitas pembangkit 1.742 kWp, total anggaran Rp 230,66 M (APBD Rp 53,8 M & APBN Rp 176,86 M), yang melistriki: 6.099 rumah warga, 816 Penerangan Jalan Umum, 180 Fasum (rumah ibadah, sekolah, ruang serbaguna, dll). Kapasitas per PLTS rata-rata 24-27 kWp dengan alokasi besaran energi yang diterima oleh setiap rumah



warga yaitu 500-600 WH. Melalui inovasi ini, selain sebagai pemenuhan kebutuhan dasar listrik di daerah pedalaman yang minim infrastruktur serta belum tersedia jaringan listrik PLN, bertujuan juga untuk “menghadirkan negara” hingga daerah pedalaman dan pinggiran serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, sehingga tidak akan ada lagi anekdot bahwa “sejak Indonesia merdeka kampung kami belum pernah terjamah listrik.

42. Penghargaan Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat RSUD Dokter Soedarso Atas Inovasi “Rumah Sakitku, Rumah Keduaku Bersama Sidoremi” Sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 Dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Inovasi ini dikembangkan dengan aplikasi SIDOREMI (Sistem Informasi Donor Darah Talasemi) untuk mengatasi kesulitan mencari pendonor darah bagi penyandang Talasemi. Aplikasi si Doremi bisa di akses oleh masyarakat dan komunitas pendonor darah untuk berinteraksi dg penyandang Talasemi melalui aplikasi tersebut. Sehingga ketersediaan darah terjamin, Aplikasi ini di gagas oleh komunitas pendonor darah dan POPTI difasilitasi oleh RSUD Dr SOEDARSO.

2.3.1.8 Realisasi Anggaran

Nilai efisiensi anggaran Tahun 2017-2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat:

Tabel 2.64
Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

TAHUN	NILAI EFISIENSI (Pagu Belanja Langsung - Realisasi Belanja Langsung)	TOTAL APBD NON GAJI (Pagu Belanja Langsung)	PERSENTASE (Nilai Efisiensi/ Pagu Belanja Langsung x 100%)
	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4
2017	479.341.253.745	2.635.407.775.713	18,19
2018	240.008.039.435	2.214.254.825.989	10,84
2019	393.423.322.759,16	2.831.262.145.878,51	13,89
2020	141.792.048.698,50	2.342.039.119.250,85	6,05
	Total belanja – realisasi belanja	(Total Belanja- belanja pegawai)	
2021	389.874.792.408,12	5.237.908.411.454	7,44
2022	267.788.730.524,04	4.393.679.418.169	6.09

Sumber: BKAD Prov Kalbar. 2022





Guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan anggaran belanja dalam APBD Tahun 2022 sebesar **Rp. 5.994.652.629.595,-** dengan realisasi sebesar **Rp 5.726.863.899.070,96.**

BAB III



CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN

Kalbar Maju Lingkungan Hidup Lestari
dalam Keberagaman



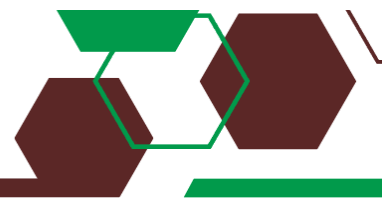
BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No.08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No.08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
8. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor:



- 0442/M.PPN/2010, Nomor SE-696/MK/2010, dan Nomor 120/4693/SJ tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian / Lembaga di Daerah Serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2022 Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Kepada 7 (Tujuh) Gubernur Untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2022.
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pelimpahan kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2022.
 12. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat No.105 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PPKH Provinsi Kalimantan Barat;
 13. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 1436/BPKPD/2019 Tahun 2019 tentang Penunjukkan Pejabat/Pegawai Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Atas Beban APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat Tanggal 27 Desember 2019.

3.2 Gambaran Umum Tugas Pembantuan di Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2022 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan yang terdiri dari beberapa Satker/OPD Provinsi Kalimantan Barat yang menerima Dana Tugas Pembantuan dengan pagu anggaran sebesar **Rp 115.657.670.000,-** Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi Kalimantan Barat hanya diterima dari Pemerintah Pusat saja sedangkan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten/Kota belum ada dilakukan di Tahun 2022. Adapun Kementerian/Lembaga yang memberikan penugasan antara lain:



1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Pada Tahun 2022 Tugas Pembantuan Restorasi Gambut Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat mengelola DIPA dengan pagu dana sebesar Rp 11.524.005.000,-.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat kucuran dana pusat ini. Dikelola oleh Bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Pagu di Tahun 2022 Rp 195.528.621.000. untuk Bidang Sumber Daya dan Rp 12.268.599.000,- untuk bidang Bina Marga.
3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2022 mengelola dana TP Nomor: SP DIPA-018.03.4.139125/2022 untuk anggaran dari Dirjen Tanaman Pangan sebesar Rp 13.658.017.000,-. Nomor: SP DIPA-018.04.4.139126/2022 untuk anggaran dari Dirjen Hortikultura sebesar Rp 4.700.512.000,- dan Nomor: SP DIPA-018.08.4.139134/2022 untuk anggaran dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp 34.324.120.000.
4. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat. Dalam rangka mendukung Program Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 telah dialokasikan Dana Tugas Pembantuan yang berasal dari Unit Eselon I Kementerian Pertanian yaitu Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp 2.623.651.000,00. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp 14.577.865.000,00. Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp 625.500.000,00.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Pada Tahun 2022 PNBP pasca produksi merupakan sebuah terobosan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jendral Perikanan Tangkap (DJPT) dalam upaya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, khususnya di sektor perikanan tangkap. PNBP pasca produksi diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi pelaku usaha dan negara, karena tarif yang nantinya akan dibayarkan sesuai dengan hasil produksi tangkap yang didaratkan di pelabuhan perikanan oleh pelaku usaha. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan PNBP ini telah selesai dilakukan pada bulan September sesuai dengan yang tertera pada kontrak pengadaan dan



sudah di distribusikan kepada Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan (UPT PP) Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 378.825.000,-.

6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Kalbar. Pada tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat mendapat Alokasi Anggaran Tugas Pembantuan sebesar Rp 1.447.955.000,- dengan Realisasi Rp 1.197.048.100,- (82,67%) sampai dengan 30 November 2022.

3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Daerah Provinsi

1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat khususnya disektor Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi:

a. Tanaman Pangan

Pada sektor tanaman pangan terdapat program kegiatan yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu "Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas". Pada program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, meliputi:

1) Pengembangan budidaya padi lahan kering

Pengembangan budidaya padi lahan kering pada tahun 2022 difokuskan di 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkayang seluas 250 Ha, Kabupaten Landak seluas 250 Ha, Kabupaten Mempawah 250 Ha, Kabupaten Kapuas Hulu seluas 250 Ha. Pada kegiatan ini bantuan yang diberikan berupa benih padi sebanyak 40 Kg/Ha, pupuk NPK non subsidi sebanyak 100 Kg/Ha dan pestisida 1 Pkt/Ha.

2) Pengembangan kawasan padi kaya gizi (Biofortifikasi)

Pengembangan kawasan padi kaya gizi (Biofortifikasi) dialokasikan di 6 Kabupaten, yang meliputi Kabupaten Bengkayang seluas 1.000 Ha, Kabupaten Landak 25 Ha, Kabupaten Mempawah 500 Ha Kabupaten Ketapang 500 Ha, Kabupaten Kayong Utara 175 Ha, dan Kabupaten Kubu Raya 100 Ha. Paket Bantuan yang diberikan untuk pengembangan kawasan padi kaya gizi berupa bantuan benih padi 25 Kg/Ha, pupuk NPK non subsidi 100 Kg/Ha, pupuk hayati 1 Pkt/Ha.



3) Bantuan Benih Padi Inbrida

Bantuan benih padi Inbrida tahun 2022 sebanyak 10.000 Ha, terdiri dari 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Landak 3.000 Ha, Mempawah 2.000 Ha, Ketapang 3.000 Ha, dan Kabupaten Sekadau 2.000 Ha, yang mana masing-masing Kabupaten memperoleh benih sebanyak 25 Kg/Ha.

Selain Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, di sektor tanaman pangan juga terdapat Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, yang mana pada program ini berupa bantuan alat pasca panen, sarana dan pemasaran hasil tanaman pangan yang terdiri dari uji mutu beras dan jagung, power thresher 30 Unit, Corn Sheller 25 Unit, Grading/Packing 4 Unit, Power Thresher multiguna 20 unit, Bangunan UPH 3 Paket, dan Sarana UPH Tanaman Pangan lainnya 3 Unit.

b. Hortikultura

Pada sektor Hortikultura terdapat beberapa program yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, meliputi:

- 1) Kegiatan fasilitasi sarana pascapanen hortikultura yang meliputi Kabupaten Sambas 1 Unit, Kabupaten Mempawah 1 Unit.
- 2) Kegiatan fasilitasi sarana pengolahan hortikultura, terdiri dari 1 Unit di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Mempawah 1 Unit.
- 3) Kegiatan fasilitasi prasarana pascapanen hortikultura berupa bangsal pasca panen sebanya 2 Unit, terdiri dari Kabupaten Sambas 1 Unit dan Kabupaten Mempawah 1 Unit.
- 4) Kegiatan fasilitasi prasarana pengolahan hortikultura, berupa bangunan pengering tenaga yang dialokasikan untuk Kabupaten Mempawah 1 Unit.

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, meliputi beberapa kegiatan, yaitu peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat dan kegiatan peningkatan produksi buah dan florikultura. Pada kegiatan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat berupa fasilitasi bantuan sarana dan prasarana produksi untuk pengembangan



kawasan sayuran, bawang merah, cabe dan tanaman jahe. Adapun alokasi bantuan tersebut, yaitu:

- 1) Fasilitasi bantuan prasarana produksi untuk kawasan sayuran, berupa bantuan prasarana hidroponik di Kota Pontianak 1 Unit.
- 2) Fasilitasi bantuan sarana produksi bawang merah dialokasikan ke Kabupaten Sambas 10 Ha, Kabupaten Kapuas Hulu 20 Ha dan Kota Singkawang 10 Ha.
- 3) Fasilitasi bantuan sarana produksi tanaman cabe di alokasikan di Kabupaten Kapuas Hulu 10 Ha, Ketapang 10 Ha, Bengkayang 10 Ha, Landak 10 Ha, Kayong Utara 10 Ha, Kubu Raya 10 Ha dan Kota Singkawang 10 Ha.
- 4) Fasilitasi bantuan sarana produksi tanaman obat berupa lidah buaya seluas 25 Ha di Kota Pontianak.
- 5) Fasilitasi bantuan sarana produksi tanaman jahe dialokasikan ke Kabupaten Mempawah 10 Ha dan Kubu Raya 10 Ha.

Kegiatan peningkatan produksi buah dan florikultura ,meliputi pengembangan kawasan jeruk, durian, kelengkeng dan alpukat. Adapun alokasi bantuan tersebut, yaitu:

- 1) Fasilitasi pengembangan kawasan jeruk seluas 50 Ha yang dialokasikan ke Kabupaten Sambas.
- 2) Fasilitasi pengembangan kawasan durian seluas 40 Ha, yang meliputi Kabupaten Sanggau 20 Ha, dan Kabupaten Sekadau 20 Ha.
- 3) Fasilitasi pengembangan kawasan kelengkeng seluas 100 Ha, meliputi Kabupaten Sambas 20 Ha, Sintang 20 Ha, Mempawah 20 Ha, Sekadau 20 Ha dan Kubu Raya 20 Ha.
- 4) Fasilitasi pengembangan kawasan alpukat seluas 30 Ha di Kabupaten Kubu Raya.

c. Prasarana dan Sarana Pertanian

Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura perlu mendapatkan dukungan prasarana dan sarana pertanian, yang mana dukungan prasarana dan sarana pertanian memiliki program yaitu program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas yang meliputi beberapa kegiatan, yaitu:

- 1) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
- 2) Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
- 3) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin



- 4) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
- 5) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

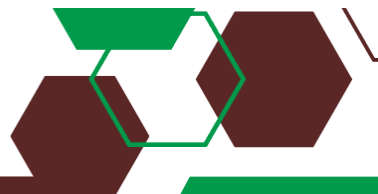
Kegiatan pengelolaan air irigasi untuk pertanian, meliputi Irigasi Perpipaan, Embung Pertanian, Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Tengah, Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Tengah, dan Rehab Jaringan Irigasi Tersier. Untuk Irigasi Perpipaan dialokasikan ke Kabupaten Sambas sebanyak 1 Unit, sedangkan Embung Pertanian sebanyak 8 Unit yang dialokasikan di beberapa Kabupaten, yaitu:

- 1) Kabupaten Bengkayang 1 Unit
- 2) Kabupaten Landak 1 Unit
- 3) Kabupaten Ketapang 1 Unit
- 4) Kabupaten Sambas 1 Unit
- 5) Kabupaten Sanggau 1 Unit
- 6) Kabupaten Melawi 1 Unit
- 7) Kabupaten Sekadau 2 Unit

Irigasi perpompaan besar wilayah tengah sebanyak 4 Unit yang dialokasikan di Kabupaten Landak sebanyak 1 Unit, Kapuas Hulu 1 Unit, Kabupaten Sanggau 1 Unit, Kabupaten Sintang 1 Unit. Untuk Irigasi perpompaan menengah wilayah tengah juga dialokasikan di 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkayang sebanyak 2 Unit, Kabupaten Mempawah 1 Unit, Kabupaten Sanggau 1 Unit. Kegiatan rehab jaringan irigasi tersier dialokasikan sebanyak 63 Unit, berupa rehab saluran jaringan irigasi tersier, dimana kegiatan ini tersebar di beberapa Kabupaten, yaitu:

- 1) Kabupaten Bengkayang 10 Unit
- 2) Kabupaten Landak 12 Unit
- 3) Kabupaten Ketapang 8 Unit
- 4) Kabupaten Sambas 10 Unit
- 5) Kabupaten Sanggau 10 Unit
- 6) Kabupaten Melawi 8 Unit
- 7) Kabupaten Sekadau 5 Unit

Kegiatan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, berupa kegiatan Optimasi Lahan (Opla) yang terdiri dari Survey Investigasi Desain (SID), pengawasan optimasi lahan, pengolahan lahan dan perbaikan infrastruktur. Pada kegiatan Optimasi Lahan di alokasikan di 5 Kabupaten, yaitu:



- 1) Kabupaten Landak 500 Ha
- 2) Kabupaten Ketapang 900 Ha
- 3) Kabupaten Mempawah 1.000 Ha
- 4) Kabupaten Sambas 1.500 Ha
- 5) Kabupaten Sanggau 600 Ha

Untuk Kegiatan pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin berupa kegiatan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi di 14 Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi bantuan alat mesin pertanian dari pusat. Kegiatan fasilitasi pupuk dan pestisida berupa penyusunan e-RDKK untuk pendataan penerima bantuan pupuk bersubsidi di 14 kabupaten/Kota, dan Layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi yang berada di 14 Kabupaten/Kota. Kegiatan fasilitasi pembiayaan pertanian berupa kegiatan asuransi pertanian yang meliputi beberapa tiga Kabupaten saja, yaitu Kabupaten Landak, Mempawah dan Kabupaten Sanggau.

2. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat

Dalam rangka mendukung Program Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 telah dialokasikan Dana Tugas Pembantuan yang berasal dari Unit Eselon I Kementerian Pertanian yaitu Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp 2.623.651.000,00. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp 14.577.865.000,00. Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp 625.500.000,00. Di bawah ini rincian DIPA Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1

Program dan Kegiatan dengan Sumber Dana Tugas Pembantuan Tahun 2022

No	Sumber Anggaran / No dan Tanggal DIPA	Anggaran (Rupiah)
1	Direktorat Jenderal Perkebunan (TP05) SP DIPA – 018.05.4.139127/2022 tgl 30 November 2022 (DIPA Revisi Ke-9)	2.623.651.000
2	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (TP06) SP DIPA – 018.06.04.139128/2022 tgl. 23 Desember 2022 (DIPA Revisi Ke-13)	14.577.865.000
3	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (TP08) SP DIPA – 018.08.04.139132/2022 tgl 11 Oktober 2022 (DIPA Revisi Ke-1)	625.500.000



Berikut ini tabel program kegiatan yang dilaksanakan dari ketiga satker yang dikelola Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat yaitu:

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Satker 139127 Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Pertemuan dan Koordinasi Penetapan Harga TBS (1 kegiatan) Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditas Tanaman Perkebunan (1 kegiatan)
			Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> Rintisan Penerbitan STDB (1.500 produk) Pendataan Perizinan Berusaha
			Penyediaan Prasarana Pascapanen Komoditas Perkebunan	Prasarana Pascapanen Tanaman Kelapa Kab. Bengkayang 1 Unit
			Penyediaan Prasarana Pengolahan Komoditas Perkebunan	Penyediaan prasarana UPH Kelapa Kab. Bengkayang 4 unit
		Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	Rekomendasi Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan (2 Rekomendasi)
		Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan		<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Lada Tahun 1 Kabupaten Sambas (1 Ha)



No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output
				<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan BPT dan PIT Kelapa yang telah ditetapkan di Kab. Kubu Raya (2 Ha)
2.	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	Layanan Manajemen Satker Daerah	Operasional Tenaga Harian Lepas Penyuluh Perkebunan (THL PP) (1 Dokumen)

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan Satker 139128 Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor (1 lembaga)
2.	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Penyidikan dan Pengujian Produk	Mutu dan Keamanan Pakan (80 sampel)
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Pelayanan Kesehatan Hewan	Pelayanan Publik: <ul style="list-style-type: none"> Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) (61.503 layanan) Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Rabies (58.500 dosis) Fasilitasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan



No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output
				Hewan Provinsi <ul style="list-style-type: none">• Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan ASF (1.950 dosis)• Operasional pengendalian PMK Tahap (115.700 ekor)
		Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Perbibitan dan Produksi Ternak	Supervisi Perbibitan dan Produksi Ternak (1 kegiatan)
			Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan (PEN)	Ternak Yang Didata dan Ditandai (66.501 unit)
			Optimalisasi Reproduksi (PEN) 18.000 ekor	Fasilitasi Alat dan Bahan IB (2 unit container N ₂ Cair dan 1 paket alat IB), Pengadaan N ₂ Cair (6.450 liter), Operasional IB (22.000 akseptor), Operasional Pelaporan Kelahiran (11.350 ekor)
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Sertifikasi Lembaga	Sertifikasi Unit Usaha (12 lembaga)
			Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Masyarakat yang Teredukasi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan (50 orang)
			Penyidikan dan Pengujian Produk	Keamanan dan Mutu Produk Hewan Hewan (25 produk)



No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output
3.	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	<ul style="list-style-type: none"> Layanan BMN (4 layanan) Layanan Hubungan Masyarakat (1 layanan) Layanan Data dan Informasi (1 dokumen)
			Layanan Manajemen Kinerja Internal	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Perencanaan dan Penganggaran (1 dokumen) Layanan Pemantauan dan Evaluasi (1 nilai) Layanan Manajemen Keuangan (4 dokumen)

Tabel 3.4

Program dan Kegiatan Satker 139132 Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output
1.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Tengah (PEN)	Konstruksi irigasi perpompaan (4 unit) di Kab. Ketapang (2), Kota Singkawang (1), Kab. Sanggau (1)
2.	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Administrasi Pengelola Dana Tugas Pembantuan Di Provinsi (1 Layanan)



3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat

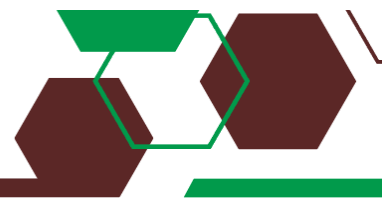
Mewujudkan percepatan pembangunan dan pembangunan berwawasan lingkungan tidak hanya di dukung anggaran dari daerah, melainkan juga dari pusat yang terangkum dalam kucuran dana Tugas Pembantuan (TP). Walaupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Guna percepatan pembangunan, terutama kegiatan yang berupa fisik dan keluaran hasil kegiatan dapat menambah aset tetap pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat kucuran dana pusat ini. Dikelola oleh Bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga.

Tabel 3.5

Program, Kegiatan dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2022

NO	PROGRAM /KEGIATAN	PAGU
1	2	3
1.	PROGRAM KETAHANAN SUMBER DAYA AIR	18.277.610.000
1	Kegiatan Operasi Rutin	536.242.000
2	Kegiatan Pemeliharaan Berkala	5.511.602.000
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin	12.229.766.000
2.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	1.251.011.000
1	Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	830.531.000
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	420.480.000
3.	PELAKSANAAN PRESERVASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS JALAN NASIONAL	12.268.599.000
1	Layanan Penyiapan Dan Pengendalian Pelaksanaan	233.760.000
2	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	8.772.042.000
3	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	729.306.000
4	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (padat karya)	847.524.000
5	Preservasi Jembatan	577.767.000
6	Preservasi Rutin Jembatan (padat karya)	392.785.000
7	Layanan Dukungan Manajemen Satker	715.415.000
TOTAL ANGGARAN		31.797.220.000

Dibandingkan dengan tahun 2021 ada pengurangan anggaran pada tahun 2022 dengan nilai Rp5.493.404.000. Tidak hanya pengurangan anggaran, bahkan rata-rata realisasi mengalami penurunan 13,49% dari tahun 2022 (86,35%) berbanding tahun 2021 (99,84%). Penurunan kinerja ini perlu mendapat perhatian mengingat rata-rata realisasi keuangan kurang dari 90% pada tahun 2022.



4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Restorasi Gambut Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tersebut telah dilaksanakan Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal, Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal, Pemeliharaan Sumur Bor, Operasional Pembasahan, Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar, Revitalisasi Sumber Mata Pencarian Masyarakat, Penyusunan RPPEG Provinsi Kalimantan Barat, Fasilitas Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

a. Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal

Kegiatan sekat kanal merupakan salah satu upaya untuk merestorasi lahan gambut dengan menjaga lahan gambut agar tetap basah. Oleh karena itu dilaksanakan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut. Untuk tahun 2022 infrastruktur pembasahan gambut yang dibangun di Kalimantan Barat berupa sekat kanal. Pada Tahun 2022, jumlah titik sekat kanal yang dibangun berjumlah 31 titik, sebanyak 25 titik di Kabupaten Sambas dan 6 titik di Kabupaten Mempawah. Pembangunan sekat kanal dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan kelompok masyarakat. Pembangunan sekat kanal pada Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) Sungai Sambas Besar-Seiyung sebanyak 25 titik yang berada di sembilan Desa dikecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Adapun lokasi dapat dilihat pada tabel Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut/PIPG (Sekat Kanal) Tahun 2022. Untuk pembangunan sekat kanal pada Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) Sungai Mempawah- Sungai Peniti sebanyak 6 titik berada dua Desa di kecamatan sui pinyuh dan segedong Kabupaten Mempawah. Adapun lokasi dapat dilihat pada tabel Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut/PIPG (Sekat Kanal) Tahun 2022.

Tabel 3.6
Rekap Pemeliharaan Sekat Kanal Tahun 2022

NO	LOKASI			JUMLAH IPG YANG DIPELIHARA	KELOMPOK MASYARAKAT
	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN		
1	Sarang Burung Kuala	Jawai	Sambas	7	MPA Desa Sarang Burung Kuala
2	Sarang Burung Usrat	Jawai	Sambas	9	KSM Bersih Bersama



NO	LOKASI			JUMLAH IPG YANG DIPELIHARA	KELOMPOK MASYARAKAT
	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN		
3	Sarang Burung Kolam	Jawai	Sambas	8	MPA Desa Sarang Burung Kolam
4	Mutus Darussalam	Jawai	Sambas	8	Pokmas Mutus Maju
5	Sungai Nilam	Jawai	Sambas	5	MPA Desa Sungai Nilam
6	Sarang Burung Danau	Jawai	Sambas	25	Lentera Desa
7	Sarang Burung Danau	Jawai	Sambas	25	Pejuang Desa
8	Lambau	Jawai	Sambas	9	Pokmas Maju Bersama
9	Simpang Empat	Tangaran	Sambas	6	Gapoktan Darul Makmur
10	Semata	Tangaran	Sambas	8	Pokmas Karya Bhakti
11	Sungai Baru	Teluk Keramat	Sambas	6	MPA Desa Sungai Baru
12	Korek	Sungai Ambawang	Kubu Raya	10	Kelompok Tani Sejahtera
13	Lingga	Sungai Ambawang	Kubu Raya	2	Gapoktan Mahkota Lingga
14	Pancaroba	Sungai Ambawang	Kubu Raya	2	Gapoktan Tani Raya
15	Durian	Sungai Ambawang	Kubu Raya	24	MPA Desa Durian
16	Simpang Kanan	Sungai Ambawang	Kubu Raya	9	Pokmas Tunas Muda
17	Simpang Raya	Sungai Ambawang	Kubu Raya	4	MPA Simpang Raya
18	Puguk	Sungai Ambawang	Kubu Raya	2	MPA Beringin I
19	Pasak	Sungai Ambawang	Kubu Raya	6	Kelompok Maju Bersama
20	Teluk Bakung	Sungai Ambawang	Kubu Raya	2	MPA Bapakat
21	Madusari	Sungai Raya	Kubu Raya	30	MPA Desa Madusari
22	Kubu Padi	Kuala Mandor B	Kubu Raya	20	MPA Desa Kubu Padi
23	Sungai Rasau	Sungai Pinyuh	Mempawah	22	Poktan Usaha Subur Jaya
24	Anjungan Dalam	Anjungan	Mempawah	16	Pokmas Gabmas Mandiri
25	Parit Banjar	Mempawah Timur	Mempawah	8	Poktan Lembah Hijau I
26	Antibar	Mempawah Timur	Mempawah	69	MPA Desa Antibar
27	Pulau Kumbang	Simpang Hilir	Kayong Utara	9	MPA Desa Pulau Kumbang



b. Kegiatan pemeliharaan sekat kanal di tahun 2022 sebanyak 591.

Kegiatan dilakukan mulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Berikut jumlah pemeliharaan sekat kanal pada tahun 2022:

- 1) Pada bulan Agustus dari jumlah 591 yang telah direncanakan pemeliharaan hanya 567 yang bisa dilakukan pemeliharaan.
- 2) Pada bulan September dari jumlah 591 yang telah direncanakan pemeliharaan hanya 516 yang bisa dilakukan pemeliharaan.
- 3) Pada bulan Oktober dari jumlah 591 yang telah direncanakan pemeliharaan hanya 536 yang bisa dilakukan pemeliharaan.
- 4) Pada bulan November dari jumlah 591 yang telah direncanakan pemeliharaan hanya 520 yang bisa dilakukan pemeliharaan.
- 5) Pada bulan Agustus dari jumlah 591 yang telah direncanakan pemeliharaan hanya 470 yang bisa dilakukan pemeliharaan.

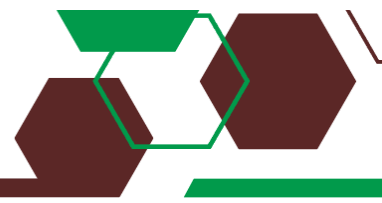
Adapun faktor/kendala yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan pemeliharaan sekat kanal sesuai dengan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor banjir dilokasi sekat kanal
- 2) Akses menuju lokasi memerlukan biaya yang lebih tinggi dari yang ada di Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 3) Ada 3 desa yang tidak melakukan kegiatan pemeliharaan Sumur Bor
- 4) Keterlambatan penyampaian laporan dikarenakan jaringan komunikasi (internet) terganggu.

c. Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor

Maksud dari kegiatan ini adalah terlaksananya pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor untuk menjaga fungsi dan manfaat lebih lama dari umur ekonomisnya sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan untuk pembasahan gambut di 7 (tujuh) Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang tersebar di Provinsi Kalimantan Barat yang telah terbangun sumur bor.

Pada tahun 2022 dapat dilihat pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Sumur Bor sebagai berikut:



Tabel 3.7

Rekap Pelaporan Pemeliharaan Sumur Bor Tahun 2022

NO	LOKASI			JUMLAH IPG SUMUR BOR	KELOMPOK MASYARAKAT
	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN		
1	Sungai Rasau	Sungai Pinyuh	Mempawah	32	MPA Desa Sungai Rasau
2	Sarang Burung Kuala	Jawai	Sambas	13	MPA Desa Sarang Burung Kuala
3	Sarang Burung Kolam	Jawai	Sambas	10	MPA Desa Sarang Burung Kolam
4	Sungai Nilam	Jawai	Sambas	10	MPA Desa Sungai Nilam
5	Sarang Burung Danau	Jawai	Sambas	10	Kelompok Lentera Desa
6	Sarang Burung Danau	Jawai	Sambas	10	Kelompok Pejuang Desa
7	Lambau	Jawai	Sambas	10	Pokmas Maju Bersama
8	Berlimang	Teluk Keramat	Sambas	10	MPA Desa Berlimang
9	Lela	Teluk Keramat	Sambas	10	MPA Desa Lela
10	Sungai Baru	Teluk Keramat	Sambas	10	MPA Desa Sungai Baru
11	Sungai Kumpai	Teluk Keramat	Sambas	10	MPA Desa Sungai Kumpai
12	Tri Mandayan	Teluk Keramat	Sambas	12	MPA Desa Tri Mandayan
13	Durian	Sungai Ambawang	Kubu Raya	10	MPA Desa Durian
14	Simpang Raya	Sungai Ambawang	Kubu Raya	10	MPA Desa Simpang Raya
15	Tebang Kacang	Sungai Raya	Kubu Raya	20	MPA Desa Tebang Kacang
16	Rasau Jaya Umum	Rasau Jaya	Kubu Raya	20	MPA Desa Rasau Jaya Umum
17	Sungai Raya Dalam	Sungai Raya	Kubu Raya	11	MPA Desa Sungai Raya Dalam
18	Sungai Asam	Sungai Raya	Kubu Raya	40	MPA Desa Sungai Asam
19	Mengkalang Jambu	Kubu	Kubu Raya	20	Damkar Mengkalang Jambu
20	Olak-Olak	Kubu	Kubu Raya	20	MPA Olak-olak
21	Medan Jaya	Simpang Hilir	Kayong Utara	22	Pokmas Lestari Jaya
22	Teluk Batang Utara	Teluk Batang	Kayong Utara	20	MPA Bakti Mulia Desa Teluk
23	Mas Bangun	Teluk Batang	Kayong Utara	20	Batang Utara
24	Sungai Putri	Matan Hilir Utara	Ketapang	10	MPA Alam Bersama Desa Mas
25	Sungai Awan Kiri	Muara Pawan	Ketapang	30	Bangun
26	Tanjung Baik Budi	Matan Hilir Utara	Ketapang	10	MPA Desa Sungai Putri
27	Nanga Kayan	Nanga Pinoh	Melawi	53	MPA Desa Sungai Awan Kiri
28	Sungai Mali	Dedai	Sintang	10	Pokmas Peduli Bencana
TOTAL				473	



Kegiatan pemeliharaan Sumur Bor di tahun 2022 sebanyak 473. Kegiatan dilakukan mulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Berikut jumlah pemeliharaan Sumur Bor tahun 2022:

- 1) Pada bulan Agustus dari jumlah 473 yang telah direncanakan pemeliharaan hanya 341 yang bisa dilakukan pemeliharaan.
- 2) Pada bulan September dari jumlah 473 yang telah direncanakan pemeliharaan hanya 351 yang bisa dilakukan pemeliharaan.
- 3) Pada bulan Oktober dari jumlah 473 yang telah direncanakan pemeliharaan hanya 329 yang bisa dilakukan pemeliharaan.
- 4) Pada bulan November dari jumlah 473 yang telah direncanakan pemeliharaan hanya 339 yang bisa dilakukan pemeliharaan.
- 5) Pada bulan Agustus dari jumlah 473 yang telah direncanakan pemeliharaan hanya 339 yang bisa dilakukan pemeliharaan.

d. Kegiatan Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar

Revegetasi lahan gambut merupakan upaya pemulihan pada ekosistem dalam rangka pemulihan gambut bekas terbakar dengan reboisasi atau menanam ulang lahan gambut jenis tanaman asli gambut atau dengan jenis tanaman lain yang adaptif terhadap lahan gambut dan bernilai ekonomi, seperti Meranti, Jelutung dan lainnya.

Bentuk kegiatan bisa berupa persemaian, penanaman, bimtek persemaian. Kegiatan Revegetasi pada tahun 2022 dilaksanakan dengan melibatkan kelompok masyarakat sebagai berikut:



Tabel 3.8
Kegiatan Revegetasi pada Tahun 2022

No	KHG	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Pokmas	Luas (Ha)	Nilai SPKS (Rp)	Jenis Bibit	Jumlah Bibit (Batang)
1	Sungai Penyangkat – Sungai Selat Maya	Kubu Raya	Batu Ampar	Teluk Nibung	Kelompok Usaha Madu Jaya Lestari	15	371.895.000	1. Geronggang 2. Nyatoh 3. Punak 4. Jengkol 5. Petai 6. Cempedak	4719 5808 363 2178 2178 2904
2	Selat Maya – Sungai Aping	Kayong Utara	Pulau Maya	Satai Lestari	MPA Satai Lestari	15	371.895.000	1. Terentang 2. Mengkapas 3. Petai 4. Rambutan 5. Jengkol 6. Pinang	6171 6171 363 726 363 4356
Total						30	743.790.000		36.300



1) Demplot Revegetasi Bekas Terbakar Blok I KHG Sungai Penyangkat – Sungai Selat Maya, Desa Teluk Nibung

Lokasi lahan gambut bekas terbakar blok I KHG Sungai Penyangkat – Sungai Selat Maya bertempat pada Kawasan Hutan Lindung yang secara administratif berada pada Desa Teluk Nibung, Kec. Batu Ampar, Kab. Kubu Raya dengan luasan 15 Ha menggunakan jenis tanaman:

- a) Geronggang (*Cratoxylon arborescens*) sebanyak 4.719 batang
- b) Nyatoh (*Palaquium bancanum*) sebanyak 5.808 batang
- c) Punak (*Tramerista glabra*) sebanyak 363 batang
- d) Jengkol (*Archidendron pauciflorum*) sebanyak 2.178 batang
- e) Petai (*Parkia speciosa*) sebanyak 2.178 batang
- f) Cempedak (*Artocarpus integer*) sebanyak 2.904 batang

Kegiatan ini dilakukan secara Swakelola (Tipe IV) oleh Kelompok Usaha Madu Jaya Lestari dengan jumlah Hari Orang Kerja (HOK) sebanyak 2.060 HOK atau senilai Rp195.700.000. Dalam pelaksanaannya kelompok ini juga turut melibatkan masyarakat sekitar lokasi demplot, dengan harapan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya mengembalikan fungsi ekosistem lahan gambut dan mencegah terjadinya kebakaran lahan gambut di lokasi demplot dan sekitarnya.

2) Demplot Revegetasi Bekas Terbakar Blok I KHG Sungai Selat Maya – Sungai Aping, Desa Satai Lestari

Lokasi lahan gambut bekas terbakar blok I KHG Sungai Selat Maya – Sungai Aping bertempat pada Kawasan Hutan Produksi wilayah KPH Kayong Utara yang secara administratif berada pada Desa Satai Lestari, Kec. Pulau Maya, Kab. Kayong Utara dengan luasan 15 Ha menggunakan jenis tanaman:

- a) Terentang (*Camposperma* sp) sebanyak 6.171 batang
- b) Mengkapas (*Mastixia pentandra*) sebanyak 6.171 batang
- c) Jengkol (*Archidendron pauciflorum*) sebanyak 363 batang
- d) Petai (*Parkia speciosa*) sebanyak 363 batang
- e) Rambutan (*Nephelium lappaceum*) sebanyak 726 batang
- f) Pinang (*Areca catechu*) sebanyak 4.356 batang

Api Desa Satai Lestari dengan jumlah Hari Orang Kerja (HOK) sebanyak 2.060 HOK atau senilai Rp195.700.000. Dalam



pelaksanaannya kelompok MPA ini juga turut melibatkan masyarakat sekitar lokasi demplot, dengan harapan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya mengembalikan fungsi ekosistem lahan gambut dan mencegah terjadinya kebakaran lahan gambut di lokasi demplot dan sekitarnya.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam pembangunan sekat kanal adalah:

- a) Tahap sosialisasi kegiatan pembangunan Demplot revegetasi dengan swakelola tipe 4 (pembangunan diserakan pada pokmas)
- b) Tahap pengajuan kelompok masyarakat oleh Pemerintah Desa (sudah disepakati antara masyarakat dengan Pemdes)
- c) Surat penawaran pelaksanaan kegiatan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke kelompok masyarakat yang direkomendasi Desa.
- d) Surat kesanggupan dari kelompok masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Demplot revegetasi
- e) Tahap verifikasi teknis dan administrasi kelompok oleh tim yang ditunjuk oleh PPK
- f) Rekomendasi kelompok pelaksana kegiatan pembangunan Demplot revegetasi dari PPK ke KPA agar dibuatkan Surat Keputusan KPA untuk Kelompok Pelaksana Pembangunan Demplot revegetasi
- g) Tahap penandatanganan kontrak oleh PPK dan kelompok pelaksana diertai dengan pengajuan pencairan tahap pertama.
- h) Monitoring kegiatan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen kontrak.
- i) Tahap verifikasi teknis dan keuangan dilakukan untuk melihat kelayakan pelaksanaan kegiatan sebagai acuan dalam pencairan tahap dua.
- j) Tahap evaluasi dan pelaporan, dilakukan untuk melihat perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat berdasarkan kondisi fisik lapangan. Apabila sudah sesuai dapat dilakukan serah terima pekerjaan dari Pokmas ke PPK.



e. Bimtek Kegiatan Revegetasi

Bimtek Kegiatan Revegetasi dilaksanakan pada dua lokasi sebagai berikut:

- 1) KHG Sungai Penyangkat – Sungai Selat Maya (Desa Teluk Nibung, Kec. Batu Ampar, Kab. Kubu Raya).
- 2) KHG Sungai Selat Maya – Sungai Aping (Desa Satai Lestari, Kec. Pulau Maya, Kab. Kayong Utara)

Kegiatan bimtek dilakukan untuk memberikan pemahaman dan memastikan keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat

Kegiatan bimtek ini bertujuan untuk:

- 1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman dasar kepada para peserta tentang kegiatan revegetasi Badan Restorasi Gambut;
- 2) Meningkatkan kesadaran para peserta tentang pentingnya kegiatan restorasi gambut melalui kegiatan revegetasi;

Kegiatan bimtek dilaksanakan di Desa Teluk Nibung dihadiri oleh anggota Kelompok Usaha Madu Jaya Lestari (20 orang) dan kelompok MPA Desa Satai Lestari (15 orang) sebagai peserta sekaligus sebagai pelaksana kegiatan penanaman demplot revegetasi. Dalam kegiatan ini tim yang turun memberikan pembekalan ilmu tentang serangkaian proses kegiatan yang berkaitan dengan revegetasi, mulai dari kegiatan persemaian, penanaman, pemeliharaan, serta monitoring kegiatan.

- 1) Dalam proses persemaian para peserta pelatihan diharapkan mampu untuk membuat bibit baik dari cabutan alam maupun secara generatif dari biji untuk mempersiapkan kebutuhan bibit yang akan ditanam pada lokasi demplot. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antarlain: polybag, media tanam, bibit tanaman, dan tempat persemaian sementara. Untuk kebutuhan bibit hutan akan menggunakan cabutan alam dan untuk MPTS akan menggunakan biji. Para peserta juga perlu memperhitungkan waktu pembibitan hingga siap tanam, oleh karenanya dalam waktu \pm 2 bulan ini diharapkan bibit sudah disiapkan.
- 2) Setelah bibit sudah siap kemudian dilakukan kegiatan penanaman. Dalam kegiatan penanaman ini bibit yang digunakan harus dalam kondisi sehat, batang lurus tunggal, ketinggian bibit minimal 50 cm. Penanaman yang dilakukan menggunakan pola maksimal, artinya dalam luasan 1 Ha terdapat 1.100 tanaman, perlu diketahui oleh



peserta bahwa dalam pendistribusian bibit ke lokasi tanam harus menghindari adanya stress pada bibit. Hal-hal yang dapat membuat bibit stress antarlain: penyusunan bibit tidak rapi sehingga media tanam tidak kompak, memegang bibit pada batangnya sehingga resiko bibit terlepas dari media tinggi.

- 3) Setelah bibit tertanam maka perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan sekaligus monitoring tanaman yang hidup, jika pada saat kegiatan ditemukan adanya tanaman yang mati maka dapat dilakukan penyulaman menggunakan bibit yang sejenis.

Selain memberikan teori tentang revegetasi tim yang turun juga memberikan praktek untuk kegiatan penanaman di lokasi sekitar kantor desa. Dalam kegiatan praktek ini para peserta menerapkan apa yang sudah disampaikan dalam teori, yaitu membuat lubang tanam, menyiapkan bibit, membuka polybag, dan menanam tanaman. Dalam prakteknya para peserta sudah mampu untuk mengaplikasikan ilmu yang ada dalam teori ke pengerjaan di lapangan.

f. Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat

Revitalisasi Ekonomi Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar lahan gambut. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan akses pasar berbasis kelestarian kawasan hutan agar dapat memberikan hasil dan manfaat yang optimal. Revitalisasi merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan guna menggiatkan kembali program yang belum maksimal, misalnya mengolah dan memanfaatkan lahan gambut dengan melakukan kegiatan pertanian tanpa bakar maupun peternakan terpadu. Kegiatan ini dilaksanakan pada 7 (tujuh) Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang tersebar di Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah 30 paket.



Tabel 3.9
Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat Tahun 2022 Yang Melibatkan
Kelompok Masyarakat

No	KHG	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Pokmas	Kegiatan	Nilai SPKS (Rp)
1	S. Kapuas-S. Mandor	Kubu Raya	Kuala Mandor B	Kuala Mandor B	MPA Desa Kuala Mandor B	Budidaya Tanaman Hortikultura	85,000,000
2	S. Kapuas-S. Mandor	Kubu Raya	Kuala Mandor B	Kubu Padi	Poktan Tambelan Jaya Anugerah	Peternakan Ayam Petelur	85,000,000
3	S. Kapuas-S. Mandor	Kubu Raya	Kuala Mandor B	Sungai Enau	MPA Gambut Jaya Gambut	Peternakan Ayam dan Budidaya Cabai	85,000,000
4	S. Kapuas-S. Ambawang	Kubu Raya	Sungai Ambawang	Puguk	Poktan Puguk Sejahtera	Pertanian Semangka dan Cabe	85,000,000
5	S. Durian-S. Labai	Kubu Raya	Batu Ampar	Muara Tiga	MPA Desa Muara Tiga	Pengeringan dan Pengupasan Buah Pinang	85,000,000
6	S. Durian-S. Labai	Kubu Raya	Batu Ampar	Sumber Agung	MPA SA Bersatu	Budidaya Perikanan dan Pertanian Terpadu	85,000,000
7	S. Durian-S. Kualan	Kayong Utara	Simpang Hilir	Pemangkat	MPA Desa Pemangkat	Budidaya Tanaman Nanas dan Jahe	85,000,000
8	S. Mempawah-S. Peniti	Mempawah	Segedong	Peniti Besar	POKJA MPG Elbatra	Pengolahan Minyak Kelapa Terpadu	85,000,000
9	S. Mempawah-S. Peniti	Mempawah	Segedong	Purun Besar	MPA Desa Sungai Purun Besar	Budidaya Pertanian Hortikultura	85,000,000
10	S. Mempawah-S. Peniti	Mempawah	Sungai Pinyuh	Purun Kecil	MPA Desa Purun Kecil	Budidaya Tanaman Hortikultura	85,000,000
11	S. Sambas Besar-S. Seiyung	Sambas	Jawai	Parit Setia	MPA Desa Parit Setia	Budidaya Pertanian Hortikultura	85,000,000
12	S. Sambas Besar-S. Seiyung	Sambas	Jawai	Pelimpaan	Kader Masyarakat Peduli Api Desa Pelimpaan	Peternakan Kambing dan Pembuatan Pupuk Kompos	85,000,000
13	S. Sambas Besar-S. Seiyung	Sambas	Jawai	Sarang Burung Kuala	MPA Desa Sarang Burung Kuala	Budidaya Tanaman Buah Naga	85,000,000
14	S. Sambas Besar-S. Seiyung	Sambas	Jawai	Sarang Burung Usrat	Masyarakat Peduli Api Desa Sarang Burung Usrat	Budidaya Ubi Jalar dan Tanaman Hortikultura	85,000,000
15	S. Sambas Besar-S. Seiyung	Sambas	Jawai	Sarang Burung Kolam	Masyarakat Peduli Api Desa Sarang Burung Kolam	Budidaya Tanaman Buah Naga	85,000,000
16	S. Sambas Besar-S. Seiyung	Sambas	Jawai	Sungai Nilam	Masyarakat Peduli Api Desa Sungai Nilam	Budidaya Keladi, Hortikultura dan Buah Semangka	85,000,000



No	KHG	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Pokmas	Kegiatan	Nilai SPKS (Rp)
17	S. Sambas Besar-S. Seiyung	Sambas	Jawai	Sarang Burung Danau	Kelompok Tani Sekar Tani II	Budidaya Keladi, Hortikultura dan Buah Semangka	85,000,000
18	S. Sambas Besar-S. Seiyung	Sambas	Teluk Keramat	Sekura	Masyarakat Peduli Api Desa Sekura	Pengembangan Ternak Kambing	85,000,000
19	S. Sambas Besar-S. Seiyung	Sambas	Teluk Keramat	Sengawang	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Budidaya Tanaman Hortikultura	85,000,000
20	S. Sambas Besar-S. Seiyung	Sambas	Teluk Keramat	Sungai Baru	Gapoktan Sinar Harapan	Budidaya Peternakan Sapi	85,000,000
21	S. Sambas Besar-S. Seiyung	Sambas	Teluk Keramat	Sungai Kumpai	Masyarakat Desa Peduli Bencana	Pengembangan Ternak Kambing	85,000,000
22	S. Sambas Besar-S. Seiyung	Sambas	Teluk Keramat	Teluk Kaseh	Masyarakat Peduli Api Desa Teluk Kaseh	Budidaya Peternakan Kambing dan Pembuatan Pupuk Kompos	85,000,000
23	S. Sambas Besar-S. Seiyung	Sambas	Teluk Keramat	Tri Mandayan	Masyarakat Peduli Api Desa Tri Mandayan	Peternakan Kambing	85,000,000
24	S. Sambas Besar-S. Seiyung	Sambas	Teluk Keramat	Berlimang	Lembaga Desa Pengelola Hutan Berlimang	Budidaya Penggemukan Kambing	85,000,000
25	S. Sambas Besar-S. Seiyung	Sambas	Teluk Keramat	Lela	Lembaga Desa Pengelola Hutan Lela	Peternakan Kambing	85,000,000
26	S. Sambas Besar-S. Seiyung	Sambas	Teluk Keramat	Merubung	Kelompok Tani Usaha Sejahtera	Peternakan Sapi	32,000,000
27	S. Sambas Besar-S. Seiyung	Sambas	Teluk Keramat	Sekura	Masyarakat Peduli Api Desa Sekura	Peternakan Kambing	32,000,000
28	S. Sambas Besar-S. Seiyung	Sambas	Teluk Keramat	Teluk Kaseh	Masyarakat Peduli Api Desa Teluk Kaseh	Peternakan Kambing	85,000,000
29	S. Sambas Besar-S. Seiyung	Sambas	Teluk Keramat	Sengawang	Masyarakat Peduli Api Desa Sengawang	Peternakan Sapi	39,852,000
30	S. Sambas Besar-S. Seiyung	Sambas	Teluk Keramat	Lela	Masyarakat Peduli Api Desa Lela	Peternakan Kambing	32,000,000
Total							2.398.852.000

Kegiatan revitalisasi Ekonomi Masyarakat sebanyak 30 kegiatan yang berada di 26 Desa yang terletak pada enam (6) Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) KHG Sungai Sambas Besar-S. Seiyung sebanyak 20 kegiatan yang berada pada 16 Desa di 2 kecamatan, Kabupaten Sambas



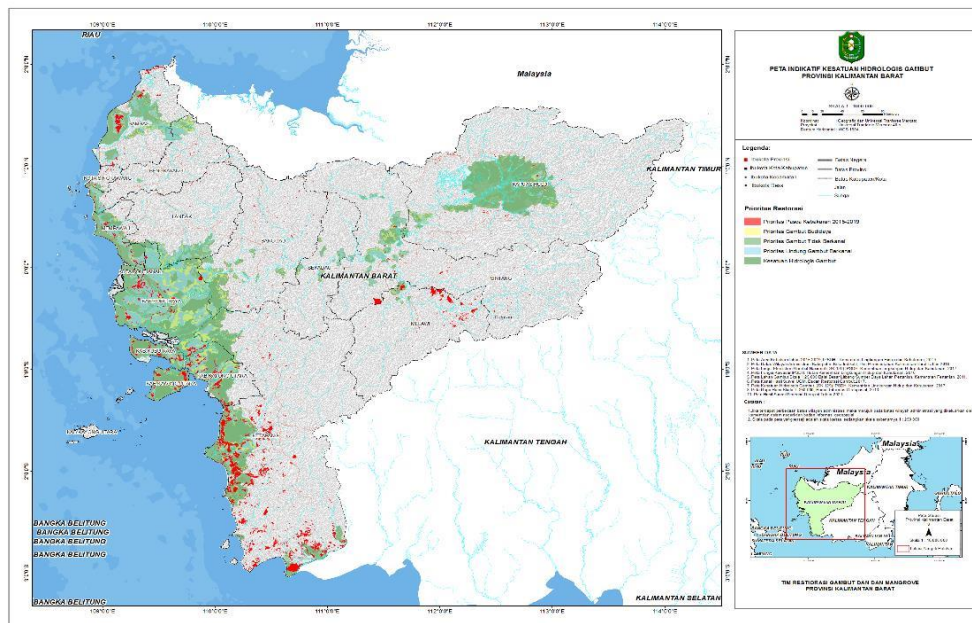
- 2) KHG Sungai Mempawah-S. Peniti sebanyak 3 Kegiatan yang berada pada 3 Desa di 2 Kecamatan Kabupaten Mempawah
- 3) KHG S. Kapuas-S. Mandor sebanyak 3 Kegiatan yang berada pada 3 Desa di 1 Kecamatan Kabupaten Kubu Raya
- 4) KHG S. Kapuas-S. Ambawang sebanyak 1 Kegiatan yang berada pada 1 Desa di 1 Kecamatan Kabupaten Kubu Raya
- 5) KHG S. Durian-S. Labai sebanyak 3 Kegiatan yang berada pada 3 Desa di 1 Kecamatan Kabupaten Kubu Raya
- 6) KHG S. Durian-S. Kualan sebanyak 1 Kegiatan yang berada pada 1 Desa di 1 Kecamatan Kabupaten Kayong Utara.

Berikut tahapan yang dilakukan dalam Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat adalah:

- 1) Tahap sosialisasi Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat dengan swakelola tipe 4 (pembangunan diserahkan pada pokmas)
- 2) Tahap pengajuan kelompok masyarakat oleh Pemerintah Desa (sudah disepakati antara masyarakat dengan Pemdes)
- 3) Surat penawaran pelaksanaan kegiatan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke kelompok masyarakat yang direkomendasi Desa.
- 4) Surat kesanggupan dari kelompok masyarakat untuk melaksanakan Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat sekaligus menyampaikan proposal kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 5) Tahap verifikasi teknis dan administrasi kelompok oleh tim yang ditunjuk oleh PPK
- 6) Rekomendasi kelompok pelaksana kegiatan pembangunan Demplot revegetasi dari PPK ke KPA agar dibuatkan Surat Keputusan KPA untuk Kelompok Pelaksana Kegiatan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat
- 7) Tahap penandatanganan kontrak oleh PPK dan kelompok pelaksana diertai dengan pengajuan pencairan tahap pertama.
- 8) Monitoring kegiatan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen kontrak.
- 9) Tahap verifikasi teknis dan keuangan dilakukan untuk melihat kelayakan pelaksanaan kegiatan sebagai acuan dalam pencairan tahap dua.
- 10) Tahap evaluasi dan pelaporan, dilakukan untuk melihat perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat berdasarkan



kondisi fisik lapangan. Apabila sudah sesuai dapat dilakukan serah terima pekerjaan dari Pokmas ke PPK.



Gambar 3.1

Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Provinsi Kalimantan Barat

g. Kegiatan Fasilitas Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tim Restorasi Gambut dan Mangrove Daerah (TRGMD) Provinsi Kalimantan Barat melalui SK Gubernur Nomor 113/DLHK/2022 Tahun 2022 dimana tugas TRGMD Provinsi Kalbar ini adalah Mengkoordinasi dan Memfasilitasi kegiatan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove di Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam melaksanakan tugas Restorasi Gambut, BRGM menerapkan pendekatan yang dikenal dengan nama 3R, yaitu Rewetting (R1), Revegetasi (R2), dan Revitalisasi Ekonomi Masyarakat (R3), sedangkan Dalam merehabilitasi mangrove, melalui pendekatan strategis secara komprehensif dan memperkenalkan 3M, yaitu memulihkan, meningkatkan dan mempertahankan. M1 dan M2 adalah penanaman diikuti pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain, sedangkan M3 adalah mempertahankan di areal mangrove, sehingga keberadaan mangrove betul-betul bisa dipertahankan dan tidak dikonversi. Rehabilitasi mangrove bukanlah hal mudah, karena ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi



seperti pertambangan timah dan pertambangan udang yang bisa merusak ekosistem mangrove itu sendiri.

Oleh karena itu, rehabilitasi mangrove ini perlu upaya bersama secara terpadu sinergis, mulai dari BRGM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO), serta pihak swasta lainnya dan Tidak Lupa TRGMD Provinsi Kalimantan Barat untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi mangrove secara nasional.

Kelembagaan TRGMD terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu Bidang Perencanaan Monitoring dan Evaluasi, Bidang Kontruksi Operasi dan Pemeliharaan, Bidang Sosialisasi Partisipasi dan Kemitraan, Bidang Pemulihan Lapangan (Revegetasi dan Budidaya) serta Bidang Basis Data Penelitian dan Pengembangan, yang keanggotaan TRGMD ini terdiri dari OPD pemerintahan provinsi terkait, Akademisi, Asosiasi, serta NGO pemerhati lingkungan.

h. Kegiatan Penyusunan RPPEG Provinsi Kalimantan Barat

Kegiatan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPED) tahun 2022 sudah masuk dalam kegiatan yang akan dilaksanakan, namun dikarenakan automatic adjustment kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan.

5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar

Adapun Program dan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tugas Pembantuan pada tahun 2022 yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, adalah sebagai berikut:

- a. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi
 - 1) Perkara Hukum Kelompok Masyarakat
 - 2) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
 - 3) Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat / Sosbud
 - 4) Bantuan Peralatan/ Sarana
 - 5) Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)
 - 6) Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat / SHM
 - 7) Sarana Pengembangan Kawasan



8) Prasarana Jaringan Sumber Daya Air

b. Program Dukungan Manajemen

Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

6. Dinas Kelautan dan Perikanan

PNBP pasca produksi merupakan sebuah terobosan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jendral Perikanan Tangkap (DJPT) dalam upaya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, khususnya di sektor perikanan tangkap. PNBP pasca produksi diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi pelaku usaha dan negara, karena tarif yang nantinya akan dibayarkan sesuai dengan hasil produksi tangkap yang didaratkan di pelabuhan perikanan oleh pelaku usaha. Hal ini karena Perikanan tangkap merupakan salah satu sub sektor yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan, antara lain sebagai: (1) penyedia lapangan kerja, (2) penyedia bahan pangan bergizi bagi masyarakat, (3) penghasil devisa bagi negara, (4) pendorong tumbuhnya industri hulu-hilir terkait perikanan tangkap, dan (5) penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan ini adalah:

- a. Bentuk dukungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam rangka penerapan PNBP Pascaproduksi dalam kegiatan usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan dengan izin pusat
- b. Membantu pemerintah menerapkan kebijakan yang menciptakan keadilan bagi pelaku usaha dan negara, berkaitan dengan tarif yang dibayarkan sesuai dengan hasil produksi perikanan tangkap
- c. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PNBP Pascaproduksi yang dilaksanakan Provinsi Kalimantan Barat.

Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan (TP) di Provinsi Kalimantan Barat diawali dengan pengadaan sarana dan prasarana pendukung yang dilakukan secara kontraktual. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan PNBP Pascaproduksi terdiri dari: pagar pembatas, trolley, CCTV dan keranjang yang dialokasikan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan (UPT PP) Provinsi Kalimantan Barat yang terdapat di Sungai Rengas dan Sungai Jawi. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan PNBP ini telah selesai dilakukan pada bulan September sesuai dengan yang tertera pada



kontrak pengadaan dan sudah di distribusikan kepada Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan (UPT PP) Provinsi Kalimantan Barat.



3.3.2 Realisasi

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 3.10

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Provinsi

No	DIPA	Kode	Nama Satker/Program/Kegiatan	Lokasi/Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	SISA PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	018-03.4.139125/2022	139125	Tanaman Pangan (Tugas Pembantuan-TP)		13.658.017.000	13.429.415.165	98,33	228.601.835
		018.03.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		3.677.245.000	3.604.081.040	98,01	73.163.960
		5885	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	- Uji Mutu Beras 5 Sampel dan Jagung 5 Sampel	3.677.245.000	3.604.081.040	98,01	73.163.960
				- Power Thresher 30 Unit				
				- Corn Sheller 25 Unit				
				Grading/Packing 4 Unit				
				- Power Thresher Multiguna 20 Unit				
				- Bangunan UPH 3 Paket				
				- Sarana UPH Tanaman Pangan Lainnya 3 Unit				
		018.03.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		9.008.500.000	8.855.648.025	98,30	152.851.975
		1762	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	- Budidaya Padi Lahan Kering 1.000 Ha di Kabupaten Bengkayang, Landak, Mempawah, Kapuas Hulu	5.456.000.000	5.383.247.475	98,67	72.752.525
				- Budidaya Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) 2.300 Ha di Kabupaten Bengkayang, Landak, Mempawah, Ketapang, Kayong Utara, Kubu Raya				
		4579	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	- Bantuan Benih Padi Inbrida 10.000 Ha di Kabupaten Landak, Mempawah, Ketapang, Sekadau	3.552.500.000	3.472.400.550	97,75	6.161.550
- Bantuan P3BTP 100 Ha								
- Fasilitas Listrik cadangan laboratorium 1 Pkt								
018.03.WA	Program Dukungan Manajemen		972.272.000	969.686.100	99,73	2.585.900		
1766	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan	Provinsi	972.272.000	969.686.100	99,73	2.336.420		



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



No	DIPA	Kode	Nama Satker/Program/Kegiatan	Lokasi/Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	SISA PAGU ANGGARAN (Rp)
2.	018-04.4.139126/2022	139126	Hortikultura (Tugas pembantuan-TP)		4.700.512.000	4.506.780.800	95,88	193.731.200
		018.04.EC	Program Nilai Tambah dan Daga Saing Industri		1.201.312.000	1.160.033.000	96,56	41.279.000
		5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	- Fasilitas Bantuan Sarana Pasar Lelang/Pasar Tani pengemas dan Rehabilitasi STA/Horti Mart)	1.201.312.000	1.160.033.000	96,56	41.279.000
				- Fasilitas Sarana Pascapanen Hortikultura di Kabupaten Sambas 1 Unit dan Kabupaten Mempawah 1 Unit				
				- Fasilitas Sarana Pengolahan Hortikultura di Kabupaten Sambas 1 Unit dan Kabupaten Mempawah 1 Unit				
				- Fasilitas Prasarana Pascapanen Hortikultura di Kabupaten Sambas 1 Unit, Kabupaten Mempawah 1 Unit				
				- Fasilitas Prasarana Pengolahan Hortikultura di Kabupaten Mempawah 1 Unit				
		018.04.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		3.349.200.000	3.228.397.800	96,39	120.802.200
		1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	- Fasilitas Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat di Kota Pontianak 2 Unit Kabupaten Sambas 10 Ha, Kabupaten Kapuas Hulu 20 Ha, Kota Singkawang 10 Ha	1.504.200.000	1.460.711.100	97,11	43.488.900
				- Fasilitas Kawasan Aneka Cabai di Kabupaten Kapuas Hulu 10 Ha, Kabupaten Ketapang 10 Ha, Kabupaten Bengkayang 10 Ha, Kabupaten Landak 10 Ha, Kabupaten Kayong Utara 10 Ha, Kabupaten Kubu Raya 10 Ha, Kota Singkawang 10 Ha				
				- Fasilitas Kawasan Tanaman Obat di Kota Pontianak 25 Ha				
				- Fasilitas Kawasan Jahe di Kabupaten Mempawah 10 ha, Kabupaten Kubu Raya 10 Ha				
		5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	- Fasilitas Kawasan Jeruk di Kabupaten Sambas 50 Ha	1.845.000.000	1.767.686.700	95,81	77.313.300
				- Fasilitas Kawasan Durian di Kabupaten Sanggau 20 Ha, Kabupaten Sekadau 20 Ha				
				- Fasilitas Kawasan Kelengkeng di Kabupaten Sambas 20 Ha, Kab. Sintang 20 Ha, Kab. Mempawah 20 Ha, Kab. Sekadau 20 Ha, Kab. Kubu Raya 20 Ha				
				- Fasilitas Kawasan Alpukat di Kabupaten Kubu Raya 30 Ha				
		018.04.VA	Manajemen		150.000.000	118.350.000	78,90	31.650.000
		1774	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Provinsi	150.000.000	118.350.000	78,90	31.650.000



LPPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022



No	DIPA	Kode	Nama Satker/Program/Kegiatan	Lokasi/Uraian	Pagu	Realisasi	Persentasi Realisasi (%)	SISA PAGU ANGGARAN (Rp)
3.	018-08.4.139134/2022	139134	Prasarana dan Sarana Pertanian (Tugas Pembantuan-TP)		34.324.120.000	32.233.761.614	93,91	2.090.358.386
		018.08.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		33.282.760.000	31.371.414.231	94,26	1.911.345.769
		1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	- Irigasi Perpipaan 1 Unit di Kabupaten Sambas - Embung Pertanian 8 Unit di Kabupaten Bengkayang 1 Unit, Kab. Landak 1 Unit, Kab. Ketapang 1 Unit, Kab. Sambas 1 Unit, Kab. Sanggau 1 Unit, Kab. Melawi 1 Unit, Kab. Sekadau 2 Unit - Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Tengah 4 Unit di Kabupaten Landak 1 Unit, Kab. Kapuas Hulu 1 Unit, Kab. Sanggau 1 Unit, Kab. Sintang 1 - Irigasi Perpompaaan Menengah Wilayah Tengah 4 Unit di Kabupaten Bengkayang 2 Unit, Kab. Mempawah 1 Unit, Kab. Sanggau 1 Unit - Rehab Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) 63 Unit di Kabupaten Bengkayang 10 Unit, Kab. Landak 12 Unit, Kab. Ketapang 8 Unit, Kab. Sambas 10 Unit, Kab. Sanggau 10 Unit, Kab. Melawi 8 Unit, Kab. Sekadau 5 Unit	6.765.000.000	6.582.334.000	97,30	182.666.000
		1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	- Optimasi Lahan (SID, Pengawasan, Pengolahan lahan dan perbaikan infrastruktur) di Kabupaten Landak 5 Km2, Kab. Ketapang 9 Km2, Kab. Mempawah 10 Km2, Kab. Sambas 15 Km2, Kab. Sanggau 6 Km2	22.601.250.000	21.831.891.481	96,60	769.358.519
		1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	- Bimtek dan Movev Alsintan (Provinsi)	195.000.000	143.313.300	73,49	51.686.700
		3993	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	- Penyusunan E-RDKK Pupuk Bersubsidi (Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota)	2.010.570.000	1.498.947.250	74,55	511.622.750
				- Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi (Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota)	1.598.800.000	1.265.866.600	79,18	332.933.400
		3994	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	- Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Asuransi Pertanian (Provinsi, Kabupaten Landak, Mempawah, Sanggau)	112.140.000	49.061.600	43,75	63.078.400
		018.03.WA	Program Dukungan Manajemen		1.041.360.000	862.347.383	82,81	179.012.617
		1766	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan	Provinsi	1.041.360.000	862.347.383	82,81	179.012.617



2. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat

Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat bersumber dari:

- a. Direktorat Jenderal Perkebunan (Satker 139127) sebanyak 2 program dan 3 kegiatan.
- b. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Satker 139128) sebanyak 3 program dan 6 kegiatan.
- c. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Satker 139132) sebanyak 2 program dan 2 kegiatan.

Tabel 3.11

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBN
Sumber Dana Tugas Pembantuan Tahun 2022

No	DIPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keu
1	TUGAS PEMBANTUAN 05 DITJEN BUN	2.623.651.000	2.600.915.947	99,13%
2	TUGAS PEMBANTUAN 06 DITJEN PKH	14.577.865.000	13.141.218.916	90,15%
3	TUGAS PEMBANTUAN 08 DITJEN PSP	625.500.000	624.853.040	99,90%

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat

Mewujudkan percepatan pembangunan dan pembangunan berwawasan lingkungan tidak hanya di dukung anggaran dari daerah, melainkan juga dari pusat yang terangkum dalam kucuran dana Tugas Pembantuan (TP). Walaupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Guna percepatan pembangunan, terutama kegiatan yang berupa fisik dan keluaran hasil kegiatan dapat menambah aset tetap pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat kucuran dana pusat ini. Dikelola oleh Bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga.



Tabel 3.12

Program, Kegiatan dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2022

NO	PROGRAM /KEGIATAN	PAGU	REALISASI		
			Keuangan		Fisik
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
Bidang Sumber Daya Air					
1.	PROGRAM KETAHANAN SUMBER DAYA AIR	18.277.610.000	18.213.352.890	99,65%	100%
1	Kegiatan Operasi Rutin	536.242.000	515.522.950	96,14%	100%
2	Kegiatan Pemeliharaan Berkala	5.511.602.000	5.495.000.000	99,70%	100%
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin	12.229.766.000	12.202.829.940	99,78%	100%
2.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	1.251.011.000	968.678.667	77,43%	100%
1	Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	830.531.000	670.847.573	80,77%	100%
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	420.480.000	311.533.632	74,09%	100%
Bidang Bina Marga (kode satker 139034 / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar)					
3.	PELAKSANAAN PRESERVASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS JALAN NASIONAL	12.268.599.000	12.147.086.000	99,01%	99,06%
1	Layanan Penyiapan Dan Pengendalian Pelaksanaan	233.760.000	230.289.000	98,52%	98,52%
2	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	8.772.042.000	8.772.042.000	100%	100%
3	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	729.306.000	729.306.000	100%	100%
4	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (padat karya)	847.524.000	840.991.000	99,23%	100%
5	Preservasi Jembatan	577.767.000	577.767.000	100%	100%
6	Preservasi Rutin Jembatan (padat karya)	392.785.000	376.484.000	95,85%	72,52%
7	Layanan Dukungan Manajemen Satker	715.415.000	620.208.000	86,69%	86,85%
Total Anggaran		31.797.220.000	29.340.083.928	86,35%	99,53%

Analisis Program dan Kegiatan di Bandingkan Dengan Tahun Lalu.

Tabel 3.13

Perbandingan Realisasi Tahun 2021 dengan tahun 2022

NO.	SATKER	PAGU		REALISASI			
		2021	2022	2021		2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	139251 / OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SDA	18.883.123.000	19.528.621.000	18.825.487.000	99,30%	17.192.997.928	88,04%
2.	139034 / PELAKSANAAN PRESERVASI dan PENINGKATAN KAPASITAS JALAN NASIONAL	18.407.501.000	12.268.599.000	18.406.786.000	99,94%	12.147.086.000	99,01%
TOTAL ANGGARAN		37.290.624.000	31.797.220.000	37.232.273.000	99,84%	29.340.083.928	86,35%

Dibandingkan dengan tahun 2021 ada pengurangan anggaran pada tahun 2022 dengan nilai Rp5.493.404.000. Tidak hanya pengurangan anggaran, bahkan rata-rata realisasi mengalami penurunan 13,49% dari tahun 2022 (86,35%) berbanding tahun 2021 (99,84%). Penurunan kinerja ini perlu



mendapat perhatian mengingat rata-rata realisasi keuangan kurang dari 90% pada tahun 2022.

4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Pada Tahun 2021 Tugas Pembantuan Restorasi Gambut Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat mengelola DIPA dengan pagu dana sebesar Rp 34.362.229.000,-.

Tabel 3.14
Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan

No	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN	PROGRAM, KEGIATAN	SKPD PELAKSANA TEKNIS	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJ EN/KUM.1/2/2020 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada 7 (Tujuh) Gubernur untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2020	Program: Kualitas Lingkungan Hidup Kegiatan: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut Konservasi Kawasan/ Rehabilitasi Ekosistem	Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	34.362.229.000	30.950.786.415	90,07



5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 3.15
 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DIPA		VOLUME	REALISASI S/D BULAN INI				PERMASALAHAN	
		ALOKASI/PAGU REVISI K-6 (Rp)	PAGU APLIKASI SAKTI (Rp)		KEUANGAN (Rp)	%	FISIK (SATUAN)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	TRANSMIGRASI	1,765,135,000	1,447,955,000		1,197,048,100	82.67	-	82.67		
1	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi	1,665,998,000	1,348,818,000		1,113,127,000	82.53	-	82.53		
	1. <i>Perkara Hukum Kelompok Masyarakat</i>	36,360,000	36,360,000	5 Perkara	34,340,000	94.44	-	94.44	Revisi DIPA ke-6 Tanggal 16 September 2022	
	2. <i>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</i>	278,200,000	218,200,000	7 Lembaga	173,000,000	79.29	-	79.29		
	3. <i>Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat/ Sosbud</i>	738,466,000	738,466,000	31 Orang	555,970,000	75.29	-	75.29		
	4. <i>Bantuan Peralatan/ Sarana</i>	250,000,000	-	1 Unit	-	0.00	-	0.00		BLOKIR
	5. <i>Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)</i>	127,500,000	127,500,000	13 Meter	127,147,000	99.72	-	99.72		
	6. <i>Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat/SHM</i>	47,880,000	40,700,000	15 Orang	35,300,000	86.73	-	86.73		
	7. <i>Sarana Pengembangan Kawasan</i>	180,000,000	180,000,000	1 Unit	179,850,000	99.92	-	99.92		
	8. <i>Prasarana Jaringan Sumber Daya Air</i>	7,592,000	7,592,000	1 Km	7,520,000	99.05	-	99.05		
2	Program Dukungan Manajemen	99,137,000	99,137,000		83,921,100	84.65	-	84.65		
	1. <i>Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi</i>	99,137,000	99,137,000	1 Layanan	83,921,100	84.65	-	84.65		
J U M L A H		1,765,135,000	1,447,955,000		1,197,048,100	82.67		82.67		



6. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PNBP Pascaproduksi, selain pengadaan sarana dan prasarananya, dilakukan juga pengadaan sumberdaya manusianya yang merupakan petugas pencatatan dan penimbangan hasil produksi perikanan yang selanjutnya di kalkulasikan menjadi nilai pajak pasca produksi yang nantinya harus dibayarkan oleh para pelaku usaha. Pengadaan petugas pencatatan dan penimbangan hasil produksi ini berada dibawah kewenangan dan koordinasi pusat melalui unit kerja pusat yang ada di daerah yaitu PPN Pemangkat di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya ditempatkan di wilayah pendukung penerapan PNBP Pascaproduksi.

Tabel 3.16

Capaian Realsasi Anggaran TP Ini Sebesar 97,77% Dengan Rincian

NO.	PROGRAM KEGIATAN	PAGU	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	361.125.000	355.643.800	98.48	100
	Penyediaan prasarana/fasilitas PNBP pasca produksi di wilayah Pelabuhan Perikanan Sungai Rengas	361.125.000	355.643.800	98.48	100
a.	Belanja Bahan	1.445.000	1.445.000	100	100
b.	Belanja Honor Output Kegiatan	680.000	680.000	100	100
c.	Belanja Langganan Telepon/ Internet	5.000.000	458.000	9.18	100
d.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	354.000.000	353.060.000	99.73	100
	Pengadaan CCTV	30.000.000	29.896.000	99.65	100
	Pengadaan troli	50.000.000	49.900.000	99.80	100
	Keranjang	74.000.000	73.889.000	99.85	100
	Pagar pembatas Dermaga I	119.680.000	119.306.000	99.69	100
	Pagar pembatas Dermaga II	80.320.000	80.069.000	99.69	100
2.	Program Dukungan Manajemen	17.700.000	14.750.000	83.33	100
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	17.700.000	14.750.000	83.33	100
	TOTAL ANGGARAN	378.825.000	370.393.800	97.77	100



3.4 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Pada Tahun 2022 tidak ada Tugas Pembantuan Urusan Pemerintah yang Diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

3.5 Permasalahan dan Kendala

1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
 - a. Kesulitan dalam menjangkau lokasi yang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan karena kondisi jalan yang tidak baik itu ditempuh melalui darat maupun air atau sungai yang berdampak langsung pada mahalanya biaya angkutan atau biaya transportasi, sehingga berdampak tidak optimal pelaksana program. Kegiatan monev tidak bisa lancar demikian juga dengan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Ketersediaan benih tidak sesuai jadwal tanam sehingga pada saat musim tanam benih belum tersedia sehingga petani tidak dapat melakukan pertanaman, karena sebagian besar penyediaan benih dari luar Kalimantan Barat.
 - c. Kondisi perubahan cuaca, anomali iklim berpengaruh besar terhadap keberhasilan program dan kegiatan di lapangan terutama dalam mendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura.
 - d. Pada bulan Oktober 2022 Provinsi Kalimantan Barat mengalami musibah bencana banjir di beberapa Kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dimana pada tahun ini musibah banjir agak lama tetapi tidak berkepanjangan seperti tahun sebelumnya di tahun 2021 dimana ketinggian banjir berkisar 50 cm sampai 1 meter. Akibat banjir tersebut semua aktivitas lumpuh total baik dari sektor ekonomi, perdagangan, perikanan, peternakan bahkan tak kalah lagi sektor pertanian, sehingga pertanian di 7 Kabupaten tersebut mengalami kerusakan total dan gagal panen. Sehingga jadwal tanam di 7 Kabupaten mengalami pengunduran waktu, yaitu bulan November akhir.
 - e. Revisi anggaran dari pusat yang terlalu sering memperlambat pelaksanaan kegiatan, disebabkan ketidak adanya konsistensi dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang dipengaruhi oleh adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Utara yang



- berdampak pada lambatnya pelaksanaan kegiatan namun realisasi akhirnya tetap baik.
- f. Terjadinya pemangkasan anggaran besar-besaran diakhir bulan Juni 2022 yang mana hasil dari pemangkasan anggaran untuk pembiayaan pembangunan IKN, hal ini menyebabkan ketidakpastian anggaran kegiatan sehingga kegiatan dilapangan pun terganggu.
 - g. Selain revisi penghematan yang dilakukan oleh Eselon 1 Kementerian Pertanian pada bulan Juni, juga melakukan revisi ditingkat KPA dan Kanwil DJPB untuk penyesuaian kegiatan yang mana ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Hal ini juga menyebabkan terhambatnya realisasi anggaran di Satker Kami, sehingga realisasi anggaran baru meningkat di Triwulan terakhir (Oktober-Desember 2022).
 - h. Dengan banyaknya revisi anggaran baik yang dilakukan oleh Eselon-1 Kementerian Pertanian maupun oleh Satker Dinas Tanaman Pangan yang dilakukan di Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat sehingga berdampak pada realisasi fisik dilapangan, yang mana CPCL yang sudah disiapkan ditingkat Kabupaten/Kota selalu berubah-ubah yang diakibatkan oleh perubahan anggaran tersebut.
2. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat
- a. Juknis kegiatan Fasilitasi Pengolahan Alat Pasca Panen Tanaman Kelapa dari pusat terlambat (terbit bulan November) sehingga pelaksanaan terhambat.
 - b. Pengadaan Gedung dan Bangunan Pengolahan Kelapa terlambat dikarenakan menunggu alat pengolahan yang dialokasikan pada DIPA Pusat.
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Lada seluas 2 Ha di Kabupaten Sambas terlambat disebabkan adanya revisi pupuk majemuk (Urea, KCL, SP36) menjadi pupuk tunggal (NPK).
 - d. Peningkatan Produksi Pakan:
 - 1) Bahan Baku pakan tidak tersedia sepanjang waktu dan dengan kualitas pakan yang tidak konsisten.
 - 2) Penempatan pakan beserta bahan berbahaya lain seperti pestisida, herbisida, dan lain-lain yang beresiko mencermati pakan apabila disimpan tidak memperhatikan syarat fisik dan lingkungan pakan/bahan pakan.



- e. Penyediaan Benih dan Bibit Ternak:
 - 1) Pergantian Pejabat/Petugas Pengampu.
 - 2) Kejadian Bencana Banjir.
 - 3) Ketidaktertiban SOP dan Pelaporan.
 - 4) Penandaan pada ternak yang dilepas liar dipadang penggembalaan dan kebun sawit.
 - 5) Belum optimalnya koordinasi dengan pelaku usaha pakan ternak ditingkat daerah.
- f. Pendampingan Kabupaten kurang optimal.
- g. Kelompok tidak segera melaporkan perubahan rincian kebutuhan belanja pada saat pelaksanaan kegiatan.
- h. Kelompok tani tidak tertib untuk mencatat dan mendokumentasikan bukti belanja.
- i. Pendamping kelompok dan kelompok tidak adaptif memanfaatkan geotagging camera untuk kebutuhan dokumentasi kegiatan.
- j. Kekurangan dana untuk pembangunan fisik irigasi oleh kelompok tidak dikomunikasikan ke pendamping.



3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 3.17

Permasalahan dan Kendala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

No	Uraian Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan	Target (Output)	Realisasi (Output)	Permasalahan	Upaya/Tindak Lanjut Mengatasi Permasalahan
1.	<p>Program: Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>Kegiatan: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut</p> <p>Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem Pengolahan, dan/atau Penimbunan</p> <p>Rincian Kegiatan: Sekat Kanal, Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor, Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal, Operasional Pembasahan, Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar, Revitalisasi Sumber Mata Pencarian Masyarakat, Penyusunan RPPEG Provinsi Kalimantan Barat, Fasilitas Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Barat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Sekat Kanal - Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor - Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal - Operasional Pembasahan - Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar - Revitalisasi Sumber Mata Pencarian Masyarakat - Penyusunan RPPEG Provinsi Kalimantan Barat - Fasilitas Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Barat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Sekat Kanal - Pemeliharaan dan Perbaikan Sumur Bor - Pemeliharaan dan Perbaikan Sekat Kanal - Operasional Pembasahan - Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar - Revitalisasi Sumber Mata Pencarian Masyarakat - Penyusunan RPPEG Provinsi Kalimantan Barat - Fasilitas Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Barat 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM di Satker Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. SDM di Satker Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat masih didominasi oleh staf administrasi kegiatan. Minimnya staf teknis lapangan terutama yang paham mengenai pelaksanaan kegiatan restorasi gambut. - Kondisi cuaca berupa intensitas hujan yang tinggi menyebabkan banyak kendala dilapangan diantaranya jalan yang sulit ditempuh, banjir, mobilisasi bahan terganggu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk permasalahan SDM, upaya yang dapat dilakukan untuk kegiatan selanjutnya adalah dengan menambah jumlah personil yang terlibat dalam kegiatan Tugas Pembantuan. Selain itu juga mengikutsertakan OPD di tingkat Kabupaten untuk hal yang lebih ke teknis. - Untuk permasalahan teknis di lapangan, diharapkan dengan dimulainya kegiatan yang lebih awal, maka dapat menghindari bulan-bulan basah yang memang tidak ideal untuk pelaksanaan kegiatan, mengingat akses lapangan dan konstruksi yang mempertimbangkan factor cuaca dalam pelaksanaannya.

4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat

Adapun yang menjadi permasalahan dan kendala dalam pengelolaan Dana Tugas Pembantuan di Satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:

- Perubahan petugas TLS (Tenaga Lintas Sektor) sehingga harus merubah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
- Revisi DIPA untuk Petugas Fasilitator yang semula 12 bulan menjadi 6 bulan.
- Perubahan tenaga medis dan guru sehingga harus merubah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat tersebut diatas, telah ditempuh langkah-langkah sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan, sebagai berikut:



- a. Mengubah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Petugas TLS (Tenaga Lintas Sektor).
 - b. Menyesuaikan dengan DIPA Baru dalam melaksanakan kegiatan.
 - c. Mengubah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tenaga Medis dan Guru.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
Satker Pelaksanaan Perservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional. Beberapa masalah yang dihadapi:
- a. Kurangnya pengaturan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sehingga tidak terarah, dikarenakan jumlah personil Penyedia Jasa tidak mencukupi untuk kebutuhan lapangan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
 - b. Penandatanganan Kontrak baru dilakukan pada bulan Januari 2022 mengakibatkan progress pekerjaan masih rendah atau tidak ada kegiatan di awal Bulan Januari.
 - c. AMP Penyedia Jasa sering mengalami kerusakan sehingga Produksi Hotmix tidak sesuai dengan rencana kerja perhari.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan (TP) adalah sebagai berikut:
- a. Kegiatan Tugas Pembantuan terkendala dengan pembukaan rekening, sehingga kegiatan terlaksana pada pertengahan tahun yaitu pada bulan Agustus sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan capaian IKPA
 - b. Kekeliruan dalam input kode barang yang sesuai untuk jenis barang pengadaan, sehingga muncul dalam To Do List yang harus ditindaklanjuti dengan melakukan Reklas Barang Masuk dan Keluar
 - c. Pemahaman kode barang yang nilainya dibawah Rp 1.000.000, nilainya harus di kapitalisasi, dan seharusnya masuk ke akun yang berbeda.

3.6 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
Tindak Lanjut Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagai berikut:



- a. Pelaksanaan kegiatan baik berupa fisik maupun pengadaan barang seperti benih dan saprodi sebaiknya direncanakan secara matang agar supaya pelaksanaan kegiatan dilapangan tepat waktunya, terutama bantuan benih dan pupuk karena musim tanam petani sudah terjadwal, sehingga jika terjadi keterlambatan dalam pengadaan dan pendistribusian akan berakibat fatal atau gagal panen (Puso).
 - b. Ketersediaan benih hendaknya memperhatikan jadwal tanam dan penggunaan varietas bermutu dalam upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas baik tanaman pangan maupun hortikulutra. Perlu adanya koordinasi dan pembinaan kepada para penangkar benih sehingga kita bisa mengontrol ketersediaan benih di tingkat lapangan agar tidak terjadi kelangkaan benih.
 - c. Prasarana pertanian hendaknya disesuaikan dengan kondisi dilapangan, seperti embung, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, irigasi perpompaan, rehab jaringan irigasi, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan petani dilapangan. Disamping itu, satuan biaya untuk prasarana pertanian sebaiknya juga disesuaikan dengan kondisi dilapangan, sehingga hasilnya bisa maksimal.
 - d. Perbaikan infrastruktur seperti jalan akan dapat mempermudah transportasi dan dapat menekan biaya-biaya operasional khususnya biaya angkut, dalam hal ini tetap bersinergi dengan OPD terkait seperti PU, Perhubungan dan Perindag.
 - e. Dalam pelaksanaan kegiatan fisik, hendaknya memperhatikan kondisi cuaca dengan memperhitungkan perubahan cuaca yang ada sehingga dapat mengurangi keterlambatan pelaksanaan kegiatan, dan perlu ditingkatkan penelitian dan pengembangan penelitian untuk menghasilkan teknologi yang sesuai
 - f. Dalam penyusunan perencanaan hendaknya dilakukan secara detail dan memperhatikan kondisi dimasing-masing daerah, sehingga dapat meminimalisir kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dan atau sulit untuk dilaksanakan.
2. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat
 - a. Juknis yang dikeluarkan sebaiknya di awal tahun sehingga pekerjaan bisa cepat di laksanakan.



- b. Berkoordinasi dengan Satker Pusat yang melaksanakan pengadaan alat pengolahan.
 - c. Perlu cepat mencermati kebutuhan petani agar segera disesuaikan dengan POK.
 - d. Perlu mencari alternatif sumber bahan pakan untukantisipasi tingginya harga pakan.
 - e. Berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait di daerah dan Pusat agar pelaksanaan kegiatan penandaan bisa terlaksana sesuai target.
 - f. koordinasi yang lebih intensif lagi dengan Dinas Kabupaten/Kota untuk turut serta melakukan pendampingan ke kelompok tani terkait pelaksanaan fisik dan pelaporan kegiatan.
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
- a. Untuk permasalahan SDM, upaya yang dapat dilakukan untuk kegiatan selanjutnya adalah dengan menambah jumlah personil yang terlibat dalam kegiatan Tugas Pembantuan. Selain itu juga mengikutsertakan OPD di tingkat Kabupaten untuk hal yang lebih ke teknis.
 - b. Untuk permasalahan teknis di lapangan, diharapkan dengan dimulainya kegiatan yang lebih awal, maka dapat menghindari bulan-bulan basah yang memang tidak ideal untuk pelaksanaan kegiatan, mengingat akses lapangan dan konstruksi yang mempertimbangkan factor cuaca dalam pelaksanaannya.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat
- Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat tersebut diatas, telah ditempuh langkah-langkah sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan, sebagai berikut:
- a. Berkoordinasikan dengan masing-masing Direktorat agar kendalakendala yang dihadapi daerah dapat diselesaikan dengan baik terutama kegiatan yang akan dilaksanakan dan kegiatan yang di revisi atau yang akan di potong, selanjutnya tetap berkoordinasi dengan bagian keuangan Ditjen PKTrans.
 - b. Sehubungan dengan minimnya tenaga ASN yang ada di bidang PKPT telah dikoordinasikan oleh Kepala Bidang dengan Kepala Dinas dan diharapkan Dinas dapat mengusulkan ke BKD Provinsi untuk penambahan



tenaga ASN di bidang PKPT dan diharapkan adanya pengkaderan ASN untuk mengikuti pelatihan bendahara.

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
 - a. Mendorong Penyedia Jasa untuk meningkatkan skill personil dan menyesuaikan personil lapangan dengan kebutuhan lapangan.
 - b. Selalu melakukan koordinasi dengan penyedia jasa untuk meningkatkan progress pekerjaan dengan menambah peralatan, waktu jam kerja (lembur) serta melaksanakan pengecekan rutin AMP sesuai dengan standar pemeliharaan alat.
 - c. Diharapkan penyedia Jasa dalam pelaksanaan di lapangan menyesuaikan pekerjaan yang dilaksanakan dengan jadwal rencana, untuk menghindari ketimpangan progres pekerjaan.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

Tindak lanjut terhadap kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

 - a. Komunikasi dan konsultasi dengan pusat baik melalui surat secara resmi dan juga komunikasi lainnya untuk mempercepat proses pembukaan nomer rekening
 - b. Melakukan Reklas Barang Masuk dan Keluar dengan pembuatan SK sebagai persyaratan dalam proses reklas tersebut sehingga kode barang yang keliru dapat dirubah dengan kode yang sesuai
 - c. Keterlambatan melakukan revisi perubahan kode akun yang nilainya harus dikapitalisasi menjadi akun yang sesuai, karena hal tersebut terjadi kepada seluruh satker TP, maka hanya menjadi catatan di To Do List aplikasi Sakti.

BAB IV



PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Kalbar Maju Lestari
dalam Keberagaman

**BAB IV****PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL****4.1 Urusan Pendidikan**

Laporan penerapan dan pencapaian standar minimal urusan pendidikan memuat:

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan adalah Pendidikan Menengah yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Pendidikan Khusus.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Target Capaian SPM Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pendidikan menengah	Jumlah warga Negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%
2.	Pendidikan khusus	Jumlah warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	100%

4.1.3 Realisasi

Tabel 4.2
Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi
1.	Pendidikan menengah	Jumlah warga Negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	87,024 %
2.	Pendidikan khusus	Jumlah warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	58,044 %



Berdasarkan tabel pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022 di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian layanan dasar Pendidikan Menengah

Capaian layanan dasar pendidikan menengah pada tahun 2022 sebesar 87,024 % dari target 100%.

Mengukur tingkat partisipasi Warga Negara usia 16 – 18 tahun dalam Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan.

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah penduduk usia 16 s.d. 18 tahun yang sudah} \\ & \text{tamat atau sedang belajar di sekolah menengah} \\ & = \frac{\text{atas}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 s.d. 18 tahun pada}} \times 100\% \\ & \quad \text{Provinsi Kalimantan Barat} \\ & = \frac{247.179 \text{ orang}}{284.034 \text{ orang}} \times 100\% \\ & = \mathbf{87,024 \%} \end{aligned}$$

2. Capaian Layanan Dasar Pendidikan Khusus

Jumlah penduduk Kalimantan Barat usia 4 s.d. 18 tahun yang memiliki kebutuhan khusus pada tahun 2022 sebanyak 3.537 orang, sementara dari jumlah tersebut sebanyak 2.053 orang bersekolah pada sekolah pendidikan khusus. Capaian layanan dasar pendidikan khusus pada tahun 2022 sebesar 58,044 % dari target 100%.

Mengukur tingkat partisipasi Warga Negara usia 4 s.d. 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus.

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah penduduk usia 4 s.d. 18 tahun disabilitas} \\ & = \frac{\text{yang bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 4 s.d. 18 tahun disabilitas}} \times 100\% \\ & \quad \text{pada Provinsi Kalimantan Barat} \\ & = \frac{2.053 \text{ orang}}{3.537 \text{ orang}} \times 100\% \\ & = \mathbf{58,044 \%} \end{aligned}$$



3. Mutu Layanan Dasar Pendidikan Menengah

Tabel 4.3
Pendidikan Menengah Atas

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu (%)
1.	Buku teks pelajaran	0	0	0	0 %
2.	Perlengkapan belajar	26046	26046	0	100%
3.	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	7162	7162	0	100%
4.	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	687	670	17	97,53%
5.	Penyediaan biaya personil peserta didik	207057	207057	0	100%
6.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	8801	8447	354	95,98%
7.	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah yang berkualifikasi S1/D-IV)	687	687	0	100%
8.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	1262	1158	104	91,76%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat dua aspek dari mutu layanan pendidikan menengah atas yang mencapai 100% yaitu perlengkapan belajar, jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan, penyediaan biaya personil peserta didik dan kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV. Selain itu terdapat tiga aspek yang memiliki nilai capaian sekitar 90%-an yaitu satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C, kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/DIV, dan kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin dan tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat dengan dan buku teks pelajaran dengan nilai capaian sebesar 0%.

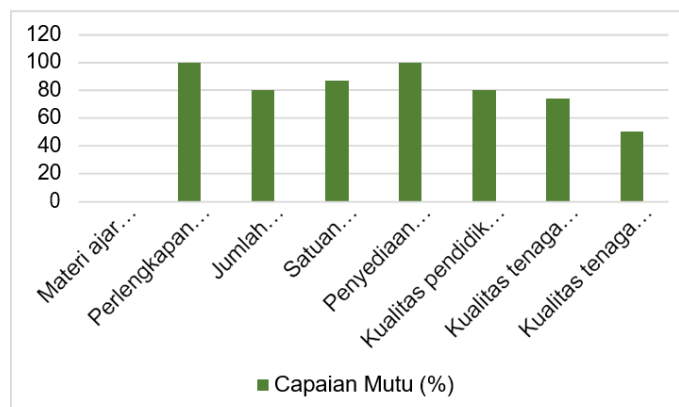


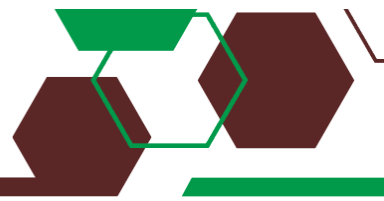
4. Mutu Layanan Dasar Pendidikan Khusus

Tabel 4.4

Mutu Layanan Dasar Pendidikan Khusus

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Belum Tersedia	Capaian Mutu (%)
1.	Materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas	0	0	0	0%
2.	Perlengkapan belajar	137	137	0	100%
3.	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	23	21	2	91,30%
4.	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	320	317	3	99,06%
5.	Penyediaan biaya personil peserta didik	973	973	0	100%
6.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi SI/D-IV	137	111	26	81,02%
7.	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah yang berkualifikasi S1/D-IV)	23	23	0	100%
8.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	19	18	1	94,74%

Gambar 4.1
Pendidikan Khusus



Terdapat dua aspek capaian mutu layanan dasar pendidikan khusus yang mencapai 100% yaitu perlengkapan belajar, penyediaan biaya personil peserta didik dan kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualitas S1/D-IV, serta aspek capaian lainnya mencapai 80%-90% dan penyediaan materi ajar sesuai ragam disabilitas yang nilai capaiannya 0%.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang urusan pendidikan diselenggarakan dengan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.505.858.083.640,-.

Berikut uraian alokasi APBD pada urusan pendidikan:

Tabel 4.5
Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan

No	Uraian	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	639.475.985.659
2	Program Pengelolaan Pendidikan	894.105.317.231
3	Program Pengembangan Kurikulum	1.217.316.300
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	999.687.600
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	108.529.800
6	Program Pengembangan Kebudayaan	14.746.729.300
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	204.997.500
TOTAL		1.550.858.083.640

4.1.5 Dukungan Personil

Penyelenggaraan SPM bidang urusan pendidikan dilaksanakan baik oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat maupun oleh tenaga kependidikan sesuai dengan jenis SPM yang dilaksanakan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak **150 orang** yang terdiri dari eselon II, III, pejabat fungsional dan staf di bidang masing - masing, yaitu: Bidang Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Bidang Pembinaan Kebudayaan. Pelaksanaan pemenuhan SPM juga ditunjang oleh tenaga kependidikan yang terdiri dari **4.543 orang guru SMA, SMK dan SLB serta Kepala Sekolah SMA sebanyak 289 orang, Kepala Sekolah SMK sebanyak 119 orang dan Kepala Sekolah SLB sebanyak 16 orang.**



4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan tugas oleh para pelaksana kegiatan menghadapi beberapa permasalahan. Berbagai upaya dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Permasalahan pelaksanaan urusan pendidikan

Terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan urusan pendidikan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam bidang Pendidikan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat hanya mempunyai kewenangan untuk pendidikan menengah (SMA/ SMK) dan pendidikan khusus. Sedangkan pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar (SD dan SMP) dan pendidikan non formal (Paket A, B, dan C). Hal ini menyebabkan Pemerintah Provinsi harus lebih fokus kepada kewenangannya.
- b. Luasnya wilayah Kalimantan Barat mengakibatkan belum meratanya akses pelayanan pendidikan, khususnya di daerah kawasan khusus perbatasan, terpencil dan tertinggal. sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang masih rendah/ masih di bawah angka Nasional.
- c. Masih belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan yang terintegrasi dan tersinkronisasi sesuai dengan kewenangan masing-masing Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- d. Belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di kabupaten/ kota, dan masih menumpuk di wilayah perkotaan sehingga pelayanan pendidikan pun tidak merata.
- e. Pemetaan pendidikan di Kabupaten/Kota terhadap data pendidikan di Provinsi masih belum sinkron dan sinergis terhadap target dan indikator kinerja pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat.
- f. Penginputan data pendidikan sekolah melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh sekolah yang keliru menyebabkan kualitas data yang dihasilkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.



- g. Belum optimalnya manajemen sekolah karena masih kurangnya SDM Tenaga Kependidikan (Pustakawan, Laboran, Arsiparis, Keuangan) yang profesional.
 - h. Belum maksimalnya pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) semua jenis/jenjang melalui pendataan, pemetaan, pemerataan dan penyebaran.
 - i. Terdapat sejumlah guru yang pendidikannya tidak linear dan tidak sesuai kualifikasi dan kompetensi mata pelajaran.
 - j. Distribusi guru ASN yang tidak merata baik secara kualifikasi, kompetensi dan jumlah sehingga masih banyak sekolah terutama di wilayah perbatasan dan tertinggal yang kekurangan guru ASN.
 - k. Masih rendahnya jumlah Guru yang bersertifikat pendidik dan masih rendahnya hasil Uji Kompetensi Guru dan pengawas di Kalimantan Barat.
2. Solusi untuk mengatasi permasalahan
- a. Menyelenggarakan Forum OPD dan menjadikan program pendidikan di daerah 3T sebagai salah satu prioritas dan mendorong kabupaten/ kota untuk menetapkan daerah khusus.
 - b. Terdapat beberapa program/kegiatan yang dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pendanaan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Data pokok pendidikan yang akurat dan valid serta terintegrasi.
 - d. Perencanaan program tepat sasaran di tingkat Kabupaten/Kota dalam kaitannya peningkatan Pendidikan.
 - e. Strategi rencana program prioritas, sangat prioritas, dan program lanjutan.
 - f. Pemetaan program kegiatan yang tepat sasaran.
 - g. Payung hukum yang jelas (UU, PP, Permen, Perda, dan turunannya).
 - h. Keterlibatan dan komitmen pemangku kebijakan penyelesaian masalah pendidikan dapat terlaksana dengan baik (DPRD, BAPPEDA, Kemenag, Kemkes, PU, PLN , BKAD, Penegak Hukum, Dewan Pendidikan, PGRI, Masyarakat, DUDI, dll).
 - i. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar bersama dengan DPRD Komisi D Provinsi Kalimantan Barat akan berupaya mengusulkan ke MENPAN-RI dalam hal mengatasi kekurangan guru tersebut dengan mengadakan program sistem guru kontrak.



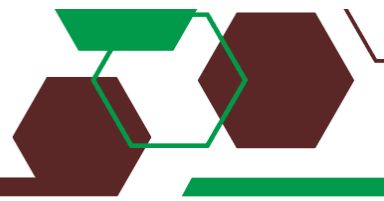
- j. Adanya workshop dan pelatihan untuk sinkronisasi data pendidikan baik dengan unsur dinas kabupaten/kota maupun dengan pimpinan satuan pendidikan di tingkat sekolah agar lebih efektif.
- k. Lebih mengoptimalkan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana sekolah seperti USB, RKB, Laboratorium dll, dalam rangka mencapai APK 100%, meningkatkan APM, Rata-rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah.
- l. Adanya dukungan dana dari pemerintah (BOS) yang memungkinkan sekolah-sekolah lebih mampu melaksanakan program-program yang direncanakan. Namun, untuk sekolah-sekolah (SD) kecil dengan siswa kurang dari 100 siswa, perlu tambahan dukungan dana dari daerah (BOSDA) yang diberikan ke sekolah.
- m. Guna meningkatkan mutu pendidikan dan sarana prasarana pendidikan di Kalimantan Barat, diharapkan agar pemerintah Kabupaten/Kota juga menganggarkan dana sharing pada APBD Kabupaten/Kota masing-masing mengingat kemampuan APBD Provinsi tidak mampu mengakomodir seluruh kebutuhan anggaran semua Kabupaten/Kota.
- n. Perlunya kegiatan yang secara khusus menunjang penginventarisasian seni budaya yang menyangkut calon cagar budaya, kesenian tradisi, dan adat istiadat yang tersebar di Kalimantan Barat.
- o. Perlunya peningkatan SDM untuk Tim Ahli Cagar Budaya, tenaga lapangan dan atau operator cagar budaya untuk pencatatan serta registrasi Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB)
- p. Perlunya ketersediaan anggaran yang memadai untuk infrastruktur pengembangan budaya dan seni daerah, seperti panggung pertunjukan seni dan budaya yang sesuai standar.
- q. Optimalisasi pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku seni dan budaya di Kalimantan Barat.

4.2 Urusan Kesehatan

Laporan penerapan dan pencapaian standar minimal urusan kesehatan memuat:

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4.6

Target Capaian SPM Urusan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%

4.2.3 Realisasi

Tabel 4.7

Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%

Berdasarkan tabel pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022 di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:



1. Capaian layanan dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana.

Capaian layanan dasar pada indikator tersebut pada tahun 2022 sebesar 100 % dari target 100%,. Dengan jumlah penduduk Kalimantan Barat yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 1.968.306 orang dan terlayani semuanya sehingga realisasi mencapai 100%.

Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat} \\ & \text{bencana dan/atau berpotensi bencana yang} \\ & \text{mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun} \\ & \text{= } \frac{\text{waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat}} \times 100\% \\ & \text{bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu} \\ & \text{tahun yang sama} \\ & \\ & \text{= } \frac{1.968.306 \text{ orang}}{1.968.306 \text{ orang}} \times 100\% \\ & \\ & \text{= } \mathbf{100 \%} \end{aligned}$$

2. Capaian layanan dasar pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi.

Capaian layanan dasar pada indikator ini mencapai 100% dari target 100%, pemerintah provinsi Kalimantan Barat bekerja maksimal dalam menangani kejadian luar biasa pandemi covid-19 yang telah melanda Indonesia sejak bulan maret tahun 2022.

Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah orang yang terdampak dan beresiko pada} \\ & \text{= } \frac{\text{situasi KLB yang mendapatkan pelayanan}}{\text{Jumlah orang yang terdampak dan beresiko pada}} \times 100\% \\ & \text{kesehatan sesuai standar} \\ & \text{situasi KLB} \\ & \\ & \text{= } \frac{3.603.082 \text{ orang}}{3.603.082 \text{ orang}} \times 100\% \\ & \\ & \text{= } \mathbf{100 \%} \end{aligned}$$

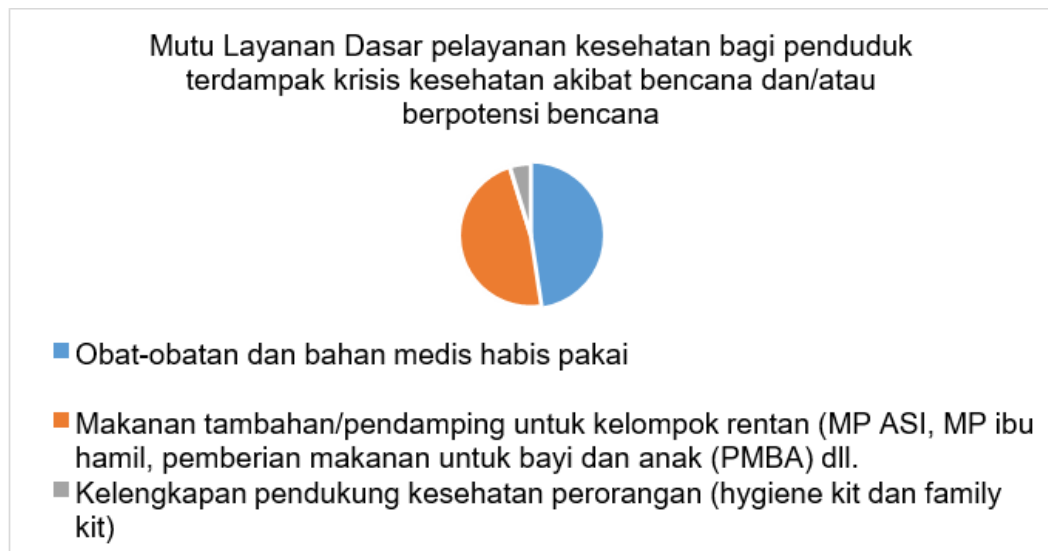


3. Mutu Layanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana.

Tabel 4.8

Mutu Pelayanan Dasar Kesehatan

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
1.	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	1.135.104	1.135.104	0	100%
2.	Makanan tambahan/pendamping untuk kelompok rentan (MP ASI, MP ibu hamil, pemberian makanan untuk bayi dan anak (PMBA) dll.	3.000	3.000	0	100%
3.	Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (hygiene kit dan family kit)	50	5	45	10%



Gambar 4.2

Mutu Layanan Dasar Kesehatan



4. Mutu Layanan Dasar pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi.

Tabel 4.9

Mutu Layanan Dasar pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi

No	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu(%)
1.	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	94.050	94.050	0	100%
2.	Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	983.909	983.909	0	100%
3.	Wadah pengiriman spesimen (specimencarrier)	4	4	0	100%
4.	Tempat sampah biologis	4553	4553	0	100%
5.	Formulir: form penyelidikan epidemiologiform/lembar KIE alat tulis yang diperlukan	50.830	50.830	0	100%
6.	Alat pemeriksaan fisik (stetoskop, thermometer badan, tensimeter, senter, test diagnostic cepat dll)	1708	1708	0	100%
7.	Alat dan bahan pengambilan specimen (tabung, pot, media amies, dll) untuk specimen yang berasal dari manusia dan lingkungan sesuai dengan jenis penyakit	50	50	0	100%

4.2.4 Alokasi Anggaran

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang urusan kesehatan diselenggarakan dengan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 22.861.124.449,-

Berikut uraian alokasi APBD pada urusan kesehatan:

Tabel 4.10

Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan

No	Indikator	Alokasi (Rp)	Sumber
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi.	Rp.400.000.000,-	APBD
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa.	Rp.22.461.124.449,-	APBD dan BOK



4.2.5 Dukungan Personil

Dalam upaya untuk mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang urusan kesehatan, kondisi sumber daya manusia yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat (Dinas Kesehatan, Unit Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat (UKKOM), Unit Laboratorium Kesehatan Daerah dan Unit Pelatihan Kesehatan didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 833 orang yang terdiri dari Personil PNS sebanyak 646 orang dan personil non PNS sebanyak 187 orang.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Permasalahan pada layanan dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana:
 - 1) Komunikasi dalam pengumpulan data di kabupaten/kota belum optimal dikarenakan dalam pengumpulan data tidak turun langsung kelapangan namun hanya melalui media komunikasi (Telp,WA)
 - 2) Belum ada kolaborasi yang baik dalam pengelolaan data dan kegiatan penanganan bencana (masih bersifat varsial).
 - 3) Tidak ada posko kesehatan penanganan bencana terpadu di Dinas Kesehatan.
 - 4) Evaluasi/ rapat dalam penanganan bencana jarang sekali dilakukan.
 - 5) Data penanganan bencana masih sangat minim dan tidak publikasikan.
 - 6) Relawan yang masuk tidak teregistrasi dengan baik oleh Dinas Kesehatan sebagai pengelola kegiatan kesehatan pada bencana sehingga berakibat bantuan yang tidak tepat sasaran dan tidak terjadwal dengan baik.
 - 7) Logistik bencana masih banyak yang kurang karena tidak ada koordinasi yang baik antar bidang/ seksi.
- b. Permasalahan pada layanan dasar pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi: Masih banyak penduduk yang tidak memeriksakan kesehatannya ke Fasyankes saat terjadinya Kejadian Luar Biasa, masih menganggap tidak terkena masalah, atau tidak merasakan sakit, hal ini menjadi cakupan layanan pada masyarakat yang terkena dampak, tidak dilayani, atau sakit tidak dirasakan sehingga tidak ke fasilitas pelayanan Kesehatan.



2. Solusi

a. Solusi pada layanan dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana:

- 1) Mengaktifkan dan mengoptimalkan komunikasi melalui media komunikasi (Telp,WA) baik grup maupun perorangan ke instansi terkait. Jika memungkinkan dapat turun langsung ke daerah yang mengalami bencana.
- 2) Kolaborasi dalam pengolahan data dapat dilakukan bersama dan 1 manajemen sehingga data yang ditampilkan diolah dengan baik dan menggambarkan penanganan bencana sesungguhnya.
- 3) Didirikannya posko Kesehatan dengan manajemen 1 pintu dan dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Kab/ Kota.
- 4) Evaluasi/ rapat dalam penanganan bencana Harus sering dilakukan dan dikomunikasikan untuk memperoleh gambaran serta Tindakan yang tepat di lapangan.
- 5) Relawan yang masuk harus diorganisir teregistrasi dengan baik oleh Dinas Kesehatan sebagai pengelola kegiatan kesehatan pada bencana sehingga berakibat bantuan yang tidak tepat sasaran dan tidak terjadwal dengan baik
- 6) Selalu mengupdate kebutuhan logistik dan melakukan koordinasi antar klaster kesehatan sehingga persediaan dan pendistribusian dapat terpenuhi dengan baik.

b. Solusi pada layanan dasar pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi:

Akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak saat terjadinya Kejadian Luar Biasa, melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama, juga kader atau perangkat desa, sehingga pesan yang akan disampaikan bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat dan yang pada akhirnya masyarakat mau memeriksakan Kesehatan ke Fasyankes, atau bisa mendapatkan pelayan Kesehatan, termasuk pengobatan dan propilaksis.



4.3 Urusan Pekerjaan Umum

Laporan penerapan dan pencapaian standar minimal memuat:

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4.11

Target Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	100%

4.3.3 Realisasi

Tabel 4.12

Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negarayang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	68,789%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahanair limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	0%

Berdasarkan tabel pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022 di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian layanan dasar Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota



Capaian layanan dasar pada indikator tersebut pada tahun 2022 sebesar 68,77% dari target 100%. Dengan jumlah penduduk Kalimantan Barat yang seharusnya dilayani sebanyak 535.877 orang, sementara yang sudah terlayani sebanyak 368.625 orang.

Mengukur persentase Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan} \\ & \text{air minum curah lintas kabupaten/kota} \\ = & \frac{\text{Jumlah warga negara yang berhak mendapatkan} \\ & \text{layanan}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan}} \times 100\% \\ = & \frac{368.625 \text{ orang}}{535.877 \text{ orang}} \times 100\% \\ = & \mathbf{68,789 \%} \end{aligned}$$

2. Capaian layanan dasar Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.

Capaian layanan dasar pada indikator ini mencapai 0% dari target 100% dikarenakan belum terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional dan kegiatan penyusunan rencana induk sistem pengelolaan limbah dilakukan pada tahun anggaran 2023.

Mengukur persentase Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan} \\ & \text{pengolahan air limbah domestik regional lintas} \\ = & \frac{\text{Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah warga negara yang berhak mendapatkan} \\ & \text{layanan}} \times 100\% \\ = & \frac{0 \text{ orang}}{0 \text{ orang}} \times 100\% \\ = & \mathbf{0\%} \end{aligned}$$



3. Mutu Layanan Dasar Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota.

Tabel 4.13
Mutu Layanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota.

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
1.	Pelayanan SPAM lintas kabupaten/kota	0	0	0	0%

4. Mutu Layanan Dasar Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.

Tabel 4.14
Mutu Layanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
1.	Pelayanan SPAL-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPAL- S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.	513.241	6.617	506.624	1,29%
2.	Pelayanan penyediaan prasarana dan/atau jasa melalui SPAL-T dengan kualitas pelayanan akses aman.	513.241	1.000	512.241	0,19%



4.3.4 Alokasi Anggaran

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang urusan Pekerjaan Umum diselenggarakan dengan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 terhadap program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum sebesar Rp117.343.082,00 dan Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah sebesar Rp120.046.229,00 yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021.

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kab/Kota Rp117.343.082,00.

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Rp120.046.229,00.

4.3.5 Dukungan Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan Pekerjaan Umum yang bertanggungjawab dalam program pengembangan sistem penyediaan air minum sebesar dan Program pengembangan sistem penyehatan lingkungan adalah sebanyak 8 PNS dan 1 Non PNS.

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Perangkat Daerah Pengampu SPM bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman di Provinsi Kalimantan Barat baru dibentuk pada akhir tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- b. Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal skala regional dan lintas kabupaten/kota, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;



- c. penyiapan untuk Penyusunan readines Criteria air minum dan air limbah Lintas kabupaten kota (skala regional);
 - d. Program dan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021;
 - e. Program dan Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2021;
 - f. Kualitas perencanaan dan pemograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM.
 - g. Minimnya dukungan anggaran terutama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - h. Belum optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi khususnya di kawasan strategis Provinsi dan rawan air / lintas kabupaten kota;
 - i. Perlu adanya lembaga pengelola dalam pelayanan air minum dan sanitasi lintas kab/kota;
 - j. Belum Optimalnya Pelayanan air minum dan sanitasi secara regional / skala lintas kabupaten/kota;
 - k. Belum optimalnya pemenuhan target cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum dan sanitasi yang layak dan aman;
 - l. Belum optimalnya secara terintegrasi terbangunnya pelaksanaan program kegiatan disektor air minum dan sanitasi didaerah.
 - m. Belum optimal sinkronisasi dan keterpaduan program kegiatan air minum dan sanitasi lintas kab/kota;
 - n. Menggali sumber-sumber dana selain APBD;
 - o. Dalam mendukung indikator kinerja utama bidang Cipta Karya, sebagian kewenangannya berada pada pemerintah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan perannya, pemerintah provinsi melakukan sharing kegiatan dengan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki, sehingga perlu ada anggaran yang diajukan melalui dana pusat (APBN).
2. Solusi
- a. Penyusunan Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota (skala regional) dan Rencana induk sistem penyediaan air limbah domestik, persampahan, drainase lintas kabupaten/kota (skala regional);



- b. Peningkatan Pembangunan SPAM di daerah dan SPAM lintas/kabupaten kota (skala regional);
- c. Peningkatan Pembangunan SPALD-Terpusat di daerah dan SPALD-T lintas kabupaten/kota (skala regional);
- d. Dukungan dan penyiapan readiness criteria sistem penyediaan air minum dan air limbah lintas kabupaten/kota di daerah;
- e. Perbaikan dan peningkatan pengelolaan kelembagaan sektor air minum dan sanitasi di daerah;
- f. Peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi program kegiatan dan pembiayaan kegiatan pusat, provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- g. Dukungan pihak swasta dalam bentuk program dan kegiatan CSR untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air minum dan air limbah;
- h. Perlunya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana strategis dengan melakukan sinkronisasi program dan sharing kegiatan. Membuat Berita Acara serah terima barang dengan pemerintah kabupaten/kota secara akurat. Perlu adanya kegiatan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman pada bidang Cipta Karya.

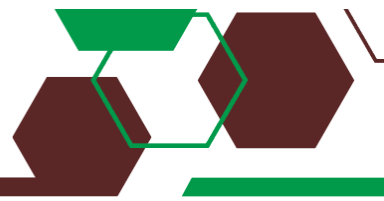
4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Laporan penerapan dan pencapaian standar minimal memuat:

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.



4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4.15

Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%

4.4.3 Realisasi

Tabel 4.16

Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

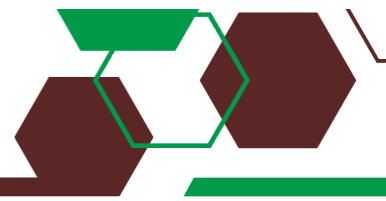
No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%

Berdasarkan tabel pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022 di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian layanan dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi

Capaian layanan dasar pada indikator tersebut pada tahun 2022 sebesar 100% dari target 100%. Dengan jumlah unit rumah korban bencana provinsi yang ditangani sebanyak 75 unit.

Mengukur persentase Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota:



$$\begin{aligned} & \text{Jumlah unit rumah korban bencana provinsi yang} \\ & = \frac{\text{ditangani tahun 2022}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana}} \times 100\% \\ & \text{provinsi yang akan ditangani pada tahun 2022} \\ & = \frac{75 \text{ unit}}{75 \text{ unit}} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

2. Capaian layanan dasar penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Pada Tahun 2022 tidak terjadi relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni sehingga tidak ada data yang dapat ditampilkan, berdasarkan hal tersebut Persentase warga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni tetap dinyatakan 100% karena merupakan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian layanan dasar pada indikator ini mencapai 100% dari target 100% dengan jumlah total rumah tangga yang menerima penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan+rumah tangga penerima subsidi+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni .

Mengukur persentase Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi:

$$\begin{aligned} & \text{rumah tangga yang menerima penggantian hak atas} \\ & \text{penguasaan tanah dan/atau bangunan+rumah} \\ & \text{tangga penerima subsidi+rumah tangga penerima} \\ & = \frac{\text{penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program}} \times 100\% \\ & \text{pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima} \\ & \text{layanan} \\ & = \frac{0 \text{ unit}}{0 \text{ unit}} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

penjelasan tambahan capaian ini memperoleh hasil 100% yaitu tidak terjadi relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni sehingga tidak ada data yang dapat ditampilkan.

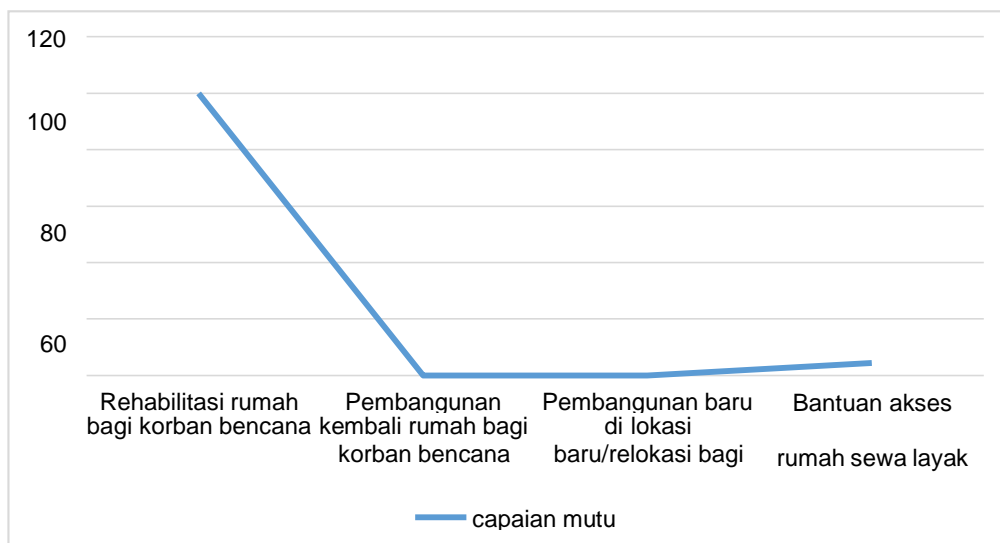


3. Mutu Layanan Dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi.

Tabel 4.17

Mutu Layanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
1.	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	75	75	0	100%
2.	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	0	0%
3.	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	0	0	0	0%
4.	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	0%



Gambar 4.3

Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi

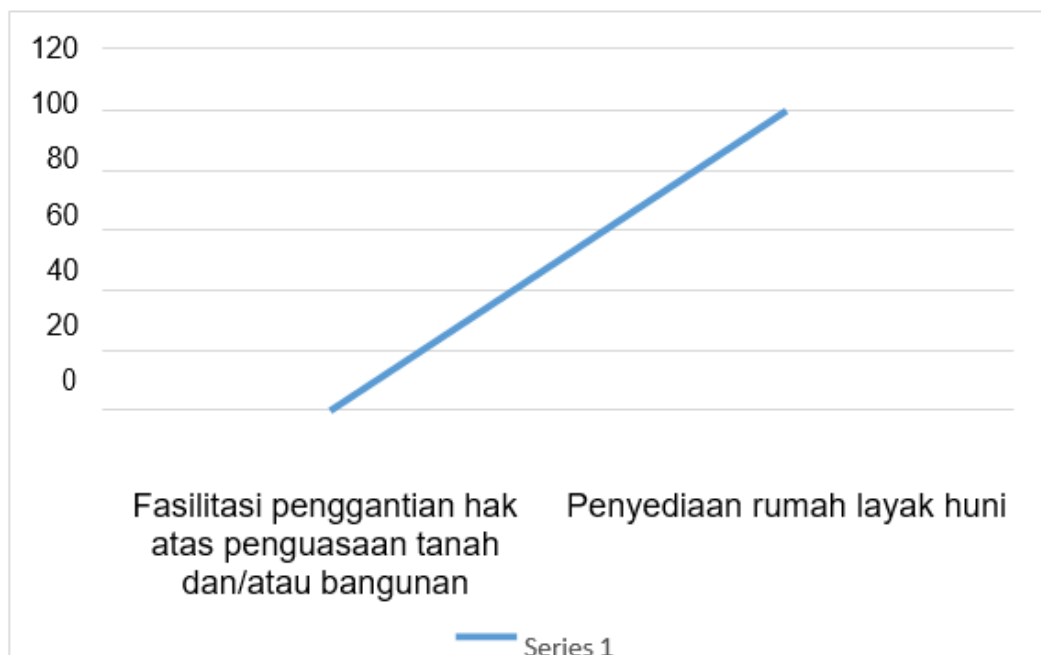


4. Mutu Layanan Dasar penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi

Tabel 4.18

Mutu Layanan Dasar Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
1.	Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan	0	0	0	0%
2.	Penyediaan rumah layak huni	0	0	0	100%



Gambar 4.4

Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

4.4.4 Alokasi Anggaran

Pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang urusan perumahan diselenggarakan dengan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 melalui Program pengembangan perumahan dan program kawasan permukiman dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 4.19

Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Kegiatan	Komponen Biaya	Perhitungan Biaya Kegiatan(Rp)
A.	Pengumpulan Data		
1.	Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	Perjalanan dinas Rapat-rapat	87.450.200
2.	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Surveyor Tenaga Ahli Perjalanan dinas Rapat-rapat	470.944.515
B.	Sosialisasi		
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Perjalanan dinas Rapat Sosialisasi Narasumber Konsumsi Rapat	34.094.996
C.	Rehabilitasi Rumah		
	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Perjalanan Dinas Rapat-rapat Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	1.453.027.000
D.	Pembangunan Baru/Relokasi Korban Bencana		
	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tenaga Ahli Rapat-rapat Perjalanan Dinas	229.184.427
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	2.916.529.627

4.4.5 Dukungan Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang perumahan rakyat yang bertanggungjawab dalam pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitas penyediaan rumah yang terkena relokasi program Pemerintah daerah Provinsi adalah sebanyak 12 (dua belas) orang pada bidang perumahan.



4.4.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan SPM Bidang perumahan Rakyat, tahun 2022 ada terdapat beberapa permasalahan/kendala SPM Perumahan Rakyat pada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat adalah:

- a. Anggaran untuk menunjang Sub Kegiatan Penerapan SPM masih minim pada dinas PKP Kabupaten/Kota sehingga ketika terjadi bencana yang seharusnya dapat dilaksanakan secara Bersama-sama sesuai pembagian tugas menjadi terhambat dan sepenuhnya dilaksanakan oleh tim provinsi saja.
- b. Kekurangan tenaga/Personil baik di Kab/Kota maupun Provinsi
- c. Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Bidang Perumahan baik di Kabupaten/Kota dan Provinsi belum memahami secara maksimal tentang penerapan SPM.
- d. Lokasi Rumah yang terkena bencana yang jauh dan medan yang sulit ditempuh sehingga menghambat penyaluran bahan material.
- e. Kurangnya Pemahaman Aparat Kecamatan/Desa terkait pemberian Bantuan untuk rumah Korban bencana sebagaimana aturan dalam penerapan SPM.

2. Solusi

Solusi dari Permasalahan/kendala ini guna mendukung pelaksanaan kedua indikator SPM bidang perumahan rakyat adalah:

- a. Pemerintah Pusat meminta Pemerintah Daerah untuk menerapkan SPM melalui pengintegrasian indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Akan tetapi penerapan SPM ini belum sepenuhnya menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan penganggaran oleh TAPD. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman yang sama dari Tim Anggaran Pemda Terdapat urgensi penerapan SPM di daerah, khususnya penganggaran SPM.
- b. Pemerintah Pusat melalui Kementerian teknis dapat melakukan fasilitasi bimbingan teknis dan pendampingan konsultan terhadap Penerapan, Penyusunan Laporan dan Perhitungan Pembiayaan SPM.



- c. Perlunya monitoring secara berkala oleh Kementerian karena fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan.
- d. dukungan penuh dari pusat dengan lebih intensif memberikan sosialisasi, bimtek, dan SDM untuk membentuk sistem informasi SPM.

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4.20

Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perdatan perkada di Provinsi	100%

4.5.3 Realisasi

Tabel 4.21

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perdatan perkada di Provinsi	84,211%

Berdasarkan tabel pencapaian SPM Bidang Ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2022 di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:



1. Capaian layanan dasar Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi.

Capaian layanan dasar pada indikator tersebut pada tahun 2022 sebesar 84,211% dari target 100%. Dengan penjelasan bahwasannya pada tahun 2022 terdapat 16 Perda/ Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan dari 19 jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi. Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat menjalankan tugas wewenang dan fungsi dengan berpedoman pada pendekatan humanis sehingga dapat mengurangi potensi friksi di lapangan.

Mengukur persentase dasar Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi}}{\text{Jumlah total warga Negara yang berhak memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi}} \times 100\% \\
 &= \frac{16 \text{ perda/perkada}}{19 \text{ perda/perkada}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{84,211 \%*}
 \end{aligned}$$

2. Mutu Layanan Dasar Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi.

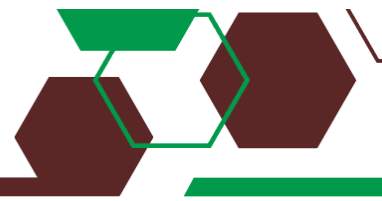
Mutu layanan dasar dapat dilihat dari dua indikator berikut:

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi.

Tabel 4.22

Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu Dan Pelayanan Ganti Rugi

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
1.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	2	1	1	50%
2.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pengobatan	3	0	3	0%



- b. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai mutu

Tabel 4.23

Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
1.	Penegakan Perda sesuai SOP	16	19	3	84,21%
2.	Pelaksanaan penegakan Perda menggunakan sarpras sesuai standar	305	293	12	96,07%
3.	Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	110	110	0	100%

4.5.4 Alokasi Anggaran

Pelaksanaan penerapan Pelayanan Publik urusan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh APBD dengan pos anggaran belanja operasi sebesar Rp. 3.213.925.478,- yang terdiri dari 1 (satu) program prioritas yaitu program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

4.5.5 Dukungan Personil

Jumlah personil yang mendukung pelaksanaan pemenuhan SPM Trantibumlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yaitu 111 orang personil (Satpol PP dan PPNS) dan 30 orang Satlinmas.

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dengan masih terbatasnya kapasitas ketrampilan dan pengetahuan/ wawasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Selain itu minimnya



sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi operasional menjadi kendala beratnya beban pemakaian sarana dan prasarana pelaksanaan operasional terutama pelaksanaan trantibumlinmas di lapangan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.

2. Solusi

Telah dilakukan upaya untuk mengatasi persalahan tersebut di atas dengan tetap melaksanakan penerapan SPM pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara maksimal dengan memprioritaskan penganggaran yang ada pada tahun 2022 pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP Provinsi dengan mengikutkan pelatihan untuk peningktan ketrampilan tugas dilapangan. Selain itu peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan mengikutkan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan baik secara internal (Pol PP) atau pihak eksternal seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Selain itu untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dilakukan upaya dengan pendanaan melalui penganggaran pagu Pol PP secara bertahap sesuai skala prioritas, untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai standar dengan Permendagri No 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga diharapkan kedepannya terjadi peningkatan pelaksanaan kinerja yang lebih baik dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat.

4.6 Urusan Sosial

Laporan penerapan dan pencapaian standar minimal memuat:

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah Provinsi dan di daerah kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti



2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4.24

Target Capaian SPM Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantardi dalam panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkanrehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitasterlantar di dalam panti.	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantardi dalam panti	Jumlah warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti.	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah warga Negara lanjutusia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia didalam panti.	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial Khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti.	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100%



4.6.3 Realisasi

Tabel 4.25
Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantardi dalam panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkanrehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitasterlantar di dalam panti.	76,786%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantardi dalam panti	Jumlah warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti.	69,509%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah warga Negara lanjutusia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia didalam panti.	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial Khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti.	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	60,48%

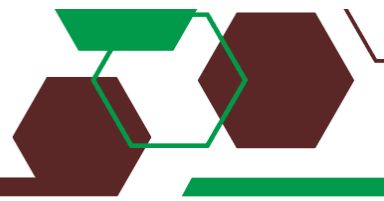
Berdasarkan tabel pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2022 di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian layanan dasar Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.

Capaian layanan dasar pada indikator tersebut pada tahun 2022 sebesar 76,786 % dari target 100%..

Mengukur persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti:

$$= \frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah total penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang seharusnya terpenuhi kebutuhan dasarnya}} \times 100\%$$



$$= \frac{215 \text{ orang}}{280 \text{ orang}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{76,786 \%}$$

2. Capaian layanan dasar Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti.

Capaian layanan dasar pada indikator tersebut pada tahun 2022 sebesar 65,509% dari target 100%..

Mengukur persentase Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti:

$$= \frac{\text{Jumlah anak terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah total anak terlantar di dalam panti yang seharusnya terpenuhi kebutuhan dasarnya}} \times 100\%$$

$$= \frac{4605 \text{ orang}}{6625 \text{ orang}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{69,509 \%}$$

3. Capaian layanan dasar Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti.

Capaian layanan dasar pada indikator tersebut pada tahun 2022 sebesar 100% dari target 100%.

Mengukur persentase Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti:

$$= \frac{\text{Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah total lanjut usia terlantar di dalam panti yang seharusnya terpenuhi kebutuhan dasarnya}} \times 100\%$$

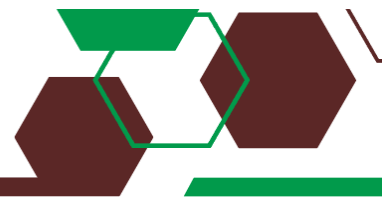
$$= \frac{3739 \text{ orang}}{3739 \text{ orang}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{100 \%}$$

4. Capaian layanan dasar Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti.

Capaian layanan dasar pada indikator tersebut pada tahun 2022 sebesar 100% dari target 100%..

Mengukur persentase Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti:



$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah total gelandangan dan pengemis di dalam panti yang seharusnya terpenuhi kebutuhan dasarnya}} \times 100\% \\ &= \frac{20 \text{ orang}}{20 \text{ orang}} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

5. Capaian layanan dasar Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Capaian layanan dasar pada indikator tersebut pada tahun 2022 sebesar 60,48% dari target 100%..

Mengukur persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah total korban bencana alam dan sosial yang seharusnya terpenuhi kebutuhan dasarnya}} \times 100\% \\ &= \frac{14.915 \text{ orang}}{24.661 \text{ orang}} \times 100\% \\ &= \mathbf{60,48\%} \end{aligned}$$

6. Mutu layanan dasar Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.

Tabel 4.26

Mutu Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas	10	10	0	100%
2.	Penyediaan Sandang	40	40	0	100%
3.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas	10	10	0	100%
4.	Penyediaan Alat bantu	1	1	0	100%
5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti	1	1	0	100%
6.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	1	1	0	100%



No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
7.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	20	20	0	100%
8.	Fasilitas Pembuatan NomorInduk Penduduk	10	8	2	80%
9.	Pemberian PelayananPenelusuran keluarga	10	8	2	80%
10.	Pemberian PelayananReunifikasi Keluarga	0	0	0	0%
11.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	1	1	0	100%
12.	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas	0	0	0	0%
13.	Akses ke Layanan Pendidikandan Kesehatan Dasar	0	0	0	0%
14.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat	50	50	0	100%
15.	Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas	1	1	0	100%

7. Mutu layanan dasar Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti.

Tabel 4.27

Mutu Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Pengasuhan	40	40	0	100%
2.	Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Anak	140	140	0	100%
3.	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak	1	1	0	100%
4.	Penyediaan sandang	40	40	0	100%
5.	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang nemiliki Panti Anak	1	1	0	100%
6.	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak	1	1	0	100%

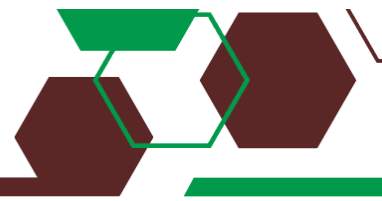


No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
7.	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	40	40	0	100%
8.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	140	140	0	100%
9.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	40	40	0	100%
10.	Fasilitas pembuatan Akte Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	40	40	0	100%
11.	Akses ke layanan pendidikan	40	40	0	100%
12.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0	0%
13.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	12	12	0	100%

8. Mutu layanan dasar Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti.

Tabel 4.28
Mutu Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia	75	75	0	100%
2.	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia dan merujuk ke Panti Masyarakat	100	100	0	100%
3.	Penyediaan sandang	75	75	0	100%
4.	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang memiliki Panti Lanjut Usia	1	1	0	100%
5.	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia	1	1	0	100%
6.	Penyediaan alat bantu	1	1	0	100%
7.	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	75	75	0	100%
8.	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia dan merujuk ke Panti Masyarakat	1	1	0	100%



No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
9.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	70	70	0	100%
10.	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	70	70	0	100%
11.	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Penduduk	1	1	0	100%
12.	Akses ke layanan kesehatan dasar	70	70	0	100%
13.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0	0%
14.	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	1	1	0	100%
15.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0	0%
16.	Pemulasaraan	4	4	0	100%
17.	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak dan merujuk ke Panti Masyarakat	1	0	1	0%
18.	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak dan merujuk ke Panti Masyarakat	1	1	0	100%
19.	Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Lanjut Usia	1	1	0	100%

9. Mutu layanan dasar Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti.

Tabel 4.29

Mutu Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	5	3	2	60%
2.	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis merujuk ke Panti Masyarakat	1	1	0	100%
3.	Penyediaan sandang	5	3	2	60%
4.	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang nmmiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	1	0	1	0%



No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
5.	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	1	0	1	0%
6.	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis dan merujuk Ke Panti Masyarakat	1	1	0	100%
7.	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	1	1	0	100%
8.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	5	3	2	60%
9.	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	1	0	1	0%
10.	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	1	1	0	100%
11.	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	0	1	0%
12.	Akses ke layanan pendidikan	1	0	1	0%
13.	Pemulangan ke daerah asal	1	0	1	0%

10. Mutu layanan dasar Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Tabel 4.30

Mutu Layanan Dasar Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Capaian Mutu (%)
1.	Penyediaan permakanan	970	970	0	100%
2.	Penyediaan sandang	500	500	0	100%
3.	Peyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	0	100%
4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	1	1	0	100%
5.	Pelayanan dukungan Psikososial	1	1	0	100%



4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.31

Alokasi Anggaran Urusan Sosial

No	URUSAN SOSIAL	ANGGARAN
1	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	Rp. 1.975.211.200,-
2	UPT Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat	Rp.1.435.889.038,-
3	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat	Rp.1.556.252.800,-
4	UPT Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat	Rp.1.969.408.715,-
JUMLAH		Rp.5.644.460.753,-

4.6.5 Dukungan Personil

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial di Provinsi Kalimantan Barat sangat tergantung juga dari dukungan personil sebagai pelaksana Program/Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Sampai dengan Desember tahun 2022, Dinas Sosial telah didukung oleh personil sebanyak 184 Personil dengan rincian:

Tabel 4.32

Dukungan Personil Dinas Sosial

No	Unit Kerja	Jenis Personil	
		PNS	Non PNS
1	Dinas Sosial Provinsi Kalbar	69	64
2	UPT Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat	16	14
3	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat	15	14
Jumlah		100	92

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang ditemui dalam proses pencapaian SPM Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.33
Permasalahan Dan Kendala Penerapan Spm Urusan Sosial
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Kendala / permasalahan	Upaya pemecahan Masalah	Keterangan
1	UPT Panti sosial Anak : Asrama yang tersedia 3 unit, yang diperuntukan untuk 1 unit untuk putra, 1 unit untuk putri dan 1 unit untuk ABH. Kondisi asrama tidak representative (sudah 44 tahun tidak direnovasi) sebagai asrama pengganti rumah yang layak	Mengajukan permohonan untuk rehabilitasi bangunan/gedung agar lebih representative untuk pelayanan ke BKAD dan Bappeda Prov. Kalbar	Membuat draft rencana anggaran biaya (RAB) rehabilitasi gedung dan bangunan
2	UPT Panti Sosial Anak disamping menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2021 t. juga menjalankan fungsi sebagai tempat penitipan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), memerlukan kajian yang lebih komprehensif;	Pengkajian yang lebih komprehensif dengan instansi terkait lainnya agar UPT Panti sosial anak tidak tumpang tindih dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai kewenangannya	Dukungan dari lembaga hukum terkait (pengadilan negeri dan lembaga hukum lainnya)
3	UPT Panti Sosial Anak tidak mempunyai tenaga medis/ tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan di dalam panti	Melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan setempat / puskesmas / relawan/pekerja sosial yang kompeten	Adanya Perjanjian kerjasama (PK) dengan Dinas Kesehatan /puskesmas setempat
4	UPT Panti Sosial Anak belum memiliki tenaga/pekerja sosial yang kompeten sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka memberikan rehabilitasi psikologi, fisik, mental dan spiritual	Melakukan kerjasama BPSDM Prov. Kalimantan Barat dalam hal Peningkatan Kapasitas SDM Jabatan Fungsional Pekerja Sosial (PEKSOS)/ Tenaga kerja Sosial (TKS), untuk melayani kebutuhan SDM PEKSOS/TKS pada UPT PSA.	Mengajukan surat permohonan ke BPSDM
5	UPT PSRLU Mulia Dharma hanya memiliki perawat, sejumlah 4 orang perawat namun tidak memiliki tenaga dokter dan psikiater	Melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan setempat / puskesmas / relawan/pekerja sosial yang kompeten	Adanya Perjanjian kerjasama (PK) dengan Dinas Kesehatan /puskesmas
6	UPT PSRLU Mulia Dharma belum memiliki tenaga/pekerja sosial yang kompeten sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka memberikan rehabilitasi psikologi, fisik, mental dan spiritual	Melakukan kerjasama BPSDM Prov. Kalimantan Barat dalam hal Peningkatan Kapasitas SDM Jabatan Fungsional Pekerja Sosial (PEKSOS)/ Tenaga kerja Sosial (TKS), untuk melayani kebutuhan SDM PEKSOS/TKS pada UPT PSRLU Mulia Dharma.	Mengajukan surat permohonan ke BPSDM Prov. Kalbar
7	UPT PSRLU Mulia Dharma belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai (Ambulance, alat-alat kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dll)	Melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan setempat / puskesmas / relawan/pekerja sosial yang kompeten	Adanya Perjanjian kerjasama (PK) dengan Dinas Kesehatan /puskesmas
8	Belum tersedianya tempat penampungan /shelter yang memadai baik dari segi daya tampung maupun sarana dan prasarana yang memadai bagi korban bencana alam dan bencana sosial	mengajukan surat permohonan kepada gubernur Kalimantan Barat Up. Kepala BKAD Provinsi Kalimantan Barat untuk menetapkan fasilitas umum yang bisa digunakan sebagai tempat penampungan sementara / shelter yang layak bagi korban bencana alam dan sosial kewenangan provinsi	Membuat surat permohonan ke Gubernur Kalimantan Barat



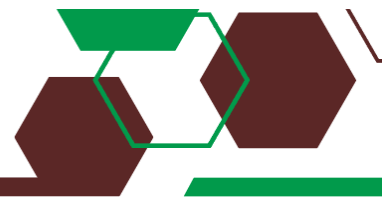
4.7 Program dan Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Berikut Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan pelaksanaan Standar pelayanan Minimal tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Barat:

4.7.1 Bidang Urusan Pendidikan

Tabel 4.34
Program Kegiatan Urusan Pendidikan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Penanganan Anak Tidak Bersekolah (ATS)	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah ke atas
		2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
2.	Program bantuan untuk siswa miskin yang belum terlayani	1. Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Atas
		2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
		3. Pengelolaan Pendidikan Khusus
3.	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
		3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
		4. Pengelolaan Pendidikan Khusus
4.	Program peningkatan mutu satuan pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
		2. Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan
		3. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah

**4.7.2 Bidang Urusan Kesehatan**

Tabel 4.35

Program Kegiatan Urusan Kesehatan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau berpotensi bencana	1. Melakukan pendampingan kegiatan penanganan bencana daerah yang terdampak bencana
		2. Manajemen data bencana
		3. Koordinasi lintas program / lintas sektor
		4. Manajemen logistik bencana
2.	Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa	1. Penemuan Kasus Suspek dengan melakukan screening baik di puskesmas atau dirumah sakit
		2. Penyelidikan Epidemiologi
		3. Pencarian Kasus Baru dengan kegiatan Entry Test dan Exit Test terhadap kontak erat
		4. Isolasi Bagi Kasus Positif baik ringan sedang maupun berat
		5. Karantina Kontak Erat
		6. Swab massal
		7. PPKM Mikro
		8. Vaksinasi Dosis 1 dan 2 dengan Kategori SDM Kesehatan, Lansia, Pelayanan Publik, Masy Umum dan Rentan dan Remaja

4.7.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 4.36

Program Kegiatan Urusan pekerjaan Umum

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	1. Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pada Kawasan Permukiman
		2. Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
		3. Inventarisasi Dan Penyusunan Database Pengembangan Kinerja Air Minum
2.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan	1. Pengembangan Saluran Drainase Perkotaan
		2. Pengembangan Saluran Drainase Kawasan Permukiman
		3. Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Kalbar
		4. Pendataan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan

**4.7.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat**

Tabel 4.37

Program Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Kegiatan Pendataan penyedia dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Relokasi Program Provinsi
		2. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
		3. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rusun dan Rusus
2.	Program Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/SuKarelawan Tanggap Bencana
3.	Program Pembangunan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana
		2. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

4.7.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 4.38

Program Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		2. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksana Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
		3. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
		4. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
		5. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

**4.7.6 Bidang Urusan Sosial**

Tabel 4.39

Program Kegiatan Urusan Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	1. Pembinaan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas
		2. Pembinaan, Bimbingan dan Rehabilitasi Eks Kusta
		3. Pelaksanaan Hari Lanjut Usia dan Monev Lanjut Usia
		4. Pemulangan, Pendamping Korban Tindakan Kekerasan Pekerja Migran Internal dan Orang Terlantar
		5. Pembinaan dan Penyantunan Anak Melalui (Lembaga Kesejahteraan Sosial) LKS
		6. Bimbingan Teknis Bagi LKS dan Keluarga ODK Penerima Subsidi
		7. Penyuluhan/ Pencegah / Rujukan Korban NAPZA
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Penyaluran Bantuan Logistik dan Shelter
		2. Penanganan Korban Bencana dan Pasca Bencana
3	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	1. Pengadaan Makanan dan Minuman Lanjut Usia/Klien
		2. Pelaksanaan Hari Lanjut Usia
		3. Peningkatan Keterampilan LanjutUsia/Klien
		4. Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia/Klien
4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	1. Pengadaan Makanan dan Minuman Lanjut Usia/Klien
		2. Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia/Klien
		3. Peningkatan Keterampilan LanjutUsia/Klien
		4. Pelaksanaan Hari Lanjut Usia
5	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial	1. Pengadaan Makanan dan Minuman Anak Asuh
		2. Pengadaan Perlengkapan Anak Asuh
		3. Pendidikan anak asuh
		4. Pembinaan dan Pelayanan anak asuh
		5. Pembinaan dan Pelayanan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
		6. Penyuluhan sosial NAPZA bagi anak asuh

BAB V



PENUTUP

KALBAR

Kalbar Maju Lingkungan Hidup Lestari
dalam Keberagaman



BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kalimantan Barat, pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Implementasi penyelenggaraan urusan pemerintahan diawali dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan yang diampu oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

LPPD ini merupakan laporan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran, mencakup didalamnya penyelenggaraan urusan konkuren, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Selama tahun 2022 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada umumnya telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.

Pelaksanaan tugas pembantuan, untuk tahun 2022 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat menerima tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Semua tugas pembantuan dapat dilaksanakan dengan baik.

Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan hasil dari sinergitas berbagai elemen baik Pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta yang telah bersatu padu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. Disamping keberhasilan tentu masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang



menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan serta masih belum optimalnya reformasi birokrasi, rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus terus dimaksimalkan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya di Indonesia.

Sehingga pencapaian target pembangunan tahun 2022 masih perlu ditingkatkan kembali dalam rangka menuju tercapainya target RPJMD pada tahun-tahun berikutnya. Kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2022 tentu akan menjadi bahan evaluasi serta sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Barat. Dengan semangat dan kerja keras, teriring doa semoga keberhasilan senantiasa mengiri segala upaya kita dalam meningkatkan kemajuan Provinsi Kalimantan Barat.